

G. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA

Catatan atas Laporan Keuangan

Tahun Anggaran 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1. PENDAHULUAN

Kabupaten Pidie Jaya merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Pidie di Provinsi Aceh yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya. Secara geografis Kabupaten Pidie Jaya mempunyai batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Selat Malaka
- 2) Sebelah Timur : Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen
- 3) Sebelah Selatan : Kecamatan Tangse, Kecamatan Geumpang, dan Kecamatan Mane Kabupaten Pidie
- 4) Sebelah Barat : Kecamatan Geuleumpang Tiga, Kecamatan Geuleumpang Baro, dan Kecamatan Keumbang Tanjong Kabupaten Pidie

Berdasarkan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya, susunan perangkat daerah Kabupaten Pidie Jaya terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Inspektorat, 19 (sembilan belas) dinas, 5 (lima) badan, 4 (empat) Sekretariat lembaga keistimewaan Aceh, 8 (delapan) kecamatan, 1 (satu) RSUD, 1 (satu) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahatul Hisbah dan 12 (dua belas) Puskesmas.

Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya telah memiliki Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang dipimpin oleh seorang Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) yang juga bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). Dalam pelaksanaannya, BUD akan mengotorisasikan pekerjaannya pada

seorang Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas Bendahara Umum Daerah.

Pada tingkat SKPD dipimpin oleh seorang Kepala SKPD yang juga bertindak sebagai Pengguna Anggaran. SKPD juga telah memiliki Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selaku pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran. Selain itu, telah terdapat pula bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran yang melaksanakan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang dilaksanakan dalam satu periode akuntansi baik yang menyangkut dengan urusan wajib ataupun urusan pilihan guna mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan operasional pemerintahan, menilai keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi entitas pelaporan serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan pemerintah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna untuk menilai akuntabilitas, manajemen, transparansi dan evaluasi kinerja serta membuat keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

- a. Menyediakan informasi yang komprehensif mengenai Realisasi Anggaran Pendapatan, Belanja Daerah dan Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2022 tentang sumber, alokasi, penggunaan sumber daya keuangan dan mengenai kecukupan penerimaan periode tahun berjalan guna membiayai seluruh pengeluaran.
- b. Menyediakan informasi posisi keuangan pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dan kondisi tentang sumber-sumber penerimaan jangka pendek maupun jangka panjang yang berasal dari pungutan pajak ataupun pinjaman.
- c. Menyediakan informasi tentang perkembangan perubahan posisi keuangan baik kenaikan ataupun penurunan selama pelaksanaan dalam satu periode pelaporan.

Secara umum tujuan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBK TA 2022 per 31 Desember 2022. Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, laporan keuangan yang disajikan meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Mulai Tahun Anggaran 2015, Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya telah menjalankan Standar

Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual yang menambahkan tiga laporan yang melengkapi rangkaian laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasi atas pendapatan, belanja dan pembiayaan serta menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif, sedangkan Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan (aset, kewajiban, dan ekuitas dana) per tanggal laporan. Laporan Arus Kas menggambarkan informasi tentang arus kas masuk dan arus kas keluar pada kas pemerintah daerah selama satu periode akuntansi serta saldo kas per tanggal laporan. Laporan Operasional menggambarkan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan, beban dan operasional-operasional dari entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan Saldo Anggaran Lebih (SAL) memberikan informasi tentang Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang merupakan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya yang merupakan akumulasi SiLPA/SiKPA tahun anggaran berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Laporan Perubahan Ekuitas menggambarkan ekuitas riil dari suatu entitas akuntansi/pelaporan beserta kenaikan atau penurunan ekuitas yang disebabkan surplus/defisit LO, koreksi yang menambah maupun mengurangi ekuitas dalam satu periode.

Sedangkan Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain:

1. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target UU APBN/Perda APBK, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
2. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;
3. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
4. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;

5. Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas;
6. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Laporan keuangan menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan pemerintah daerah dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan bertujuan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai penerimaan dan pembiayaan dalam periode berjalan;
2. Menyediakan informasi mengenai cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya, telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber penerimaannya;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan akibat kegiatan yang dilakukan dalam satu periode pelaporan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Substansi dan kerangka dasar penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya ini mengacu pada :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
 14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara 4028);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
27. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
32. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 4);
33. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 4);
34. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2022;
35. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
36. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2022;
37. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 44 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie Jaya;
38. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Subsidi yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya;

39. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya;
40. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;
41. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pinjaman Daerah;
42. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembentukan Dana Cadangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya;
43. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 57 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya;
44. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya;
45. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya;
46. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 60 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya;
47. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;
48. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 62 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;
49. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2022; dan
50. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2022.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Per 31 Desember 2022, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
- BAB II Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan
 - 2.1 Ekonomi Makro/ Ekonomi Regional
 - 2.2 Kebijakan Keuangan
 - 2.3 Indikator Pencapaian target kinerja APBK Pidie Jaya
- BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
 - 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya
 - 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
- BAB IV Kebijakan Akuntansi
 - 4.1 Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah
 - 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
 - 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya
 - 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
 - 4.5 Kebijakan akuntansi tertentu
- BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
 - 5.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
 - 5.1.1 Pendapatan
 - 5.1.1.A Pendapatan Asli Daerah
 - 5.1.1.B Pendapatan Transfer
 - 5.1.1.B.1 Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan
 - 5.1.1.B.2 Transfer Pemerintah Pusat – DID
 - 5.1.1.B.3 Transfer Antar Daerah
 - 5.1.1.B.4 Pendapatan Bantuan Keuangan
 - 5.1.1.C Lain-lain Pendapatan yang Sah
 - 5.1.2 Belanja

- 5.1.2.A Belanja Operasi
- 5.1.2.B Belanja Modal
- 5.1.2.C Belanja Tidak Terduga
- 5.1.2.D Belanja Transfer
- 5.1.3 Surplus/Defisit
- 5.1.4 Pembiayaan
 - 5.1.4.A Penerimaan Pembiayaan
 - 5.1.4.B Pengeluaran Pembiayaan
- 5.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
- 5.2 Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
- 5.3 Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos Neraca Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya per 31 Desember 2022 dan 2021
 - 5.3.1 Aset
 - 5.3.1.A Aset Lancar
 - 5.3.1.B Investasi Jangka Panjang
 - 5.3.1.C Aset Tetap
 - 5.3.1.D Dana Cadangan
 - 5.3.1.E Aset Lainnya
 - 5.3.2 Kewajiban
 - 5.3.2.A Kewajiban Jangka Pendek
 - 5.3.2.B Kewajiban Jangka Panjang
 - 5.3.3 Ekuitas Dana
- 5.4 Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos Laporan Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
 - 5.4.1.A Pendapatan
 - 5.4.1.B Beban
 - 5.4.2 Kegiatan Non Operasional
 - 5.4.2.A Pos Luar Biasa
 - 5.4.2.B Surplus/Defisit LO
- 5.5 Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

- 5.5.1 Arus Kas dari Operasi
 - 5.5.2 Arus Kas dari Investasi Aset Non Keuangan
 - 5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan
 - 5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
 - 5.6 Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022
 - 5.6.1 Ekuitas Awal
 - 5.6.1.A Surplus/Defisit LO
 - 5.6.1.B Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
 - 5.6.B.1 Koreksi Nilai Persediaan
 - 5.6.B.2 Lain-lain
 - 5.6.2 Ekuitas Akhir
- BAB VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan
- BAB VII Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

2.1 Ekonomi Makro/ Ekonomi Regional

Berdasarkan data Statistik Pidie Jaya Dalam Angka 2021, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pidie Jaya mengalami tren positif pada Tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dengan rata-rata pertumbuhan 4,79%. Adapun struktur perekonomian Kabupaten Pidie Jaya pada Tahun 2021 didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, yaitu mencapai 46,18% dari total Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Pidie Jaya. Sedangkan sektor terkecil yaitu sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang.

Tabel 2.1
Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Pidie Jaya (milyar rupiah), 2017-2021

No	Lapangan Usaha Industri	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.404,19	1.484,37	1.567,69	1.644,77	1.694,80
2	Pertambangan dan Penggalian	42,09	42,99	44,59	46,96	49,61
3	Industri Pengolahan	94,94	102,99	109,01	107,64	119,49
4	Pengadaan Listrik dan Gas	3,39	3,71	4,04	4,00	4,08
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,54	0,60	0,64	0,63	0,71
6	Konstruksi	214,16	237,99	259,77	273,85	271,59
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	342,41	373,34	386,95	368,21	392,44
8	Transportasi dan Pergudangan	129,78	135,74	141,27	105,93	136,02
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	31,15	34,19	36,49	35,59	34,54
10	Informasi dan Komunikasi	75,54	78,72	82,86	92,52	100,94
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	27,00	28,71	31,11	31,13	29,11
12	Real Estate	120,32	130,13	140,16	140,27	142,65
13	Jasa Perusahaan	8,50	9,16	9,90	9,84	10,08
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	338,29	379,77	411,85	399,52	430,51
15	Jasa Pendidikan	99,96	111,38	129,37	136,16	140,50
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	62,84	67,65	73,38	81,51	89,80
17	Jasa Lainnya	17,79	19,20	20,77	21,85	22,77
	Produk Domestik Regional Bruto Gross Regional Domestic Bruto	3.012,89	3.240,64	3.449,87	3.500,37	3.669,65

Sumber: BPS Pidie Jaya – Pidie Jaya Dalam Angka 2021

Tabel 2.2
Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Pidie Jaya (milyar rupiah), 2017-2021

No	Lapangan Usaha Industri	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.092,43	1.125,66	1.168,56	1.199,82	1.184,16
2	Pertambangan dan Penggalian	36,35	36,88	37,79	37,94	39,57
3	Industri Pengolahan	72,70	76,34	80,23	73,46	77,55
4	Pengadaan Listrik dan Gas	3,14	3,34	3,54	3,56	3,61
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-	-	0,42	0,39	0,40
6	Konstruksi	179,16	194,64	204,69	212,23	208,94
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	266,64	281,09	289,55	273,88	286,78
8	Transportasi dan Pergudangan	116,92	121,17	124,76	92,91	113,88
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	22,95	24,04	25,41	23,98	22,85
10	Informasi dan Komunikasi	73,47	76,52	79,78	89,78	95,04
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	18,86	19,71	21,01	21,12	19,95
12	Real Estate	95,24	99,58	105,43	104,17	107,76
13	Jasa Perusahaan	7,24	7,64	7,95	7,65	7,67
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	254,53	273,93	282,64	265,92	282,16
15	Jasa Pendidikan	80,56	86,23	93,24	94,86	97,04
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	55,79	59,16	62,43	65,06	71,42
17	Jasa Lainnya	14,49	15,20	16,17	16,39	16,74
	Produk Domestik Regional Bruto Gross Regional Domestic Bruto	2.390,84	2.501,51	2.603,59	2.583,13	2.635,52

Sumber: BPS Pidie Jaya – Pidie Jaya Dalam Angka 2021

Tabel 2.3
Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Pidie Jaya (persen), 2017-2021

No	Lapangan Usaha Industri	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	46,60	45,80	45,44	46,99	46,18
2	Pertambangan dan Penggalian	1,40	1,33	1,29	1,34	1,35
3	Industri Pengolahan	3,15	3,18	3,16	3,08	3,26
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,11	0,11	0,12	0,11	0,11
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
6	Konstruksi	7,11	7,34	7,53	7,82	7,40
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,36	11,52	11,22	10,52	10,69
8	Transportasi dan Pergudangan	4,31	4,19	4,09	3,03	3,71
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,03	1,06	1,06	1,02	0,94
10	Informasi dan Komunikasi	2,51	2,43	2,40	2,64	2,75
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,90	0,89	0,90	0,89	0,79
12	Real Estate	3,99	4,02	4,06	4,01	3,89
13	Jasa Perusahaan	0,28	0,28	0,29	0,28	0,27
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	11,23	11,72	11,94	11,41	11,73

No	Lapangan Usaha Industri	2017	2018	2019	2020	2021
15	Jasa Pendidikan	3,32	3,44	3,75	3,89	3,83
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,09	2,09	2,13	2,33	2,45
17	Jasa Lainnya	0,59	0,59	0,60	0,62	0,62
	Produk Domestik Regional Bruto Gross Regional Domestic Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Pidie Jaya – Pidie Jaya Dalam Angka 2021

2.2 Kebijakan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBK merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran, dengan komponen pokoknya adalah pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pendapatan daerah merupakan sumber keuangan daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan pendapatan lain-lain yang sah. Belanja daerah merupakan pengeluaran untuk kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan pelaksanaan pembangunan daerah, sedangkan pembiayaan untuk menutupi defisit anggaran yaitu selisih antara pendapatan dan belanja, yang terdiri dari penerimaan dan pengeluaran.

Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan. Selanjutnya anggaran sebagai manajemen berfungsi sebagai:

1. Rencana organisasi untuk melayani masyarakat atau aktivitas lain yang dapat mengembangkan kapasitas organisasi pelayanan;
2. Estimasi besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam merealisasikan rencana tersebut;
3. Perkiraan sumber-sumber mana saja yang akan menghasilkan pemasukan serta seberapa besar pemasukan tersebut.

APBK merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRK serta ditetapkan dengan qanun. Sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah, maka dalam APBK tergambar semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam

kurun waktu satu tahun, dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1. Kebijakan Pendapatan

Untuk mencapai pengelolaan pendapatan daerah yang lebih baik maka perlu ditetapkan kebijakan peningkatan pendapatan daerah. Kebijakan tersebut berfokus pada peningkatan dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah khususnya pada penerimaan pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban masyarakat. Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber penerimaan daerah merupakan indikator kekuatan dan kemandirian pembiayaan pembangunan daerah yang paling memungkinkan untuk dioptimalkan dan terus ditingkatkan penerimaannya. Hal ini mengingat sumber penerimaan lain dalam APBK masih sangat tergantung dari kemampuan keuangan pemerintah pusat.

Kebijakan pendapatan juga diarahkan untuk meningkatkan dana perimbangan dengan asumsi peningkatan retribusi daerah dan kondisi perekonomian makro membaik. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah berasal dari:

- 1) Pajak daerah;
- 2) Retribusi daerah;
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- 4) Lain- lain pendapatan asli daerah yang sah.

Usaha-usaha yang telah dilakukan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah, antara lain, yaitu:

- 1) Melakukan pendataan terhadap potensi pajak dan retribusi daerah;
- 2) Melakukan/membuat penyesuaian atau perbaikan dan pembuatan qanun sebagai salah satu dasar hukum pengelolaan pajak dan retribusi daerah serta penerimaan lainnya;
- 3) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan wajib pajak;
- 4) Meningkatkan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap satuan kerja sebagai unsur pelaksana pemungutan Pendapatan Asli Daerah;

- 5) Melaksanakan intensifikasi penagihan terhadap objek dan subjek pajak dan retribusi daerah;
- 6) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pajak dan retribusi daerah dalam upaya meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
- 7) Optimalisasi pengelolaan keuangan dengan mempedomani *cashflow* dan kebutuhan keuangan daerah;
- 8) Melakukan investasi pada sektor-sektor yang menguntungkan, seperti penyertaan modal pada perbankan, dan sebagainya; dan
- 9) Optimalisasi pengelolaan aset daerah sehingga aset yang ada dapat memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah.

b. Dana Perimbangan

- 1) Bagian Daerah Dalam Bentuk Bagi Hasil Penerimaan (*Revenue Sharing*)
Untuk menambah pendapatan daerah dalam rangka pembiayaan pelaksanaan fungsi yang menjadi kewenangan dilakukan dengan pola bagi hasil penerimaan pajak dan bukan pajak Sumber Daya Alam (SDA) antara pusat dan daerah sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 1999.

- 2) Dana Alokasi Umum (DAU)

Implikasi langsung dari kewenangan/fungsi yang diserahkan kepada daerah sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 adalah kebutuhan dana yang cukup besar, oleh karenanya diperlukan bantuan dana dari Pemerintah Pusat dalam bentuk dana perimbangan.

Untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak antara pusat dan daerah telah diatasi dengan adanya perimbangan keuangan antara pusat dan daerah (dengan kebijakan bagi hasil dan DAU minimal sebesar 25% dari penerimaan dalam negeri). Dengan perimbangan tersebut, khususnya dari DAU akan memberikan kepastian bagi daerah dalam memperoleh sumber-sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya.

Berdasarkan konsep selisih keuangan (*fiscal gap*), distribusi DAU daerah-daerah yang memiliki kemampuan relatif besar akan lebih kecil dan sebaliknya daerah-daerah yang mempunyai kemampuan keuangan relatif kecil akan memperoleh DAU yang relatif besar.

- 3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Pada hakikatnya DAK adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus. Pengalokasian DAK ditentukan dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN.

Sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 1999, yang dimaksud dengan kebutuhan khusus adalah:

a) Kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum, dalam pengertian kebutuhan yang tidak sama dengan kebutuhan daerah lain, misalnya kebutuhan di kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi/prasarana baru, pembangunan jalan di kawasan terpencil, saluran irigasi primer dan saluran drainase primer; dan

b) Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.

Implementasi konsep DAK di Indonesia mencakup pula alokasi dana untuk kegiatan penghijauan dan reboisasi, dimana pembiayaannya berasal dari penerimaan Dana Reboisasi (DR) dalam APBN yang diberikan 40%-nya kepada daerah penghasil. Pembiayaan dari DAK-DR sejalan dengan keinginan pemerintah untuk melibatkan Pemerintah Daerah Penghasil Dana Reboisasi dalam kegiatan penghijauan dan reboisasi kawasan hutan di daerahnya, dimana kegiatan tersebut merupakan salah satu kegiatan yang menjadi prioritas nasional.

c. Dana Otonomi Khusus

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada Pemerintahan Aceh termasuk dalam membentuk perangkat dan lembaga daerah yang menjadi ciri keistimewaan Aceh, dan menjadi dasar hukum pemberian tambahan pendanaan pembangunan dalam bentuk Dana Otonomi Khusus. Pasal 183 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, antara lain menyebutkan Dana Otonomi Khusus ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan.

Sesuai UU Nomor 11 Tahun 2006 tersebut, pemberian Dana Otonomi Khusus kepada Pemerintah Aceh diberikan selama 20 tahun, yaitu sejak Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2027. Dana Otonomi Khusus tahun pertama sampai dengan kelima belas (2008 s.d. 2022) ditetapkan sebesar 2% dari plafon Dana

Alokasi Umum (DAU) Nasional, sedangkan Dana Otonomi Khusus tahun keenam belas sampai dengan dua puluh (2023 s.d 2027) ditetapkan sebesar 1% dari plafon DAU Nasional. Transfer dari rekening Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Aceh dilaksanakan setelah diterbitkan keputusan tentang besaran alokasi Dana Otonomi Khusus oleh Kementerian Keuangan yang ditetapkan setiap tahun anggaran.

Dana Otonomi Khusus dialokasikan kepada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan kebijakan yang dinamis. Sejak Tahun 2008, telah terjadi beberapa kali perubahan porsi alokasi antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang diatur dengan Qanun Pemerintah Aceh, yaitu Qanun Nomor 2 Tahun 2008, Qanun Nomor 2 Tahun 2013, Qanun Nomor 10 Tahun 2016, dan Qanun Nomor 1 Tahun 2018. Selain alokasi, sistem pengelolaan Dana Otonomi Khusus Aceh pun sejak diberikan pertama kali pada Tahun 2008 hingga Tahun 2020, telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Periode Tahun 2008 s.d 2009 Dana Otonomi Khusus sepenuhnya dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA), termasuk alokasi untuk kabupaten/kota, dimana Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berada pada SKPA;
2. Periode Tahun 2010 s.d 2013, pemerintah kabupaten/kota diberikan kewenangan untuk pelaksanaan anggaran, dengan KPA dan PPTK berada pada Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten/Kota (SKPK);
3. Periode Tahun 2014 s.d 2017, model tata kelola Dana Otonomi Khusus memberikan kewenangan penuh kepada kabupaten/kota melalui mekanisme transfer khusus langsung. Meskipun demikian, proses perencanaan program/kegiatan kabupaten/kota yang akan dibiayai dari Dana Otonomi Khusus tetap melalui mekanisme Musrenbang dan disepakati bersama dengan DPRK;
4. Tahun 2018, pengelolaan Dana Otonomi Khusus kembali ke Pemerintah Aceh dan semua program/kegiatan yang akan didanai adalah yang sudah diusulkan dalam Musrenbang;
5. Tahun 2019, kebijakan pengelolaan Dana Otonomi Khusus mengacu Qanun Nomor 1 Tahun 2018 yaitu untuk program dan kegiatan bersama Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota dikelola oleh Pemerintah Aceh, selanjutnya sisanya untuk Pemerintah Aceh paling sedikit 60% (termasuk

1% untuk Ibu kota Aceh) dan untuk Kabupaten/Kota paling banyak 40% dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Rekapitulasi Dana Otonomi Khusus yang dikelola Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, adalah sebagai berikut.

Tabel 2.4
Rincian Alokasi Anggaran di Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya

Tahun	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Keterangan
2008	0,00	0,00	Alokasi anggaran di Pemerintah Aceh
2009	0,00	0,00	Alokasi anggaran di Pemerintah Aceh
2010	0,00	0,00	Alokasi anggaran di Pemerintah Aceh
2011	0,00	0,00	Alokasi anggaran di Pemerintah Aceh
2012	0,00	0,00	Alokasi anggaran di Pemerintah Aceh
2013	0,00	0,00	Alokasi anggaran di Pemerintah Aceh
2014	94.216.152.766,00	87.751.581.894,00	Alokasi anggaran di Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya
2015	96.640.402.805,00	94.219.874.040,00	Alokasi anggaran di Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya
2016	94.651.839.282,00	92.445.745.086,00	Alokasi anggaran di Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya
2017	98.263.717.918,00	56.606.644.746,00	Alokasi anggaran di Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya
2018	0,00	0,00	Alokasi anggaran di Pemerintah Aceh
2019	87.319.493.982,00	83.299.460.934,75	Alokasi anggaran di Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya
2020	100.850.532.828,00	96.830.499.781,00	Alokasi anggaran di Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya
2021	75.279.453.373,00	75.279.453.374,00	Alokasi anggaran di Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya
2022	78.204.473.527,89	78.195.223.528,25	Alokasi anggaran di Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya

d. Pinjaman Daerah

Untuk membiayai kebutuhan daerah berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana, daerah dapat melakukan pinjaman baik dari dalam negeri (pusat dan lembaga keuangan) maupun dari luar negeri dengan persetujuan pusat.

2. Kebijakan Belanja

Dalam menentukan arah kebijakan belanja tahun anggaran 2022 Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya mengacu pada Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Arah pengelolaan belanja daerah Kabupaten Pidie Jaya dilakukan melalui dua sisi yaitu belanja untuk kepentingan pemberdayaan sektor publik dan belanja aparatur. Alokasi belanja publik tersebut memperhatikan sisi prioritas dan efek *multiplier* dari pengeluaran belanja. Belanja aparatur untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai seperti gaji, biaya pemeliharaan dan operasional serta lain-lain sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pelayanan bagi masyarakat.

Penggunaan anggaran belanja diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah TA 2022 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Belanja daerah TA 2022 dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.

Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Belanja daerah terdiri dari belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer. Belanja Operasi adalah Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Sedangkan Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Secara umum, kebijakan belanja dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Penetapan pagu indikatif untuk setiap program dan kegiatan dalam setiap misi hendaknya proporsional;
- b. Secara kewilayahan belanja daerah harus disusun secara adil dan proporsional. Adapun daerah-daerah dengan permasalahan khusus perlu diadakan anggaran penyeimbang; dan
- c. Program yang direncanakan dan diperlukan bagi percepatan pembangunan daerah harus didukung dengan pendanaan yang memadai.

Kebijakan belanja dapat dirinci sebagai berikut:

a. Kebijakan Belanja Program

Belanja program adalah alokasi belanja APBK Pidie Jaya yang dilaksanakan oleh SKPK Kabupaten Pidie Jaya. Alokasi belanja program Tahun 2022 didasarkan pada kebijakan yang ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Alokasi belanja ditetapkan berdasarkan indeks relevansi anggaran dengan merujuk pada prioritas pembangunan daerah Tahun 2022;
- 2) Proporsi belanja difokuskan pada tiga indikator yaitu, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur; serta
- 3) Proporsi anggaran pendidikan dan kesehatan diusahakan mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya.

b. Kebijakan Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dalam rangka pemerataan dan peningkatan kemampuan keuangan bagi daerah atau desa penerima bantuan. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada pemerintah tingkat kecamatan dan desa serta organisasi kemasyarakatan, politik dan organisasi kepemudaan. Kebijakan yang menjadi dasar alokasi bantuan keuangan tersebut adalah:

- 1) Bantuan keuangan kepada kecamatan dan desa berupa bantuan langsung;
- 2) Alokasi bantuan keuangan kecamatan dan desa dibagi menjadi dana pemerataan, dana proporsional dan dana operasional;
- 3) Bantuan organisasi kemasyarakatan dialokasikan berdasarkan tingkat kepentingan yang dinilai berdasarkan proposal yang diajukan.

c. Kebijakan Belanja Bantuan Sosial

Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemberian bantuan sosial tersebut tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya. Pengurangan jumlah bantuan sosial bertujuan agar dana APBK dapat dialokasikan mendanai program dan kegiatan pemerintahan daerah yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian.

d. Kebijakan Belanja Khusus

Alokasi belanja dalam APBK juga dilaksanakan berdasarkan kebijakan khusus yang ditetapkan oleh pimpinan daerah yang antara lain terdiri dari:

- 1) Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;
- 2) Percepatan pembangunan infrastruktur;
- 3) Percepatan pembangunan daerah tertinggal; dan
- 4) Penanganan masalah korban bencana alam.

3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Penggunaan anggaran belanja daerah harus tetap terarah, efisien dan efektif dalam pembelanjaan pembangunan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan sehingga diharapkan tidak akan terjadi defisit anggaran. Jika terjadi defisit, pembiayaan yang dilakukan tetap harus mengacu pada arah kebijakan pembelanjaan. Defisit anggaran tersebut dibiayai terlebih dahulu melalui sisa lebih perhitungan APBK tahun lalu yang merupakan selisih lebih realisasi pendapatan terhadap realisasi belanja daerah. Dalam menetapkan struktur pembiayaan guna membiayai atau menggunakan defisit atau surplus anggaran, penetapannya dioptimalkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Pengaturan tentang kebijakan pembiayaan dalam APBK telah diatur dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 174, apabila APBK diperkirakan surplus maka penggunaannya dapat diarahkan untuk pengeluaran pembiayaan yang mencakup penyertaan modal (investasi daerah) dan transfer ke rekening dana cadangan. Namun apabila APBK diperkirakan defisit, penggunaannya dapat didanai dari penerimaan pembiayaan yang terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, transfer dari dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pinjaman daerah.

2.3 Kebijakan APBD pada Masa Pandemi Covid 19

Pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap perekonomian nasional dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Hal tersebut juga berdampak pada kondisi perekonomian di daerah. Pandemi Covid-19 yang melanda memaksa pemerintah daerah melakukan penyesuaian APBD untuk menangani/mencegah dampak kesehatan, menjaga kondisi perekonomian dan kondisi sosial ekonomi. Dalam hal penyesuaian APBD Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
3. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Dampaknya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.04/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Dampaknya;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Kabupaten Pidie Jaya merupakan rekapitulasi realisasi keuangan pada Tahun 2022. Adapun pencapaian realisasi keuangan Tahun 2022 setelah dibandingkan dengan anggaran/target yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

3.1.1 Pendapatan

Tabel 3.1
Realisasi Pendapatan Asli Daerah

NO	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	7.865.000.000,00	9.638.687.012,00	122,55	8.711.018.955,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	8.219.646.000,00	3.646.194.200,00	44,36	56.047.888.179,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.700.000.000,00	2.786.958.904,00	103,22	2.532.367.261,00
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	88.839.728.955,00	83.617.620.364,60	94,12	15.082.539.347,45
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	107.624.374.955,00	99.689.460.480,60	92,63	82.373.813.742,45

Sumber : LRA TA 2022

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 sebesar Rp99.689.460.480,60 atau 92,63% dari anggaran dan mengalami peningkatan sebesar Rp17.315.646.738,15 atau sebesar 21,02% dari realisasi Tahun 2021 sebesar Rp82.373.813.742,45.

Tabel 3.2
Realisasi Pendapatan Dana Transfer

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)	REALISASI
		2022	2022		2021
1	PENDAPATAN TRANSFER				
2	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT				
3	DANA PERIMBANGAN				
4	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	12.008.311.000,00	15.923.089.937,00	132,60	14.823.551.675,00
5	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	403.338.331.158,00	403.321.541.158,00	100,00	404.301.754.000,00
6	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	100.379.975.000,00	99.282.291.087,00	98,91	71.966.566.106,00
7	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	76.946.260.553,00	71.442.427.199,00	92,85	50.880.388.547,00
8	Jumlah Dana Perimbangan (4 s/d 7)	592.672.877.711,00	589.969.349.381,00	99,54	541.972.260.328,00
9	DANA INSENTIF DAERAH (DID)				

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)	REALISASI
		2022	2022		2021
10	DID	9.645.129.000,00	18.897.689.000,00	195,93	39.790.452.000,00
11	Jumlah Dana Insentif Daerah (DID) (10)	9.645.129.000,00	18.897.689.000,00	195,93	39.790.452.000,00
12	DANA DESA				
13	Dana Desa	151.746.896.000,00	151.746.896.000,00	100,00	165.862.465.000,00
14	Jumlah Dana Desa (13)	151.746.896.000,00	151.746.896.000,00	100,00	165.862.465.000,00
15	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT (8+11+14)	754.064.902.711,00	760.613.934.381,00	100,87	747.625.177.328,00
16	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH				
17	Pendapatan Bagi Hasil	25.783.457.533,00	26.524.380.706,17	102,87	24.922.205.099,00
18	Jumlah Pendapatan Antar Daerah (17)	25.783.457.533,00	26.524.380.706,17	102,87	24.922.205.099,00
19	Bantuan Keuangan				
20	Bantuan Keuangan	78.204.473.527,89	78.195.223.528,25	99,99	75.279.453.374,00
21	Jumlah Bantuan Keuangan (20)	78.204.473.527,89	78.195.223.528,25	99,99	75.279.453.374,00
22	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH (18+21)	103.987.931.060,89	104.719.604.234,42	100,70	100.201.658.473,00
23	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER (15+22)	858.052.833.771,89	865.333.538.615,42	100,85	847.826.835.801,00

Sumber : LRA TA 2022

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2022 sebesar Rp865.333.538.615,42 atau 100,85% dari anggaran dan mengalami peningkatan sebesar Rp17.506.702.814,42 atau sebesar 2,06% dari realisasi Tahun 2021 sebesar Rp847.826.835.801,00.

Tabel 3.3
Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah

NO	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
1	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
2	Pendapatan Hibah	0,00	28.431.969.000,00	100,00	0,00
3	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	00,0	00,0	0,00	15.926.388.000,00
5	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (2 s/d 4)	0,00	28.431.969.000,00	100,00	15.926.388.000,00

Sumber : LRA TA 2022

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp28.431.969.000,00 dari anggaran dan mengalami peningkatan sebesar Rp12.505.581.000,00 dari realisasi Tahun 2021 sebesar Rp15.926.388.000,00 atau 78,52%. Secara keseluruhan total pendapatan Kabupaten Pidie Jaya pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp993.454.968.096,02 atau 102,88% dari Anggaran Pendapatan Kabupaten Pidie Jaya sebesar Rp965.677.208.726,89 dan mengalami peningkatan sebesar 5,00% atau Rp47.327.930.552,57 dari realisasi Tahun 2021 atau sebesar Rp946.127.037.543,45.

3.1.2 Belanja

Tabel 3.4
Realisasi Belanja

NO	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
1	BELANJA				
2	BELANJA OPERASI				
3	Belanja Pegawai	276.719.980.829,02	282.596.101.590,00	102,12	276.602.633.548,00
4	Belanja Barang dan Jasa	277.011.228.797,00	261.170.526.142,67	94,28	227.738.907.643,00
5	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Hibah	27.498.665.850,00	25.459.561.000,00	92,58	34.299.744.969,00
8	Belanja Bantuan Sosial	11.739.811.482,00	11.081.907.883,00	94,40	14.477.353.930,00
9	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Jumlah Belanja Operasi (3 s/d 9)	592.969.686.958,02	580.308.096.615,67	97,86	553.118.640.090,00
11	BELANJA MODAL				
12	Belanja Modal Tanah	5.000.000.000,00	4.996.809.600,00	99,94	550.845.831,00
13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.923.298.254,00	30.099.824.944,00	97,34	32.598.696.862,38
14	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	43.810.837.861,00	43.151.915.965,51	98,50	68.212.942.818,25
15	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	107.890.398.757,00	105.461.360.624,44	97,75	78.307.685.310,11
16	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	545.381.191,00	529.813.300,00	97,15	127.052.015,00
17	Jumlah Belanja Modal (12 s/d 16)	188.169.916.063,00	184.239.724.433,95	97,91	179.797.222.836,74
18	BELANJA TAK TERDUGA				
19	Belanja Tak Terduga	1.363.876.132,00	706.903.046,00	51,83	4.053.589.338,00
20	Jumlah Belanja Tidak Terduga (19)	1.363.876.132,00	706.903.046,00	51,83	4.053.589.338,00
21	BELANJA TRANSFER				
22	Belanja Bantuan Keuangan	211.270.835.820,00	211.270.835.820,00	100,00	214.867.372.113,00
23	JUMLAH BELANJA TRANSFER (22)	211.270.835.820,00	211.270.835.820,00	100,00	214.867.372.113,00
24	JUMLAH BELANJA (10+17+20+23)	993.774.314.973,02	976.525.559.915,62	98,26	951.836.824.377,74

Sumber : LRA TA 2022

Realisasi Belanja dan Transfer Kabupaten Pidie Jaya pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp976.525.559.915,62 atau 98,26% dari anggaran sebesar Rp993.774.314.973,02 dan mengalami peningkatan sebesar Rp24.688.735.537,88 atau sebesar 2,59% dari realisasi Tahun 2021 sebesar Rp951.836.824.377,74.

3.1.3 Pembiayaan Daerah

Tabel 3.5
Realisasi Pembiayaan Daerah

NO	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
1	PEMBIAYAAN				
2	PENERIMAAN DAERAH				
3	Penggunaan SILPA	29.197.106.246,13	29.197.106.246,13	100,00	35.906.893.080,42
4	Jumlah Penerimaan (3)	29.197.106.246,13	29.197.106.246,13	100,00	35.906.893.080,42
5	PENGELUARAN DAERAH				
6	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00
7	Jumlah Pengeluaran (6 s/d 7)	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00

NO	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
8	PEMBIAYAAN NETTO (4-8)	28.097.106.246,13	28.097.106.246,13	100,00	34.906.893.080,42
9	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)	0,00	45.026.514.426,53	100,00	29.197.106.246,13

Sumber : LRA TA 2022

Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp29.197.106.246,13 merupakan penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2021. Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp1.100.000.000,00 merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya pada PT Bank Aceh Syariah sebesar Rp1.000.000.000,00 dan penyertaan modal pada PDAM Tirta Krueng Meureudu sebesar Rp100.000.000,00 sehingga jumlah Pembiayaan Netto sebesar Rp28.097.106.246,13. Ditambah dengan Surplus Anggaran Tahun 2022 sebesar Rp16.929.408.180,40 maka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2022 adalah sebesar Rp45.026.514.426,53.

3.2 Ikhtisar Target dan Realisasi Anggaran Penanganan Pandemi Covid 19

Pada Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya mengalokasikan anggaran penanganan pandemic covid 19 sebesar Rp26.581.931.375,00 dan dari jumlah tersebut terealisasi sebesar Rp25.424.363.044,00. Adapun rincian penggunaan dana dalam rangka penanganan pandemi Covid 19 adalah sebagai berikut:

- a. **Bidang Kesehatan** dalam program ini Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya menganggarkan sebesar Rp650.380.000,00 dan terealisasi sebesar Rp650.380.000,00.
- b. **Bidang Penanganan Dampak/Dukungan Ekonomi** program ini Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya menganggarkan sebesar Rp15.607.551.375,00 dan terealisasi sebesar Rp15.232.969.070,00.
- c. **Bidang sosial *safety net/jarring pengaman sosial*** program ini Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya menganggarkan sebesar Rp10.324.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp9.541.013.974,00.

3.3 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Secara umum permasalahan yang masih dihadapi dalam pengelolaan pendapatan daerah antara lain:

1. Target yang ditetapkan belum mengacu pada potensi riil yang ada pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;

2. Banyak Wajib Pajak yang belum memiliki izin seperti Izin Pertambangan Galian C dan Pajak Sarang Burung Walet;
3. Kurangnya Kepatuhan Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah dalam memenuhi kewajibannya kepada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;
4. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pajak dan retribusi daerah;
5. Masih terbatasnya payung hukum yang merupakan dasar untuk menggali potensi-potensi pendapatan baru secara optimal;
6. Terbatasnya jumlah SDM, dan fasilitas lapangan untuk menggali potensi PAD Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.

Untuk mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi serta untuk menjaga konsistensi dalam pemenuhan target penerimaan yang telah ditetapkan maka dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:

1. Membangun komunikasi yang konstruktif dengan berbagai pihak, baik dalam lingkungan pemerintahan, kalangan pengusaha, akademisi, maupun masyarakat;
2. Menjaga keakuratan data potensi pajak dan retribusi daerah dengan tetap konsisten melaksanakan pemantauan dan pembinaan;
3. Menjaga konsistensi pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap sensitif pada dinamika perkembangan sosial ekonomi masyarakat; dan
4. Melakukan pembenahan dan pengembangan internal kelembagaan secara terus menerus dalam mendukung peningkatan kualitas SDM.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bertanggung jawab menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya untuk disampaikan kepada Bupati Pidie Jaya dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBK yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan serta melampirkan Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 62 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya adalah berdasarkan biaya dan hasil estimasi yang layak. Secara umum pengukuran aset dan kewajiban berdasar nilai nominal atau nilai perolehannya. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan

dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah bank sentral yang berlaku pada tanggal transaksi

Pengukuran Aset adalah sebagai berikut:

- a. Kas dicatat sebesar nilai nominal;
- b. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
- c. Piutang dicatat sebesar nilai nominal;
- d. Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut; dan
- e. Aset tetap dicatat sebesar nilai perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

4.4 Basis Pengakuan yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

a. Pengakuan Aset

- 1) Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
- 2) Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

b. Pengakuan Kewajiban

- 1) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu;
- 2) Kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah atau dengan pemberi jasa lainnya; dan
- 3) Pengukuran kewajiban dicatat sebesar nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

c. Pengakuan Pendapatan

1) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pengakuan pendapatan-LO pada Pemda Kabupaten Pidie Jaya dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:

- a) Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas;
- b) Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi;
- c) Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro;
- d) Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assessment* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan); dan
- e) Sistem atau administrasi piutang (termasuk *aging schedule* piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko pemda tidak mengakui adanya piutang di akhir tahun.

Dalam hal pengukuran pendapatan LO Kabupaten Pidie Jaya, dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

2) Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

- a) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD;

- b) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh bendahara penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
- c) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
- d) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD; dan
- e) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pengukuran Pendapatan LRA Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dilakukan berdasarkan:

- a) Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- b) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan; dan
- c) Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

d. Pengakuan Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Pengakuan Belanja diakui pada saat:

- 1) Terjadinya pengeluaran dari RKUD;
- 2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil; dan

3) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

- 1) Belanja Operasi;
- 2) Belanja Modal; dan
- 3) Belanja Tak Terduga.

Belanja dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

e. Pengakuan Transfer

Adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Pengakuan pendapatan transfer:

- 1) Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer
 - a) Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah;
 - b) Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:
 - i. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
 - ii. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
 - c) Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas

apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 2) Transfer Keluar dan Beban Transfer
 - a) Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar; dan
 - b) Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.

f. Pengakuan Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya diakui pada saat:

- 1) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah; dan
- 2) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

4.5 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Secara umum kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam mengelola keuangan pada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Adapun kebijakan akuntansi pada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya adalah sebagai berikut:

a. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah.

Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset non lancar.

1) Aset Lancar

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Aset lancar terdiri dari:

a) Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas adalah alat pembayaran yang sah, setiap saat dapat digunakan dan dinilai dalam mata uang rupiah. Kas di kas daerah adalah saldo kas pemerintah daerah yang berada di rekening kas daerah pada bank. Kas di pemegang kas adalah sisa kas yang masih berada di bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan per 31 Desember 2022.

b) Piutang/Tagihan ke Pihak Ketiga

Piutang merupakan hak atau klaim entitas pemerintah kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi.

c) Penyisihan Piutang Tak Tertagih

(1) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar:

- (a) Kualitas Lancar sebesar 5%;
- (b) Kualitas Kurang Lancar sebesar 20% dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- (c) Kualitas Diragukan sebesar 30% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- (d) Kualitas Macet 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

(2) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Retribusi, ditetapkan sebesar:

- (a) Kualitas Lancar sebesar 5%;
- (b) Kualitas Kurang Lancar sebesar 20% dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- (c) Kualitas Diragukan sebesar 30% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
Kualitas Macet 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

(3) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan pajak selain Retribusi, ditetapkan sebesar:

- (a) 0,5% dari Piutang dengan kualitas lancar;
- (b) 10% dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- (c) 50% dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- (d) 100% dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

(4) Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan.

- (5) Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.
- (6) Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CALK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

d) Persediaan

Persediaan adalah barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat.

Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah.

Persediaan dicatat sebesar:

- (1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- (2) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan
- (3) Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/hibah.

2) Aset Non Lancar

Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.

Aset non lancar terdiri dari:

a) Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah aset yang dimaksud untuk memperoleh manfaat ekonomi sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi Jangka Panjang terdiri atas:

- (1) Investasi non permanen yaitu investasi jangka panjang yang tidak dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
- (2) Investasi permanen yaitu investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Investasi Jangka Panjang dicatat sebesar biaya perolehan (*cost method*), untuk investasi yang proporsi sahamnya dimiliki kurang dari 20% dan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan dalam mengendalikan perusahaan. Untuk investasi yang mempunyai proporsi lebih dari 20%, maka investasi dicatat menggunakan *equity method*. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan atau nilai wajar investasi jika harga perolehannya tidak ada.

b) Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

- (1) Aset tetap diakui pada saat diterima dan hak kepemilikan berpindah;
- (2) Aset tetap dicatat sebesar harga perolehan. Apabila harga perolehan tidak diketahui maka aset tetap dinilai sebesar nilai wajar pada saat perolehan;
- (3) Aset tetap akan dihapuskan apabila rusak berat, berlebih, usang, hilang dan sebagainya berdasarkan Peraturan Bupati; dan
- (4) Dalam pencatatan Aset Tetap harus dibuat ketentuan yang membedakan antara penambahan, penghapusan dan penggantian utama.
 - (a) Penambahan adalah peningkatan nilai aset tetap karena diperluas atau diperbesarnya gedung dan bangunan. Biaya penambahan akan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga gedung dan bangunan yang bersangkutan;
 - (b) Penghapusan adalah penurunan aset tetap karena berkurangnya kuantitas;
 - (c) Penghapusan dicatat sebagai pengurangan harga perolehan aset tetap yang bersangkutan; dan

- (d) Penggantian utama adalah memperbaiki bagian aset tetap. Biaya penggantian utama dikapitalisasi dengan cara mengurangi nilai bagian yang diganti dari harga aktiva tetap dimaksud dan menambah biaya penggantian.
- (5) Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Treshold*) Perolehan Awal Aset Tetap.
- (a) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi;
- (b) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak;
- (c) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut:
- Alat angkutan dan alat berat sebesar Rp1.000.000,00;
 - Peralatan dan mesin lainnya selain alat angkutan dan alat berat sebesar Rp600.000,00; dan
 - Aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian dan buku-buku perpustakaan tidak ada nilai satuan minimum sehingga berapa pun nilai perolehannya dikapitalisasi.
- (6) Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)
- (a) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan.
- (b) Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomis di masa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan

hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.

- (c) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk pengeluaran setelah perolehan yang dimaksud dapat menggunakan data yang telah ditetapkan pada modul kebijakan akuntansi aset tetap dan penyusutan sesuai Permendagri 64 Tahun 2013.
- (d) Nilai pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut harus sama dengan atau melebihi nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Nilai satuan minimum kapitalisasi adalah penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi. contoh ditetapkan nilai satuan minimum kapitalisasi untuk pemeliharaan gedung dan bangunan sama dengan atau melebihi dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

(7) Penyusutan

- (a) Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode Garis Lurus (*straight line method*).
- (b) Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada akumulasi penyusutan aset tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.
- (c) Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap dapat menggunakan data yang telah ditetapkan pada modul kebijakan akuntansi aset tetap dan penyusutan sesuai Permendagri 64 Tahun 2013.
- (d) Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu tanah, konstruksi dalam pengerjaan buku-buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman.
- (e) Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset *Idle* disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
- (f) Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa:
 - (1) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan

(2) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

(g) Penyusutan aset tetap pada laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya mulai diberlakukan pada Tahun 2015.

c) Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

d) Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset lancar, investasi jangka panjang dan aset tetap. Aset ini diakui sebesar harga perolehan.

b. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Kewajiban diklasifikasikan:

- 1) Kewajiban jangka pendek yaitu kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan; dan
 - 2) Kewajiban jangka panjang yaitu kewajiban yang jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan
- Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.

Kewajiban timbul dari:

- 1) Transaksi dengan pertukaran;
- 2) Transaksi tanpa pertukaran, sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
- 3) Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah;
- 4) Kejadian yang diakui pemerintah; dan
- 5) Penghapusan utang adalah pembatalan secara sukarela tagihan oleh kreditur kepada debitur, baik sebagian maupun seluruhnya, jumlah utang debitur dalam bentuk perjanjian formal diantara keduanya.

c. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

- 1) Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Bendahara Umum Daerah (BUD).
- 2) Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- 3) Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

b. Pendapatan-LO

- 1) Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- 2) Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- 3) Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- 4) Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

c. Belanja

- 1) Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- 2) Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas BUD.
- 3) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja

terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang telah disahkan oleh masing-masing Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran.

- 4) Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi.

d. Beban

- 1) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- 2) Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- 3) Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi.

BAB V
PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

5.1 Penjelasan atas Pos-Pos dalam Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1 Pendapatan

Realisasi pendapatan TA 2022 mencapai Rp993.454.968.096,02 atau 102,88% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp965.677.208.726,89. Secara keseluruhan total pendapatan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya mengalami peningkatan sebesar Rp47.327.930.552,57 dibandingkan total pendapatan pada TA 2021 sebesar Rp946.127.037.543,45. Adapun rincian pendapatan tersebut untuk TA 2022 dan 2021 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1
Realisasi Pendapatan Untuk Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	(%)	Realisasi 2021
A.	Pendapatan Asli Daerah	107.624.374.955,00	99.689.460.480,60	92,63	82.373.813.742,45
B.	Pendapatan Transfer	858.052.833.771,89	865.333.538.615,42	100,85	847.826.835.801,00
C.	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	0,00	28.431.969.000,00	0,00	15.926.388.000,00
	Jumlah	965.677.208.726,89	993.454.968.096,02	102,88	946.127.037.543,45

A. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2022 dapat direalisasikan sebesar Rp99.689.460.480,60 atau 92,63% dari target sebesar Rp107.624.374.955,00. Pendapatan Asli Daerah TA 2022 meningkat sebesar Rp17.315.646.738,15 dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah TA 2021 sebesar Rp82.373.813.742,45. Adapun rincian Pendapatan Asli Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	(%)	Realisasi 2021
1	Pendapatan Pajak Daerah	7.865.000.000,00	9.638.687.012,00	122,55	8.711.018.955,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah	8.219.646.000,00	3.646.194.200,00	44,36	56.047.888.179,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.700.000.000,00	2.786.958.904,00	103,22	2.532.367.261,00
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah	88.839.728.955,00	83.617.620.364,60	94,12	15.082.539.347,45
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (1 s/d 5)	107.624.374.955,00	99.689.460.480,60	92,63	82.373.813.742,45

Dari jumlah keseluruhan realisasi penerimaan PAD tersebut yang realisasi pendapatannya paling besar dibandingkan anggarannya adalah Pendapatan

Pajak Daerah sebesar 122,55%. Sedangkan jumlah realisasi jika dibandingkan dengan total PAD, maka yang paling besar kontribusinya adalah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah sebesar 83,88% ((Rp83.617.620.364,60 /Rp99.689.460.480,60) x 100%) dari total penerimaan PAD. Secara keseluruhan kontribusi PAD terhadap total Pendapatan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya TA 2022 adalah sebesar 10,03% ((Rp99.689.460.480,60/Rp993.454.968.096,02) x 100%).

1) Pendapatan Pajak Daerah

Rincian Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Daerah untuk TA 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3
Realisasi Pajak Daerah Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	(%)	Realisasi 2021
1	Pajak Restoran	1.700.000.000,00	1.563.223.006,00	91,95	1.399.931.087,00
2	Pajak Reklame	225.000.000,00	315.689.500,00	140,31	297.983.250,00
3	Pajak Penerangan Jalan	3.500.000.000,00	5.059.796.742,00	144,57	3.994.548.302,00
4	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.200.000.000,00	700.674.459,00	58,39	974.678.640,00
5	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000,00	14.400.000,00	28,80	11.500.000,00
6	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	550.000.000,00	715.099.180,00	130,02	801.099.376,00
7	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	640.000.000,00	1.269.804.125,00	198,41	1.231.278.300,00
	Jumlah Pajak Daerah	7.865.000.000,00	9.638.687.012,00	122,55	8.711.018.955,00

Dari Tabel 5.3 di atas dapat diketahui bahwa total realisasi Pajak Daerah untuk Tahun 2022 sebesar Rp9.638.687.012,00 dan Tahun 2021 sebesar Rp8.711.018.955,00. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya meningkat sebesar Rp927.668.057,00 atau 10,65% dari tahun sebelumnya. Jika dilihat dari target yang direncanakan jumlah pendapatan Pajak Daerah Tahun 2022 melampaui dari nilai target yang dianggarkan sebesar Rp1.773.687.012,00.

2) Pendapatan Retribusi Daerah

Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah TA 2022 sebesar Rp3.646.194.200,00 menurun sebesar Rp52.401.693.979,00 atau 93,49% dari Pendapatan Retribusi Daerah TA 2021. Penurunan yang sangat signifikan tersebut terjadi pada akun Retribusi Pelayanan Kesehatan. Pada TA 2021 terdapat Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD sedangkan pada TA 2022 dikarenakan RSUD telah menjadi BLUD, maka penganggaran dan realisasi pendapatan dimaksud tercatat pada Lain-lain

PAD yang Sah. Jika dibandingkan dengan target yang dianggarkan sebesar Rp8.219.646.000,00 maka Pendapatan Retribusi Daerah TA 2022 terealisasi sebesar 44,36%. Rincian Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Retribusi Daerah untuk TA 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4
Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.822.000.000,00	923.314.200,00	50,68	52.929.146.979,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	300.000.000,00	173.010.000,00	57,67	189.758.000,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	142.480.000,00	117.950.000,00	82,78	125.700.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	78.153.600,00	51.000.000,00	65,26	70.728.200,00
5	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	50.000.000,00	37.000.000,00	74,00	28.500.000,00
6	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	167.400.000,00	170.333.000,00	101,75	161.672.000,00
7	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.330.910.400,00	673.500.000,00	20,22	928.350.000,00
8	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	1.854.266.000,00	1.440.481.000,00	77,68	1.470.420.000,00
9	Retribusi Terminal	15.096.000,00	0,00	-	8.064.000,00
10	Retribusi Tempat Khusus Parkir	3.840.000,00	0,00	-	2.400.000,00
11	Retribusi Rumah Potong Hewan	80.000.000,00	22.860.000,00	28,58	59.040.000,00
12	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	105.500.000,00	19.292.000,00	18,29	14.600.000,00
13	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	20.000.000,00	5.000.000,00	25,00	10.000.000,00
14	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	250.000.000,00	12.454.000,00	4,98	49.509.000,00
	Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah	8.219.646.000,00	3.646.194.200,00	44,36	56.047.888.179,00

Berdasarkan tabel di atas retribusi yang berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Retribusi Daerah pada TA 2022 adalah Retribusi Pasar Grosir dan/atau pertokoan sebesar Rp1.440.481.000,00 atau 39,51% dari total realisasi Pendapatan Retribusi TA 2022 sebesar Rp3.646.194.200,00.

3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Dari Tabel 5.2 di atas dapat diketahui bahwa realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2022 sebesar Rp2.786.958.904,00 atau 103,22% dari anggaran, yang berasal dari hasil pembagian deviden yang diterima dari PT Bank Aceh Syariah. Dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2021 sebesar Rp2.532.367.261,00 maka pada TA 2022 terjadi peningkatan 10,05% atau sebesar Rp254.591.643,00.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah

Dari Tabel 5.2 di atas dapat diketahui realisasi Lain-Lain PAD yang Sah TA 2022 sebesar Rp83.617.620.364,60 dan TA 2021 sebesar

Rp15.082.539.347,45. Adapun Rincian Lain-lain PAD yang Sah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5
Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
a.	Penerimaan Jasa Giro	2.480.000.000,00	304.503.887,91	12,28	857.905.757,24
b.	Pendapatan dari Pengembalian Belanja Lainnya	500.000.000,00	817.296.015,13	163,46	935.424.776,10
c.	Pendapatan BLUD	70.000.000.000,00	69.511.158.720,89	99,30	0,00
d.	Dana Kapitasi JKN Pada FKTP	12.259.728.955,00	9.055.731.948,00	73,87	9.286.150.128,00
e.	Pendapatan Zakat dan Infaq	3.600.000.000,00	3.928.929.792,67	109,14	4.003.058.686,11
f.	Lain-lain PAD Yang Sah lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah	88.839.728.955,00	83.617.620.364,60	94,12	15.082.539.347,45

Lain-lain PAD yang Sah pada TA 2022 meningkat sebesar Rp68.535.081.017,15 atau sebesar 454,40% jika dibandingkan dengan realisasi Lain-lain PAD yang Sah pada TA 2021 sebesar Rp15.082.539.347,45. Pada tabel di atas menjelaskan bahwa Lain-lain PAD yang Sah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya TA 2022 dan 2021 bersumber dari Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan dari Pengembalian Belanja Lainnya, Pendapatan BLUD, Dana Kapitalisasi JKN pada FKTP, dan Pendapatan Zakat dan Infak. Dilihat dari target yang dianggarkan dan realisasinya, penerimaan Jasa Giro terealisasi sebesar 12,28% dari target yang direncanakan atau Rp304.503.887,91. Adapun realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2022 dijelaskan sebagai berikut:

- a) Penerimaan Jasa Giro TA 2022 menurun sebesar Rp553.401.869,33 dari tahun sebelumnya. Besarnya/kecilnya Penerimaan Jasa Giro ditentukan oleh besarnya/kecilnya nilai saldo kas di Rekening Bank TA 2022 pada saat Bank melakukan perhitungan jasa giro yang akan dibagikan kepada pemilik rekening/nasabah, sehingga Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya memperoleh penerimaan Jasa Giro yang lebih rendah jika dibandingkan dengan TA 2021.
- b) Pendapatan dari Pengembalian Belanja Lainnya TA 2022 sebesar Rp817.296.015,13. Dalam Akun Pendapatan dari Pengembalian Belanja Lainnya terdapat Pendapatan atas denda PBB-P2 TA 2021 sebesar Rp66.417.707,00 dikarenakan pada TA 2022 pendapatan Denda PBB-P2 tidak dianggarkan secara terpisah.

- c) Pendapatan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) merupakan Pendapatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya. Pendapatan BLUD TA 2022 sebesar Rp69.511.158.720,89 atau sebesar 99,30% dari yang anggaran yang ditetapkan Rp70.000.000.000.
- d) Penerimaan Dana Kapitasi JKN pada FKTP TA 2022 sebesar Rp9.055.731.948,00 merupakan gabungan dari realisasi Dana Kapitasi JKN dan FKTP pada 12 Puskesmas di lingkungan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pidie Jaya.
- e) Target yang dianggarkan untuk penerimaan Zakat dan Infaq pada TA 2022 sebesar Rp3.600.000.000,00 terealisasi sebesar Rp3.928.929.792,67 atau sebesar 109,14% dari yang dianggarkan. Penerimaan ini terdiri dari penerimaan Zakat sebesar Rp1.653.310.937,06 dan Infaq sebesar Rp2.275.618.855,61. Jika dibandingkan dengan Pendapatan Zakat dan Infaq TA 2021 sebesar Rp4.003.058.686,11 berarti Pendapatan Zakat dan Infaq TA 2022 menurun sebesar Rp74.128.893,44 atau 1,85% dari tahun sebelumnya. Pendapatan Zakat dan Infaq berasal dari pembayaran Zakat Pegawai dan Kontraktor pada TA 2022. Berikut ini merupakan rincian Lain-lain PAD yang Sah TA 2022 dan 2021:

Tabel 5.6
Rekapitulasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
A	Penerimaan Jasa Giro	2.480.000.000,00	304.503.887,91	857.905.757,24
1	Jasa Giro Kas Daerah	2.480.000.000,00	304.503.887,91	857.905.757,24
B	Pendapatan dari Pengembalian	500.000.000,00	817.296.015,13	935.424.776,10
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Lainnya	500.000.000,00	817.296.015,13	935.424.776,10
C	Pendapatan Denda Pajak	0,00	0,00	0,00
1	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	0,00	0,00	0,00
D	Pendapatan BLUD	70.000.000.000,00	69.511.158.720,89	0,00
1	Pendapatan BLUD	70.000.000.000,00	69.511.158.720,89	0,00
E	Dana Kapitasi JKN Pada FKTP	12.259.728.955,00	9.055.731.948,00	9.286.150.128,00
1	Dana Kapitasi JKN Pada Puskesmas/FKTP Bandar Baruq	1.928.747.543,00	1.249.719.350,00	1.365.592.466,00
2	Dana Kapitasi JKN Pada Puskesmas/FKTP Pantereja	727.589.840,00	483.260.601,00	485.957.529,00
3	Dana Kapitasi JKN Pada Puskesmas/FKTP Trienggadeng	1.872.728.000,00	1.182.192.150,00	1.252.224.827,00
4	Dana Kapitasi JKN Pada Puskesmas/FKTP Meureudu	1.644.116.125,00	1.287.768.427,00	1.306.436.799,00
5	Dana Kapitasi JKN Pada Puskesmas/FKTP Meurah Dua	831.822.290,00	759.214.287,00	706.126.681,00
6	Dana Kapitasi JKN Pada Puskesmas/FKTP Ulim	1.190.387.250,00	1.053.402.002,00	921.389.463,00

	7	Dana Kapitasi JKN Pada Puskesmas/FKTP Bandar Dua	1.193.813.500,00	880.438.770,00	929.114.652,00
	8	Dana Kapitasi JKN Pada Puskesmas/FKTP Kuta Krueng	581.453.700,00	396.868.728,00	444.380.370,00
	9	Dana Kapitasi JKN Pada Puskesmas/FKTP Jangka Buya	736.736.550,00	591.188.644,00	625.369.801,00
	10	Dana Kapitasi JKN Pada Puskesmas/FKTP Blang Kuta	639.916.200,00	417.096.900,00	403.642.719,00
	11	Dana Kapitasi JKN Pada Puskesmas/FKTP Cubo	409.713.957,00	325.029.592,00	348.220.717,00
	12	Dana Kapitasi JKN Pada Puskesmas/FKTP Sp 4 Nyong	502.704.000,00	429.552.497,00	497.694.104,00
F	1	Pendapatan Zakat dan Infaq	3.600.000.000,00	3.928.929.792,67	4.003.058.686,11
		Pendapatan Zakat	2.000.000.000,00	1.653.310.937,06	1.945.740.387,00
		Pendapatan Infaq	1.600.000.000,00	2.275.618.855,61	2.057.318.299,11
G	1	Lain-lain PAD yang Sah			
		Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	88.839.728.955,00	83.617.620.364,60	15.082.539.347,45

B. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang bersumber dari transfer pemerintah pusat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Pendapatan Transfer sampai dengan akhir TA 2022 dapat direalisasikan sebesar Rp865.333.538.615,42 atau 100,85% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp858.052.833.771,89 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.7
Realisasi Pendapatan Transfer TA 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	592.672.877.711,00	589.969.349.381,00	99,54	541.972.260.328,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya	161.392.025.000,00	170.644.585.000,00	105,73	205.652.917.000,00
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	25.783.457.533,00	26.524.380.706,17	102,87	24.922.205.099,00
4	Pendapatan Transfer-Bantuan Keuangan	78.204.473.527,89	78.195.223.528,25	99,99	75.279.453.374,00
	Jumlah Pendapatan Transfer	858.052.833.771,89	865.333.538.615,42	100,85	847.826.835.801,00

Pendapatan Transfer TA 2022 meningkat sebesar Rp17.506.702.814,42 atau 2,06% dari tahun sebelumnya sebesar Rp847.826.835.801,00. Untuk lebih jelasnya Pendapatan Transfer diuraikan sebagai berikut:

1. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan TA 2022 sebesar Rp589.969.349.381,00 atau 99,54% dari anggaran sebesar Rp592.672.877.711,00. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan meningkat sebesar Rp47.997.089.053,00 atau 8,86% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp541.972.260.328,00. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan bersumber dari:

a) **Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH)**

1) **Dana Bagi Hasil Pajak**

Anggaran dan realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2022 direalisasikan sebesar Rp9.024.898.892,00 atau 111,12% dari anggaran sebesar Rp8.121.544.000,00 dan menurun sebesar Rp2.316.573.635,00 atau 20,43% dibanding dengan realisasi dana bagi hasil TA 2021 sebesar Rp11.341.472.527,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.8
Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2022 dan 2021

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	4.550.259.000,00	5.328.707.504,00	7.070.031.344,00
Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21	3.158.419.000,00	3.278.795.054,00	3.802.237.700,00
Bagi Hasil Cukai dan Tembakau	412.866.000,00	417.396.334,00	469.203.483,00
Jumlah	8.121.544.000,00	9.024.898.892,00	11.341.472.527,00

2) **Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam**

Anggaran dan realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2022 direalisasikan sebesar Rp6.898.191.045,00 atau 177,48% dari anggaran sebesar Rp3.886.767.000,00 dan mengalami peningkatan sebesar Rp3.416.111.897,00 atau 98,11% dibanding dengan realisasi Dana Bagi Hasil TA 2021 sebesar Rp3.482.079.148,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.9
Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2022 dan 2021

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	547.238.000,00	1.873.988.801,00	55.053.875,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	16.618.000,00	22.868.119,00	44.954.435,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	1.348.688.000,00	3.021.831.444,00	1.687.050.635,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	15.912.000,00	21.191.681,00	30.782.639,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.958.311.000,00	1.958.311.000,00	1.664.237.564,00
Jumlah	3.886.767.000,00	6.898.191.045,00	3.482.079.148,00

b) **Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)**

Anggaran dan realisasi Dana Alokasi Umum TA 2022 direalisasikan sebesar Rp403.321.541.158,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp403.338.331.158,00 dan menurun sebesar Rp980.212.842,00 atau

0.24% dibandingkan dengan realisasi dana bagi hasil TA 2021 sebesar Rp404.301.754.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.10
Realisasi Dana Alokasi Umum TA 2022 dan 2021

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Dana Alokasi Umum (DAU)	403.338.331.158,00	403.321.541.158,00	404.301.754.000,00
Jumlah	403.338.331.158,00	403.321.541.158,00	404.301.754.000,00

c) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Anggaran dan realisasi Dana Alokasi Khusus TA 2022 direalisasikan sebesar Rp170.694.316.286,00 atau 96,26% dari yang dianggarkan sebesar Rp177.326.235.553,00 dan meningkat sebesar Rp47.847.361.633,00 atau 38,95% dibanding dengan realisasi Dana Alokasi Khusus TA 2021 sebesar Rp122.846.954.653,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.11
Realisasi Dana Alokasi Khusus TA 2022 dan 2021

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Dana Alokasi Khusus (DAK)	177.326.235.553,00	170.724.718.286,00	122.846.954.653,00
Jumlah	177.326.235.553,00	170.694.316.286,00	122.846.954.653,00

Dana Alokasi Khusus sebagaimana dijelaskan pada tabel diatas terdiri dari:

1) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik adalah dana transfer khusus dari pemerintah pusat kepada pemerintah Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas pembangunan nasional. Pada TA 2022 Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya memperoleh transfer DAK Fisik sebesar Rp99.282.291.087,00 dengan rincian sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.12
Rincian Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2022

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Lebih/(Kurang)	%
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.561.612.000,00	1.561.492.000,00	(120.000,00)	99,99
2	DAK Fisik -Bidang Pendidikan-Reguler-SD	4.369.980.000,00	4.488.948.000,00	118.968.000,00	102,72
3	DAK Fisik -Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	2.793.959.000,00	2.793.959.000,00	0,00	100,00

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Lebih/(Kurang)	%
4	DAK Fisik -Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	610.694.000,00	490.594.000,00	(120.100.000,00)	80,33
5	DAK Fisik -Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	300.000.000,00	299.996.100,00	(3.900,00)	100
6	DAK Fisik -Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	27.550.728.000,00	27.091.838.001,00	(458.889.999,00)	98,33
7	DAK Fisik -Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	7.534.878.000,00	7.460.143.483,00	(74.734.517,00)	99,01
8	DAK Fisik -Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	3.231.849.000,00	3.207.929.413,00	(23.919.587,00)	99,26
9	DAK Fisik -Bidang Jalan-Reguler-Jalan	30.001.970.000,00	29.670.737.334,00	(331.232.666,00)	98,90
10	DAK Fisik -Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	12.329.387.000,00	12.183.372.208,00	(146.014.792,00)	98,82
11	DAK Fisik -Bidang Air Minum-Reguler	4.540.463.000,00	4.502.035.454,00	(38.427.546,00)	99,15
12	DAK Fisik -Bidang Sanitasi-Reguler	3.100.000.000,00	3.080.000.000,00	(20.000.000,00)	99,35
13	DAK Fisik -Bidang Irigasi-Penugasan	2.454.455.000,00	2.451.246.094,00	(3.208.906,00)	99,87
	Jumlah Dana DAK FISIK	100.379.975.000,00	99.282.291.087,00	(1.097.683.913,00)	98,91

2) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik adalah dana transfer khusus dari pemerintah pusat kepada pemerintah Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus Non fisik yang merupakan urusan daerah. Pada TA 2022 pemerintah Kabupaten Pidie Jaya memperoleh DAK Non Fisik sebesar Rp71.442.427.199,00. Adapun rincian DAK Non fisik yang diterima sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.13
Rincian Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik TA 2022

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Lebih/(Kurang)	%
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	17.387.712.967,00	15.703.409.400,00	(1.684.303.567,00)	90,31
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	640.000.000,00	640.000.000,00	0,00	100,00
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD	36.547.181.000,00	33.362.757.613,00	(3.184.423.387,00)	91,29
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	801.000.000,00	971.490.000,00	170.490.000,00	121,28
5	DAK Non Fisik-TKG PNSD	2.077.416.000,00	1.274.949.600,00	(802.466.400,00)	61,37
6	DAK Non Fisik-BOP PAUD	2.529.000.000,00	2.525.870.000,00	(3.130.000,00)	99,88
7	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	320.100.000,00	320.100.000,00	0,00	100,00
8	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	11.913.965.000,00	12.381.418.000,00	467.453.000,00	103,92
9	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	406.876.000,00	0,00	(406.876.000,00)	-
10	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	60.577.000,00	0,00	(60.577.000,00)	-
11	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	2.852.635.554,00	2.852.635.554,00	0,00	100,00
12	DAK Non Fisik-PK2UKM	1.409.797.032,00	1.409.797.032,00	0,00	100,00
	Jumlah (DAK) Non Fisik	76.946.260.553,00	71.442.427.199,00	(5.503.833.354,00)	92,85

2. Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya

Anggaran dan realisasi Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2022 direalisasikan sebesar Rp170.644.585.000,00 atau 105,73% dari anggaran sebesar Rp161.392.025.000,00, menurun sebesar Rp35.008.332.000,00

atau 17,02% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp205.652.917.000,00 yang bersumber dari Dana Penyesuaian dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.14
Realisasi Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya TA 2022 dan 2021

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Dana Insentif Daerah DID	9.645.129.000,00	18.897.689.000,00	39.790.452.000,00
Alokasi Dana Desa APBN	151.746.896.000,00	151.746.896.000,00	165.862.465.000,00
Jumlah	161.392.025.000,00	170.644.585.000,00	205.652.917.000,00

3. PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH

Anggaran dan realisasi Transfer Antar Daerah TA 2022 direalisasikan sebesar Rp104.719.604.234,42 atau 100,70% dari anggaran sebesar Rp103.987.931.060,89 meningkat sebesar Rp4.517.945.761,42 atau 4,51% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp100.201.658.473,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.15
Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi TA 2022 dan 2021

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Pendapatan Bagi Hasil	25.783.457.533,00	26.524.380.706,17	24.922.205.099,00
Bantuan Keuangan	78.204.473.527,89	78.195.223.528,25	75.279.453.374,00
Jumlah	103.987.931.060,89	104.719.604.234,42	100.201.658.473,00

Rincian realisasi Transfer Antar Daerah TA 2022 dijelaskan sebagaimana berikut:

a. Pendapatan Bagi Hasil

Anggaran dan realisasi pendapatan bagi hasil TA 2022 direalisasikan sebesar Rp26.524.380.706,17 atau 102,87% dari anggaran sebesar Rp25.783.457.533,00 meningkat sebesar Rp1.602.175.607,17 atau 6,43% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp24.922.205.099,00

Tabel 5.16
Realisasi Pendapatan Bagi Hasil TA 2022 dan 2021

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	5.253.236.557,00	5.346.352.459,00	4.836.545.235,00
Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.708.300.370,00	3.187.455.635,00	2.897.812.951,00
Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	7.725.767.178,00	9.131.272.085,00	7.759.840.100,00
Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan	23.606.662,00	33.301.041,00	24.388.035,00
Bagi Hasil dari Pajak Rokok	10.072.546.766,00	8.825.999.486,17	9.403.618.778,00
Jumlah	25.783.457.533,00	26.524.380.706,17	24.922.205.099,00

b. Bantuan Keuangan

Anggaran dan realisasi Pendapatan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi TA 2022 direalisasikan sebesar Rp78.195.223.528,25 atau

99,99% dari anggaran sebesar Rp78.204.473.527,89 meningkat sebesar Rp2.915.770.154,25 atau 3,87% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp75.279.453.374,00. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.17
Realisasi Pendapatan Bantuan Keuangan TA 2022 dan 2021

Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	78.204.473.527,89	78.195.223.528,25	75.279.453.374,00
Jumlah	78.204.473.527,89	78.195.223.528,25	75.279.453.374,00

Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi pada TA 2022 merupakan Transfer Bagian Dana Otonomi Khusus Aceh kepada Kabupaten Pidie Jaya sebesar Rp78.195.223.528,25 atau 99,99% dari target yang dianggarkan. Sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/1429/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/678/2022 Tentang Penetapan Pembagian dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Dana Otonomi Khusus Aceh Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022.

C. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan yang Sah sampai dengan berakhirnya TA 2022 direalisasikan sebesar Rp28.431.969.000,00 menurun sebesar Rp12.505.581.000,00 dari realisasi TA 2021 sebesar Rp15.926.388.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.18
Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah TA 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pendapatan Hibah	0,00	28.431.969.000,00	0,00
2	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00
3	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	15.926.388.000,00
Jumlah Lain lain Pendapatan Daerah yang Sah		0,00	28.431.969.000,00	15.926.388.000,00

1. Pendapatan Hibah

Pada Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya memperoleh pendapatan hibah yang bersumber dari BNPB sebesar Rp28.431.969.000,00 sesuai dengan Perjanjian Hibah Daerah Nomor: PHD-4/MK.7/DTK.03/RR/2022 untuk hibah rehabilitasi dan rekontruksi pascabencana. Sedangkan pendapatan hibah Tahun 2021 adalah nol.

2. Pendapatan Dana Darurat

Saldo pendapatan dana darurat pada TA 2022 dan 2021 adalah Nol

3. Pendapatan Lainnya

Pendapatan lainnya untuk TA 2022 adalah nol. Sedangkan pada TA 2021 sebesar Rp15.926.388.000,00 yang merupakan penerimaan Dana BOS pada satdikdas negeri. Sementara penerimaan Dana BOS TA 2022 dianggarkan pada Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

5.1.2 Belanja

Realisasi Belanja TA 2022 mencapai Rp976.525.559.915,62 atau 98,26% dari anggaran sebesar Rp993.774.314.973,02. Dibandingkan dengan realisasi belanja daerah TA 2021 sebesar Rp951.836.824.377,74, jumlah Belanja TA 2022 meningkat sebesar Rp24.688.735.537,88. Rincian Belanja daerah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya TA 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.19
Realisasi Belanja TA 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
A.	Belanja Operasi	592.969.686.958,02	580.308.096.615,67	97,86	553.118.640.090,00
B.	Belanja Modal	188.169.916.063,00	184.239.724.433,95	97,91	179.797.222.836,74
C.	Belanja Tak Terduga	1.363.876.132,00	706.903.046,00	51,83	4.053.589.338,00
D.	Transfer	211.270.835.820,00	211.270.835.820,00	100,00	214.867.372.113,00
	Jumlah Belanja	993.774.314.973,02	976.525.559.915,62	98,26	951.836.824.377,74

A. Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Realisasi Belanja Operasi TA 2022 sebesar Rp580.308.096.615,67 atau 97,86% dari anggaran sebesar Rp592.969.686.958,02. Dibandingkan dengan realisasi belanja operasi TA 2021 sebesar Rp553.118.640.090,00. Belanja Operasi TA 2022 meningkat sebesar Rp27.189.456.525,67 atau 4,92%. Rincian Belanja Operasi untuk TA 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.20
Realisasi Belanja Operasi TA 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Pegawai	276.719.980.829,02	282.596.101.590,00	276.602.633.548,00
2	Belanja Barang dan Jasa	277.011.228.797,00	261.170.526.142,67	227.738.907.643,00
3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Hibah	27.498.665.850,00	25.459.561.000,00	34.299.744.969,00
6	Belanja Bantuan Sosial	11.739.811.482,00	11.081.907.883,00	14.477.353.930,00

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
7	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Belanja Operasi	592.969.686.958,02	580.308.096.615,67	553.118.640.090,00

1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan pengeluaran Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya untuk imbalan atas hasil kerja yang dilakukan pegawai yang merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan. Uang representasi dan tunjangan pimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah, gaji dan tunjangan anggota DPRK serta penghasilan lainnya. Realisasi belanja pegawai sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp282.596.101.590,00 atau 102,12% dari anggaran sebesar Rp276.719.980.829,02, dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai TA 2021 sebesar Rp276.602.633.548,00. Pada TA 2022 terjadi peningkatan sebesar Rp5.993.468.042,00 atau 2,17%. Adapun rincian Belanja Pegawai untuk TA 2022 dan TA 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.21
Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	200.138.258.089,50	215.691.931.361,00	211.119.465.499,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	24.071.542.827,52	19.762.534.588,00	13.458.649.246,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	43.008.516.962,00	38.208.801.425,00	43.005.614.667,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	8.819.613.977,00	8.257.889.380,00	8.342.546.500,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	171.168.973,00	168.304.836,00	169.517.636,00
6	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	510.880.000,00	506.640.000,00	506.840.000,00
	Jumlah Belanja Pegawai	276.719.980.829,02	282.596.101.590,00	276.602.633.548,00

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya untuk pengadaan barang dan jasa yang digunakan dalam masa satu tahun anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan. Realisasi Belanja Barang dan Jasa sampai dengan 31 Desember 2022 Rp261.170.526.142,67 atau 94,28% dari anggaran sebesar Rp277.011.228.797,00 yang dialokasikan pada beberapa program/kegiatan. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2021 sebesar Rp227.738.907.643,00 pada TA 2022 meningkat

sebesar Rp33.431.618.499,67 atau 14,68%. Adapun rincian Belanja Barang dan Jasa disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.22
Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Barang Pakai Habis	102.515.797.226,00	99.468.714.599,67	97,03	101.932.678.276,00
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	0,00	29.800.000,00
3	Belanja Jasa Kantor	71.230.162.070,00	63.158.640.772,00	88,67	89.154.733.160,00
4	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	215.850.000,00	211.465.047,00	97,97	121.599.857,00
5	Belanja Sewa Tanah	1.200.000,00	109.091,00	9,09	10.909.091,00
6	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	487.600.000,00	469.350.000,00	96,26	514.290.000,00
7	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	506.117.000,00	416.841.200,00	82,36	1.137.758.365,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	2.155.525.000,00	1.929.448.735,00	89,51	2.271.882.350,00
9	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	46.751.524,00	46.750.000,00	100,00	1.614.989.700,00
10	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	18.081.609.413,00	16.983.256.620,00	93,93	17.484.960.825,00
11	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.931.300.000,00	1.832.534.000,00	94,89	1.031.508.000,00
12	Belanja Pemeliharaan Tanah	0,00	0,00	0,00	573.529.300,00
13	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.704.831.723,00	2.574.213.400,00	95,17	3.879.366.308,00
14	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	990.021.632,00	857.054.156,00	86,57	3.797.286.691,00
15	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	15.118.230.400,00	15.018.828.084,00	99,34	3.345.288.720,00
16	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00
17	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	926.250.000,00	879.050.000,00	94,90	419.600.000,00
18	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	88.150.000,00	87.650.000,00	99,43	390.727.000,00
19	Belanja Barang dan Jasa BLUD	60.011.832.809,00	57.236.620.438,00	95,38	0,00
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa	277.011.228.797,00	261.170.526.142,67	94,28	227.738.907.643,00

3) Belanja Bunga

Belanja Bunga merupakan pengeluaran Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya untuk membayar bunga atas pinjaman daerah. Anggaran dan realisasi Belanja Bunga TA 2022 serta realisasi TA 2021 adalah nihil.

4) Belanja Subsidi

Belanja Subsidi merupakan pengeluaran Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya untuk membantu pembiayaan perusahaan yang menghasilkan produksi/jasa dan hasilnya dapat terjangkau oleh masyarakat. Anggaran dan realisasi Belanja Subsidi TA 2022 dan 2021 adalah nihil.

5) Belanja Hibah

Belanja Hibah adalah pengeluaran Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya kepada badan/lembaga/organisasi serta instansi vertikal dalam rangka meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah dan secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintah daerah. Realisasi Belanja Hibah TA 2022 mencapai sebesar Rp25.459.561.000,00 atau 92,58% dari anggaran sebesar Rp27.498.665.850,00. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah TA 2021 sebesar Rp34.299.744.969,00 pada TA 2022 menurun sebesar Rp8.840.183.969,00 atau 25,77%. Adapun pelaksanaan hibah pada TA 2022 diperuntukkan sebagaimana berikut:

Tabel 5.23
Realisasi Belanja Hibah TA 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	5.377.400.000,00	5.355.728.717,00	99,60	15.389.137.202,00
2	Belanja Hibah Dana BOS	21.546.960.000,00	19.529.526.433,00	90,64	18.271.802.267,00
3	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	574.305.850,00	574.305.850,00	100,00	638.805.500,00
	Jumlah Belanja Hibah	27.498.665.850,00	25.459.561.000,00	92,58	34.299.744.969,00

6) Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat pada umumnya. Realisasi Belanja Bantuan Sosial dalam TA 2022 mencapai sebesar Rp11.081.907.883,00 atau 94,40% dari anggaran sebesar Rp11.739.811.482,00. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2021 sebesar Rp14.477.353.930,00 pada TA 2022 menurun sebesar Rp3.395.446.047,00 atau 23,45%.

Tabel 5.24
Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	7.948.511.482,00	7.695.492.883,00	96,82	7.612.019.800,00
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	930.000.000,00	548.550.000,00	58,98	3.955.128.250,00
3	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	2.861.300.000,00	2.837.865.000,00	99,18	2.910.205.880,00
	Jumlah	11.739.811.482,00	11.081.907.883,00	94,40	14.477.353.930,00

B. Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang digunakan untuk perolehan Aset Tetap atau Aset Lainnya untuk keperluan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Belanja Modal TA 2022 terealisasi sebesar Rp184.239.724.433,95 atau 97,91% dari anggaran sebesar Rp188.169.916.063,00. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal TA 2021 sebesar Rp179.797.222.836,74. Belanja Modal pada TA 2022 meningkat sebesar Rp4.442.501.597,21 atau 2,47%. Adapun rincian Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya TA 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.25
Realisasi Belanja Modal TA 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Tanah	5.000.000.000,00	4.996.809.600,00	99,94	550.845.831,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	30.923.298.254,00	30.099.824.944,00	97,34	32.598.696.862,38
3	Belanja Gedung dan Bangunan	43.810.837.861,00	43.151.915.965,51	98,50	68.212.942.818,25
4	Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan	107.890.398.757,00	105.461.360.624,44	97,75	78.307.685.310,11
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	545.381.191,00	529.813.300,00	97,15	127.052.015,00
6	Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Belanja Modal	188.169.916.063,00	184.239.724.433,95	97,91	179.797.222.836,74

Rekapitulasi realisasi Belanja Modal per Satuan Kerja dapat dilihat di Lampiran 3.2. Adapun rincian Belanja Modal adalah sebagai berikut:

1) Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak. Biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Anggaran sebesar Rp5.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp4.996.809.600,00 atau 99,94% dari nilai anggaran TA 2022.

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin yang mencakup belanja modal pengadaan alat-alat berat, alat-alat bengkel, alat-alat pengolahan pertanian dan perternakan, peralatan kantor dan rumah tangga, alat-alat studio dan komunikasi, alat-alat ukur, alat-alat kedokteran. alat-alat laboratorium, serta peralatan dan perlengkapan olah

raga. Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin TA 2022 mencapai Rp30.099.824.944,00 atau 97,34% dari total anggaran belanja peralatan dan mesin sebesar Rp30.923.298.254,00. Belanja Modal Peralatan Mesin TA 2022 menurun sebesar Rp2.498.871.918,38 atau 7,67% jika dibandingkan dengan TA 2021 sebesar Rp32.598.696.862,38. Berikut ini merupakan rincian Belanja Peralatan dan Mesin TA 2022 dan 2021.

Tabel 5.26
Rekapitulasi Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Bantu	13.200.000,00	13.200.000,00	464.086.350,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	1.133.400.000,00	1.111.043.000,00	1.371.163.000,00
3	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	0,00	0,00	2.000.000,00
4	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	0,00	0,00	2.750.000,00
5	Belanja Modal Alat Ukur	0,00	0,00	356.800,00
6	Belanja Modal Alat Pengolahan	750.939.000,00	749.939.000,00	249.052.000,00
7	Belanja Modal Alat Kantor	140.600.000,00	117.232.400,00	335.950.712,00
8	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.782.675.727,00	1.730.647.792,00	4.555.940.156,38
9	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	485.918.000,00	484.818.000,00	642.312.000,00
10	Belanja Modal Alat Studio	212.575.407,00	208.844.750,00	453.828.122,00
11	Belanja Modal Alat Komunikasi	13.950.000,00	13.950.000,00	221.694.000,00
12	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	0,00	0,00	14.968.875,00
13	Belanja Modal Alat Kedokteran	11.428.604.010,00	11.372.538.131,00	11.428.704.069,00
14	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	6.620.965,00	6.222.500,00	777.228.239,00
15	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	0,00	0,00	6.630.152.000,00
16	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	2.335.000.000,00	2.333.748.000,00	877.080.725,00
17	Belanja Modal Komputer Unit	2.433.981.945,00	2.314.573.566,00	2.587.409.274,00
18	Belanja Modal Peralatan Komputer	361.833.200,00	333.022.250,00	648.617.340,00
19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	9.824.000.000,00	9.310.045.555,00	0,00
20	Belanja Modal Sumur	0,00	0,00	670.519.200,00
21	Belanja Modal Alat Deteksi	0,00	0,00	12.000.000,00
22	Belanja Modal Alat SAR	0,00	0,00	498.685.000,00
23	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	0,00	0,00	79.810.000,00
24	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00	74.389.000,00
	Jumlah	30.923.298.254,00	30.099.824.944,00	32.598.696.862,38

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan yang dipakai dalam kegiatan operasional pemerintahan dan dalam kondisi yang siap pakai antara lain gedung kantor, rumah jabatan, rumah dinas, gudang, monumen, *tower*/menara dan pengadaan konstruksi bangunan ternak. Realisasi belanja Gedung dan Bangunan TA 2022 mencapai Rp43.151.915.965,51 atau 98,5% dari anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp43.810.837.861,00. Belanja Modal Gedung dan

Bangunan TA 2022 menurun sebesar Rp25.061.026.852,74 atau 36,74% dibandingkan dengan TA 2021 sebesar Rp68.212.942.818,25. Berikut ini merupakan rincian Belanja Gedung dan Bangunan TA 2022 dan 2021.

Tabel 5.27
Rekapitulasi Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	28.000.000,00	27.963.000,00	7.303.226.468,55
2	Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi	0,00	0,00	4.795.716.803,69
3	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	1.222.650.000,00	1.222.635.000,00	0,00
4	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	18.211.858.761,00	17.983.796.721,99	5.331.233.424,00
5	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	819.400.000,00	815.370.000,00	0,00
6	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.339.312.500,00	1.209.016.048,00	19.990.000,00
7	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	8.156.362.750,00	8.129.704.163,00	20.522.362.302,00
8	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	0,00	0,00	1.593.791.900,00
9	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	1.000.000.000,00	966.721.365,00	1.030.408.468,55
10	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	188.100.000,00	188.090.000,00	2.682.484.180,00
11	Belanja Modal Bangunan Industri	2.048.750.000,00	1.962.132.269,50	0,00
12	Belanja Modal Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	0,00	0,00	100.000.000,00
13	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	0,00	0,00	1.517.930.297,00
14	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	980.504.000,00
15	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	317.372.250,00	317.371.250,00	15.513.294.803,00
16	Belanja Modal Bangunan Parkir	140.000.000,00	139.800.000,00	47.857.831,00
17	Belanja Modal Bangunan Gedung Pabrik	0,00	0,00	199.799.000,00
18	Belanja Modal Taman	2.865.327.100,00	2.835.198.279,20	1.029.037.035,00
19	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	2.471.939.000,00	2.462.142.482,82	434.791.200,00
20	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	200.000.000,00	199.519.000,00	199.292.000,00
21	Belanja Modal Tugu	35.000.000,00	0,00	0,00
22	Belanja Modal Pagar	4.616.765.500,00	4.542.756.386,00	4.911.223.105,46
23	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	150.000.000,00	149.700.000,00	0,00
	Jumlah	43.810.837.861,00	43.151.915.965,51	68.212.942.818,25

4) Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan mencakup biaya yang dikeluarkan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi yang siap pakai. Realisasi Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan TA 2022 mencapai sebesar Rp105.461.360.624,44 atau 97,75% dari anggaran sebesar Rp107.890.398.757,00. Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan TA 2022 meningkat sebesar Rp27.153.675.314,33 atau 34,68% dibandingkan dengan TA 2021 sebesar Rp78.307.685.310,11. Berikut ini merupakan rincian Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan TA 2022 dan 2021.

Tabel 5.28

**Rekapitulasi Realisasi Belanja Modal Jaringan Irigasi dan Jaringan
TA 2022 dan 2021**

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Modal Jalan	57.901.671.093,00	57.021.561.493,80	46.385.961.061,00
1.1	Belanja Modal Jalan Kabupaten	46.557.646.093,00	45.888.254.396,80	28.481.649.582,00
1.2	Belanja Modal Jalan Desa	10.759.500.000,00	10.552.408.125,00	14.112.096.526,00
1.3	Belanja Modal Jalan Lainnya	584.525.000,00	580.898.972,00	3.792.214.953,00
2	Belanja Modal Jembatan	15.098.746.600,00	14.327.567.305,00	5.256.761.900,00
2.1	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	14.468.746.600,00	13.698.801.939,00	4.771.833.300,00
2.2	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa	430.000.000,00	429.221.966,00	484.928.600,00
2.3	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyebrangan	200.000.000,00	199.543.400,00	0,00
3	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	17.663.265.214,00	17.443.480.179,58	13.543.936.560,88
3.1	Belanja Modal Bangunan Waduk Irigasi	190.000.000,00	189.000.000,00	360.000.000,00
3.2	Belanja Modal Bangunan Sawah Irigasi	4.167.750.000,00	4.109.135.867,53	4.162.460.673,59
3.3	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	13.305.515.214,00	13.145.344.312,05	9.021.475.887,29
4	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	0,00	0,00	917.655.000,00
4.1	Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut	0,00	0,00	917.655.000,00
5	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	5.267.026.000,00	4.903.107.707,06	2.289.953.657,93
5.1	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	1.024.250.000,00	986.752.099,74	0,00
5.2	Belanja Modal Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai	4.242.776.000,00	3.916.355.607,32	2.190.253.657,93
5.3	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	0,00	0,00	99.700.000,00
6	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	731.250.000,00	727.500.000,00	493.426.000,00
6.1	Belanja Modal Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air	0,00	0,00	493.426.000,00
6.2	Belanja Modal Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah	731.250.000,00	727.500.000,00	0,00
7	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	2.450.000.000,00	2.450.000.000,00	3.015.032.904,30
7.1	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	2.450.000.000,00	2.450.000.000,00	2.076.000.000,00
7.2	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	0,00	0,00	939.032.904,30
8	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	1.327.500.000,00	1.323.666.000,00	1.842.192.700,00
8.1	Belanja Modal Instalasi Air Permukaan	0,00	0,00	540.000.000,00
8.2	Belanja Modal Instalasi Air Tanah Dalam	1.185.000.000,00	1.181.166.000,00	285.000.000,00
8.3	Belanja Modal Instalasi Air Tanah Dangkal	142.500.000,00	142.500.000,00	
8.4	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00	0,00	1.017.192.700,00
9	Belanja Modal Jaringan Air Minum	7.450.939.850,00	7.264.477.939,00	4.562.765.526,00
9.1	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	7.450.939.850,00	7.264.477.939,00	4.562.765.526,00
	Jumlah 1 s/d 10	107.890.398.757,00	105.461.360.624,44	78.307.685.310,11

5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya mencakup biaya yang dikeluarkan untuk aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan kedalam aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2022 mencapai sebesar Rp529.813.300,00 atau 97,15% dari total anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp545.381.191,00. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya meningkat sebesar Rp402.761.285,00 atau 317,01% jika dibandingkan dengan TA

2021 sebesar Rp127.052.015,00. Berikut ini merupakan rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2022 dan 2021.

Tabel 5.29
Rekapitulasi Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	371.000.000,00	360.842.100,00	90.052.015,00
1.1	Belanja Modal Buku Umum	71.000.000,00	60.846.000,00	90.052.015,00
1.2	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	300.000.000,00	299.996.100,00	0,00
2	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian Kebudayaan	32.000.000,00	31.900.000,00	0,00
2.1	Belanja Modal Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	32.000.000,00	31.900.000,00	0,00
3	Belanja Modal Tanda Penghargaan	15.000.000,00	14.994.000,00	0,00
3.1	Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Lainnya	15.000.000,00	14.994.000,00	0,00
4	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	0,00	0,00	15.000.000,00
4.1	Belanja Modal Audio Visual	0,00	0,00	15.000.000,00
5	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	113.214.000,00	107.914.000,00	22.000.000,00
5.1	Belanja Modal <i>Software</i>	113.214.000,00	107.914.000,00	22.000.000,00
6	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	14.167.191,00	14.163.200,00	0,00
6.1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	14.167.191,00	14.163.200,00	0,00
	Jumlah 1 s/d 4	545.381.191,00	529.813.300,00	127.052.015,00

6) Belanja Aset Lainnya

Belanja Aset Lainnya mencakup biaya yang dikeluarkan untuk aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan kedalam aset tetap di atas. yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Pada TA 2022 Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya tidak mengalokasikan anggaran untuk belanja aset tersebut.

C. Belanja Tak Terduga

Realisasi Belanja Tak Terduga TA 2022 sebesar Rp706.903.046,00 atau 51,83% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.363.876.132,00. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Tak Terduga TA 2021 sebesar Rp4.053.589.338,00 pada TA 2022 terjadi penurunan sebesar Rp3.346.686.292,00 atau 82,56%. Berdasarkan penggunaannya Belanja Tak Terduga TA 2022 terdiri dari:

- 1) Pengembalian ke rekening Bendahara Umum Negara (BUN) yang merupakan Sisa Dana Bos Tahun 2011 sebesar Rp250.671.046,00.
- 2) Penanganan kebencanaan di TA 2022 sebesar Rp456.232.000,00.

D. Belanja Transfer

Belanja Transfer Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya TA 2022 merupakan belanja Alokasi Dana Desa ADD dari APBN dan APBK. Realisasi Belanja Transfer TA 2022 sebesar Rp211.270.835.820,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp211.270.835.820,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.30
Realisasi Belanja Transfer TA 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Transfer Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Mukim	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja ADD dari APBN	151.746.896.000,00	151.746.896.000,00	100,00	165.862.465.000,00
3	Belanja ADD Dari APBK	59.523.939.820,00	59.523.939.820,00	100,00	49.004.907.113,00
	TOTAL A+B	211.270.835.820,00	211.270.835.820,00	100,00	214.867.372.113,00

Realisasi belanja Transfer TA 2021 menurun sebesar Rp3.596.536.293,00 atau 1,67% dari TA 2021 sebesar Rp214.867.372.113,00.

5.1.3 Surplus/Defisit

Surplus/Defisit LRA diperoleh dari perhitungan antara total pendapatan dikurang dengan jumlah belanja dan jumlah transfer. Berdasarkan hasil realisasi total Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp993.454.968.096,02 dikurangi dengan realisasi total Belanja Daerah sebesar Rp976.525.559.915,62 pada Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya mengalami Surplus sebesar Rp16.929.408.180,40.

Tabel 5.31
Perhitungan Surplus/Defisit

No	Uraian	Nilai
1	Pendapatan Daerah	993.454.968.096,02
2	Belanja Daerah	976.525.559.915,62
	Surplus/(Defisit) (1-2)	16.929.408.180,40

5.1.4 Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya baik penerimaan maupun pengeluaran yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp29.197.106.246,13 yaitu berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran SiLPA tahun lalu. Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp1.100.000.000,00 sebagai tambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya pada PT Bank Aceh Syariah pada TA 2022, maka diperoleh Pembiayaan Netto sebesar Rp28.097.106.246,13

yang merupakan hasil perhitungan penerimaan pembiayaan dikurangi dengan jumlah pengeluaran pembiayaan.

A. Penerimaan Pembiayaan

Realisasi Penerimaan pembiayaan berasal dari Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Lalu SiLPA TA 2022 sebesar Rp29.197.106.246,13 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp29.197.106.246,13, menurun sebesar Rp6.709.786.834,29 atau 18,69% dibanding TA 2021 sebesar Rp35.906.893.080,42.

B. Pengeluaran Pembiayaan

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan berasal dari Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Lalu SiLPA TA 2022 sebesar Rp1.100.000.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp1.100.000.000,00, meningkat sebesar Rp100.000.000,00 atau 10% dibanding TA 2021 sebesar Rp1.000.000.000,00 dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.32
Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
1	Penyertaan Modal Investasi Pemerintah Daerah	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	1.000.000.000,00
2	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	1.000.000.000,00

Penyertaan Modal sebesar Rp1.100.000.000,00 merupakan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya pada PT Bank Aceh Syariah sebesar Rp1.000.000.000,00 dan penyertaan modal pada PDAM Tirta Krueng Meureudu sebesar Rp100.000.000,00.

5.1.5 Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran SiLPA

Sisa Perhitungan Anggaran merupakan Sisa Lebih Pembiayaan APBK SiLPA atau Sisa Kurang Pembiayaan APBK SiKPA yang menunjukkan kelebihan atau kekurangan pendapatan dan penerimaan dibanding belanja dan pengeluaran daerah sebagai berikut:

Tabel 5.33
Perhitungan SiLPA TA 2022 dan 2021

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	Pendapatan	965.677.208.726,89	993.454.968.096,02	102,87	946.127.037.543,45
2	Belanja	782.503.479.153,02	765.224.322.095,62	97,79	736.969.452.264,74
3	Transfer	211.270.835.820,00	211.270.835.820,00	100,00	214.867.372.113,00
4	Surplus/Defisit LRA	(28.097.106.246,13)	16.929.408.180,40	60,25	(5.709.786.834,29)

No	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
	=1-2-3				
5	Penerimaan Pembiayaan	29.197.106.246,13	29.197.106.246,13	100,00	35.906.893.080,42
6	Pengeluaran Pembiayaan	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00
7	Pembiayaan Netto = 5-6	28.097.106.246,13	28.097.106.246,13	100,00	34.906.893.080,42
8	SiLPA =4+7	0,00	45.026.514.426,53		29.197.106.246,13

SiLPA merupakan hasil perhitungan Surplus/Defisit LRA ditambah dengan pembiayaan netto. Dengan demikian diperoleh SiLPA TA 2022 Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya sebesar Rp45.026.514.426,53. SiLPA Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya meningkat sebesar Rp15.829.408.180,40 atau 54,22% dibandingkan dengan SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp29.197.106.246,13.

5.2 Penjelasan atas Pos-Pos dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan selisih antara perhitungan Surplus/Defisit dengan perhitungan Pembiayaan yang terjadi pada LRA TA 2022.

Tabel 5.34
LPSAL TA 2022 dan 2021

No	URAIAN	31 Des 2022 (Rp)	31 Des 2021 (Rp)
1	SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL	29.197.106.246,13	35.906.893.080,42
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	29.197.106.246,13	35.906.893.080,42
3	Sub Total 1 – 2	0,00	0,00
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran SiLPA/SiKPA	45.026.514.426,53	29.197.106.246,13
5	Sub Total 3+4	45.026.514.426,53	29.197.106.246,13
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	-	0,00
7	Lain-lain		
8	SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR 5 + 6 + 7	45.026.514.426,53	29.197.106.246,13

Realisasi Perubahan SAL Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya per 31 Desember 2022 sebesar Rp45.026.514.426,53. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran SiLPA Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Rp29.197.106.246,13 yang berupa kas pada rekening giro yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah BUD, Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama FKTP, Kas Dana BOS, Kas Bendahara Penerimaan TA 2022 berikut ini:

Tabel 5.35
Rincian LPSAL TA 2022 dan 2021

No.	Nama Bank	No. Rekening	Nama Rekening	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
A	Saldo Uang Tunai, Bank, Pos dan Deposito per 31 Desember 2022				
1	Bank Aceh	085.01.02.570046-3	RKUD Kabupaten Pidie Jaya	42.225.141.021,30	28.028.583.941,78
2	Bank Aceh	085.01.02.580008-0	Bendahara PAD Kab.Pidie Jaya	537.600,00	0,00
3	Bank Aceh	08501.02.610001-0	Rekening BPHTB Kab.Pidie Jaya	0,00	0,00
4	Bank Aceh	085.01.02.590109-2	Rekening Zakat	0,00	0,00
5	Bank Aceh	085.01.02.640001-3	Rekening PBBP2	0,00	0,00

No.	Nama Bank	No. Rekening	Nama Rekening	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
	Jumlah Kas di Bank			42.225.678.621,30	28.028.583.941,78
B	Kas di FKTP				
1	Bank Aceh	08601.02.640007-8	Bandar Baru	0,00	0,00
2	Bank Aceh	08601.02.640006-6	Cubo	646,00	108,00
3	Bank Aceh	08601.02.640008-1	Panteraja	1.679,00	2.799,00
4	Bank Aceh	08501.02.640006-2	Trienggadeng	0,00	0,00
5	Bank Aceh	08501.02.640004-9	Meureudu	0,00	8.398,00
6	Bank Aceh	085.01.02.640003-7	Meurah Dua	6.446,00	13.813,00
7	Bank Aceh	085.01.02.640008-6	Ulim	1.743,00	10.198,00
8	Bank Aceh	08201.02.640004-8	Jangka Buya	523,00	556,00
9	Bank Aceh	08201.02.640006-0	Bandar Dua	23.316,00	42.730,00
10	Bank Aceh	08201.02.640003-6	Kuta Krueng	0,00	972,00
11	Bank Aceh	08201.02.640005-1	Blang Kuta	0,00	0,00
12	Bank Aceh	08601.02.000005-3	Sp.4 Nyong	436,00	6.183.253,00
	Jumlah Kas di FKTP			34.789,00	6.262.827,00
C	Kas Dana BOS			0,00	340.147.033,00
D	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran			0,00	0,00
E	Kas di Bendahara Penerimaan			171.488,34	822.112.444,35
F	Kas di BLUD			2.800.629.527,89	0,00
Jumlah A + B + C+ D				45.026.514.426,53	29.197.106.246,13

Dalam bagian SiLPA TA 2022 sebesar Rp45.026.514.426,53 terdapat bagian sisa Kas yang tercatat pada Kas di Kasda dan di Setara Kas yang peruntukannya terbatas dan mengikat yaitu terdiri dari:

Tabel 5.36
Sisa Kas yang Peruntukannya Bersifat Terbatas dan Mengikat

No	Uraian	Sisa di Kas Daerah/Setara Kas Per 31 Desember 2022
1	Dana Alokasi Khusus Fisik 2021	250.400.510,00
2	Dana Alokasi Khusus Fisik 2022	30.083.509,00
3	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	4.739.500.494,00
4	Dana Insentif Daerah	41.742.935,00
5	Dana Otsus	1.673.865.520,56
6	Hibah BNPB	28.431.969.000,00
7	Sisa Kas Dana BOS	0,00
8	Sisa Kas Dana BLUD	2.800.629.527,89
9	Sisa Kas FKTP	34.789,00
10	Zakat	150.577.088,00
11	Infaq	473.655.883,00
	JUMLAH	38.592.459.256,45

5.3 Penjelasan atas Pos-Pos dalam Neraca

5.3.1 Aset

Aset adalah merupakan sumber daya ekonomis yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dengan satuan uang yang terdiri dari Aset Lancar dan Aset Non Lancar.

A. Aset Lancar

Diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai dalam waktu satu tahun anggaran.

Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya terdiri dari:

Tabel 5.37
Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya

No	Uraian	Per 31 Des 2022 (Rp)	Per 31 Des 2021 (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	42.225.678.621,30	28.028.583.941,78
2	Kas di Bendahara Penerimaan	171.488,34	822.112.444,35
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
3	Kas di BLUD	2.800.629.527,89	0,00
4	Kas Dana BOS	0,00	340.147.033,00
5	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	34.789,00	6.262.827,00
6	Kas Lainnya	0,00	64.707.342,00
7	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
8	Piutang Pajak	8.113.793.785,00	7.580.073.732,00
9	Piutang Retribusi	0,00	21.033.600,00
10	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00
11	Piutang Transfer Antar Daerah	1.965.482.058,00	4.423.322.609,00
12	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	17.484.523.506,80	3.189.293.012,78
13	Penyisihan Piutang	(9.071.968.295,61)	(8.334.319.558,22)
14	Beban Dibayar Dimuka	68.439.670,68	80.583.902,17
15	Persediaan	14.447.036.528,46	17.387.123.423,16
	Jumlah Aset Lancar	78.033.821.679,86	53.608.924.309,02

1) Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp42.225.678.621,30 meningkat sebesar Rp14.197.094.679,52 atau 50,65% jika dibandingkan dengan nilai Kas di Kas Daerah pada 31 Desember 2021 sebesar Rp28.028.583.941,78. Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas yang terdapat pada Rekening Bendahara Umum Daerah dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp42.225.678.621,30.

Tabel 5.38
Rincian Kas di Kas Daerah TA 2022 dan 2021

No.	Nama Bank	No. Rekening	Nama Rekening	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
A	Saldo Uang Tunai, Bank, Pos dan Deposito per 31 Desember 2022 dan 2021				
1	Bank Aceh	085.01.02.570046-3	RKUD Kabupaten Pidie Jaya	42.225.141.021,30	28.028.583.941,78
2	Bank Aceh	085.01.02.580008-0	Bendahara PAD Kab.Pidie Jaya	537.600,00	0,00
3	Bank Aceh	08501.02.610001-0	Rekening BPHTB Kab.Pidie Jaya	0,00	0,00
4	Bank Aceh	085.01.02.590109-2	Rekening Zakat	0,00	0,00
5	Bank Aceh	085.01.02.640001-3	Rekening PBBP2	0,00	0,00
	Jumlah Kas di Bank			42.225.678.621,30	28.028.583.941,78

Nilai Kas di Kasda pada Tahun 2022 merupakan akumulasi Kas pada Rekening RKUD Kabupaten Pidie Jaya sebesar Rp42.225.141.021,30 ditambah Kas Rekening Bendahara PAD Kab Pidie Jaya sebesar Rp537.600,00.

2) Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp171.488,34 merupakan Kas yang berada pada Bendahara Penerimaan Baitul Mal.

3) Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah nihil.

4) Kas di BLUD

Saldo kas di BLUD merupakan saldo kas yang terdapat pada BLUD RSUD Pidie Jaya per 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp2.800.629.527,89.

5) Kas Dana BOS

Kas Dana BOS adalah kas pada Bendahara Dana BOS di 115 Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri yang berada di Kabupaten Pidie Jaya adalah nihil. Untuk penjelasan atas perhitungan Kas Dana BOS dapat dilihat pada Lampiran 1.

6) Kas Dana Kapitasi pada FKTP

Merupakan Kas di Bendahara Kapitasi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) pada 12 puskesmas di wilayah Kabupaten Pidie Jaya yaitu sebesar Rp34.789,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.39
Rincian Kas Dana Kapitasi pada FKTP per 31 Desember 2022

No	Nama Bank	Nomor Rekening	Nama Rekening	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
1.	Bank Aceh	08601.02.640007-8	Bandar Baru	0,00	0,00
2.	Bank Aceh	08601.02.640006-6	Cubo	646,00	108,00
3.	Bank Aceh	08601.02.640008-1	Panteraja	1.679,00	2.799,00
4.	Bank Aceh	08501.02.640006-2	Trienggadeng	0,00	0,00
5.	Bank Aceh	08501.02.640004-9	Meureudu	0,00	8.398,00
6.	Bank Aceh	085.01.02.640003-7	Meurah Dua	6.446,00	13.813,00
7.	Bank Aceh	085.01.02.640008-6	Ulim	1.743,00	10.198,00
8.	Bank Aceh	08201.02.640004-8	Jangka Buya	523,00	556,00
9.	Bank Aceh	08201.02.640006-0	Bandar Dua	23.316,00	42.730,00
10.	Bank Aceh	08201.02.640003-6	Kuta Krueng	0,00	972,00
11.	Bank Aceh	08201.02.640005-1	Blang Kuta	0,00	0,00
12.	Bank Aceh	08601.02.000005-3	Sp.4 Nyong	436,00	6.183.253,00
Jumlah Kas di FKTP				34.789,00	6.262.827,00

7) Kas Lainnya

Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 sebesar adalah nihil.

8) Investasi Jangka Pendek

Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya tidak memiliki saldo Investasi Jangka Pendek sampai dengan TA 2022 dan 2021 adalah nihil.

9) Piutang Pajak

Piutang Pajak Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya per 31 Desember 2022 sebesar Rp8.113.793.785,00 meningkat sebesar Rp533.720.053,00 atau 7,04% dibandingkan dengan nilai Piutang Pajak per 31 Desember 2021 sebesar Rp7.580.073.732,00. Adapun rincian mutasi piutang pajak dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.40
Mutasi Piutang Pajak per 31 Desember 2022

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2021 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)
			Ketetapan 2022	Pelunasan Pokok Piutang	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Piutang PBBP2	7.580.073.732,00	1.248.065.555,00	714.345.502,00	8.113.793.785
	Jumlah	7.580.073.732,00	1.248.065.555,00	715.099.180,00	8.113.793.785

Berdasarkan umur piutangnya, Piutang Pajak Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 5.41
Klasifikasi Piutang Pajak Berdasarkan
Umur dan Kualitas Piutang

No	Umur Piutang	Kualitas Piutang	Piutang PBB
1	0 s/d 1 Tahun	Lancar	670.934.200
2	>1 s/d 2 Tahun	Kurang Lancar	554.157.835
3	>2 Tahun s/d 5 Tahun	Diragukan	1.648.853.517
4	> 5 Tahun	Macet	5.239.848.233
	TOTAL		8.113.793.785

Pengakuan piutang Pajak PBB Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada Lampiran 4.1 dan Lampiran 4.2.

10) Piutang Retribusi

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2022 Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya nihil, menurun sebesar Rp21.033.600,00 dibandingkan dengan nilai Piutang Retribusi per 31 Desember 2021 sebesar Rp21.033.600,00. Penurunan tersebut disebabkan oleh peralihan pengelolaan Objek Retribusi ke Pemerintah Provinsi.

11) Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Saldo Piutang Pendapatan Bagi Hasil Pusat Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2022 dan 2021 adalah nihil.

12) Piutang Transfer Antar Daerah

Piutang Pendapatan Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.965.482.058,00 merupakan Piutang Pajak Rokok dari Provinsi sesuai dengan Kepgub Aceh No:903/165/2022.

13) Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp17.484.869.091,42 meningkat sebesar Rp14.295.576.078,64 atau 448,24% dibandingkan dengan nilai Piutang Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.189.293.012,78. Adapun rincian mutasi piutang lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.42
Mutasi Piutang Lainnya per 31 Desember 2022

No	Uraian	Saldo Awal (Rp)	Penambahan Ketetapan 2022	Pengurangan Pelunasan Piutang	Saldo Akhir (Rp)
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Piutang denda PBB P2	3.189.293.012,78	312.704.073,02	66.417.707,00	3.435.579.378,80
2	Piutang BLUD	0,00	14.048.944.128,00	0,00	14.048.944.128,00
3	Remunerasi TDF-TKD	0,00	345.584,62	0,00	345.584,62
	Jumlah	3.189.293.012,78	14.361.993.789,64	66.417.707,00	17.484.869.091,42

Peningkatan Piutang Lainnya di tahun 2022 yang sangat signifikan mencapai 448,23% dikarenakan piutang BLUD sebesar Rp14.048.944.128,00. Pada tahun 2022 terdapat Piutang Lainnya – Remunerasi TDF-TKD sebesar Rp345.584,62 sesuai dengan Surat Nomor S-46/PK/PK.2/2023 tentang Rincian Penyaluran DBH Secara Non Tunai melalui TDF Tahun 2022.

14) Penyisihan Piutang

Nilai Penyisihan Piutang per 31 Desember 2022 sebesar Rp-9.071.968.295,61 meningkat sebesar Rp737.648.737,39 atau meningkat sebesar 8,85% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp8.334.319.558,22. Adapun rincian Penyisihan Piutang per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.43
Penyisihan Piutang Tahun 2022

URAIAN	PENYISIHAN PIUTANG PAJAK BERDASARKAN PENGGOLONGAN PIUTANG				JUMLAH
	LANCAR	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET	
	(0-1 tahun)	(+1-2 tahun)	(+2-5 tahun)	(+ 5 tahun)	
	0,5%	10%	50%	100%	
Piutang PBB	3.354.671,00	55.415.783,50	824.426.758,50	5.236.493.562,00	6.119.690.775,00
Piutang Denda PBB P2	147.377,45	15.093.031,88	388.233.802,58	2.478.558.588,40	2.882.032.800,30
Piutang Pendapatan BLUD	70.244.720,31	0,00	0,00	0,00	70.244.720,31
JUMLAH	73.746.768,76	70.508.815,38	1.212.660.561,08	7.715.052.150,40	9.071.968.295,61

15) Beban Dibayar Dimuka

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp68.439.670,68 (Lampiran 15). Adapun rincian Belanja Dibayar Dimuka terdiri dari:

- a. Pembayaran sewa gudang obat pada RSUD yang manfaatnya belum habis per 31 Desember 2022 sebesar Rp18.719.112,33;
- b. Pembayaran premi asuransi kendaraan pimpinan pada Sekretariat DPRK yang manfaatnya belum habis per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.508.836,49; dan
- c. Pembayaran premi asuransi kendaraan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta pejabat lainnya pada Sekretariat Daerah yang manfaatnya belum habis per 31 Desember 2022 sebesar Rp37.946.694,54.
- d. Pembayaran sewa ruko untuk Kantor LPTQ pada Dinas Syariat Islam yang manfaatnya belum habis per 31 Desember 2022 sebesar Rp8.265.027,32.

16) Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp14.447.036.528,46 menurun sebesar Rp2.940.086.894,70 atau sebesar 16,91% dari tahun sebelumnya sebesar Rp17.387.123.423,16 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.44
Rekapitulasi Persediaan Berdasarkan Kelompok Barang

No	Uraian	per 31 Des 2022 (Rp)	per 31 Des 2021 (Rp)
1	Persediaan Alat Tulis Kantor	65.667.666,00	126.773.702,00
2	Persediaan Alat Kebersihan	0,00	0,00
3	Persediaan Alat Listrik	847.500,00	2.050.000,00
4	Persediaan Cetak dan Penggandaan	167.892.500,00	208.204.000,00

5	Persediaan Bahan Kimia	366.333.173,86	199.570.000,30
6	Persediaan Obat-obatan	4.980.806.458,48	7.164.612.783,33
7	Isi Tabung Gas/Persediaan Oksigen	3.400.000,00	10.880.000,00
8	Barang yang akan diserahkan ke Pihak Ketiga/ (Alat Penyandang Cacat)	211.273.625,00	542.119.375,00
9	Persediaan Bantuan Tanggap Darurat/Bencana	1.364.895.264,00	2.837.277.746,00
10	Bahan Lainnya	7.285.920.341,12	6.295.635.816,53
	Jumlah	14.447.036.528,46	17.387.123.423,16

Rincian Persediaan per 31 Desember 2022 pada SKPK dapat dilihat pada Lampiran 2.

Persediaan Bahan lainnya sebagaimana tabel diatas terdiri dari persediaan bahan pakai medis dan alat-alat KB. Selain persediaan tersebut pada tabel di atas, terdapat persediaan Vaksin Polio sebanyak 6250 Dosis yang berasal dari hibah Pemerintah Aceh yang tidak dilengkapi dengan harga satuan. sehingga merupakan bagian yang tepisahkan dari *stock opname* Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana.

Dari nilai persediaan bantuan tanggap darurat/bencana sebesar Rp1.364.895.264,00 terdapat persediaan yang disimpan dan dikelola oleh pihak ketiga sebesar Rp118.948.500,00 dengan rincian berikut:

Tabel 5.45
Persediaan Bantuan Tanggap Darurat/Bencana pada Dinas Sosial, PP dan PA yang Disimpan oleh Pihak Ketiga/Toko

No	Nama Barang	Merek	Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Keterangan
1	Beras	Lokal	51	zak	195.000,00	9.945.000,00	Stok Bencana
2	Beras 2022	Lokal	20	zak	219.000,00	4.380.000,00	Stok Bencana
3	Telur 2022	Ras	40	Papan	65.000,00	2.600.000,00	Stok Bencana
4	Telur 2021	Ras	170	Papan	51.000,00	8.670.000,00	Stok Bencana
5	Mie Instan 2022	Sarimi	47	Kotak	113.000,00	5.311.000,00	Stok Bencana
6	Mie Instan	Sarimi	225	Kotak	61.000,00	13.725.000,00	Stok Bencana
7	Mie Instan 2021	Sarimi	275	Kotak	61.000,00	16.775.000,00	Stok Bencana
8	Gula Pasir	Kristal	207	Kg	18.000,00	3.726.000,00	Stok Bencana
9	Minyak Goreng	Bimoli	275	Liter	19.500,00	5.362.500,00	Stok Bencana
10	Kain Sarung	Wadimor	31	Pcs	65.000,00	2.015.000,00	Stok Bencana
11	Mukena	Bali	71	Pcs	142.000,00	10.082.000,00	Stok Bencana
12	Sajadah	Al-Arabiya	46	Pcs	78.000,00	3.588.000,00	Stok Bencana
13	Baju Coco	Syammil	12	Pcs	130.000,00	1.560.000,00	Stok Bencana
14	Baju Daster	Kanjeng	3	Pcs	97.500,00	292.500,00	Stok Bencana
15	Telur	Ras	617	Papan	49.500,00	30.541.500,00	Paket Kematian

16	Gula Pasir	Kristal	25	Kg	15.000,00	375.000,00	Paket Kematian
TOTAL						118.948.500,00	

B. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang yaitu investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah untuk pelayanan kepada masyarakat, dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi yang terdiri dari:

1) Investasi Non Permanen

Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya tidak memiliki saldo Investasi Non Permanen sampai dengan 31 Desember 2022.

2) Investasi Permanen

Investasi Permanen merupakan penyertaan modal pemerintah kepada lembaga keuangan dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Penyertaan modal tersebut terdiri dari investasi pada PT Bank Aceh Syariah dan PDAM Tirta Krueng Meureudu. Investasi Permanen per 31 Desember 2022 sebesar Rp40.087.946.086,00 merupakan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya pada PT Bank Aceh Syariah sebesar Rp15.000.000.000,00 ditambah dengan penyertaan modal pada PDAM Tirta Krueng Meureudu sebesar Rp25.087.946.086,00. Terdapat penurunan nilai investasi pada PDAM Tirta Krueng Meureudu sebesar Rp3.592.611.556,00 dikarenakan PDAM Tirta Krueng Meureudu mengalami kerugian.

Rincian penyertaan modal pemerintah daerah tersebut adalah sebagai berikut:

a) Penyertaan Modal pada PT Bank Aceh Syariah

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya pada PT Bank Aceh Syariah per 31 Desember 2022 berupa investasi dalam bentuk saham sebesar Rp15.000.000.000,00. Nilai penyertaan modal tersebut bertambah sebesar Rp1.000.000.000,00 dari nilai penyertaan modal per 31 Desember 2021 sebesar Rp14.000.000.000,00. Penilaian penyertaan modal pada Bank Aceh dicatat dengan menggunakan metode biaya (*cost method*) dengan persentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya pada PT Bank Aceh Syariah sebesar 0,36% dari total modal dasar PT Bank Aceh Syariah sesuai dengan sertifikat saham kolektif.

Adapun penyertaan modal pada PT Bank Aceh Syariah sesuai dengan sertifikat saham kolektif dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.46
Rincian Penyertaan Modal ke PT Bank Aceh Syariah

No	Tahun Penyerataan Modal	No. Surat Kolektif Saham	No. Seri Saham	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Penyertaan (Rp)
1	2008	X-BPDIA/001/2008	A 0071594583 – 0071619582	25.000	250.000.000,00
2	2009	X-BPDIA/002/2009	A 0073700714 – 0073800713	100.000	1.000.000.000,00
3	2010	X-BA/003/2011	A 0084918794 – 0085018793	100.000	1.000.000.000,00
4	2011	X-BA/004/2012	A 0085768794 – 0085868793	100.000	1.000.000.000,00
5	2012	X-BA/005/2013	A 0085968794 – 0086143793	175.000	1.750.000.000,00
6	2013	X-BA/006/2014	A 0086688138 – 0086788137	100.000	1.000.000.000,00
7	2014	X-BA/007/2015	88.983.138 - 89.083.137	100.000	1.000.000.000,00
8	2015	X-BA/008/2016	100.578.622 - 100.678.621	100.000	1.000.000.000,00
9	2016	X-BA/009/2017	102.525.994 - 102.625.993	100.000	1.000.000.000,00
10	2017	X-BA/010/2018	103.885.994 - 103.985.993	100.000	1.000.000.000,00
11	2018	X-BA/011/2019	106.029.536 - 106.129.535	100.000	1.000.000.000,00
12	2019	X-BA/012/2020	107.745.318 - 107.854.317	100.000	1.000.000.000,00
13	2020	X-BA/013/2021	109.998.744 – 110.098.743	100.000	1.000.000.000,00
14	2021	X-BA/014/2022	131.985.244 – 132.085.243	100.000	1.000.000.000,00
15	2022	-	-	100.000	1.000.000.000,00
	Jumlah			1.500.000	15.000.000.000,00

Dari tabel di atas dapat dilihat rincian penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya per tahun. Untuk penyertaan modal Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya belum menerima surat kolektif saham.

b) Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Krueng Meureudu

Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya mendirikan PDAM Tirta Krueng Meureudu yang ditandai dengan diterbitkannya Qanun Nomor 5 Tahun 2010 tentang PDAM Kabupaten Pidie Jaya. Dalam kurun waktu sampai dengan tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya telah menyerahkan aset untuk menunjang kegiatan operasional PDAM sebesar Rp53.118.893.775,00 yang terdiri dari aset milik Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya sebesar Rp15.744.225.000,00 dan hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp37.274.668.775,00.

Namun atas penyerahan aset tersebut baru dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima yang diterbitkan pada Tahun 2015 untuk penyerahan aset milik Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, Tahun 2020

dan 2019 untuk aset hibah dari Pemerintah Pusat, akan tetapi sampai dengan TA 2020 Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya belum melengkapi penyerahan aset tersebut dengan Peraturan Daerah/Qanun mengenai penyertaan modal pada PDAM Tirta Krueng Meureudu. Berikut ini merupakan rincian Berita Acara Serah Terima Aset:

- (1) Berita Acara Serah Terima Nomor 690/2943/BAST/2015 tanggal 3 Juni 2015, Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya menyerahkan aset sebesar Rp15.744.225.000,00 kepada PDAM Tirta Krueng Meureudu dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.47
Rincian Penyerahan Aset Pemerintah Pidie Jaya kepada PDAM Tirta Krueng Meureudu

No.	Uraian	Sumber Dana	Tahun Perolehan	Lokasi	Nilai (Rp)
1	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Blang Carl-Ulee Gle	APBK	2010	Ulim	2.863.868.000,00
2	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Jalan rel Trienggadeng-Meureudu-Pangwa	APBK	2010	Meureudu	1.418.983.000,00
3	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Ulee Gle-kota	APBK	2010	Bandar Dua	1.274.306.000,00
4	Pengadaan dan Pemasangan Sambungan rumah Komunal IKK Ulim dan Pateraja	APBK	2010	Ulim	1.421.250.000,00
5	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Bunot Kec. Meureudu	APBK	2010	Meureudu	1.424.565.000,00
6	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Tersier Desa Tanjong-Jurong-Jurong Teungoh	APBK	2010	Jangka Buya	433.314.000,00
7	Connecting Pipa 75mm-250mm	APBK	2010	Meureudu	63.733.000,00
8	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Air Minum Kec. Meureudu	APBK	2010	Meureudu	64.469.000,00
9	Pembangunan Instalasi Air Bersih Kec.Panteraja	APBK	2010	Panteraja	667.415.000,00
10	Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum SRM Desa Jurong Minje Desa Jurong Tengoh dan Desa Ara Kec. Jangka Buya	APBK	2011	Jangka Buya	918.488.000,00
11	Rehabilitasi Jaringan Air Bersih Kec. Meureudu (DAK) Tahun 2008	APBK	2011	Meureudu	46.400.000
12	Sambungan Rumah Komunal Menasah Lhoj Kec. Meureudu (DAK)	APBK	2012	Meureudu	383.500.000,00
13	Sambungan Rumah Desa Relui Mangat Kec. Jangka Buya (DAK)	APBK	2012	Jangka Buya	382.900.000,00
14	Sambungan Rumah Komunal Menasah Bueng Kec.Ulim (DAK)	APBK	2012	Ulim	276.500.000,00
15.	Sambungan Rumah Komunal Kec.Bandar Dua Desa Keudu Ulee Gle Lueng Teungoh (DAK)	APBK	2013	Bandar Dua	198.000.000,00
16.	Sambungan Rumah Komunal Kec. Ulim Desa Mesjid Ulim Baroh (DAK)	APBK	2013	Ulim	198.000.000,00
17.	Pembangunan Jaringan Distribusi pipa Ulim-Meureudu-Trienggadeng (DAK)	APBK	2013	Meureudu	1.137.571.000,00
18.	Pemasangan Sambungan Rumah dan Instalasi Air Minum Kec.Ulim (DAK-DAU)	APBK	2014	Ulim	183.000.000,00
19.	Pemasangan Sambungan Rumah dan Instalasi Air Minum Kec. Jangka Buya (DAK-DAU)	APBK	2014	Jangka Buya	182.500.000,00
20.	Pemasangan Sambungan Rumah dan Instalasi Air Minum Kec.Trienggadeng (DAK-DAU)	APBK	2014	Trienggadeng	436.000.000,00

No.	Uraian	Sumber Dana	Tahun Perolehan	Lokasi	Nilai (Rp)
21	Pemasangan Sambungan Rumah dan Instalasi Air Minum Kec.Panteraja (DAK-DAU)	APBK	2014	Panteraja	439.513.000,00
22.	Pembangunan Jaringan Distribusi Pipa150 mm (DAK)	APBK	2014	Meurah Dua	1.130.450.000,00
23	Pembangunan jaringan air bersih Gp. Ulee Glee	APBK	2014	Bandar Dua	199.500.000,00
Jumlah					15.744.225.000,00

(2) Berita Acara Serah Terima Nomor 456/BA/DC/2019 tanggal 18 Oktober 2019 dan Berita Acara Serah Terima Nomor 201.1/BA/DC/2019 tanggal 29 Agustus 2019, Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya menerima hibah aset dari Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk menunjang kegiatan operasional PDAM masing-masing sebesar Rp2.281.910.000,00 dan Rp34.992.758.775,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.48
Rincian Penyerahan Aset Hibah Pemerintah Pusat kepada PDAM Tirta Krueng Meureudu

No.	Uraian	Sumber Dana	Tahun Perolehan	Nilai (Rp)
1	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang	APBN	2016	2.281.910.000,00
2	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang	APBN	2011	1.063.180.705,00
3	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Besar	APBN	2015	12.496.638.349,00
4	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Besar	APBN	2017	8.532.719.697,00
5	Instalasi Air Permukaan Kapasitas Besar	APBN	2016	11.821.530.800,00
6	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang	APBN	2011	1.078.689.224,00
Jumlah				37.274.668.775,00

Penilaian penyertaan modal pada PDAM dicatat dengan menggunakan metode ekuitas (*equity method*) dengan persentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya pada PDAM Tirta Krueng Meureudu sebesar 100%. Sesuai laporan keuangan *audited* PDAM Tirta Krueng Meureudu yang telah dilampirkan, saldo ekuitas PDAM Tirta Krueng Meureudu per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.49
Rincian Investasi kepada PDAM Tirta Krueng Meureudu

No	Uraian	TA 2022 (Rp)
1	Kekayaan Pemda yang dipisahkan	15.844.225.000,00
2	Penyertaan Pemerintah Pusat	37.274.668.775,00

No	Uraian	TA 2022 (Rp)
3	Penyertaan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya	0,00
4	Modal Hibah	0,00
5	Laba Ditahan/Akumulasi Kerugian	(24.472.765.713,00)
6	Laba Rugi Tahun Berjalan	(3.558.181.976,00)
	Jumlah	25.087.946.086,00

Berdasarkan Laporan Laba Rugi *Audited* PDAM Tirta Krueng Meureudu diketahui informasi sebagai berikut:

1. Kekayaan Pemda yang dipisahkan sebesar Rp15.844.225.000,00 merupakan aset Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang diserahkan kepada PDAM Tirta Krueng Meureudu. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya TA 2022 melakukan penyertaan modal pada PDAM Tirta Krueng Meureudu sebesar Rp100.000.000,00.
2. Penyertaan Pemerintah Pusat sebesar Rp37.274.668.775,00 merupakan aset hibah dari Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional PDAM Tirta Krueng Meureudu.
3. Akumulasi kerugian sebesar Rp24.472.765.713,00 merupakan akumulasi kerugian PDAM Tirta Krueng Meureudu sejak tahun pertama beroperasi sampai dengan TA 2022, atas kerugian tersebut Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya mengakui 100% sebagai pengurang nilai penyertaan modal TA 2022.
4. Rugi tahun berjalan sebesar Rp3.558.181.976,00 merupakan kerugian PDAM Tirta Krueng Meureudu atas kegiatan operasional selama TA 2022, atas kerugian tersebut Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya mengakui 100% sebagai pengurang nilai penyertaan modal TA 2022.

C. Aset Tetap

Aset Tetap yaitu aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBK melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi. Aset Tetap dicatat berdasarkan harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Adapun nilai harga perolehan Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.882.470.949.205,99 dikurangi dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp1.183.890.802.579,23 sehingga nilai Aset Tetap per 31

Desember 2022 sebesar Rp1.698.580.146.626,76. Rekapitulasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap sebagai berikut:

Tabel 5.50
Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap

No	Jenis Aset Tetap	Saldo Awal (per 31 Des 2021) (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir per 31 Desember 2022 (Rp)
1	Tanah	145.102.281.035,71	5.851.416.282,50	4.996.809.600,00	145.956.887.718,21
2	Peralatan dan Mesin	335.244.326.373,12	51.238.026.929,00	5.809.862.266,16	380.672.491.035,96
3	Gedung dan Bangunan	737.188.239.536,57	76.084.004.451,20	4.854.848.225,00	808.417.395.762,77
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.448.307.770.451,36	105.653.490.624,44	49.441.018.790,60	1.504.520.242.285,20
5	Aset Tetap Lainnya	38.512.377.414,85	2.109.523.589,00	137.071.200,00	40.484.829.803,85
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	4.985.301.973,00	2.092.469.400,00	4.658.668.773,00	2.419.102.600,00
7	Akumulasi Penyusutan	(1.015.806.202.921,04)	16.446.156.846,35	184.530.756.504,54	(1.183.890.802.579,23)
	JUMLAH = 1 s/d 7	1.693.534.093.863,57	259.475.088.122,49	254.429.035.359,30	1.698.580.146.626,76

Rincian analitis mutasi Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya per 31 Desember 2022 secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 3.1. Berikut dijelaskan secara ringkas Aset Tetap selama Tahun 2022.

1) Tanah

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2022 yang mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap dipakai, meliputi antara lain harga pembelian dan biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan, serta biaya pembelian bangunan tua yang terletak pada sebidang tanah yang dibeli untuk pembangunan sebuah aset baru jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dibongkar. Adapun nilai perolehan Tanah sampai dengan TA 2022 adalah sebesar Rp145.956.887.718,21 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp145.102.281.035,71. Menunjukkan pada TA 2022 terjadi penambahan nilai sebesar Rp854.606.682,50 Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap Tanah TA 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.51
Rekapitulasi Mutasi Aset Tanah

NO	URAIAN	NILAI
A.	SALDO AWAL	Rp 145.102.281.035,71
B.	MUTASI TAMBAH	
	1) Belanja Modal Tanah TA 2022	Rp 4.996.809.600,00
	2) Koreksi Penilaian Tanah berdasarkan nilai NJOP	Rp 854.606.682,50

NO	URAIAN	NILAI	
	JUMLAH B	Rp	5.851.416.282,50
C.	MUTASI KURANG		
	1) Hibah Tanah Ke Instansi Vertikal	Rp	4.518.452.700,00
	2) Reklas Menjadi KDP Tanah	Rp	478.356.900,00
	JUMLAH C	Rp	4.996.809.600,00
	SALDO AKHIR = A+B-C	Rp	145.956.887.718,21

Dari saldo Tanah sebesar Rp145.956.887.718,21, senilai Rp56.549.317.505,21 telah memiliki sertifikat dan senilai Rp89.407.570.213,00 belum bersertifikat. Untuk penjelasan lebih lanjut rincian Aset Tanah yang telah bersertifikat dan belum bersertifikat disajikan pada lampiran 5.2 dan 5.3.

2) Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp380.672.491.035,96 dan Rp335.244.326.373,12 meningkat sebesar Rp45.428.164.662,84 atau 13,55% dari tahun sebelumnya. Jumlah tersebut merupakan saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Aset Tetap Peralatan dan Mesin sampai terpasang dan siap dipakai yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya. Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

Tabel 5.52
Rekapitulasi Mutasi Peralatan Mesin

NO	URAIAN	NILAI	
A	SALDO AWAL	Rp	335.244.326.373,12
B	MUTASI TAMBAH		
	1) Belanja Modal TA 2022	Rp	30.099.824.944,00
	2) Reklas Masuk antar KIB	Rp	366.215.600,00
	3) Reklas dari Belanja Hibah (Dana BOS TA 2022)	Rp	1.840.065.142,00
	4) Aset Yang diperoleh dari Hibah	Rp	18.931.921.243,00
	JUMLAH B	Rp	51.238.026.929,00
C	MUTASI KURANG		
	1) Reklas ke Aset Lainnya	Rp	2.956.676.805,16
	2) Reklas ke Ekstrakompatabel	Rp	1.165.540.261,00
	3) Reklas Keluar Antar KIB	Rp	12.000.000,00
	4) Penghapusan	Rp	1.675.645.200,00
	JUMLAH C	Rp	5.809.862.266,16
	SALDO AKHIR = A+B-C	Rp	380.672.491.035,96

Mutasi penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya pada Tahun Anggaran 2022 bersumber dari belanja modal pada seluruh SKPK di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya sebesar Rp30.099.824.944,00 ditambah dengan mutasi masuk antar KIB sebesar Rp366.215.600,00, reklas dari Belanja Hibah Dana BOS pada Satdikdas Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya sebesar Rp1.840.065.142,00. Mutasi penambahan Peralatan dan Mesin yang terakhir bersumber dari hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp18.931.921.243,00 yang terdiri dari hibah yang bersumber dari BNPB pada BPBD sebesar Rp50.930.000,00, dan pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar 1.468.700.000,00 dan Dana Hibah Politeknik Payakumbuh untuk AKN Pidie Jaya sebesar Rp4.853.280.746,00. Hibah peralatan mesin dari Kemendikbud Ristek sebesar Rp447.100.000,00 hibah peralatan mesin yang terakhir bersumber dari kementerian Pertanian sebesar Rp12.111.910.497,00

Berikut ini merupakan rincian penerimaan hibah dari Instansi Vertikal:

Tabel 5.53
Rekapitulasi Penerimaan Hibah Peralatan dan Mesin dari Instansi Vertikal

No	Nama SKPK>Nama Barang	Sumber	SKPK	Tahun Perolehan	Nilai (Rp)
1	1 Unit Mesin Boat 14 PK	BNPB	BPBD	2022	50.930.000,00
2	1 Unit Buldozer	Pemerintah Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup	2022	1.468.700.000,00
	TOTAL				1.519.630.000,00

Sedangkan mutasi pengurangan Peralatan dan Mesin sebesar Rp5.809.862.266,16 bersumber dari:

- a) Reklas keluar menjadi Aset lainnya sebesar Rp2.956.676.805,16 merupakan penghentian pemakaian Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2022 Lampiran 16.
- b) Mutasi pengurangan Aset Peralatan Mesin sebesar RpRp1.165.540.261,00 merupakan nilai ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin 2022 yang direklas menjadi Beban Lain-lain LO, dikarena tidak memenuhi nilai minimum kapitalisasi Peralatan dan Mesin. Berdasarkan Lampiran II Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang menyatakan bahwa nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap

atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut; pertama, alat angkutan dan alat berat sebesar Rp1.000.000,00; serta peralatan dan mesin lainnya selain alat angkutan dan alat berat sebesar Rp600.000,00. Untuk lebih jelasnya rincian nilai ekstrakomptabel disajikan pada Lampiran 3.3.

- c) Reklas antar KIB sebesar Rp12.000.000,00 merupakan reklas antar KIB pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp12.000.000,00.
- d) Penghapusan Aset Peralatan dan Mesin sebesar 1.675.645.200,0. Penghapusan Aset merupakan Aset di Dinas Perhubungan sebesar Rp621.795.200,00, Dinas Kesehatan Rp117.000.000,00, Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp542.900.000,00, Kecamatan Panteraja sebesar Rp85.600.000,00, Kecamatan Jangka Buya sebesar Rp85.600.000,00, Kecamatan Meurah Dua sebesar 127.750.000,00 dan Kecamatan Meureudu Rp95.000.000,00.

Pada Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya menerima bantuan hibah dari Yayasan Media Group sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 084/YMG/XI/2019 berupa gedung 2 lantai beserta peralatan mesin berupa alat-alat kesehatan untuk Puskesmas Meurah Dua. Adapun nilai hibah tersebut belum tercatat pada KIB dikarenakan dokumen serah terima tidak mencantumkan nilai.

3) Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp808.417.395.762,77 dan sebesar Rp737.188.239.536,57 meningkat sebesar Rp71.229.156.226,20 atau 9,66%. Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan tersebut merupakan keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh bangunan dan gedung sampai siap dipakai, meliputi harga beli, biaya pembebasan, IMB, Notaris, biaya pajak, biaya konstruksi yang dicakup oleh kontrak konstruksi meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dikeluarkan sehubungan dengan konstruksi dan dibayar pada pihak lain selain kontraktor, serta mencakup pula biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola. Adapun rincian mutasi

penambahan dan pengurangan Gedung dan Bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.54
Mutasi Gedung dan Bangunan

NO	URAIAN	NILAI	
		Rp	
A	SALDO AWAL	Rp	737.188.239.536,57
B	MUTASI TAMBAH		
	1) Belanja Modal TA 2022	Rp	43.151.915.965,51
	2) Reklas Masuk dari KIB	Rp	4.593.668.773,00
	3) Pengakuan Utang	Rp	139.969.312,69
	4) Koreksi Kurang Catat	Rp	85.249.000,00
	5) Reklas dari Hibah Dana BOS	Rp	0,00
	6) Reklas Masuk dari Belanja Hibah	Rp	28.113.201.400,00
	JUMLAH B	Rp	76.084.004.451,20
C	MUTASI KURANG		
	1) Reklas ke Ekstrakomptabel	Rp	16.000.000,00
	2) Reklas Keluar Antar KIB	Rp	456.068.600,00
	3) Penghapusan Aset	Rp	919.874.725,00
	5) Hibah Aset	Rp	3.462.904.900,00
	6) Reklas Menjadi KDP	Rp	0,00
	JUMLAH C	Rp	4.854.848.225,00
	SALDO AKHIR = A+B-C	Rp	808.417.395.762,77

Mutasi penambahan aset sebesar Rp76.084.004.451,20 dijelaskan sebagai berikut:

- a) Mutasi tambah sebesar Rp43.151.915.965,51 berasal dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
- b) Reklas masuk dari KIB sebesar Rp4.593.668.773,00 merupakan reklas masuk dari KDP yang telah selesai fisiknya pada RSUD sebesar Rp1.297.317.600,00, Sekretariat Daerah Kabupaten sebesar Rp2.783.726.552,00 dan Dinas Pendidikan Dayah sebesar Rp512.624.621,00.
- c) Penambahan nilai Gedung dan Bangunan terhadap pengakuan atas hutang kekurangan bayar pekerjaan revitalisasi pendopo Bupati sebesar Rp139.969.312,69 pada Dinas Pekerjaan Umum
- d) Koreksi kurang catat sebesar Rp85.249.000,00 merupakan koreksi kurang catat nilai perencanaan Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan Dayah Sebesar Rp47.800.000,00 atas pekerjaan pembangunan Gedung MUQ Pidie Jaya dan Sebesar Rp37.449.000,00 pada RSUD yang merupakan nilai perencanaan RAM SRUD

e) Reklas masuk dari Dana Hibah sebesar 28.113.201.400,00

Sedangkan mutasi kurang sebesar Rp4.601.182.625,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Mutasi kurang yang bersumber dari reklas Gedung dan Bangunan ke Ekstrakomptabel sebesar Rp16.000.000,00.
- b) Reklas keluar antar KIB sebesar Rp456.068.600,00
- c) Penghapusan aset sebesar Rp919.874.725,00;
- d) Hibah Aset sebesar Rp3.462.904.900,00;

Selain Gedung dan Bangunan yang nilainya sebagaimana tercantum di atas terdapat dua gedung yang belum tercatat pada KIB C, dan dijelaskan sebagai berikut:

- a) Pada Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya menerima hibah pembangunan gedung dan bangunan dari Yayasan Tahir Foundation melalui Kementerian Sosial RI. Nilai gedung tersebut belum dicatat pada Kartu Inventaris Barang Gedung dan Bangunan dikarenakan tidak adanya dokumen yang memadai. Sampai saat ini dokumen yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya hanya berupa Berita Acara Serah Terima dengan Nomor TP.03.01/WPG.0A.108/2018 tanggal 24 September 2018. BAST tersebut merupakan BAST sementara serta tidak mencantumkan nilai. Berita acara tersebut ditandatangani/diserahkan oleh PT Wijaya Karya selaku pelaksana pembangunan gedung serba guna dan diterima oleh Wakil Bupati Pidie Jaya tersebut disaksikan oleh perwakilan pihak Kementerian Sosial RI beserta perwakilan dari Tahir Foundation. Saat ini gedung serba guna tersebut digunakan sebagai ruang isolasi Covid 19 dan telah dicatat kedalam KIB Gedung dan Bangunan pada TA 2022 sesuai dengan BAST Nomor 021/TF/BAST/X/2022
- b) Gedung Puskesmas Meurah Dua yang merupakan hibah dari Yayasan Media Group sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 084/YMG/XI/2019 dikarenakan tidak tercantum nilai.

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp1.504.520.242.285,20 dan sebesar Rp1.448.307.770.451,36. Nilai tersebut meningkat sebesar

Rp56.212.471.833,84 atau 3,88% dari tahun sebelumnya. Berikut dijelaskan mutasi aset Jalan, Irigasi dan Jaringan:

Tabel 5.55
Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan

NO	URAIAN	NILAI	
A	SALDO AWAL	Rp	1.448.307.770.451,36
B	MUTASI TAMBAH		
	1) Belanja Modal TA 2021	Rp	105.461.360.624,44
	2) Reklas Masuk Antar KIB	Rp	192.130.000,00
	JUMLAH B	Rp	105.653.490.624,44
C	MUTASI KURANG		
	1) Reklas Masuk Antar KIB	Rp	1.082.756.400,00
	2) Reklas Keluar Menjadi Aset Lain-lain		48.358.262.390,60
	JUMLAH C	Rp	49.441.018.790,60
	SALDO AKHIR = A+B-C	Rp	1.504.520.242.285,20

Nilai mutasi tambah sebesar Rp105.653.490.624,44 bersumber dari Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp105.461.360.624,44, ditambah dengan reklas masuk antar KIB sebesar Rp192.130.000,00. Nilai mutasi kurang sebesar Rp49.441.018.790,60 bersumber dari Reklas masuk antar KIB sebesar Rp1.082.756.400,00 dan KIB D (Jembatan) pada Dinas PU yang akan dilakukan rehab rekontruksi pada tahun 2023 sebesar Rp538.500.000,00. Serta sebesar Rp47.819.762.390,60 KIB D (Jaringan Air Minum) pada Dinas PU yang akan diakui sebagai Investasi Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya pada PDAM Tirta Krueng Meureudu serta Pamsimas yang akan diserahkan ke masyarakat.

5) Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh. Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp40.484.829.803,85 dan sebesar 38.512.377.414,85. Hal ini menunjukkan bahwa nilai Aset Tetap Lainnya meningkat sebesar Rp1.972.452.389,00 atau 5,12% dari tahun sebelumnya.

Tabel 5.56
Mutasi Aset Tetap Lainnya

Saldo Awal (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	2	3	4=1+2-3
38.512.377.414,85	2.109.523.589,00	137.071.200,00	40.484.829.803,85

Mutasi Mutasi tambah sebesar Rp2.109.523.589,00 bersumber dari belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada TA 2022 sebesar Rp529.813.300,00 diperoleh dari Hibah dan dari reklas Belanja Hibah Dana BOS pada Satdikdas Negeri sebesar Rp1.430.961.306,00. Penerimaan hibah Aset Tetap Lainnya dari Politeknik Payakumbuh sebesar Rp54.571.000,00, dan hibah dari Perpustakaan Nasional sebesar Rp94.177.983.

Mutasi kurang untuk Aset Tetap Lainnya Tahun 2022 sebesar Rp137.071.200,00 berupa reklas Belanja Modal ATB menjadi peralatan mesin sebesar Rp117.377.200,00 dan reklas menjadi KIB B sebesar Rp19.694.000,00.

6) **Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.419.102.600,00 dan sebesar Rp4.985.301.973,00 menurun sebesar Rp2.566.199.373,00 dari tahun sebelumnya. Untuk lebih jelasnya mutasi Kontruksi Dalam Pengerjaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.57
Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan

NO	URAIAN	NILAI	
A	SALDO AWAL	Rp	4.985.301.973,00
B	MUTASI TAMBAH		
	1) Reklas dari KIB D	Rp	1.170.029.400,00
	2) Reklas Dari KIB A		478.356.900,00
	3) Reklasifikasi dari Belanja Barang Jasa	Rp	444.083.100,00
	JUMLAH B	Rp	2.092.469.400,00
C	MUTASI KURANG		
	1) Reklas Menjadi Gedung Bangunan	Rp	4.593.668.773,00
	2) Reklas menjadi KIB D	Rp	65.000.000,00
	JUMLAH C	Rp	4.658.668.773,00
	SALDO AKHIR = A+B-C	Rp	2.419.102.600,00

Tabel 5.57 menjelaskan bahwa terjadi penambahan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Tahun 2022 sebesar Rp2.092.469.400,00 bersumber dari reklas masuk dari KIB D sebesar Rp1.170.029.400,00 ditambah dengan reklas masuk dari Reklasifikasi dari Belanja Barang Jasa sebesar Rp1.010.514.600,00 dikurangi dengan reklas keluar KDP menjadi KIB C (Bangunan dan Gedung) sebesar Rp4.593.668.773,00 dan reklas keluar

menjadi KIB D sebesar Rp65.000.000,00. Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya sampai dengan 31 Desember 2022 dapat dilihat di Lampiran 5.1.

7) Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya per 31 Desember 2022 sesuai dengan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.58
Mutasi Akumulasi Penyusutan

No	Uraian	Saldo per 31 Des 2021 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo per 31 Des 2022 (Rp)
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Peralatan dan Mesin	261.405.610.615,58	45.870.537.351,55	4.621.619.506,30	302.654.528.460,83
2	Gedung dan Bangunan	107.476.065.124,98	16.280.301.016,95	413.329.398,51	123.343.036.743,42
3	Jalan Irigasi dan Jaringan	646.924.527.180,48	122.379.918.136,04	11.411.207.941,54	757.893.237.374,98
	Jumlah (1 s/d 3)	1.015.806.202.921,04	184.530.756.504,54	16.446.156.846,35	1.183.890.802.579,23

Perhitungan akumulasi penyusutan aset tetap TA 2022 sebesar Rp1.183.890.802.579,23 meningkat sebesar Rp168.084.599.658,19 atau 16,55% dari tahun sebelumnya sejumlah Rp1.015.806.202.921,04. Kenaikan akumulasi penyusutan tersebut berasal dari:

Tabel 5.59
Rincian Mutasi Akumulasi Penyusutan

No	Uraian	Nilai (Rp)
A	Saldo Awal	1.015.806.202.921,04
B	Mutasi Tambah	
	1) Penambahan dari Beban Penyusutan Tahun 2022	153.393.448.948,04
	2) Koreksi Kurang Catat Akumulasi Penyusutan	0,01
	3) Koreksi Kapitalisasi Ke Aset Induknya	21.317.075.203,14
	4) Reklas dari Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	92.856.000,00
	5) Penyusutan Aset Hibah yang baru tercatat di TA 2022	9.727.376.353,35
	Jumlah Mutasi Tambah	184.530.756.504,54
C	Mutasi Kurang	
	1) Penghapusan akumulasi Penyusutan dari Aset yang akan dihapuskan/dihibahkan	16.446.156.845,20
	2) Koreksi Kurang Catat Akumulasi Penyusutan	1,15
	Jumlah Mutasi Kurang	16.446.156.846,35
	Saldo Akhir (A+B-C)	1.183.890.802.579,23

Adapun rincian Akumulasi Penyusutan per SKPK dapat dilihat pada Lampiran 6.

D. Dana Cadangan

Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya belum membentuk Dana Cadangan sehingga saldo per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah nihil.

E. Aset Lainnya

Total Aset Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp39.539.123.849,06 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp26.618.649.722,00. Aset Lainnya per 31 Desember 2022 terdiri dari:

Tabel 5.60
Aset Lainnya per 31 Des 2022 dan 2021

No	Uraian	per 31 Des 2022 (Rp)	per 31 Des 2021(Rp)
1	Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00
2	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00
3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
4	Aset Tak Berwujud	4.091.561.200,00	3.974.184.000,00
5	Amortisasi Aset Tak Berwujud	(3.825.913.000,00)	(3.676.784.750,00)
6	Aset Lain-lain	37.848.563.141,06	33.871.064.192,00
7	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0,00	(7.549.813.720,00)
8	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	1.424.912.508,00	0,00
	Jumlah	39.539.123.849,06	26.618.649.722,00

Untuk lebih jelasnya rincian Aset Lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Tagihan Penjualan Angsuran

Adapun nilai Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah nihil.

2) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan Ganti Rugi TA 2022 dan TA 2021 sebesar Rp0,00. Dalam Laporan Hasil Pemantauan Kerugian Daerah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya mencatatkan kerugian daerah sebesar Rp9.298.473.632,99 sampai dengan Tahun 2021 belum ditetapkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak maupun Surat Ketetapan dari Majelis atas kerugian tersebut.

Nilai kerugian daerah tersebut merupakan akumulasi atas kerugian daerah Tahun 2008 sampai dengan 2021. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya telah melakukan beberapa tahapan untuk menindaklanjuti kerugian daerah tersebut yaitu dengan:

- a) Pada Tahun 2017 mengesahkan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;

- b) Pada Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 14 Tahun 2019 dan efektif bertugas mulai tanggal 6 Maret 2019; dan
- c) Pada Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya telah menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 392 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Sidang Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) Kabupaten Pidie Jaya.

3) Kemitraan Pihak Ketiga

Saldo Kemitraan Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 adalah nihil.

4) Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual yang dikendalikan oleh entitas dan mempunyai potensi manfaat ekonomis di masa yang akan datang. Nilai Aset tak Berwujud yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya sesuai dengan tabel di atas adalah per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp4.091.561.200,00 dan sebesar Rp3.974.184.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp117.377.200,00 atau 2,95% dari tahun sebelumnya. Adapun rincian Aset Tak Berwujud Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dapat dilihat pada Lampiran 7.

5) Amortisasi Aset Tak Berwujud

Amortisasi Aset Tak Berwujud Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2022 sebesar Rp3.825.913.000,00 mengalami peningkatan sebesar - Rp149.128.250,00 atau 4,06% dari Tahun 2021 sebesar Rp3.676.784.750,00. Untuk lebih jelasnya perhitungan Amortisasi Aset Tak Berwujud disajikan pada Lampiran 7.1.

6) Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya per 31 Desember 2022 sebesar Rp37.848.563.141,06 nilai tersebut merupakan nilai bersih atau nilai sisa buku yang bersumber dari nilai perolehan sebesar Rp52.235.517.387,76 dikurangi dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp14.386.954.246,70 rincian sebagai berikut:

Tabel 5.61
Rincian Nilai Perolehan Aset Lain-lain TA 2022 dan 2021

No	Uraian	2022	2021	Keterangan
1	Kendaraan roda empat yang hilang Sepeda	603.797.600,00	603.797.600,00	Lampiran 8
2	Kendaraan roda dua yang hilang Sepeda Motor	316.780.592,00	316.780.592,00	Lampiran 8
3	Kendaraan roda dua yang akan dihibahkan ke Pemerintahan Gampong	0,00	7.172.053.000,00	Lampiran 9 dan 9.1
4	Gedung SMA/SMK yang akan dihibahkan ke Provinsi	0,00	5.799.812.000,00	Lampiran 10.1 dan 10.2
5	Tanah yang akan dihibahkan ke Instansi Vertikal	0,00	5.823.650.000,00	Lampiran 11
6	Gedung PU yang sudah rusak berat	0,00	10.753.012.000,00	Lampiran 14
7	Penghentiaan KDP pada RSUD	0,00	818.175.000,00	Lampiran 14
8	Penghentiaan KDP pada Bappeda	0,00	2.583.784.000,00	Lampiran 14
9	Penghentiaan Pemakaian Aset Tetap Peralatan Dan Mesin Per Skpk Tahun 2022	2.956.676.805,16	0,00	Lampiran 16
10	KIB D yang akan di jadikan Investasi Permanent dan Dhibahkan	47.819.762.390,60	0,00	Lampiran 21
11	KIB D yang akan dihapuskan untuk direkontruksi	538.500.000,00	0,00	Lampiran 22
	Total	52.235.517.387,76	33.871.064.192,00	

Tabel 5.62
Perhitungan Nilai Bersih Aset Lain-lain TA 2022

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Sisa Buku
1	Kendaraan roda empat yang hilang Sepeda	603.797.600,00	0,00	603.797.600,00
2	Kendaraan roda dua yang hilang Sepeda Motor	316.780.592,00	29.772.000,00	287.008.592,00
3	Penghentiaan Pemakaian Aset Tetap Peralatan Dan Mesin Per Skpk Tahun 2022	2.956.676.805,16	2.945.974.305,16	10.702.500,00
4	KIB D yang akan di jadikan Investasi Permanent dan Dhibahkan	47.819.762.390,60	11.093.983.941,54	36.725.778.449,08
5	KIB D yang akan dihapuskan untuk direkontruksi	538.500.000,00	317.224.000,00	221.276.000,00
	Total	52.235.517.387,76	14.386.954.246,70	37.848.563.141,06

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sebesar Rp603.797.600,00 dan sebesar Rp316.780.592,00 merupakan nilai tercatat atas kendaraan roda empat dan roda yang hilang sampai dengan TA 2022, dikurangi dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp29.772.000,00.
- b. Nilai sisa buku atas aset tetap peralatan mesin sebesar Rp10.702.500,00 pada Badan Pengelolaan Keuangan sebesar Rp3.762.500,00 dan pada

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong sebesar Rp6.940.000,00.

c. Sisa nilai buku atas Jalan, Jembatan, Jaringan dan Irigasi yang akan dihapuskan pada TA dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Aset Tetap Jalan, Jembatan, Jaringan dan Irigasi pada Dinas Pekerjaan umum dengan nilai perolehan awal Sebesar Rp3.625.038.161,00 dikurangi dengan perhitungan penyusutan sebesar Rp450.719.137,45 sehingga nilai bersihnya sebesar Rp3.174.319.023,56 merupakan jaringan air bersih PAMSIMAS yang akan dihibahkan kepada pemerintah Gampong.
- Aset Tetap Jalan, Jembatan, Jaringan dan Irigasi pada Dinas Pekerjaan umum dengan nilai perolehan awal Sebesar Rp44.194.724.229,60 dikurangi dengan perhitungan penyusutan sebesar Rp10.643.264.804,09 sehingga nilai bersihnya sebesar Rp33.551.459.425,53 akan dilakukan penyerahan kepada PDAM Tirta Krueng Meureudu sebagai tambahan nilai Investasi Permanent Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.

7) Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Saldo Akumulasi penyusutan aset lain-lain merupakan nilai dari akumulasi penyusutan Aset tetap yang dihentikan penggunaannya dari operasional pemerintah. Akumulasi penyusutan Aset Lain-lain TA 2022 sebesar Rp0,00 menurun sebesar Rp7.549.813.720,00 dibandingkan TA 2021 sebesar Rp7.549.813.720,00. Pada TA 2022, pencatatan pada Aset lain-lain menggunakan nilai buku, sehingga Akumulasi penyusutan disajikan sebagai nilai pengurang atas nilai perolehan Aset lain-lain itu sendiri.

8) Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)

Treasury Deposit Facility (TDF) merupakan fasilitas yang disediakan oleh bendahara umum negara bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di bendahara umum negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia. TDF bertujuan untuk menampung Penyaluran DBH dan/ atau DAU secara nontunai. Adapun saldo *Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)* Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya sesuai dengan Surat Nomor S-46/PK/PK.2/2023 tentang Rincian Penyaluran DBH Secara Non Tunai melalui TDF Tahun

2022 adalah sebesar Rp1.424.912.508,00. Adapun rincian Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dapat dilihat pada Lampiran 7.2.

5.3.2 Kewajiban

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu dan muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari lembaga keuangan, entitas pemerintah lain atau lembaga internasional. Kewajiban dapat diklasifikasikan ke dalam:

- a. Kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam jangka waktu 12 bulan, seperti utang transfer pemerintah, bunga pinjaman, bagian lancar utang jangka panjang, dan utang jangka pendek lainnya.
- b. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Adapun Kewajiban Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp51.086.243.802,69 jika dibandingkan dengan saldo kewajiban per 31 Desember 2021 sebesar Rp8.444.917.090,00. Hal ini menunjukkan bahwa nilai kewajiban Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya meningkat sebesar Rp42.641.326.712,69 dari tahun sebelumnya. Adapun rincian Kewajiban per 31 Desember 2022 dan 2021 dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.63
Rekapitulasi Kewajiban

NO	Uraian	Per 31 Des 2022 (Rp)	Per 31 Des 2021 (Rp)
A.	Kewajiban Jangka Pendek		
	1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga	0,00	8.431.208.490,00
	2. Pendapatan Diterima Dimuka	80.753.678,00	13.708.600,00
	3. Utang Belanja	51.005.490.124,69	0,00
	Jumlah	51.086.243.802,69	8.444.917.090,00

A. Kewajiban Jangka Pendek

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp51.086.243.802,69 dan Rp8.444.917.090,00 dengan rincian sebagai berikut:

1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya per 31 Desember 2022 nihil, menurun sebesar Rp8.431.208.490,00 dari saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 sebesar Rp8.431.208.490,00. Hal ini dikarenakan saldo Utang PFK direklasifikasi pada akun Utang Belanja dan pajak negara sebesar Rp64.707.342,00 sudah

disetor ke kas negara tahun 2022. Adapun rincian Utang Perhitungan Pihak Ketiga Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.64
Rincian Utang Perhitungan Pihak Ketiga

No	Uraian	Per 31 Des 2022 (Rp)	Per 31 Des 2021 (Rp)
a	Hutang Iuran BPJS 4 %	Reklas Menjadi Utang Belanja	7.828.429.042,00
b	Pajak yang belum disetorkan ke Kas Negara	0,00	64.707.342,00
c	Gedung Kantor Pekerjaan Umum	Reklas Menjadi Utang Belanja	538.072.106,00
	Jumlah	0,00	8.431.208.490,00

2) Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2022 sebesar Rp80.753.678,00. Pendapatan Diterima Dimuka merupakan kelebihan pembayaran PBBP2 dari PT Miratel dan koreksi salah pencatatan atas Pendapatan sewa sebesar Rp80.000.000,00 pada BLUD RSUD Pidie Jaya sesuai dengan LK Audited KAP.

3) Utang Belanja

Saldo Utang Belanja Tahun 2022 sebesar Rp51.005.490.124,69 mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar nihil. Adapun rincian utang belanja dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.65
Rincian Utang Belanja

No	Uraian	Per 31 Des 2022 (Rp)	Per 31 Des 2021 (Rp)
	Utang Belanja Pegawai (Iuran BPJS 4 %)	11.695.089.778,00	0,00
a	Gedung Kantor Pekerjaan Umum	538.072.106,00	0,00
b	Utang Belanja pada Dinas Pekerjaan Umum	601.904.059,69	0,00
c	Utang Pada BLUD	38.170.424.181,00	0,00
	Jumlah	51.005.490.124,69	0,00

a) Hutang BPJS sebesar Rp11.695.089.778,00 merupakan hutang iuran 4% yang menjadi tanggungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya sesuai Berita Acara Hasil Rekonsiliasi berikut:

- 1) Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Iuran Jaminan Kesehatan Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) Pemerintah Daerah antara KPPN Banda Aceh, Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie Jaya, dan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Banda Aceh Nomor 1836/BA/I.06/0722 yang menyatakan jumlah hutang iuran 4%

Tahun 2020 sebesar Rp3.336.486.842 dan Tahun 2021 sebesar Rp4.602.789.618;

- 2) Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Iuran Jaminan Kesehatan Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) Pemerintah Daerah antara KPPN Banda Aceh, Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie Jaya, dan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Banda Aceh Bulan Januari s.d Desember Tahun 2022 Nomor 4491/BA/I.06/1222 yang menyatakan jumlah hutang iuran 4% sebesar Rp3.443.099.055;
 - 3) Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Iuran Jaminan Kesehatan PPPK Pemerintah Daerah dan antara KPPN Banda Aceh, Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie Jaya, dan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Banda Aceh Bulan Januari s.d Desember Tahun 2021 Nomor 06-I/BA/I.06/0122 yang menyatakan jumlah hutang iuran 4% sebesar Rp106.069.722,00;
 - 4) Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Iuran Jaminan Kesehatan PPPK Pemerintah Daerah dan antara KPPN Banda Aceh, Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie Jaya, dan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Banda Aceh Bulan Januari s.d Desember Tahun 2022 Nomor 4492/BA/I.06/1222 yang menyatakan jumlah hutang iuran 4% sebesar Rp206.644.541.
- b) Utang atas Gedung Kantor Pekerjaan Umum berasal dari proyek Pembangunan Gedung Kantor PU dengan kontrak tahun jamak (*multiyear*) yang dilaksanakan pada Tahun 2010 dan direncanakan selesai pada 11 Oktober 2012. Pekerjaan beberapa kali mengalami addendum, berdasarkan hasil verifikasi Dinas Pekerjaan Umum dengan pihak rekanan pada Tahun 2013 diketahui bahwa terdapat kontrak Addendum III Bulan Februari 2013 yang menjelaskan bahwa terdapat progres pengadaan proyek pembangunan Gedung PU telah mencapai fisik 96,00% dengan nilai kontrak yang disepakati sebesar Rp10.199.976.000,00, dengan nilai kontrak yang telah dibayarkan sebesar Rp9.350.090.894,00, sehingga terdapat sisa nilai kontrak yang belum dibayarkan kepada rekanan sebesar Rp849.885.106,00. Namun pada Bulan Desember 2020, Dinas Pekerjaan Umum memverifikasi ulang dokumen dan data terkait sisa nilai kontrak yang belum dilunasi atas proyek pembangunan Gedung PU. Berdasarkan

hasil verifikasi ulang tersebut diketahui bahwa terdapat dokumen Addendum Final Nomor 600/12/KONTR-CK/ADD.Final/2013 tanggal 5 April 2013 yang belum dicantumkan pada hasil verifikasi awal Tahun 2013.

Dalam kontrak Addendum Final menjelaskan bahwa terdapat progres pengadaan proyek Pembangunan Gedung PU telah mencapai fisik 95,89%, dengan nilai kontrak yang disepakati sebesar Rp10.188.163.000, kekurangan prosentase pembangunan fisik kurang lebih 5% terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana pendukung yang belum dikerjakan dan disepakati untuk tidak dikerjakan sesuai dengan realisasi keuangan/pembayaran ke pihak ketiga yang sudah tersalurkan sebesar Rp9.350.090.894,00, sehingga terdapat kewajiban Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya kepada pihak rekanan sebesar Rp838.072.106,00 sampai dengan 31 Desember 2020.

Karena terdapat perbedaan nilai antara hasil verifikasi awal yang menggunakan kontrak Addendum III dengan hasil verifikasi pada Desember 2019 yang menggunakan kontrak Addendum Final, maka pada penyajian nilai utang pembangunan Gedung PU, nilainya disesuaikan dengan hasil verifikasi Dinas Pekerjaan Umum pada Desember 2019 yaitu sebesar Rp838.072.106,00.

Adapun alasan belum terselesaikannya utang pembangunan Gedung PU dari Tahun 2013 sampai dengan 2019, karena nilai utang ini berhubungan dengan Aset Gedung PU yang tercatat pada Aset Tetap-Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp9.914.939.894,00 yang telah rusak berat pada saat gempa bumi Tahun 2016 dan masih dalam proses pengkajian terkait status Aset Gedung PU tersebut.

Pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya melalui Dinas Pekerjaan Umum telah melakukan pembayaran sebesar Rp300.000.000,00, sehingga sisa nilai hutang per 31 Desember 2022 sebesar Rp538.072.106,00.

- c) Utang Belanja Pada Dinas Pekerjaan umum Sebesar Rp601.904.059,69 terdiri dari:
 - 1) Utang pekerjaan Revitalisasi Pendopo Bupati Pidie Jaya pada Tahun 2021 yang diselesaikan pada TA 2022 sebesar Rp139.969.312,69;

- 2) Utang pekerjaan pembangunan Mesjid Baitul Izzah Gampong Sarah Panyang sebesar Rp284.021.643,00;
- 3) Utang pekerjaan pembangunan Mesjid Quba Pangwa sebesar Rp177.913.104,00.
- d) Hutang Belanja dan Beban pada BLUD sebesar Rp38.170.424.181,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.66
Rincian Utang Belanja Pada BLUD

NO	URAUAN	NILAI
A	Utang Jasa Pelayanan Medis dan Insentif Covid	
1	Insentif covid 2019 pelayanan mei 2021 sd Oktober 2021	2.049.107.203,00
2	Jasa covid 2019 pelayanan tahun 2021	5.646.743.400,00
3	Jasa Pelayanan Medis Juli 2022 s/d Oktober 2022	11.350.788.500,00
4	Jasa Ambulance Bulan Pelayanan Juli sd September 2022	67.008.000,00
5	Jasa Partikulir Bulan Juli sd Desember 2022	25.393.041,00
	Sub Jumlah A	19.139.040.144,00
B	Utang Beban merupakan utang kepada pemasok barang/distributor	
1	Obat-Obatan	9.700.464.050,00
2	Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)	6.037.449.839,00
3	Oksigen	460.245.000,00
4	Pengelolaan Sampah	480.970.000,00
5	Bahan Makanan Pasien	884.960.650,00
6	Biaya Iuran Persi	3.000.000,00
7	Kimia Laundry	145.471.050,00
8	Cetak	31.485.000,00
9	Bahan Kebersihan Cleaning Service	99.410.750,00
10	Bahan Kimia	1.142.977.698,00
11	BBM Mobil Ambulance/Operasional Tahun 2022	27.050.000,00
12	Pelayanan Pengelolaan Kantong Darah, screening test, Crosmatch golongan darah, dll	7.200.000,00
13	Pemeriksaan CT-Scan Pasien Rujukan Parsial	10.700.000,00
	Sub Jumlah B	19.031.384.037,00
	TOTAL A + B	38.170.424.181,00

Sumber: Laporan Keuangan BLUD 2022 Audited

1) Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah nihil.

B. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah nihil.

5.3.3 Ekuitas

Ekuitas Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Adapun nilai Ekuitas Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp1.805.155.140.023,61 dan Rp1.807.897.308.446,59. Hal ini menunjukkan bahwa nilai Ekuitas Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya menurun sebesar Rp2.742.168.422,98 atau sebesar 0,15% dari tahun sebelumnya. Untuk lebih lanjut perubahan nilai Ekuitas dijelaskan pada penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas.

5.4 Penjelasan Pos-Pos dalam Laporan Operasional

5.4.1 Kegiatan Operasional

A. Pendapatan

Pendapatan Daerah merupakan hak pemerintah atas pendapatan daerah karena adanya aliran masuk sumber daya ekonomi tanpa harus memperhatikan adanya aliran kas masuk ke rekening kas daerah. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara pendapatan pada LRA dan LO. Adapun realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pidie Jaya yang berasal dari kegiatan operasional pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp891.165.708.822,66. Jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp769.728.620.517,88, maka pendapatan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya meningkat sebesar Rp121.437.088.304,78 atau 15,77%. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 5.67
Pendapatan LO TA 2022 dan 2021

No	Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	114.451.365.949,62	74.269.621.385,04
2	Pendapatan Transfer	712.553.714.572,42	677.382.271.393,00
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	64.160.282.716,00	18.076.727.739,84
	Jumlah	891.165.708.822,66	769.728.620.517,88

1) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) LO TA 2022 sebesar Rp114.451.711.534,24 dan Pendapatan PAD LO TA 2021 sebesar Rp74.269.621.385,04 dengan demikian PAD LO TA 2022 meningkat sebesar Rp40.182.090.149,20 atau 54,10 % dibanding dengan PAD LO TA 2021. Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2021 terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah-LO. Adapun rincian Pendapatan Asli Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.68
Pendapatan PAD - LO TA 2022 dan 2021

No	Uraian	LO 2022 (Rp)	LO 2021 (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah	10.171.653.387,00	9.138.742.662,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah	3.659.902.800,00	47.284.904.188,67
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.786.958.904,00	2.532.367.261,00
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah	97.833.196.443,24	15.313.607.273,37
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	114.451.711.534,24	74.269.621.385,04

a) Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak LO TA 2022 adalah sebesar Rp10.171.653.387,00 dan TA 2021 sebesar Rp9.138.742.662,00. Pendapatan Pajak Daerah LO TA 2022 meningkat sebesar Rp1.032.910.725,00. Sedangkan jika dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah LRA TA 2022 sebesar Rp9.638.687.012,00, terdapat selisih sebesar Rp532.966.375,00. Selisih tersebut merupakan selisih antara ketentuan PBBP2 TA 2022 sebesar Rp1.248.065.555,00 dikurangi dengan total realisasi pembayaran pokok Piutang PBBP2 di TA 2022 sebesar Rp715.099.180,00. Adapun rincian pendapatan Pajak Daerah LRA dan LO 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.69
Pendapatan Pajak Daerah LRA dan LO Tahun 2022

No	Uraian	LO 2022	LRA 2022	Selisih
1	Pajak Restoran	1.563.223.006,00	1.563.223.006,00	0,00
2	Pajak Reklame	315.689.500,00	315.689.500,00	0,00
3	Pajak Penerangan Jalan	5.059.796.742,00	5.059.796.742,00	0,00
5	Pajak Sarang Burung Walet	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00
4	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	700.674.459,00	700.674.459,00	0,00
6	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	1.248.065.555,00	715.099.180,00	532.966.375,00
7	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.269.804.125,00	1.269.804.125,00	0,00
	Jumlah Pajak Daerah	10.171.653.387,00	9.638.687.012,00	532.966.375,00

b) Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah LO TA 2022 sebesar Rp3.659.902.800,00 menurun sebesar Rp43.625.001.388,67 atau 92,26% dari tahun sebelumnya sebesar Rp47.284.904.188,67. Adapun rincian retribusi daerah disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.70
Pendapatan Retribusi Daerah LRA dan LO Tahun 2022

No	Uraian	LO 2022 (Rp)	LRA 2022 (Rp)	Selisih (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	923.314.200,00	923.314.200,00	0,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	173.010.000,00	173.010.000,00	0,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	117.950.000,00	117.950.000,00	0,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00
5	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00
6	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	170.333.000,00	170.333.000,00	0,00
7	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	687.208.600,00	673.500.000,00	13.708.600,00
8	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	1.440.481.000,00	1.440.481.000,00	0,00
11	Retribusi Rumah Potong Hewan	22.860.000,00	22.860.000,00	0,00
12	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	19.292.000,00	19.292.000,00	0,00
13	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
14	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	12.454.000,00	12.454.000,00	0,00
	TOTAL	3.659.902.800,00	3.646.194.200,00	13.708.600,00

Dari data pada tabel diatas terdapat perbedaan antara Pendapatan Retribusi Daerah LO dan LRA. Perbedaan atau selisih nilai tersebut merupakan retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp13.708.600,00 merupakan penerimaan atas sewa kios pada Dinas Kelautan dan Perikanan pada tahun 2021 (pendapatan diterima dimuka TA 2021) yang masa perjanjiaan sewanya habis di Tahun 2022.

c) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2022 sebesar Rp2.786.958.904,00. Dibandingkan dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2021 sebesar Rp2.532.367.261,00 maka pada TA 2022 terjadi penurunan sebesar Rp254.591.643,00 atau 10,05%. Bersumber dari bagi hasil deviden pada PT. Bank Aceh Syariah.

d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah TA 2022 sebesar Rp97.833.196.443,24 meningkat sebesar Rp82.519.589.169,87 atau 538,86 % dari TA 2021 sebesar Rp15.313.607.273,37. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.71
Lain-lain PAD yang Sah LO dan LRA

No	Uraian	LO 2022 (Rp)	LRA 2022 (Rp)	Selisih (Rp)
1	Penerimaan Jasa Giro	304.503.887,91	304.503.887,91	0,00
2	Pendapatan dari Pengembalian	750.878.308,13	750.878.308,13	0,00
3	Pendapatan BLUD	83.480.102.848,89	69.511.158.720,89	13.968.944.128,00
4	Dana Kapitasi JKN Pada FKTP	9.055.731.948,00	9.055.731.948,00	0,00
5	Pendapatan Denda PBB	312.704.073,02	66.417.707,00	246.286.366,02
6	Pendapatan Zakat	1.653.310.937,06	1.653.310.937,06	0,00
7	Pendapatan Infaq	2.275.618.855,61	2.275.618.855,61	0,00
8	Pendapatan Bunga	345.584,62	0,00	345.584,62
	Jumlah	97.833.196.443,24	83.617.620.364,60	14.215.576.078,64

Berdasarkan penjelasan pada tabel di atas terdapat selisih sebesar Rp14.215.576.078,64 antara realisasi pendapatan Retribusi LRA dan Pendapatan Retribusi LO TA 2022. Adapun selisih adalah sebesar Rp246.286.366,02 bersumber penetapan denda PBB TA 2022 yang belum terealisasi sebesar Rp312.704.073,02 dikurangi realisasi atas penetapan denda PBB tahun sebelumnya sebesar Rp66.417.707,00. Selisih sebesar Rp13.968.944.128,00 merupakan sisa klaim BPJS dan Jasa Raharja pada BLUD yang belum diterima hingga 31 Desember 2022. Selisih sebesar Rp345.584,62 merupakan pendapatan Bunga dari TDF-TKD yang diberikan oleh Bank Indonesia atas remunerasi DBH/DAU melalui fasilitas TDF.

2) Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer LO TA 2022 sebesar Rp712.553.714.572,42 dan pendapatan Transfer LRA TA 2022 sebesar Rp865.333.538.615,42 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.72
Pendapatan Transfer LO TA 2022

No	Uraian	LO 2022 (Rp)	LRA 2022 (Rp)	Selisih (Rp)
1	Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	591.394.261.889,00	589.969.349.381,00	1.424.912.508,00
2	Dana Insentif Daerah (DID)	18.897.689.000,00	18.897.689.000,00	0,00
3	Dana Desa	0,00	151.746.896.000,00	(151.746.896.000,00)
4	Pendapatan Transfer Antar Daerah	102.261.763.683,42	104.719.604.234,42	(2.457.840.551,00)
	Jumlah Pendapatan Transfer (1+2+3+4)	712.553.714.572,42	865.333.538.615,42	(152.779.824.043,00)

a. Pendapatan Dana Perimbangan

Pendapatan Dana Perimbangan LO TA 2022 sebesar Rp591.394.261.889,00 dan Pendapatan Dana Perimbangan LRA TA 2022 sebesar Rp589.969.349.381,00. Dengan demikian terdapat perbedaan

antara pendapatan Dana Perimbangan LO dan LRA pada TA 2022. Yang bersumber dari penyaluran DBH melalui Fasilitas TDF-TKD sebesar Rp1.424.912.508,00 Pendapatan dana Perimbangan LO dan LRA terdiri dari:

Tabel 5.73
Pendapatan Dana Perimbangan LO dan LRA TA 2022

No	Uraian	LO 2022 (Rp)	LRA 2022 (Rp)	Selisih (Rp)
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	17.348.002.445,00	15.923.089.937,00	1.424.912.508,00
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	403.321.541.158,00	403.321.541.158,00	0,00
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	99.282.291.087,00	99.282.291.087,00	0,00
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	71.442.427.199,00	71.442.427.199,00	0,00
	Jumlah Pendapatan Dana Perimbangan	591.394.261.889,00	589.969.349.381,00	1.424.912.508,00

b. Dana Insentif Daerah (DID)

Dana Insentif Daerah (DID) LO TA 2022 sebesar Rp18.897.689.000,00 dan Dana Insentif Daerah (DID) LRA TA 2022 sebesar Rp18.897.689.000,00. Dengan demikian tidak terdapat perbedaan nilai antara realisasi DID LO dan DID LRA pada TA 2022.

c. Dana Desa

Pendapatan Dana Desa LO TA 2022 sebesar nol dan LRA sebesar Rp151.746.896.000,00. Perbedaan pencatatan Dana Desa LO dan LRA ini sesuai dengan Buletin Teknis No 21 tentang Akuntansi Dana Transfer pada poin 3.5 menyatakan bahwa Pendapatan Transfer Dana Desa yang diterima oleh kabupaten/kota bukan merupakan hak entitas yang bisa dimanfaatkan untuk operasional pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi entitas. Selain itu, kinerja pemanfaatan Dana Desa ada pada desa, bukan pada pemerintah kabupaten/kota sehingga penerimaan Dana Desa tidak perlu dilakukan pencatatan pada LO.

d. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah LO TA 2022 sebesar Rp102.261.763.683,42 dan Pendapatan Transfer Antar Daerah LRA TA 2022 sebesar Rp104.719.604.234,42 terdapat perbedaan Sebesar Rp2.457.840.551,00 bersumber dari sebesar Rp4.423.322.609,00 merupakan pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi atas pendapatan bagi hasil Pajak TA 2021 yang baru diterima oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya pada TA 2022. Dikurangi dengan Pajak Rokok TA 2022 yang belum diterima oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Sebesar

Rp1.965.482.058,00 sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor:903/165/2022. Adapun rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah LO dan LRA adalah sebagai berikut:

Tabel 5.74
Pendapatan Transfer Antar Daerah LO dan LRA TA 2022

No	Uraian	LO 2022 (Rp)	LRA 2022 (Rp)	Selisih (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil	24.066.540.155,17	26.524.380.706,17	(2.457.840.551,00)
2	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	78.195.223.528,25	78.195.223.528,25	
	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah	102.261.763.683,42	104.719.604.234,42	(2.457.840.551,00)

3) Lain-lain Pendapatan yang Sah

Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya untuk TA 2022 sebesar Rp64.160.282.716,00 meningkat sebesar Rp46.083.554.976,16 atau 254,93% jika dibandingkan dengan TA 2021 sebesar Rp18.076.727.739,84.

Tabel 5.75
Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO TA 2022 dan 2021

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Pendapatan Hibah	64.160.282.716,00	18.076.727.739,84
	Jumlah	64.160.282.716,00	18.076.727.739,84

Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO TA 2022 sebesar Rp64.160.282.716,00 yang bersumber dari:

Tabel 5.76
Rincian Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO TA 2022 dan 2021

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00	15.926.388.000,00
2	Pendapatan Hibah BNPB pada RSUD	0,00	825.100.000,00
3	Pendapatan Hibah Kementerian Kesehatan pada RSUD	0,00	783.446.000,00
4	Pendapatan Hibah KEMENINVES-BKPM pada DMPTSP Nakertras	0,00	17.748.500,00
5	Penerimaan Hibah dari Kemendikbud Riset dan Teknologi pada Dinas Pendidikan	0,00	226.660.000,00
6	Penerimaan Hibah dari Kemenkes pada Dinkes KB	0,00	121.885.239,84
7	Pendapatan Hibah dari BPBA pada BPBD	198.913.000,00	175.500.000,00
8	Pendapatan Hibah Aset dari BNPB pada BPBD	50.930.000,00	0,00
9	Hibah Uang BNPB	28.431.969.000,00	0,00
10	Pendapatan Hibah dari BKKBN pada Dinkes-KB	173.840.300,00	0,00
11	Pendapatan Hibah LO dari Perpustakaan Nasional	94.177.983,00	0,00
12	Pendapatan Hibah Aset dari Pemerintah Provinsi	9.581.901.400,00	0,00
13	Pendapatan Hibah dari Tahir Foundation	20.000.000.000,00	0,00
14	Pendapatan Hibah dari Kemendikbud Ristek	447.950.000,00	0,00
15	Pendapatan Hibah dari Politeknik Payakumbuh pada AKN Pidie Jaya	5.180.601.033,00	0,00
	Jumlah	64.160.282.716,00	18.076.727.739,84

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Pendapatan Hibah TA 2022 bersumber dari:

- 1) Penerimaan hibah dari BPBA pada BPBD sebesar Rp198.913.000,00 merupakan penerimaan hibah berupa barang bantuan tanggap darurat sesuai dengan BA Nomor Nomor 12/BAST/BPBA/2022.
- 2) Pendapatan Hibah Aset dari BNPB pada BPBD sebesar Rp50.930.000,00 merupakan penerimaan hibah Aset Tetap Peralatan Mesin berupa Mesin Boat sesuai dengan BA Nomor Nomor 65/D.03.03/06/2022.
- 3) Pendapatan Hibah Uang sebesar Rp28.431.969.000 bersumber dari BNPB yang ditransferkan langsung ke RKUD Kabupaten Pidie Jaya.
- 4) Pendapatan hibah sebesar Rp173.840.300,00 pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana merupakan hibah berupa Obat-obatan, Bahan Medis Habis Pakai dan alat kontrasepsi selama Tahun 2022.
- 5) Pendapatan hibah sebesar Rp94.177.983,00 merupakan hibah berupa Aset Tetap Lainnya (buku pustaka) dari Perpustakaan Nasional Sesuai BA Nomor 7194/4.2/PLK/03.07/X.2022.
- 6) Pendapatan hibah sebesar Rp9.581.901.400,00 merupakan hibah berupa Aset Tetap dari Pemerintah Provinsi pada Dinas Lingkungan Hidup.
- 7) Pendapatan hibah sebesar Rp20.000.000.000,00 merupakan hibah berupa Gedung dan Bangunan dari Tahir Foundation sesuai BA Nomor 021/TF/BAST/X/2022.
- 8) Pendapatan hibah sebesar Rp447.950.000,00 merupakan hibah barang berupa peralatan TIK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- 9) Pendapatan hibah sebesar Rp5.180.601.033,00 merupakan hibah barang pada AKN Pidie Jaya dari Politeknik Payakumbuh Sumatera Barat.

B. Beban

Realisasi Beban Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp835.548.165.266,29 mengalami peningkatan sebesar Rp66.078.911.517,35 atau 8,59% dibanding dengan jumlah beban operasional Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp769.469.253.748,94. Untuk lebih jelasnya rincian Beban Operasional Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya untuk Tahun Anggaran 2022 dan 2021 dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.77
Beban Operasional TA 2022 dan 2021

No	Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
1	Beban Pegawai	282.596.101.590,00	281.094.575.748,00
2	Beban Barang dan Jasa	304.904.895.245,86	230.153.726.625,00
3	Beban Hibah	23.155.234.552,00	41.717.984.843,31
4	Beban Bantuan Sosial	11.081.907.883,00	14.480.353.930,00
5	Beban Penyusutan dan Amortisasi	153.546.935.198,04	142.950.552.716,03
6	Beban Penyisihan Piutang	739.150.977,39	8.334.319.558,22
7	Beban Transfer	59.523.939.820,00	49.004.907.113,00
8	Beban Lain-lain	0,00	1.732.833.215,38
	Jumlah Beban	835.548.165.266,29	769.469.253.748,94

Dari penjelasan pada tabel di atas dapat dijelaskan mengenai beban-beban seperti berikut ini:

1. Beban Pegawai

Beban pegawai Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya TA 2022 sebesar Rp282.596.101.590,00, meningkat sebesar Rp1.501.525.842,00 atau 0,53% jika dibandingkan dengan TA 2021 sebesar Rp281.094.575.748,00. Adapun beban pegawai TA 2022 Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.78
Beban Pegawai TA 2022

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	215.691.931.361,00
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	19.762.534.588,00
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	38.208.801.425,00
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	8.257.889.380,00
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	168.304.836,00
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	506.640.000,00
	Jumlah Beban	282.596.101.590,00

2. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa yang ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya pada TA 2022 adalah sebesar Rp304.904.895.245,86. Jika dibandingkan dengan beban barang dan jasa tahun sebelumnya sebesar Rp230.153.726.625,00. Maka beban barang dan jasa TA 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp74.751.168.620,86 atau 32,48% dibanding dengan beban barang dan jasa TA 2021. Adapun rincian beban barang dan jasa TA 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.79
Beban Barang dan Jasa TA 2022

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Beban Barang	102.781.554.794,37
2	Beban Jasa	71.301.662.684,82

No	Uraian	Nilai (Rp)
3	Beban Pemeliharaan	18.450.095.640,00
4	Beban Perjalanan Dinas	16.983.256.620,00
5	Beban Barang dan Jasa BLUD	95.388.325.506,67
	Jumlah	304.904.895.245,86

3. Beban Hibah

Beban Hibah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya TA 2022 sebesar Rp23.155.234.552,00 menurun sebesar Rp18.562.750.291,31 atau 44,50% jika dibandingkan dengan TA 2021 sebesar Rp41.717.984.843,31. Adapun rincian beban hibah TA 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.80
Beban Hibah TA 2022

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	966.700.000,00
2	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	5.355.728.717,00
3	Beban Hibah Dana BOS	16.258.499.985,00
4	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	574.305.850,00
	Jumlah	23.155.234.552,00

4. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya TA 2022 sebesar Rp11.081.907.883,00 menurun sebesar Rp3.398.446.047,00 atau 23,47% jika dibandingkan dengan TA 2021 sebesar Rp14.480.353.930,00. Adapun rincian beban bantuan sosial TA 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.81
Beban Bantuan Sosial TA 2022

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Beban Bantuan Sosial Barang kepada Individu	1.608.199.700,00
2	Beban Bantuan Sosial Barang kepada Kelompok Masyarakat	99.500.000,00
3	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	6.087.293.183,00
4	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	449.050.000,00
5	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan	2.837.865.000,00
	Jumlah	11.081.907.883,00

5. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2022 sebesar Rp153.546.935.198,04 mengalami peningkatan sebesar Rp10.596.382.482,01 atau 7,41% jika dibandingkan dengan TA 2021

sebesar Rp142.950.552.716,03. Adapun rincian beban Penyusutan dan Amortisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 5.82
Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2022

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	36.050.304.998,20
2	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	16.179.201.417,75
3	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	101.168.300.532,09
4	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	149.128.250,00
	Jumlah	153.546.935.198,04

6. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang TA 2022 sebesar Rp739.150.977,39 mengalami penurunan sebesar Rp7.595.168.580,83 atau 91,13% jika dibandingkan dengan TA 2021 sebesar Rp8.334.319.558,22. Beban penyisihan piutang TA 2022 terdiri dari:

Tabel 5.83
Beban Penyisihan Piutang TA 2022

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Beban Penyisihan Piutang PBBP2 dan Denda PBBP2	668.906.257,08
2	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	70.244.720,31
	Jumlah	739.150.977,39

7. Beban Transfer

Beban Transfer TA 2022 sebesar Rp59.523.939.820,00 meningkat sebesar Rp10.519.032.707,00 atau 21,47% jika dibandingkan dengan TA 2021 sebesar Rp49.004.907.113,00.

8. Beban Lain-lain

Beban Lain-lain TA 2021 sebesar Rp1.732.833.215,38. Beban Lain-lain ini merupakan beban tidak habis pakai ditambah dengan beban ekstrakomptabel dari barang yang tidak memenuhi batasan minimum kapitalisasi aset tetap. Pada TA 2022 nilai ekstrakomptabel disajikan pada akun defisit non Operasional Lainnya.

Dari penjelasan pada tabel 5.71 di atas dapat disimpulkan bahwa total pendapatan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya sebesar Rp891.165.708.822,66 dan jumlah Beban Operasional seperti pada Tabel 5.77 sebesar Rp835.548.165.266,29. Maka dapat disimpulkan pada TA 2022 Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya mengalami surplus sebesar Rp55.617.543.556,37.

5.4.2 Kegiatan Non Operasional

Tabel 5.84
Kegiatan Non Operasional TA 2022 dan 2021

No	Uraian	2022	2021
1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0,00	0,00
2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	0,00	0,00
4	Defisit Penjualan Aset Non Lancar	0,00	0,00
5	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
6	Defisit Kegiatan Non Operasional lainnya – LO	(38.931.668.730,50)	(12.240.124.207,93)
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasi	(38.931.668.730,50)	(12.240.124.207,93)

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa defisit dari Kegiatan Non Operasional Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp38.931.668.730,50 adapun rincian defisit kegiatan non operasional lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.85
Defisit Non Operasional Lainnya TA 2022

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Sisa nilai Buku Aset Tetap yang dihapuskan	33.918.347.206,50
2	Beban Ektrakompatabel TA 2022	1.455.139.548,00
3	Penurunan Nilai Investasi pada PDAM Tirta Krueng Meureudu TA 2022	3.558.181.976,00
	Jumlah	38.931.668.730,50

A. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya pada Tahun Anggaran 2022 adalah pendapatan Luar Biasa sebesar Rp0,00 dikurangi dengan Beban Luar Biasa sebesar Rp706.903.046,00, maka diperoleh nilai Pos Luar Biasa TA 2022 sebesar minus Rp706.903.046,00. Dibandingkan dengan Beban Luar Biasa TA 2021 sebesar Rp1.487.567.674,00 pada TA 2022 terjadi penurunan sebesar Rp780.664.628,00 atau 52,48%.

B. Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit LO berasal Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasi (merupakan selisih antara total pendapatan dikurangi dengan jumlah beban operasi) ditambah Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa.

Tabel 5.86
Surplus/Defisit Laporan Operasional TA 2022 dan 2021

No	Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
1	Jumlah Pendapatan	891.165.708.822,66	769.728.620.517,88
2	Jumlah Beban	835.618.253.090,29	769.469.253.748,94
3	Surplus/Defisit dari Operasi (1-2)	55.617.543.556,37	259.366.768,94
4	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasi	(38.931.668.730,50)	(12.240.124.207,93)
5	Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa (3+4)	16.685.874.825,87	(11.980.757.438,99)

No	Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
6	Pos Luar Biasa	(706.903.046,00)	(1.487.567.674,00)
	Surplus/Defisit-LO (5+6)	15.978.971.779,87	(13.468.325.112,99)

5.5 Penjelasan atas Pos-Pos dalam Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan, Aktivitas Pembiayaan dan Aktivitas Non Anggaran. Aktivitas Operasi menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional pemerintah.

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih dari aktivitas operasi Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya pada TA 2022 sebesar Rp189.751.022.178,47 dibandingkan dengan TA 2021 sebesar minus Rp172.890.390.591,80 maka arus kas dari aktivitas operasi Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya meningkat sebesar Rp16.860.631.587. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.87
Arus Kas dari Aktivitas Operasi TA 2022 dan 2021

No	Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
1	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	744.773.742.983,14	754.230.087.452,80
2	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	555.022.720.804,67	581.339.696.861,00
	Arus Kas Bersih dari aktivitas operasi (1-2)	189.751.022.178,47	172.890.390.591,80

A. Arus Masuk Kas

Arus masuk kas dari aktivitas operasi Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.88
Arus Masuk Kas TA 2022 dan 2021

No	Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
1	Penerimaan Pajak Daerah	9.638.687.012,00	8.711.018.955,00
2	Penerimaan Retribusi Daerah	3.646.194.200,00	56.047.888.179,00
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.786.958.904,00	2.532.367.261,00
4	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	5.872.670.651,72	4.974.442.256,80
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	9.024.898.892,00	11.341.472.527,00
6	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	6.898.191.045,00	3.482.079.148,00
7	Penerimaan Dana Alokasi Umum	403.321.541.158,00	404.301.754.000,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	151.535.338.886,00	122.846.954.653,00
9	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00
10	Penerimaan Dana Penyesuaian	18.897.689.000,00	39.790.452.000,00
11	Penerimaan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	26.524.380.706,17	24.922.205.099,00
12	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya dari Provinsi	78.195.223.528,25	75.279.453.374,00
13	Penerimaan Hibah	28.431.969.000,00	0,00
14	Penerimaan Dana Darurat	0,00	0,00
15	Penerimaan Lainnya	0,00	0,00
16	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	744.773.742.983,14	754.230.087.452,80

Arus kas masuk untuk TA 2022 dan TA 2021 disajikan pada Lampiran 12.

B. Arus Keluar Kas

Arus keluar kas dari aktivitas operasi Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.89
Arus Keluar Kas TA 2022 dan 2021

No	Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
1	Pembayaran Pegawai	282.596.101.590,00	276.602.633.548,00
2	Pembayaran Barang dan Jasa	195.183.833.898,67	218.876.770.230,00
3	Pembayaran Bunga	0,00	0,00
4	Pembayaran Subsidi	0,00	0,00
5	Pembayaran Hibah	5.930.034.567,00	18.324.442.702,00
6	Pembayaran Bantuan Sosial	11.081.907.883,00	14.477.353.930,00
7	Pembayaran Tak Terduga	706.903.046,00	4.053.589.338,00
8	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	59.523.939.820,00	49.004.907.113,00
9	Pembayaran Kejadian Luar Biasa	0,00	0,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	555.022.720.804,67	581.339.696.861,00

Arus keluar kas untuk TA 2022 dan TA 2021 disajikan pada Lampiran 13.

5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

Aktivitas investasi aset non keuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan perolehan dan pelepasan sumber daya yang bertujuan untuk meningkatkan operasional pemerintah dan menghasilkan pendapatan dimasa yang akan datang. Arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan Pemerintah selama Tahun 2022 minus sebesar Rp175.553.927.498,95. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah lebih banyak mengeluarkan belanja modal dibandingkan dengan pendapatan penjualan asetnya. Rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.90
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan
TA 2022 dan 2021

No	Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
A.	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Aset non Keuangan	0,00	0,00
B.	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Aset non Keuangan	175.553.927.498,95	180.151.757.251,74
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan (1-2)	(175.553.927.498,95)	(180.151.757.251,74)

A. Arus Masuk Kas

Pada TA 2022 dan 2021 tidak ada transaksi kas masuk dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan.

B. Arus Keluar Kas

Arus keluar kas dari aktivitas investasi aset non keuangan Tahun 2022 dan 2021 merupakan transaksi Belanja Modal Aset Tetap dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.91
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan
TA 2022 dan 2021

No	Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
1	Perolehan Tanah	4.996.809.600,00	550.845.831,00
2	Perolehan Peralatan dan Mesin	20.477.891.209,00	31.996.129.108,38
3	Perolehan Gedung dan Bangunan	43.002.215.965,51	68.170.044.987,25
4	Perolehan Jalan Irigasi dan Jaringan	105.461.360.624,44	78.307.685.310,11
5	Perolehan Aset Tetap Lainnya	515.650.100,00	127.052.015,00
6	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	1.100.000.000,00	1.000.000.000,00
Jumlah		175.553.927.498,95	180.151.757.251,74

Untuk lebih jelasnya rincian Arus Keluar Kas dari aktivitas Investasi Aset Non Keuangan TA 2022 per SKPK dapat dilihat pada Lampiran 3.2, sedangkan rincian per jenis barang dapat dilihat pada Tabel 5.29 sampai dengan Tabel 5.33.

5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan

Aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran bruto sehubungan dengan surplus/defisit anggaran. Arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan pemerintah Tahun 2022 adalah nihil.

5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas transitoris merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran dan tidak disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran APBK. Dalam Tahun 2022 arus kas bersih dari aktivitas transitoris adalah nihil.

Tabel 5.92
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris TA 2022 dan 2021

No	Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
1	Arus Masuk Kas dari aktivitas Transitoris	43.317.210.623,00	43.045.019.118,00
	- Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	43.317.210.623,00	43.045.019.118,00
	- Penerimaan Transitoris	0,00	0,00
2	Arus Keluar Kas dari aktivitas Transitoris	43.317.210.623,00	43.045.019.118,00
	- Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	43.317.210.623,00	43.045.019.118,00
	- Pengeluaran Transitoris	0,00	0,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (1-2)	0,00	0,00

A. Arus Masuk Kas

Rincian arus kas dari aktivitas non anggaran terdiri dari:

Tabel 5.93
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris TA 2022 dan 2021

No	Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
A	Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) terdiri dari:		
1	PPN	22.635.810.497,00	22.307.793.210,00
2	PPh Pasal 21	2.244.233.158,00	2.179.499.949,00
3	PPh Pasal 22. 23. 26. 4 (2)	4.487.440.017,00	4.751.162.564,00
4	IWP	13.784.934.859,00	13.806.293.810,00
5	Taperum/Taspen	164.792.092,00	269.585,00
	Jumlah	43.317.210.623,00	43.045.019.118,00

B. Arus Keluar Kas

Rincian arus keluar dari aktivitas non anggaran terdiri dari:

Tabel 5.94
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris TA 2022 dan 2021

No	Uraian	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
A	Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) terdiri dari:		
1	PPN	22.635.810.497,00	22.307.793.210,00
2	PPh Pasal 21	2.244.233.158,00	2.179.499.949,00
3	PPh Pasal 22. 23. 26. 4 (2)	4.487.440.017,00	4.751.162.564,00
4	IWP	13.784.934.859,00	13.806.293.810,00
5	Taperum/Taspen	164.792.092,00	269.585,00
	Jumlah	43.317.210.623,00	43.045.019.118,00

5.5.5 Saldo Akhir Kas

Dari arus kas bersih keempat aktivitas di atas terjadi penurunan kas sebesar Rp14.197.094.679,52 ditambah dengan saldo awal Kas di Kas Daerah sebesar Rp28.028.583.941,78 sehingga saldo akhir kas per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp45.026.514.426,53, yang terdiri:

- Saldo akhir Kas di Kas Daerah sebesar Rp42.225.678.621,30;
- Saldo Kas di BLUD sebesar Rp2.800.629.527,89;
- Saldo akhir Kas Dana BOS sebesar Rp0,00;
- Saldo akhir Kas Dana Kapitasi pada FKTP Rp34.789,00 ;
- Saldo akhir Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp171.488,34.

5.6 Penjelasan atas Pos-Pos dalam Laporan Perubahan Ekuitas

Perubahan ekuitas yang terjadi pada Tahun 2022 yakni:

5.6.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal merupakan nilai ekuitas akhir per 31 Desember 2021. Adapun nilai ekuitas awal pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp1.807.897.308.446,59

A. Surplus Defisit - LO

Surplus/Defisit LO berasal Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasi merupakan selisih antara total pendapatan dikurangi dengan jumlah beban operasi ditambah

Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Pada Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya mengalami Surplus-LO sebesar Rp15.978.971.779,87. Rincian perhitungan Surplus/Defisit-LO dapat dilihat di Tabel 5.81.

B. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

1. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi nilai persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi atas persediaan Tahun 2022 sebesar Rp0,00

2. Lain - lain

Merupakan kontra akun dari dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar lainnya, diantaranya adalah selisih akumulasi penyusutan dikurangi beban penyusutan, selisih koreksi nilai aset tetap (penambahan/penurunan) akibat salah pencatatan atau disebabkan adanya pelepasan aset (penghapusan/penjualan aset) dan aset lancar (selisih nilai piutang). Adapun nilai Lain-lain pada TA 2022 adalah sebesar Rp18.721.140.202,85 yang mempengaruhi posisi ekuitas Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya selama TA 2022. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.95
Mutasi Ekuitas Lain-lain TA 2022

NO	URAIAN	NILAI (Rp)
A	MUTASI TAMBAH	
1	Koreksi Kurang Catat KDP Pembangunan Ram RSUD 06413/SP2D-LS/2021 (Nilai Perencanaan)	37.449.000,00
2	Penyesuaian Penyisihan Piutang Retribusi pada Dinas Kelautan TYL yang dihapuskan/dialihkan ke Provinsi	1.502.240,00
3	Koreksi Kurang Catat Nilai Perencanaan Gedung MUQ TA 2021	47.800.000,00
4	Koreksi Pembulatan Atas Perhitungan Penyusutan	1,15
5	Koreksi Kurang Catat Aset Tetap bersumber dari Hibah kementerian Pertanian yang baru dicatat pada TA 2022	12.111.910.497,00
6	Koreksi Atas Penilaian/Pemberian Nilai Aset Tetap Tanah berdasarkan NJOP	854.606.682,50
	Jumlah 1 s/d 6	13.053.268.420,65
B	MUTASI KURANG	
1	Koreksi Penyusutan atas Kapitalisasi KIB C ke Aset Induknya	101.099.599,20
2	Koreksi Penyusutan atas Kapitalisasi KIB D ke Aset Induknya	21.210.699.603,94
3	Koreksi Atas Pengakuan Hutang Belanja Pada Dinas PU sesuai dgn Hasil Review Inspektorat Nomor R.740/113/LHR-INSP/2022	461.934.747,00
4	Koreksi Pembulatan Atas Perhitungan Penyusutan	0,01
5	Koreksi Piutang Retribusi atas Peralihan Pengelolaan Aset pada Dinas Kelautan Ke Provinsi	21.033.600,00

NO	URAIAN	NILAI (Rp)
6	Koreksi Atas Hutang Iuran 4% BPJS TA 2020 dan 2021	216.917.140,00
7	Koreksi Nilai Penyusutan KIB B yang bersumber hibah dari Kementerian Pertanian	5.774.577.029,16
8	Koreksi kurang Catat Penyusutan atas (Perencanaa Jalan Nanggroe - Lhok Sandeng - Krueng Tijee) yang telah diselesaikan TA 2021	918.000,00
9	Koreksi atas saldo laba di tahan tahun 2021 PDAM Tirta Krueng Meureudu berdasarkan LK Audited KAP Drs. Katio & Rekan	34.429.580,00
10	Koreksi atas Penyusutan KIB B yang bersumber dari Hibah Politeknik Payakumbuh	3.952.799.324,19
	Jumlah 1 s/d 10	31.774.408.623,50
C	JUMLAH EKUITAS LAIN-LAIN A-B	(18.721.140.202,85)

5.6.2 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir TA 2022 dan TA 2021 masing-masing sebesar Rp1.805.155.140.023,61 dan sebesar Rp1.807.897.308.446,59 dengan demikian menunjukkan bahwa ekuitas Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya pada TA 2022 menurun sebesar Rp(2.742.168.422,98) atau sebesar 0,15%.

BAB VI
PENJELASAN DAN INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Gambaran Umum Kabupaten Pidie Jaya

Berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2007, Kabupaten Pidie Jaya terbentuk, yang merupakan bagian dari 23 (dua puluh tiga) Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Wilayah Kabupaten Pidie Jaya terletak pada posisi 04°06'-04°47' Lintang Utara dan 95°52'-96°30' Bujur Timur dengan luas daerah 1.162,84 km². Kabupaten Pidie Jaya berbatasan dengan Selat Malaka di sebelah utara, Kabupaten Pidie di sebelah selatan dan barat, Kabupaten Bireuen di sebelah timur dengan luas wilayah 1.162.84 km², terdiri dari 8 kecamatan, 34 mukim dan 222 gampong dengan jumlah penduduk berdasarkan Data BPS Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2021 sebanyak 160.327 jiwa yang terdiri atas 79.716 jiwa penduduk laki-laki dan 80.611 jiwa penduduk perempuan. Kepadatan penduduk di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2021 mencapai 168,39 jiwa/km².

Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya saat ini dipimpin oleh:

Bupati : Aiyub Bin Abbas
Wakil Bupati : Dr. Said Mulyadi, SE, M.Si
Sekretaris Daerah : Ir. Jailani

Pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang ingin dicapai adalah “Mewujudkan Kabupaten Pidie Jaya yang Damai, Adil Makmur dan Islami di Bawah Pemerintahan yang Pro Rakyat”.

Berdasarkan visi tersebut diharapkan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dapat bekerja lebih efektif, bersih dan berwibawa serta lebih demokratis dan konstitusional sehingga mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, mandiri dan mempunyai daya saing dalam rangka ketahanan daerah.

6.2 Kepegawaian

Jumlah pegawai per 31 Desember 2022 sebanyak 3.327 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.1
Daftar Pegawai di Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya

GOLONGAN/RUANG	ESELON					TENAGA FUNGSIONAL			STAF	JUMLAH
	I	II	III	IV	V	PENDIDIKAN	KESEHATAN	LAINNYA		
Golongan IV/e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Golongan IV/d	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Golongan IV/c	0	25	0	0	0	8	2	1	0	36
Golongan IV/b	0	8	33	1	0	301	8	3	6	360
Golongan IV/a	0	0	74	19	0	176	31	4	9	313
JUMLAH GOLONGAN IV	0	34	107	20	0	485	41	8	15	710

GOLONGAN/RUANG	ESELON					TENAGA FUNGSIONAL			STAF	JUMLAH
	I	II	III	IV	V	PENDIDIKAN	KESEHATAN	LAINNYA		
Golongan III/d	0	0	34	176	0	277	322	8	23	840
Golongan III/c	0	0	9	78	0	110	174	3	36	410
Golongan III/b	0	0	0	43	0	36	122	2	130	333
Golongan III/a	0	0	0	4	0	55	17	17	383	476
JUMLAH GOLONGAN III	0	0	43	301	0	478	635	30	572	2059
Golongan II/d	0	0	0	0	0	2	185	5	88	280
Golongan II/c	0	0	0	0	0	1	36	0	186	223
Golongan II/b	0	0	0	0	0	1	0	3	26	30
Golongan II/a	0	0	0	0	0	0	1	0	15	16
JUMLAH GOLONGAN II	0	0	0	0	0	4	222	8	315	549
Golongan I/d	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
Golongan I/c	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
Golongan I/b	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Golongan I/a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH GOLONGAN I	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9
TOTAL	0	34	150	321	0	967	898	46	911	3327

Sumber: Database Simgaji 31 Desember 2022

6.3 Kewajiban Kontijensi

6.3.1 Iuran Wajib Pegawai 1% BPJS Kesehatan

Kewajiban kontijensi adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu, dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali Pemerintah atau kewajiban kini timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu tetapi tidak diakui karena:

- Tidak terdapat kemungkinan besar pemerintah mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya; atau
- Jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.

Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya telah melakukan rekonsiliasi Iuran Wajib Pemerintah bersama BPJS Kesehatan Cabang Banda Aceh dan KPPN Banda Aceh berdasarkan Berita Acara Hasil Rekonsiliasi sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 6.2
Hasil Rekonsiliasi Iuran Wajib BPJS Kesehatan

NO	TAHUN IURAN	PNSD		PPPK		TOTAL
		1%	NO BA	1%	NO BA	
1	2020	-593.455.623,00	1836/BA/I.06/0722			-593.455.623,00
2	2021	11.514.866,00	1836/BA/I.06/0722	-460.226,00	06.1/BA/I-06/0122	11.054.640,00
3	2022	40.406.546,00	4491/BA/I.06/1222	5.926.647,00	4492/BA/I.06/1222	46.333.193,00
JUMLAH		-541.534.211,00		5.466.421,00		-536.067.790,00

Dari data pada tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pada tahun 2020 terdapat kekurangan bayar Iuran Wajib Pegawai PNSD 1% BPJS Kesehatan sebesar Rp593.455.623,00;
- b. Pada Tahun 2021 terdapat kelebihan bayar Iuran Wajib Pegawai 1% BPJS Kesehatan sebesar Rp11.054.640,00 yang merupakan akumulasi atas kelebihan bayar Iuran Wajib Pegawai 1% BPJS Kesehatan PNSD sebesar Rp11.514.866,00 dikurangi dengan kurang bayar iuran 1% PPPK sebesar Rp460.226,00;
- c. Pada Tahun 2022 terdapat kelebihan bayar Iuran Wajib Pegawai 1% BPJS Kesehatan sebesar Rp46.333.193,00 yang merupakan akumulasi atas kelebihan bayar Iuran Wajib Pegawai 1% BPJS Kesehatan PNSD sebesar Rp40.406.546,00 ditambah dengan kelebihan bayar iuran 1% PPPK sebesar Rp5.926.647,00.

BAB VII

PENUTUP

Laporan Keuangan yang disusun setiap akhir periode akuntansi merupakan cerminan kinerja entitas pemerintahan yang akan dimanfaatkan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan serta mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan. Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pidie Jaya TA 2022 ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2022. terdiri dari:
 - a. Pendapatan Rp 964.589.745.543,00
 - b. Belanja Rp 963.489.745.543,00
 - c. Pembiayaan Netto Rp (1.100.000.000,00)
2. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2022. terdiri dari:
 - a. Pendapatan Rp 965.677.208.726,89
 - b. Belanja Rp 993.774.314.973,02
 - c. Pembiayaan Netto Rp 28.097.106.246,13
3. Realisasi Pendapatan Daerah sampai dengan akhir TA 2022 mencapai sejumlah Rp993.454.968.096,02 atau 102,88 % dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp965.677.208.726,89.
4. Realisasi Belanja Daerah sampai dengan akhir TA 2022 mencapai sejumlah Rp976.525.559.915,62 atau 98,26 % dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp993.774.314.973,02.
5. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp29.197.106.246,13 sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp1.100.000.000,00. Sehingga nilai Pembiayaan Netto Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya sebesar Rp28.097.106.246,13.
6. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2022 sebesar Rp45.026.514.426,53 terdiri dari:

Kas di Kas Daerah	Rp	42.225.678.621,30
Kas di BLUD	Rp	2.800.629.527,89
Kas di FKTP	Rp	34.789,00

Kas Dana BOS	Rp	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	<u>171.488,34</u>
Jumlah SILPA	Rp	45.026.514.426,53

Berdasarkan realisasi anggaran dan penjelasan di atas, maka pelaksanaan APBK Kabupaten Pidie Jaya TA 2022 pada umumnya dapat berjalan baik dan lancar. Perlu diketahui bersama, bahwa disamping hasil yang telah dicapai masih terdapat kelemahan, kekurangan dan hambatan yang kesemuanya itu harus dihadapi sebagai pelajaran dan tantangan demi tercapainya kesempurnaan di masa yang akan datang.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2022 yang merupakan penjelasan lebih lanjut sebagai bahan informasi dalam rangka pengambilan keputusan bagi para pengguna terutama bagi pejabat pengelola keuangan daerah untuk mengevaluasi sejauh mana kinerja yang dicapai khususnya yang berkaitan dengan penerimaan daerah, belanja daerah dan pembiayaan serta aset, kewajiban dan ekuitas sehingga dapat diambil langkah-langkah konkrit untuk perbaikan ke depan terutama dalam hal penentuan target pendapatan maupun langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan yang mengakibatkan penerimaan daerah yang tidak mencapai target, sedangkan para pengguna lainnya dapat menilai tingkat kemampuan daerah berdasarkan neraca yang disajikan dalam laporan keuangan dimaksud.

Kami menyadari bahwa dalam pengelolaan administrasi keuangan daerah masih banyak kelemahan-kelemahan yang bersifat administratif dan teknis, hal tersebut disebabkan antara lain karena sumber daya aparat pengelola yang belum sepenuhnya memahami tugas pokok dan fungsi masing-masing. Namun ke depan, tahap demi tahap akan dilakukan perbaikan sesuai tuntutan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



LAMPIRAN

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
REKAPITULASI DANA BOS TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA SEKOLAH	SILPA 2021	PENDAPATAN				BELANJA			SISA		
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	AFIRMASI	JLH PENDAPATAN	PEGAWAI	BARJAS		MODAL	JLH BELANJA
1	SMPN 1 BANDAR BARU	2.820.000,00	213.672.000,00	282.076.000,00	213.672.000,00	-	709.420.000,00	104.040.000,00	509.200.000,00	99.000.000,00	712.240.000,00	-
2	SMPN 2 BANDAR BARU	12.992.000,00	59.508.000,00	79.344.000,00	59.508.000,00	-	198.360.000,00	38.575.000,00	116.651.000,00	56.126.000,00	211.352.000,00	-
3	SMPN 3 BANDAR BARU	-	11.484.000,00	15.312.000,00	11.484.000,00	-	38.280.000,00	14.636.000,00	23.644.000,00	-	38.280.000,00	-
4	SMPN 4 BANDAR BARU	8.120.000,00	21.228.000,00	28.304.000,00	21.228.000,00	-	70.760.000,00	9.300.000,00	61.784.000,00	7.796.000,00	78.880.000,00	-
5	SMPN 5 BANDAR BARU	6.496.000,00	76.560.000,00	95.584.000,00	76.560.000,00	-	248.704.000,00	33.420.000,00	172.968.000,00	48.812.000,00	255.200.000,00	-
6	SMPN 6 BANDAR BARU	2.436.000,00	2.784.000,00	3.712.000,00	2.784.000,00	-	9.280.000,00	1.600.000,00	9.720.000,00	396.000,00	11.716.000,00	-
7	SMPN 7 BANDAR BARU	800,00	42.804.000,00	57.071.200,00	42.804.000,00	-	142.679.200,00	24.900.000,00	111.043.000,00	6.737.000,00	142.680.000,00	-
8	SMPN 8 BANDAR BARU	812.000,00	24.012.000,00	32.016.000,00	24.012.000,00	-	80.040.000,00	21.780.000,00	53.942.000,00	5.130.000,00	80.852.000,00	-
9	SMPN 1 TRIENGGADENG	-	161.124.000,00	214.832.000,00	161.124.000,00	-	537.080.000,00	84.640.000,00	242.306.000,00	210.134.000,00	537.080.000,00	-
10	SMPN 1 PANTERAJA	-	58.116.000,00	63.958.000,00	58.116.000,00	-	180.190.000,00	30.720.000,00	109.453.000,00	40.017.000,00	180.190.000,00	-
11	SMPN 2 TRIENGGADENG	600,00	21.576.000,00	28.767.400,00	21.576.000,00	-	71.919.400,00	10.680.000,00	52.990.000,00	8.250.000,00	71.920.000,00	-
12	SMP ULUMUL QURAN PIDIE JAYA	-	46.980.000,00	62.640.000,00	46.980.000,00	120.000.000,00	276.600.000,00	46.700.000,00	148.134.362,00	81.765.638,00	276.600.000,00	-
13	SMPN 1 MEUREUDU	28.420.000,00	136.764.000,00	182.352.000,00	136.764.000,00	120.000.000,00	575.880.000,00	53.460.000,00	457.982.791,00	92.857.209,00	604.300.000,00	-
14	SMPN 2 MEUREUDU	3.712.000,00	45.240.000,00	55.280.500,00	45.240.000,00	-	145.760.500,00	25.300.000,00	96.162.500,00	28.010.000,00	149.472.500,00	-
15	SMPN 1 MEURAH DUA	580.000,00	31.320.000,00	41.180.000,00	31.320.000,00	-	103.820.000,00	11.360.000,00	83.745.000,00	9.295.000,00	104.400.000,00	-
16	SMPN 1 ULIM	464.000,00	21.576.000,00	28.768.000,00	21.576.000,00	-	71.920.000,00	17.880.000,00	49.152.000,00	5.352.000,00	72.384.000,00	-
17	SMPN 2 ULIM	-	74.472.000,00	99.296.000,00	74.472.000,00	-	248.240.000,00	36.552.547,00	156.299.453,00	55.388.000,00	248.240.000,00	-
18	SMPN 3 ULIM	9.280.000,00	18.096.000,00	14.848.000,00	18.096.000,00	-	51.040.000,00	12.080.000,00	46.290.000,00	6.320.000,00	60.320.000,00	-
19	SMPN 1 BANDAR DUA	7.320.400,00	235.944.000,00	314.592.000,00	235.944.000,00	-	786.480.000,00	144.840.000,00	459.096.400,00	189.864.000,00	793.800.400,00	-
20	SMPN 2 BANDAR DUA	-	69.600.000,00	92.800.000,00	69.600.000,00	-	232.000.000,00	30.000.000,00	117.835.000,00	84.165.000,00	232.000.000,00	-
21	SMPN 1 JANGKA BUAH	-	66.468.000,00	88.624.000,00	66.468.000,00	-	221.560.000,00	52.785.000,00	109.644.000,00	59.131.000,00	221.560.000,00	-
22	SMPN 3 BANDAR DUA	-	21.228.000,00	28.304.000,00	21.228.000,00	-	70.760.000,00	14.400.000,00	56.360.000,00	-	70.760.000,00	-
23	SMPN 4 BANDAR DUA	1.276.053,00	43.848.000,00	58.464.000,00	43.848.000,00	-	146.160.000,00	23.440.000,00	77.993.053,00	46.003.000,00	147.436.053,00	-
24	SMPN 2 MEURAH DUA	10.974.000,00	20.880.000,00	16.866.000,00	20.880.000,00	-	58.626.000,00	13.720.000,00	52.022.000,00	3.858.000,00	69.600.000,00	-
25	SMPN 3 TRIENGGADENG	33.815.000,00	11.136.000,00	14.848.000,00	11.136.000,00	-	37.120.000,00	41.183.000,00	29.752.000,00	-	70.935.000,00	-
26	SDN 5 BANDAR BARU	-	31.584.000,00	42.112.000,00	31.584.000,00	-	105.280.000,00	6.800.000,00	74.980.000,00	23.500.000,00	105.280.000,00	-
27	SDN 14 BANDAR BARU	-	36.096.000,00	48.128.000,00	36.096.000,00	-	120.320.000,00	8.600.000,00	100.220.000,00	11.500.000,00	120.320.000,00	-
28	SDN 16 BANDAR BARU	1.140.000,00	49.350.000,00	64.660.000,00	49.350.000,00	-	163.360.000,00	7.200.000,00	129.800.000,00	27.500.000,00	164.500.000,00	-
29	SDN 4 BANDAR BARU	8.258.000,00	64.296.000,00	85.728.000,00	64.296.000,00	-	214.320.000,00	21.004.000,00	165.687.150,00	35.886.850,00	222.578.000,00	-
30	SDN 15 BANDAR BARU	-	54.708.000,00	72.944.000,00	54.708.000,00	-	182.360.000,00	25.200.000,00	120.588.000,00	36.572.000,00	182.360.000,00	-
31	SDN 24 BANDAR BARU	-	17.766.000,00	23.688.000,00	17.766.000,00	-	59.220.000,00	6.200.000,00	45.220.000,00	7.800.000,00	59.220.000,00	-
32	SDN 27 BANDAR BARU	5.358.000,00	37.224.000,00	49.632.000,00	37.224.000,00	-	124.080.000,00	16.500.000,00	91.038.000,00	21.900.000,00	129.438.000,00	-
33	SDN 6 BANDAR BARU	9.212.000,00	29.046.000,00	38.728.000,00	29.046.000,00	-	96.820.000,00	9.600.000,00	84.132.000,00	12.300.000,00	106.032.000,00	-
34	SDN 25 BANDAR BARU	9.400.000,00	16.920.000,00	13.160.000,00	16.920.000,00	-	47.000.000,00	5.568.000,00	30.858.000,00	19.974.000,00	56.400.000,00	-
35	SDN 11 BANDAR BARU	-	12.972.000,00	16.838.500,00	12.972.000,00	80.000.000,00	122.782.500,00	5.472.000,00	84.088.600,00	33.221.900,00	122.782.500,00	-
36	SDN 9 BANDAR BARU	-	39.480.000,00	52.640.000,00	39.480.000,00	-	131.600.000,00	18.360.000,00	82.718.000,00	30.522.000,00	131.600.000,00	-
37	SDN 20 BANDAR BARU	-	26.226.000,00	34.968.000,00	26.226.000,00	-	87.420.000,00	11.720.000,00	60.300.000,00	15.400.000,00	87.420.000,00	-
38	SDN 10 BANDAR BARU	4.324.000,00	18.330.000,00	21.448.900,00	18.330.000,00	-	58.108.900,00	3.600.000,00	56.832.900,00	2.000.000,00	62.432.900,00	-
39	SDN 21 BANDAR BARU	-	28.482.000,00	37.976.000,00	28.482.000,00	-	94.940.000,00	12.000.000,00	55.300.000,00	27.640.000,00	94.940.000,00	-
40	SDN 18 BANDAR BARU	3.948.000,00	23.406.000,00	27.260.000,00	23.406.000,00	-	74.072.000,00	12.800.000,00	52.863.000,00	12.357.000,00	78.020.000,00	-
41	SDN 17 BANDAR BARU	100,00	38.916.000,00	49.973.500,00	38.916.000,00	-	127.805.500,00	21.000.000,00	88.805.600,00	18.000.000,00	127.805.600,00	-
42	SDN 26 BANDAR BARU	1.974.000,00	6.768.000,00	9.024.000,00	6.768.000,00	-	22.560.000,00	3.600.000,00	18.730.000,00	2.204.000,00	24.534.000,00	-
43	SDN 22 BANDAR BARU	-	12.408.000,00	16.544.000,00	12.408.000,00	-	41.360.000,00	4.800.000,00	33.560.000,00	3.000.000,00	41.360.000,00	-
44	SDN 8 BANDAR BARU	3.948.000,00	11.280.000,00	11.092.000,00	11.280.000,00	-	33.652.000,00	3.600.000,00	31.675.000,00	2.325.000,00	37.600.000,00	-
45	SDN 23 BANDAR BARU	-	41.172.000,00	54.896.000,00	41.172.000,00	-	137.240.000,00	17.240.000,00	93.834.600,00	26.165.400,00	137.240.000,00	-
46	SDN 7 BANDAR BARU	-	47.376.000,00	63.168.000,00	47.376.000,00	-	157.920.000,00	20.400.000,00	115.569.600,00	21.950.400,00	157.920.000,00	-
47	SDN 19 BANDAR BARU	3.478.000,00	20.022.000,00	23.218.000,00	20.022.000,00	-	63.262.000,00	9.400.000,00	52.940.000,00	4.400.000,00	66.740.000,00	-
48	SDN 13 BANDAR BARU	5.922.000,00	32.712.000,00	43.616.000,00	32.712.000,00	-	109.040.000,00	15.200.000,00	80.212.000,00	19.550.000,00	114.962.000,00	-
49	SDN 1 BANDAR BARU	-	76.140.000,00	101.520.000,00	76.140.000,00	-	253.800.000,00	56.060.000,00	176.240.000,00	21.500.000,00	253.800.000,00	-
50	SDN 12 BANDAR BARU	2.632.000,00	16.356.000,00	21.808.000,00	16.356.000,00	-	54.520.000,00	8.100.000,00	41.104.000,00	7.948.000,00	57.152.000,00	-
51	SDN 3 BANDAR BARU	752.000,00	29.610.000,00	39.480.000,00	29.610.000,00	-	98.700.000,00	9.600.000,00	68.472.000,00	21.380.000,00	99.452.000,00	-
52	SDN 2 BANDAR BARU	-	17.484.000,00	23.312.000,00	17.484.000,00	-	58.280.000,00	10.000.000,00	48.280.000,00	-	58.280.000,00	-
53	SDN 28 BANDAR BARU	18.800.000,00	10.998.000,00	14.664.000,00	10.998.000,00	-	36.660.000,00	5.680.000,00	45.980.000,00	3.800.000,00	55.460.000,00	-
54	SDN 6 PANTERAJA	600,00	20.304.000,00	27.071.400,00	20.304.000,00	-	67.679.400,00	10.200.000,00	38.485.000,00	18.995.000,00	67.680.000,00	-
55	SDN 5 PANTERAJA	7.238.400,00	33.558.000,00	44.744.000,00	33.558.000,00	-	111.860.000,00	23.760.000,00	77.838.400,00	119.098.400,00	119.098.400,00	-
56	SDN 3 PANTERAJA	1.704.000,00	29.610.000,00	39.480.000,00	29.610.000,00	-	98.700.000,00	12.400.000,00	74.682.000,00	13.322.000,00	100.404.000,00	-
57	SDN 4 PANTERAJA	-	25.098.000,00	33.464.000,00	25.098.000,00	-	83.660.000,00	13.900.000,00	35.135.000,00	34.625.000,00	83.660.000,00	-
58	SDN 1 PANTERAJA	-	54.708.000,00	72.944.000,00	54.708.000,00	-	182.360.000,00	23.425.000,00	118.575.000,00	40.360.000,00	182.360.000,00	-
59	SDN 2 PANTERAJA	-	21.432.000,00	28.576.000,00	21.432.000,00	-	71.440.000,00	12.600.000,00	47.560.000,00	11.280.000,00	71.440.000,00	-
60	SDN 1 BANDAR DUA	-	155.664.000,00	207.552.000,00	155.664.000,00	-	518.880.000,00	88.080.000,00	304.437.200,00	126.362.800,00	518.880.000,00	-

NO	NAMA SEKOLAH	SILPA 2021	PENDAPATAN					BELANJA				SISA
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	AFIRMASI	JLH PENDAPATAN	PEGAWAI	BARJAS	MODAL	JLH BELANJA	
61	SDN 2 BANDAR DUA	6.580.000,00	35.532.000,00	40.796.000,00	35.532.000,00	-	111.860.000,00	25.664.000,00	74.703.000,00	18.073.000,00	118.440.000,00	-
62	SDN 3 BANDAR DUA	-	33.558.000,00	44.744.000,00	33.558.000,00	-	111.860.000,00	16.200.000,00	65.655.000,00	30.005.000,00	111.860.000,00	-
63	SDN 4 BANDAR DUA	2.268.000,00	37.224.000,00	49.632.000,00	37.224.000,00	-	124.080.000,00	18.600.000,00	68.100.600,00	39.647.400,00	126.348.000,00	-
64	SDN 5 BANDAR DUA	3.290.000,00	34.968.000,00	43.334.000,00	34.968.000,00	-	113.270.000,00	29.400.000,00	60.757.000,00	26.403.000,00	116.560.000,00	-
65	SDN 6 BANDAR DUA	-	13.536.000,00	18.048.000,00	13.536.000,00	-	45.120.000,00	10.040.000,00	26.000.000,00	9.080.000,00	45.120.000,00	-
66	SDN 7 BANDAR DUA	-	81.216.000,00	108.288.000,00	81.216.000,00	-	270.720.000,00	35.400.000,00	171.210.000,00	64.110.000,00	270.720.000,00	-
67	SDN 8 BANDAR DUA	-	43.710.000,00	58.280.000,00	43.710.000,00	-	145.700.000,00	15.100.000,00	84.011.000,00	46.589.000,00	145.700.000,00	-
68	SDN 9 BANDAR DUA	-	37.224.000,00	49.632.000,00	37.224.000,00	-	124.080.000,00	22.320.000,00	69.399.800,00	32.360.200,00	124.080.000,00	-
69	SDN 10 BANDAR DUA	-	33.558.000,00	44.744.000,00	33.558.000,00	-	111.860.000,00	21.072.000,00	69.938.000,00	20.850.000,00	111.860.000,00	-
70	SDN 11 BANDAR DUA	-	29.610.000,00	39.480.000,00	29.610.000,00	-	98.700.000,00	20.640.000,00	72.510.000,00	5.550.000,00	98.700.000,00	-
71	SDN 12 BANDAR DUA	-	44.274.000,00	59.032.000,00	44.274.000,00	-	147.580.000,00	20.330.000,00	77.737.000,00	49.513.000,00	147.580.000,00	-
72	SDN 13 BANDAR DUA	-	32.148.000,00	42.864.000,00	32.148.000,00	-	107.160.000,00	16.200.000,00	70.460.000,00	20.500.000,00	107.160.000,00	-
73	SDN 1 ULIM	7.839.600,00	39.198.000,00	52.264.000,00	39.198.000,00	-	130.660.000,00	18.350.000,00	84.767.800,00	35.381.800,00	138.499.600,00	-
74	SDN 2 ULIM	1.704.000,00	36.660.000,00	48.880.000,00	36.660.000,00	-	122.200.000,00	17.400.000,00	79.674.000,00	26.830.000,00	123.904.000,00	-
75	SDN 3 ULIM	1.416.200,00	61.476.000,00	81.968.000,00	61.476.000,00	-	204.920.000,00	27.600.000,00	144.170.200,00	34.566.000,00	206.336.200,00	-
76	SDN 4 ULIM	-	17.766.000,00	23.688.000,00	17.766.000,00	-	59.220.000,00	5.065.000,00	43.601.000,00	10.554.000,00	59.220.000,00	-
77	SDN 5 ULIM	11.280.000,00	32.430.000,00	43.240.000,00	32.430.000,00	-	108.100.000,00	25.930.000,00	70.052.000,00	23.398.000,00	119.380.000,00	-
78	SDN 6 ULIM	3.666.000,00	46.530.000,00	62.040.000,00	46.530.000,00	-	155.100.000,00	25.800.000,00	83.685.000,00	49.281.000,00	158.766.000,00	-
79	SDN 7 ULIM	-	20.868.000,00	27.824.000,00	20.868.000,00	-	69.560.000,00	17.208.000,00	47.233.000,00	5.119.000,00	69.560.000,00	-
80	SDN 8 ULIM	1.000,00	17.202.000,00	22.936.000,00	17.202.000,00	-	57.340.000,00	15.200.000,00	39.341.000,00	2.800.000,00	57.341.000,00	-
81	SDN 1 JANGKA BUYA	-	56.682.000,00	75.576.000,00	56.682.000,00	-	188.940.000,00	26.400.000,00	113.468.500,00	49.071.500,00	188.940.000,00	-
82	SDN 2 JANGKA BUYA	1.692.000,00	46.812.000,00	62.416.000,00	46.812.000,00	-	156.040.000,00	28.200.000,00	84.737.000,00	44.795.000,00	157.732.000,00	-
83	SDN 3 JANGKA BUYA	80,00	40.608.000,00	49.149.000,00	40.608.000,00	-	130.365.000,00	18.000.000,00	95.977.080,00	16.388.000,00	130.365.080,00	-
84	SDN 1 MEUREUDU	-	33.276.000,00	44.368.000,00	33.276.000,00	-	110.920.000,00	16.200.000,00	71.540.000,00	23.180.000,00	110.920.000,00	-
85	SDN 2 MEUREUDU	-	25.380.000,00	33.840.000,00	25.380.000,00	80.000.000,00	164.600.000,00	23.900.000,00	98.210.466,00	42.489.534,00	164.600.000,00	-
86	SDN 3 MEUREUDU	8.648.000,00	54.708.000,00	72.944.000,00	54.708.000,00	-	182.360.000,00	14.400.000,00	149.713.000,00	26.895.000,00	191.008.000,00	-
87	SDN 4 MEUREUDU	1.974.000,00	34.404.000,00	43.898.000,00	34.404.000,00	-	112.706.000,00	18.960.000,00	92.350.000,00	3.370.000,00	114.680.000,00	-
88	SDN 5 MEUREUDU	-	28.482.000,00	37.976.000,00	28.482.000,00	-	94.940.000,00	13.200.000,00	77.570.000,00	4.170.000,00	94.940.000,00	-
89	SDN 6 MEUREUDU	40.608.000,00	40.608.000,00	13.536.000,00	40.608.000,00	-	94.752.000,00	21.400.000,00	97.429.000,00	16.531.000,00	135.360.000,00	-
90	SDN 7 MEUREUDU	-	21.996.000,00	26.080.000,00	21.996.000,00	-	70.072.000,00	12.660.000,00	47.472.000,00	9.940.000,00	70.072.000,00	-
91	SDN 8 MEUREUDU	-	80.088.000,00	106.784.000,00	80.088.000,00	-	266.960.000,00	24.000.000,00	172.430.000,00	70.530.000,00	266.960.000,00	-
92	SDN 9 MEUREUDU	5.264.000,00	17.766.000,00	23.688.000,00	17.766.000,00	-	59.220.000,00	13.100.000,00	51.384.000,00	-	64.484.000,00	-
93	SDN 10 MEUREUDU	-	43.428.000,00	52.954.000,00	43.428.000,00	-	139.810.000,00	16.560.000,00	99.524.000,00	23.726.000,00	139.810.000,00	-
94	SDN 11 MEUREUDU	-	15.792.000,00	21.056.000,00	15.792.000,00	-	52.640.000,00	8.200.000,00	40.478.000,00	3.962.000,00	52.640.000,00	-
95	SDN 12 MEUREUDU	-	28.200.000,00	37.600.000,00	28.200.000,00	-	94.000.000,00	18.800.000,00	58.967.000,00	16.233.000,00	94.000.000,00	-
96	SDN 13 MEUREUDU	1.652.400,00	31.584.000,00	41.034.000,00	31.584.000,00	-	104.202.000,00	19.620.000,00	58.562.400,00	27.672.000,00	105.854.400,00	-
97	SDN 1 MEURAH DUA	658.000,00	32.994.000,00	43.992.000,00	32.994.000,00	-	109.980.000,00	19.680.000,00	65.547.200,00	25.410.800,00	110.638.000,00	-
98	SDN 2 MEURAH DUA	3.196.000,00	35.532.000,00	47.376.000,00	35.532.000,00	-	118.440.000,00	16.800.000,00	103.572.000,00	1.264.000,00	121.636.000,00	-
99	SDN 3 MEURAH DUA	-	30.738.000,00	40.984.000,00	30.738.000,00	-	102.460.000,00	19.200.000,00	58.764.800,00	24.495.200,00	102.460.000,00	-
100	SDN 4 MEURAH DUA	-	36.942.000,00	49.256.000,00	36.942.000,00	-	123.140.000,00	15.000.000,00	87.630.000,00	20.510.000,00	123.140.000,00	-
101	SDN 5 MEURAH DUA	5.264.000,00	38.352.000,00	51.136.000,00	38.352.000,00	-	127.840.000,00	12.720.000,00	83.948.000,00	36.436.000,00	133.104.000,00	-
102	SDN 6 MEURAH DUA	-	20.022.000,00	26.696.000,00	20.022.000,00	-	66.740.000,00	11.620.000,00	38.272.000,00	16.848.000,00	66.740.000,00	-
103	SDN 1 TRIENGGADENG	1.906.000,00	101.520.000,00	135.360.000,00	101.520.000,00	80.000.000,00	418.400.000,00	66.600.000,00	296.243.770,00	57.462.230,00	420.306.000,00	-
104	SDN 2 TRIENGGADENG	-	30.174.000,00	40.232.000,00	30.174.000,00	-	100.580.000,00	12.000.000,00	78.315.032,00	10.264.968,00	100.580.000,00	-
105	SDN 3 TRIENGGADENG	800,00	-	36.472.000,00	27.354.000,00	-	63.826.000,00	4.800.000,00	47.364.800,00	11.662.000,00	63.826.800,00	-
106	SDN 4 TRIENGGADENG	-	26.226.000,00	34.968.000,00	26.226.000,00	80.000.000,00	167.420.000,00	18.900.000,00	131.918.497,00	16.601.503,00	167.420.000,00	-
107	SDN 5 TRIENGGADENG	-	26.226.000,00	34.968.000,00	26.226.000,00	-	87.420.000,00	11.200.000,00	60.320.100,00	15.899.900,00	87.420.000,00	-
108	SDN 6 TRIENGGADENG	1.692.000,00	22.560.000,00	28.388.000,00	22.560.000,00	-	73.508.000,00	9.120.000,00	46.910.000,00	19.170.000,00	75.200.000,00	-
109	SDN 7 TRIENGGADENG	10.246.000,00	103.776.000,00	138.368.000,00	103.776.000,00	80.000.000,00	425.910.000,00	47.600.000,00	308.032.684,00	80.523.316,00	436.156.000,00	-
110	SDN 8 TRIENGGADENG	1.693.000,00	44.556.000,00	57.715.000,00	44.556.000,00	-	146.827.000,00	29.600.000,00	93.129.300,00	25.790.700,00	148.520.000,00	-
111	SDN 9 TRIENGGADENG	-	33.558.000,00	44.744.000,00	33.558.000,00	-	111.860.000,00	20.800.000,00	62.981.900,00	28.078.100,00	111.860.000,00	-
112	SDN 10 TRIENGGADENG	-	22.842.000,00	30.456.000,00	22.842.000,00	-	76.140.000,00	11.100.000,00	51.078.800,00	13.961.200,00	76.140.000,00	-
113	SDN 11 TRIENGGADENG	-	24.816.000,00	33.088.000,00	24.816.000,00	-	82.720.000,00	16.400.000,00	50.474.000,00	15.846.000,00	82.720.000,00	-
114	SDN 12 TRIENGGADENG	-	22.278.000,00	29.704.000,00	22.278.000,00	-	74.260.000,00	7.200.000,00	43.460.000,00	23.600.000,00	74.260.000,00	-
115	SDN 13 TRIENGGADENG	-	30.174.000,00	40.232.000,00	30.174.000,00	-	100.580.000,00	12.120.000,00	63.099.100,00	25.360.900,00	100.580.000,00	-
	JUMLAH	340.147.033,00	4.735.710.000,00	6.204.645.400,00	4.763.054.000,00	640.000.000,00	16.343.409.400,00	2.497.239.547,00	10.914.790.438,00	3.271.526.448,00	16.683.556.433,00	-

92

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
REKAPITULASI PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2022

KODE SKPK	NAMA SKPK	KD REKENING	NAMA REKENING	2022	2021
1.01.01.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	111201030001	Alat Tulis Kantor	453.000,00	629.000,00
1.01.05.00	Dinas Pendidikan Dayah	111201030001	Alat Tulis Kantor	200.150,00	194.400,00
1.02.01.00	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	111201010012	Bahan Lainnya	1.209.485.061,73	85.799.601,94
1.02.01.00	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	111201040001	Obat	2.395.715.552,86	3.146.909.660,00
1.02.02.00	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten	111201010002	Bahan Kimia	366.333.173,86	199.570.000,30
1.02.02.00	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten	111201010010	Isi Tabung Gas	3.400.000,00	10.880.000,00
1.02.02.00	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten	111201010012	Bahan Lainnya	6.075.340.079,39	6.206.803.514,59
1.02.02.00	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten	111201030001	Alat Tulis Kantor	22.379.006,00	16.187.492,00
1.02.02.00	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten	111201030003	Bahan Cetak	103.504.500,00	122.516.000,00
1.02.02.00	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten	111201040001	Obat	2.585.090.905,62	4.017.703.123,33
1.03.01.00	Dinas Pekerjaan Umum	111201030001	Alat Tulis Kantor	3.110.200,00	1.338.260,00
1.05.01.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	111201060001	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	1.011.956.264,00	1.082.729.962,00
1.05.01.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	111201070003	Natura dan Pakan Lainnya	104.374.000,00	17.929.000,00
1.05.02.00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	111201030001	Alat Tulis Kantor	124.500,00	389.500,00
1.06.01.00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	111201030001	Alat Tulis Kantor	74.000,00	61.200,00
1.06.01.00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	111201050001	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	211.273.625,00	542.119.375,00
1.06.01.00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	111201060001	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	248.565.000,00	1.736.618.784,00
2.10.01.00	Dinas Pertanahan	111201030001	Alat Tulis Kantor	225.280,00	336.405,00
2.11.01.00	Dinas Lingkungan Hidup	111201030001	Alat Tulis Kantor	545.000,00	490.000,00
2.12.01.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	111201030001	Alat Tulis Kantor	24.030.000,00	94.275.000,00
2.12.01.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	111201030003	Bahan Cetak	-	34.100.000,00
2.13.01.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	111201030001	Alat Tulis Kantor	462.800,00	481.800,00
2.15.01.00	Dinas Perhubungan	111201030001	Alat Tulis Kantor	436.500,00	471.900,00
2.16.01.00	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	111201030001	Alat Tulis Kantor	5.000,00	-
2.19.01.00	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	111201030001	Alat Tulis Kantor	-	1.500,00
3.27.01.00	Dinas Pertanian dan Pangan	111201030001	Alat Tulis Kantor	1.308.000,00	2.535.000,00
3.27.02.00	Dinas Perkebunan dan Peternakan	111201030001	Alat Tulis Kantor	1.649.500,00	1.069.000,00
4.01.01.00	Sekretariat Daerah Kabupaten	111201030001	Alat Tulis Kantor	-	168.100,00
4.02.01.00	Sekretariat DPRK	111201010012	Bahan Lainnya	1.065.000,00	2.948.000,00
4.02.01.00	Sekretariat DPRK	111201030001	Alat Tulis Kantor	7.102.000,00	4.805.700,00
4.02.01.00	Sekretariat DPRK	111201030003	Bahan Cetak	7.698.000,00	6.000.000,00
4.02.01.00	Sekretariat DPRK	111201030008	Alat Listrik	847.500,00	2.050.000,00

KODE SKPK	NAMA SKPK	KD REKENING	NAMA REKENING	2022	2021
5.01.01.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	111201030001	Alat Tulis Kantor	572.500,00	443.000,00
5.02.01.00	Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten	111201030001	Alat Tulis Kantor	280.000,00	113.000,00
5.02.01.00	Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten	111201030003	Bahan Cetak	56.690.000,00	45.580.000,00
5.03.01.00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	111201030001	Alat Tulis Kantor	453.000,00	419.900,00
6.01.01.00	Inspektorat	111201030001	Alat Tulis Kantor	24.500,00	373.400,00
7.01.01.00	Kecamatan Bandar Baru	111201030001	Alat Tulis Kantor	253.000,00	255.500,00
7.01.05.00	Kecamatan Meurah Dua	111201010012	Bahan Lainnya	-	56.000,00
7.01.05.00	Kecamatan Meurah Dua	111201030001	Alat Tulis Kantor	178.000,00	122.000,00
7.01.06.00	Kecamatan Ulim	111201030001	Alat Tulis Kantor	267.500,00	315.500,00
7.01.07.00	Kecamatan Jangka Buya	111201030001	Alat Tulis Kantor	254.800,00	206.300,00
7.01.08.00	Kecamatan Bandar Dua	111201030001	Alat Tulis Kantor	75.500,00	170.000,00
8.01.01.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	111201030001	Alat Tulis Kantor	1.192.480,00	914.495,00
9.01.03.00	Sekretariat Baitul Mal	111201010012	Bahan Lainnya	30.200,00	28.700,00
9.01.03.00	Sekretariat Baitul Mal	111201030001	Alat Tulis Kantor	11.450,00	6.350,00
9.01.03.00	Sekretariat Baitul Mal	111201030003	Bahan Cetak	-	8.000,00
JUMLAH PERSEDIAAN				14.447.036.528,46	17.387.123.423,16

92

**ANALISIS PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP
KABUPATEN PIDIE JAYA**

KABUPATEN/KOTA : PIDIE JAYA
PROVINSI : ACEH

No	Jenis Aset Tetap	Mutasi Penambahan							
		Saldo Awal TA 2022 (Audited)	Bm Lra TA 2022 (Anaudited)	Pengakuan Utang Belanja/Belanja Barang dan Jasa	Koreksi Nilai	Belanja Barang Hibah Dana BOS	Reklas Masuk antar KIB	Aset Yang Diperoleh dari Hibah	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (4 s/d 9)
1	Tanah	145.102.281.035,71	4.996.809.600,00	-	854.606.682,50	-	-	-	5.851.416.282,50
2	Peralatan dan Mesin	335.244.326.373,12	30.099.824.944,00	-	-	1.840.065.142,00	366.215.600,00	18.931.921.243,00	51.238.026.929,00
3	Gedung dan Bangunan	737.188.239.536,57	43.151.915.965,51	139.969.312,69	85.249.000,00	-	4.593.668.773,00	28.113.201.400,00	76.084.004.451,20
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.448.307.770.451,36	105.461.360.624,44	-	-	-	192.130.000,00	-	105.653.490.624,44
5	Aset Tetap Lainnya	38.512.377.414,85	529.813.300,00	-	-	1.430.961.306,00	-	148.748.983,00	2.109.523.589,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	4.985.301.973,00	-	444.083.100,00	-	-	1.648.386.300,00	-	2.092.469.400,00
	Jumlah	2.709.340.296.784,62	184.239.724.433,95	584.052.412,69	939.855.682,50	3.271.026.448,00	6.800.400.673,00	47.193.871.626,00	243.028.931.276,14

No	Jenis Aset Tetap	Mutasi Pengurangan							Saldo Akhir 2022
		Aset Tak Berwujud	Reklas ke Aset Lainnya	Ekstrakomptable/ Beban LO	Reklas Keluar antar KIB	Aset Tetap Yang Dihibahkan	Aset Tetap Dihapuskan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (3 s/d 8)	10 = (3 + 10 - 9)
1	Tanah	-	-	-	478.356.900,00	4.518.452.700,00	-	4.996.809.600,00	145.956.887.718,21
2	Peralatan dan Mesin	-	2.956.676.805,16	1.165.540.261,00	12.000.000,00	-	1.675.645.200,00	5.809.862.266,16	380.672.491.035,96
3	Gedung dan Bangunan	-	-	16.000.000,00	456.068.600,00	3.462.904.900,00	919.874.725,00	4.854.848.225,00	808.417.395.762,77
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	48.358.262.390,60	-	1.082.756.400,00	-	-	49.441.018.790,60	1.504.520.242.285,20
5	Aset Tetap Lainnya	117.377.200,00	-	-	19.694.000,00	-	-	137.071.200,00	40.484.829.803,85
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	4.658.668.773,00	-	-	4.658.668.773,00	2.419.102.600,00
	Jumlah	117.377.200,00	51.314.939.195,76	1.181.540.261,00	6.707.544.673,00	7.981.357.600,00	2.595.519.925,00	69.898.278.854,76	2.882.470.949.206,00

92

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
REKAPITULASI REALISASI BELANJA MODAL PER SATUAN KERJA
1 Januari 2022 - 31 Desember 2022

NO	Kode SKPK	Nama SKPK	Belanja Modal Tanah	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Jumlah
1	1.01.01.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		4.578.644.000,00	13.548.907.236,00	199.090.000,00	10.000.000,00	18.336.641.236,00
2	1.01.04.00	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah		9.000.000,00				9.000.000,00
3	1.01.05.00	Dinas Pendidikan Dayah		62.850.000,00	2.120.615.654,00			2.183.465.654,00
4	1.02.01.00	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana		730.353.948,00	3.917.787.499,20			4.648.141.447,20
5	1.02.02.00	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten		20.639.686.946,00	16.448.503.401,99		14.163.200,00	37.102.353.547,99
6	1.03.01.00	Dinas Pekerjaan Umum		635.700.000,00	1.243.372.100,00	88.214.673.244,17	5.000.000,00	90.098.745.344,17
7	1.05.01.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				1.086.002.099,74		1.086.002.099,74
8	2.10.01.00	Dinas Pertanahan	4.996.809.600,00	130.336.000,00				5.127.145.600,00
9	2.11.01.00	Dinas Lingkungan Hidup		15.000.000,00				15.000.000,00
10	2.12.01.00	Dinas Kependudukan dan Percatatan Sipil		42.000.000,00				42.000.000,00
11	2.13.01.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong		8.000.000,00				8.000.000,00
12	2.16.01.00	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian		55.927.000,00			38.214.000,00	94.141.000,00
13	2.19.01.00	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata		34.000.000,00	8.000.000,00			42.000.000,00
14	2.23.01.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		108.500.000,00			371.896.100,00	480.396.100,00
15	3.25.01.00	Dinas Kelautan dan Perikanan		561.232.000,00	992.148.957,00	491.342.372,00		2.044.723.329,00
16	3.27.01.00	Dinas Pertanian dan Pangan		503.430.000,00	1.256.245.482,82	4.283.468.982,53		6.043.144.465,35
17	3.27.02.00	Dinas Perkebunan dan Peternakan		443.632.000,00	348.919.000,00	11.186.783.926,00		11.979.334.926,00
18	3.31.01.00	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi		59.766.800,00	2.928.853.634,50			2.988.620.434,50
19	4.01.01.00	Sekretariat Daerah Kabupaten		208.529.000,00	199.152.000,00			407.681.000,00
20	4.02.01.00	Sekretariat DPRK		144.750.000,00			5.846.000,00	150.596.000,00
21	5.02.01.00	Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten		797.900.000,00				797.900.000,00
22	5.03.01.00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		89.522.250,00			84.694.000,00	174.216.250,00
23	6.01.01.00	Inspektorat		22.500.000,00				22.500.000,00
24	7.01.01.00	Kecamatan Bandar Baru		26.500.000,00				26.500.000,00
25	7.01.02.00	Kecamatan Panteraja		4.900.000,00	19.963.000,00			24.863.000,00
26	7.01.04.00	Kecamatan Meureudu		49.750.000,00				49.750.000,00
27	7.01.05.00	Kecamatan Meurah Dua		19.200.000,00				19.200.000,00
28	7.01.06.00	Kecamatan Ulim		14.600.000,00				14.600.000,00
29	7.01.07.00	Kecamatan Jangka Buya		7.240.000,00	119.448.000,00			126.688.000,00
30	7.01.08.00	Kecamatan Bandar Dua		21.000.000,00				21.000.000,00
31	8.01.01.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		8.625.000,00				8.625.000,00
32	9.01.02.00	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama		3.000.000,00				3.000.000,00
33	9.01.03.00	Sekretariat Baitul Mal Kabupaten		63.750.000,00				63.750.000,00
		Total	4.996.809.600,00	30.099.824.944,00	43.151.915.965,51	105.461.360.624,44	529.813.300,00	184.239.724.433,95

98

**PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
REKAPITULASI EKSTRAKOMPTABEL TAHUN 2022**

No	Kode SKPK	Nama SKPK	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Jumlah
1	1.01.01.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	746.529.850,00	-	746.529.850,00
2	1.02.01.00	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	49.948.451,00		49.948.451,00
3	1.02.02.00	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten	267.945.160,00		267.945.160,00
4	1.03.01.00	Dinas Pekerjaan Umum		8.000.000,00	8.000.000,00
5	2.10.01.00	Dinas Pertanahan	6.516.000,00		6.516.000,00
6	2.19.01.00	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata		8.000.000,00	8.000.000,00
7	3.27.01.00	Dinas Pertanian dan Pangan	10.400.000,00		10.400.000,00
8	3.31.01.00	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	49.766.800,00		49.766.800,00
9	4.01.01.00	Sekretariat Daerah Kabupaten	1.840.000,00		1.840.000,00
10	5.02.01.00	Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten	2.600.000,00		2.600.000,00
11	5.03.01.00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	14.994.000,00		14.994.000,00
12	7.01.04.00	Kecamatan Meureudu	15.000.000,00		15.000.000,00
		Total	1.165.540.261,00	16.000.000,00	1.181.540.261,00

98

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
REKAPITULASI PIUTANG PAJAK PBB BERDASARKAN TAHUN SPPT

Tahun SPPT	SALDO AWAL PIUTANG POKOK PBBP2 sd. 2021 + SPPT 2022	Pembayaran Piutang Pokok PBB-P2 di tahun 2022	Pembayaran PBB_DENDA di Tahun 2022	Piutang Pokok PBB-P2 yang masih sisa Per 31 Desember 2022	Tgl Jatuh Tempo Pelunasan	Tarif Denda Per 31 Des 2022 (2%/bln)	Piutang Denda Per 31 des 2022	Piutang Denda PBB P2 Per 31 Desember 2022 (Penyetoran Denda Tahun Lalu)
1	2	3	4	5=2-3	6	7	8=5x7	9=8-4
1995	18.076.826,00	235.141,00	112.858,00	17.841.685,00	30/09/1995	48%	8.564.008,80	8.451.150,80
1996	85.498.610,00	1.379.435,00	661.841,00	84.119.175,00	30/09/1996	48%	40.377.204,00	39.715.363,00
1997	125.544.892,00	2.123.108,00	1.018.629,00	123.421.784,00	30/09/1997	48%	59.242.456,32	58.223.827,32
1998	124.795.278,00	2.112.515,00	1.013.544,00	122.682.763,00	30/09/1998	48%	58.887.726,24	57.874.182,24
1999	161.570.411,00	2.705.530,00	1.298.113,00	158.864.881,00	30/09/1999	48%	76.255.142,88	74.957.029,88
2000	87.157.997,00	1.324.232,00	635.388,00	85.833.765,00	30/09/2000	48%	41.200.207,20	40.564.819,20
2001	132.109.272,00	2.258.481,00	1.083.762,00	129.850.791,00	30/09/2001	48%	62.328.379,68	61.244.617,68
2002	151.938.310,00	2.565.002,00	1.230.866,00	149.373.308,00	30/09/2002	48%	71.699.187,84	70.468.321,84
2003	122.481.816,00	2.089.264,00	1.002.583,00	120.392.552,00	30/09/2003	48%	57.788.424,96	56.785.841,96
2004	120.748.009,00	2.080.344,00	998.316,00	118.667.665,00	30/09/2004	48%	56.960.479,20	55.962.163,20
2005	117.553.825,00	1.979.462,00	949.902,00	115.574.363,00	30/09/2005	48%	55.475.694,24	54.525.792,24
2006	119.318.942,00	1.967.660,00	944.243,00	117.351.282,00	30/09/2006	48%	56.328.615,36	55.384.372,36
2007	168.767.012,00	2.801.126,00	1.344.256,00	165.965.886,00	30/09/2007	48%	79.663.625,28	78.319.369,28
2008	172.154.950,00	2.913.619,00	1.398.349,00	169.241.331,00	30/09/2008	48%	81.235.838,88	79.837.489,88
2009	115.140.243,00	1.133.154,00	543.842,00	114.007.089,00	30/09/2009	48%	54.723.402,72	54.179.560,72
2010	241.656.528,00	2.808.195,00	1.347.704,00	238.848.333,00	30/09/2010	48%	114.647.199,84	113.299.495,84
2011	392.134.080,00	4.959.327,00	2.380.214,00	387.174.753,00	30/09/2011	48%	185.843.881,44	183.463.667,44
2012	347.429.462,00	4.711.526,00	2.261.288,00	342.717.936,00	30/09/2012	48%	164.504.609,28	162.243.321,28
2013	589.734.467,00	7.709.875,00	3.700.617,00	582.024.592,00	30/09/2013	48%	279.371.804,16	275.671.187,16
2014	453.698.223,00	5.628.616,00	2.701.643,00	448.069.607,00	30/09/2014	48%	215.073.411,36	212.371.768,36
2015	526.007.370,00	7.128.475,00	3.421.552,00	518.878.895,00	30/09/2015	48%	249.061.869,60	245.640.317,60
2016	507.163.875,00	7.122.119,00	3.418.504,00	500.041.756,00	30/09/2016	48%	240.020.042,88	236.601.538,88

Tahun SPPT	SALDO AWAL PIUTANG POKOK PBBP2 sd. 2021 + SPPT 2022	Pembayaran Piutang Pokok PBB-P2 di tahun 2022	Pembayaran PBB_DENDA di Tahun 2022	Piutang Pokok PBB-P2 yang masih sisa Per 31 Desember 2022	Tgl Jatuh Tempo Pelunasan	Tarif Denda Per 31 Des 2022 (2%/bln)	Piutang Denda Per 31 des 2022	Piutang Denda PBB P2 Per 31 Desember 2022 (Penyetoran Denda Tahun Lalu)
1	2	3	4	5=2-3	6	7	8=5x7	9=8-4
2017	435.056.667,00	6.152.626,00	2.953.172,00	428.904.041,00	30/09/2017	48%	205.873.939,68	202.920.767,68
2018	514.571.979,00	8.439.899,00	4.051.022,00	506.132.080,00	30/09/2018	48%	242.943.398,40	238.892.376,40
2019	486.968.644,00	6.969.174,00	3.345.167,00	479.999.470,00	30/09/2019	48%	230.399.745,60	227.054.578,60
2020	680.950.195,00	18.228.228,00	7.585.894,00	662.721.967,00	30/09/2020	48%	318.106.544,16	310.520.650,16
2021	581.845.849,00	27.688.014,00	4.233.875,00	554.157.835,00	30/09/2021	28%	155.164.193,80	150.930.318,80
2022	1.248.065.555,00	577.131.355,00	10.780.563,00	670.934.200,00	30/09/2022	6%	40.256.052,00	29.475.489,00
2023		753.678,00						
Total	8.828.139.287,00	715.099.180,00	66.417.707,00	8.113.793.785,00			3.501.997.085,80	3.435.579.378,80

92

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
PERHITUNGAN PENYISIHAN PIUTANG POKOK PBB P2 DAN DENDA PIUTANG PBB P2
TAHUN ANGGARAN 2022

Tahun	Piutang Pokok PBB-P2 yang masih sisa Per 31 Desember 2022	Piutang Denda PBB P2 Per 31 Desember 2022 - (Penyetoran Denda Tahun Lalu)	Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Pokok SPPT PBB P2	Umur Pokok Piutang PBB per 31 Des 2022	Kualitas Piutang	% Taksiran Piutang Tak Tertagih (per 31 Des 2022)	Penyisihan Pokok Piutang Per 31 Desember 2022	Penyisihan Piutang Denda Per 31 Desember 2022
1	2	3	4	5	6	7	8 = 2 x 7	9 = 3 x 7
1995	17.841.685,00	8.451.150,80	30/09/1995	> 5 Tahun	Macet	100%	17.841.685,00	8.451.150,80
1996	84.119.175,00	39.715.363,00	30/09/1996	> 5 Tahun	Macet	100%	84.119.175,00	39.715.363,00
1997	123.421.784,00	58.223.827,32	30/09/1997	> 5 Tahun	Macet	100%	123.421.784,00	58.223.827,32
1998	122.682.763,00	57.874.182,24	30/09/1998	> 5 Tahun	Macet	100%	122.682.763,00	57.874.182,24
1999	158.864.881,00	74.957.029,88	30/09/1999	> 5 Tahun	Macet	100%	158.864.881,00	74.957.029,88
2000	85.833.765,00	40.564.819,20	30/09/2000	> 5 Tahun	Macet	100%	85.833.765,00	40.564.819,20
2001	129.850.791,00	61.244.617,68	30/09/2001	> 5 Tahun	Macet	100%	129.850.791,00	61.244.617,68
2002	149.373.308,00	70.468.321,84	30/09/2002	> 5 Tahun	Macet	100%	149.373.308,00	70.468.321,84
2003	120.392.552,00	56.785.841,96	30/09/2003	> 5 Tahun	Macet	100%	120.392.552,00	56.785.841,96
2004	118.667.665,00	55.962.163,20	30/09/2004	> 5 Tahun	Macet	100%	118.667.665,00	55.962.163,20
2005	115.574.363,00	54.525.792,24	30/09/2005	> 5 Tahun	Macet	100%	115.574.363,00	54.525.792,24
2006	117.351.282,00	55.384.372,36	30/09/2006	> 5 Tahun	Macet	100%	117.351.282,00	55.384.372,36
2007	165.965.886,00	78.319.369,28	30/09/2007	> 5 Tahun	Macet	100%	165.965.886,00	78.319.369,28
2008	169.241.331,00	79.837.489,88	30/09/2008	> 5 Tahun	Macet	100%	169.241.331,00	79.837.489,88
2009	114.007.089,00	54.179.560,72	30/09/2009	> 5 Tahun	Macet	100%	114.007.089,00	54.179.560,72
2010	238.848.333,00	113.299.495,84	30/09/2010	> 5 Tahun	Macet	100%	238.848.333,00	113.299.495,84
2011	387.174.753,00	183.463.667,44	30/09/2011	> 5 Tahun	Macet	100%	387.174.753,00	183.463.667,44
2012	342.717.936,00	162.243.321,28	30/09/2012	> 5 Tahun	Macet	100%	342.717.936,00	162.243.321,28
2013	582.024.592,00	275.671.187,16	30/09/2013	> 5 Tahun	Macet	100%	582.024.592,00	275.671.187,16
2014	448.069.607,00	212.371.768,36	30/09/2014	> 5 Tahun	Macet	100%	448.069.607,00	212.371.768,36
2015	518.878.895,00	245.640.317,60	30/09/2015	> 5 Tahun	Macet	100%	518.878.895,00	245.640.317,60
2016	500.041.756,00	236.601.538,88	30/09/2016	> 5 Tahun	Macet	100%	500.041.756,00	236.601.538,88
2017	428.904.041,00	202.920.767,68	30/09/2017	> 5 Tahun	Macet	100%	428.904.041,00	202.920.767,68
2018	506.132.080,00	238.892.376,40	30/09/2018	4 Tahun 3 Bulan	Diragukan	50%	253.066.040,00	119.446.188,20
2019	479.999.470,00	227.054.578,60	30/09/2019	3 Tahun 3 Bulan	Diragukan	50%	239.999.735,00	113.527.289,30
2020	662.721.967,00	310.520.650,16	30/09/2020	2 Tahun 3 Bulan	Diragukan	50%	331.360.983,50	155.260.325,08
2021	554.157.835,00	150.930.318,80	30/09/2021	1 Tahun 3 Bulan	Kurang Lancar	10%	55.415.783,50	15.093.031,88
2022	670.934.200,00	29.475.489,00	30/09/2022	3 Bulan	Lancar	0,005	3.354.671,00	147.377,45
Total	8.113.793.785,00	3.435.579.378,80					6.123.045.446,00	2.882.180.177,75

No	Uraian	Kualitas Piutang				Total
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
1	PBBP2	3.354.671,00	55.415.783,50	824.426.758,50	5.239.848.233,00	6.123.045.446,00
2	Denda PBBP2	147.377,45	15.093.031,88	388.233.802,58	2.478.705.965,84	2.882.180.177,75
		3.502.048,45	70.508.815,38	1.212.660.561,08	7.718.554.198,84	9.005.225.623,75

97

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
RINCIAN KONTRUKSI DALAM Pengerjaan

No.	SKPK	Uraian	Lokasi	Tahun Perolehan	Nilai
					(Rp)
A. Dinas Pekerjaan Umum					
1	Dinas Pekerjaan Umum	Perencanaan Peningkatan Jalan	Blang Gapu-Blang Iboh - Lhok Duek	2022	286.800.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum	Perencanaan Peningkatan Jalan	Blang Sukon- Sarah Panyang	2022	175.000.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum	Perencanaan Peningkatan Jalan	Meurandeh Alue- Asan Kumbang - Blang Miroe	2022	226.200.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum	Perencanaan Peningkatan Jalan	Blang Miroe-Kumba	2022	60.206.400,00
5	Dinas Pekerjaan Umum	Perencanaan Peningkatan Jalan	Babah Krueng-Alue Sane-Jeulanga Barat	2022	235.300.000,00
6	Dinas Pekerjaan Umum	Perencanaan Peningkatan Jalan	Paru-Kayee Jatoe	2022	242.550.000,00
7	Dinas Pekerjaan Umum	Perencanaan Peningkatan Jalan	Mns Raya-Sagoe	2022	35.786.400,00
8	Dinas Pekerjaan Umum	Perencanaan Peningkatan Jalan	Drien Bungoeng-Asan Kumbang	2022	29.553.750,00
9	Dinas Pekerjaan Umum	Perencanaan Peningkatan Jalan	Sarah Panyang-Alue Ngeu	2022	76.917.450,00
10	Dinas Pekerjaan Umum	Perencanaan Peningkatan Jalan	Pohroh-Paya Pisang Klat	2022	24.475.500,00
11	Dinas Pekerjaan Umum	Perencanaan Peningkatan Jalan	Rambong Meureudu	2022	34.800.000,00
Subtotal (1 s.d 20)					1.427.589.500,00
B. Dinas Pendidikan					
1	Dinas Pendidikan	Perencanaan Pembangunan Pagar	Jl. Blang Lam Ujong I Lingk Syahbandar Lr. V Gp. P	2018	4.930.000,00
2	Dinas Pendidikan	Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas	Jl. Tgk. Djam Lr. Lampoh Lada No. 10 Gp. Jawa Kuta	2018	24.900.000,00
3	Dinas Pendidikan	Perencanaan Lab. Sekolah	Jl. Banda Aceh - Medan Km. 169 Gp. Meuko Kuthang K	2018	24.900.000,00
4	Dinas Pendidikan	Perencanaan Pagar Sekolah	Jl. Banda Aceh - Medan Km. 158 Gp. Dayah Timu Meureudu	2018	24.800.000,00
5	Dinas Pendidikan	Perencanaan Pembangunan Mushalla	Jl. Medan - Banda Aceh Gp. Paya Kec. Trienggadeng	2018	24.900.000,00
6	Dinas Pendidikan	Perencanaan	Lr. Tgk. Dikandang No. 37 Jln. Punge Blang Cut Ban	2018	29.650.000,00
Subtotal (1 s.d 6)					134.080.000,00
C. Dinas Kesehatan Dan Keluarga Berencana					

No.	SKPK	Uraian	Lokasi	Tahun Perolehan	Nilai
					(Rp)
1	Dinas Kesehatan Dan Keluarga Berencana	Perencanaan Pengolahan Air Limbah	Puskesmas Njong	2019	18.300.000,00
	Subtotal (1 s.d 2)				18.300.000,00
D.	Dinas Perhubungan				
1	Dinas Perhubungan	Perencanaan Pengadaan dan Pemasangan rambu-rambu lalu lintas	Dalam Kab. Pidie Jaya	2019	29.900.000,00
	Subtotal (1)				29.900.000,00
E.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM				
1	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Perencanaan Rehab pasar Kec. Bandar Baru dan Sarana Pendukung	Dalam Kab. Pidie Jaya	2019	34.500.000,00
	Subtotal (1)				34.500.000,00
F.	Dinas Pertanahan				
1	Dinas Pertanahan	Lahan untuk Gedung Kantor. (KJPP)	Desa Beurawang, Kec. Meureudu, kab. Pidie Jaya	2021	41.021.641,00
2	Dinas Pertanahan	Tanah Untuk Tempat kerja (OP untuk 3 Lokasi).	Pidie Jaya	2021	20.277.559,00
3	Dinas Pertanahan	Lahan untuk Gedung Kantor. (KJPP) Desa Beunot.	Desa Beunot, Kec. Meureudu, kab. Pidie Jaya	2021	48.554.000,00
4	Dinas Pertanahan	Lahan untuk Gedung Kantor	Desa Beurawang, Kec. Meureudu, kab. Pidie Jaya	2022	478.356.900,00
	Subtotal (1)				588.210.100,00
G.	Rumah Sakit Umum Daerah				
1	Rumah Sakit Umum Daerah	Bangunan Rumah Sakit Umum	RSUD Meureudu	2022	87.273.000,00
	Subtotal (1)				87.273.000,00
H.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Perencanaan Jalan	Gampong Meuraksa Kecamatan Meureudu	2022	99.250.000,00
	Subtotal (1)				99.250.000,00
	Total (A s.d J)				2.419.102.600,00

97

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
RINCIAN ASET TETAP TANAH YANG TELAH MEMILIKI SERTIFIKAT

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Luas(m2)	Tahun	Letak / Alamat	Status Tanah		Pergunaan	Asal Usul	Harga	Keterangan
		Kode Barang	Register				Hak	Sertifikat				
								Tanggal				
1	2	3	4	5,00	6	7	8	9	11	12	13	14
1	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	39	1.295,00	2013	Jln. Banda Aceh-Medan Keude Lueng Putu	Hak Pakai	24 mei 1996	Bangunan SDN 3 Lueng Putu	Hibah	122.500.000,00	Dinas PK
2	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	37	2.871,82	2013	Jln. Banda Aceh-Medan Desa Teungoh Musa	Hak Pakai	30 September 1985	Bangunan SDN Musa Baroh	Hibah	1.005.137.000,00	Dinas PK
3	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	41	1.652,00	2013	Desa Kayee Raya	Hak Pakai	30 September 1985	Bangunan SDN Teupin Jangat	Hibah	52.500.000,00	Dinas PK
4	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	43	2.924,50	2013	Jln. Lueng Putu Ujong Leubat	Hak Pakai	23 Mei 1996	Bangunan SDN Ujong Lebat	Hibah	712.250.000,00	Dinas PK
5	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	44	1.530,00	2013	Desa Cot Baroh Langgien	Hak Pakai	24 mei 1996	Bangunan SDN Cot Baroh Langgin	Hibah	28.000.000,00	Dinas PK
6	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	c	1.500,00	2013	Desa Baroh Nyong	Hak Pakai	30 September 1985	Bangunan SDN Kuta Trieng	Hibah	115.640.000,00	Dinas PK
7	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	36	1.750,00	2013	Jln. Banda Aceh-Medan Desa Paru Keude	Hak Pakai	2 juni 1986	Bangunan SDN Paru Keude	Hibah	26.250.000,00	Dinas PK
8	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	42	1.050,00	2013	Jln. Blang Beunot	Hak Pakai	24 mei 1996	Bangunan SDN Blang Beunot	Hibah	58.490.000,00	Dinas PK
9	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	40	1.120,00	2013	Desa Pulo Pueb	Hak Pakai	30 September 1985	Bangunan SDN Pulo Pueb	Hibah	53.550.000,00	Dinas PK
10	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	47	15.300,00	2013	Desa Kayee Jatoe Kec. Bandar Baru	Hak Pakai	1 Januari 2001	Bangunan SMP 4 Cubo	Hibah	25.000.000,00	Dinas PK
11	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	53	2.017,00	2013	Gampong Ulee Glee	Hak Pakai	30 September 1985	Bangunan SDN Ulee Glee	Hibah	114.240.000,00	Dinas PK
12	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	54	2.800,00	2013	Desa Blang Miroe Kec. Bandar Dua	Hak Pakai	5 oktober 1985	Bangunan SDN Kuta Japakeh	Hibah	250.000.000,00	Dinas PK
13	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	49	952,00	2013	Jln. Ule Glee-Garut Desa Paya Pisang Klat Kec. Bandar Dua	Hak Pakai	30 September 1985	Bangunan SDN 1 Blang Kuta	Hibah	1.179.000.000,00	Dinas PK
14	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	52	3.336,00	2013	Jln. Banda Aceh-Medan Blang Dalam	Hak Pakai	5 oktober 1985	Bangunan SDN Blang Dalam	Hibah	667.200.000,00	Dinas PK
15	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	50	2.500,00	2013	Jln. Ule Glee Barat Desa Blang Kuta Kec. Bandar Dua	Hak Pakai	30 September 1985	Bangunan SDN 2 Blang Kuta	Hibah	201.700.000,00	Dinas PK
16	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	51	11.790,00	2013	Jln. Ule Glee Barat Desa Uteun Bayi Kec. Bandar Dua	Hak Pakai	30 September 1985	Bangunan SDN Babah Krueng	Hibah	140.000.000,00	Dinas PK
17	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	55	4.164,00	2013	Desa Kumba Kec. Bandar Dua	Hak Pakai	5 oktober 1985	Bangunan SDN Kumba	Hibah	208.200.000,00	Dinas PK
18	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	57	2.014,00	2013	Desa Alue Sane Kec. Bandar Dua	Hak Pakai	5 oktober 1985	Bangunan SDN Alue Sane	Hibah	224.900.000,00	Dinas PK
19	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	56	2.249,00	2013	Desa Paya Baroh Kec. Bandar Dua	Hak Pakai	5 Oktober 1985	Bangunan SDN Masjati	Hibah	90.630.000,00	Dinas PK
20	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	66	1.474,00	2013	Jln. Iskandar Muda Meureudu	Hak Pakai	24 Mei 1996	Bangunan SDN 1 Meureudu	Hibah	700.000.000,00	Dinas PK
21	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	71	1.570,00	2013	Jln. Banda Aceh-Medan Desa Manyang Cut	Hak Pakai	30 September 1985	Bangunan SDN Simpang Tiga	Hibah	223.080.000,00	Dinas PK
22	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	65	2.589,00	2013	Jln. Iskandar Muda Meureudu	Hak Pakai	30 September 1985	Bangunan SDN 5 Meureudu	Hibah	101.280.000,00	Dinas PK
23	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	63	1.921,00	2013	Jln. Banda Aceh-Medan Desa Kuta Trieng	Hak Pakai	30 September 1985	Bangunan SDN Beuracan	Hibah	249.730.000,00	Dinas PK
24	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	69	1.900,00	2013	Jln. Pemukiman Beuracan Ds. Meunasah Muling Kec. Meureudu	Hak Pakai	30 September 1985	Bangunan SDN Muling	Hibah	51.100.000,00	Dinas PK
25	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	70	1.583,00	2013	Jln. Kelurahan Masjid Tuha	Hak Pakai	30 September 1985	Bangunan SDN 4 Meureudu	Hibah	595.470.000,00	Dinas PK
26	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	73	1.627,00	2013	Jln. Desa Beuriweuh Gampong Pohroh	Hak Pakai	5 Oktober 1985	Bangunan SDN Beuriweuh	Hibah	223.860.000,00	Dinas PK
27	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	68	2.275,00	2013	Jln. Kantor Pos Kel. Masjid Tuha	Hak Pakai	5 oktober 1985	Bangunan SDN Meunasah Kota	Hibah	451.800.000,00	Dinas PK
28	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	72	1.920,00	2013	Jln. Banda Aceh-Medan Desa Beunot	Hak Pakai	5 oktober 1985	Bangunan SDN Beunot	Hibah	682.500.000,00	Dinas PK
29	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	61	2.028,00	2013	Jln. Beuracan	Hak Pakai	24 mei 1996	Bangunan SDN Beuracan Jaya	Hibah	228.000.000,00	Dinas PK
30	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	62	1.688,00	2013	Jln. Desa Teupin Peurahu	Hak Pakai	24 mei 1996/4 April 2019	Bangunan SDN Beuracan Murni	Hibah	126.640.000,00	Dinas PK
31	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	67	1.506,00	2013	Jln. Iskandar Muda Meureudu	Hak Pakai	5 oktober 1985	Bangunan SDN Rhieng	Hibah	188.400.000,00	Dinas PK

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Luas(m2)	Tahun	Letak / Alamat	Status Tanah		Pergunaan	Asal Usul	Harga	Keterangan
		Kode Barang	Register				Hak	Sertifikat				
								Tanggal				
32	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	75	10.000,00	2013	Jln. Banda Aceh-Medan Desa Kuta Trieng Kec. Meureudu	Hak Pakai	14 Agustus 2002	Bangunan SMPN 2	Hibah	81.350.000,00	Dinas PK
33	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	77	2.928,00	2013	Desa Sagoe	Hak Pakai	28 agustus 1985	Bangunan SDN 1 Trienggadeng	Hibah	2.500.000.000,00	Dinas PK
34	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	78	2.613,00	2013	Desa Sagoe	Hak Pakai	28 agustus 1985	Bangunan SDN 2 Trienggadeng	Hibah	177.600.000,00	Dinas PK
35	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	88	1.378,00	2013	Gampong Dee	Hak Pakai	30 September 1985	Bangunan SDN Peuduk	Hibah	439.200.000,00	Dinas PK
36	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	80	2.090,00	2013	Desa Matang	Hak Pakai	30 September 1985	Bangunan SDN Cot Matang	Hibah	391.950.000,00	Dinas PK
37	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	76	1.184,00	2013	Jalan Provinsi	Hak Pakai	28 agustus 1985	Bangunan SDN Pangwa	Hibah	310.500.000,00	Dinas PK
38	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	85	2.056,00	2013	Desa Mee Pangwa	Hak Pakai	28 agustus 1985	Bangunan SDN Antara	Hibah	313.500.000,00	Dinas PK
39	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	79	2.070,00	2013	Desa Sagoe	Hak Pakai	28 agustus 1985	Bangunan SDN Kuta Batee	Hibah	335.400.000,00	Dinas PK
40	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	86	2.350,00	2013	Desa Dayah Teumanah	Hak Pakai	30 September 1985	Bangunan SDN Peuduk Tunong	Hibah	305.250.000,00	Dinas PK
41	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	83	1.135,00	2013	Desa Tampui	Hak Pakai	24 Mei 1996	Bangunan SDN Tampui	Hibah	170.250.000,00	Dinas PK
42	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	84	1.924,00	2013	Jalan Banda Aceh-Medan	Hak Pakai	28 agustus 1985	Bangunan SDN Mesjid Trienggadeng	Hibah	269.360.000,00	Dinas PK
43	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	82	2.035,00	2013	Peuduek Baroh Kec. Trienggadeng	Hak Pakai	30 September 1985	Tanah Peuduk Baroh	Hibah	276.750.000,00	Dinas PK
44	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	81	2.236,00	2013	Desa Peulandok	Hak Pakai	24 Mei 1996	Bangunan SDN Peulandok	Hibah	352.500.000,00	Dinas PK
45	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	87	1.811,00	2013	Desa Cot Lheuerheng	Hak Pakai	24 Mei 1996	Bangunan SDN Cot Lheu Rheng	Hibah	267.750.000,00	Dinas PK
46	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	90	12.978,00	2013	Desa Matang Kec. Trienggadeng	Hak Pakai	8 Agustus 1991	Bangunan SMPN 3 Trienggadeng	Hibah	934.500.000,00	Dinas PK
47	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	95	2.520,00	2013	Desa Tijien Husein	Hak Pakai	28 agustus 1985	Bangunan SDN 1 Ulim	Hibah	1.930.050.000,00	Dinas PK
48	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	96	2.559,00	2013	Desa Leubu	Hak Pakai	28 agustus 1985	Bangunan SDN 2 Ulim	Hibah	249.200.000,00	Dinas PK
49	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	97	1.280,00	2013	Desa Balee Ulim	Hak Pakai	24 mei 1996	Bangunan SDN Tutue Ara	Hibah	992.000.000,00	Dinas PK
50	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	94	1.595,00	2013	Jln. Blang Rheu	Hak Pakai	28 agustus 1985	Bangunan SDN Cot Baloi	Hibah	363.250.000,00	Dinas PK
51	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	91	3.115,00	2013	Jln. PT Gotong Royong Km. 8 Desa Meunasah Mesid Kec. Ulim	Hak Pakai	13 September 1995	Bangunan SDN Malem Dagang	Hibah	191.400.000,00	Dinas PK
52	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	98	2.559,00	2013	Desa Pulo Ulim	Hak Pakai	28 agustus 1985	Bangunan SDN Pulo Ulim	Hibah	100.800.000,00	Dinas PK
53	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	93	1.453,00	2013	Desa Mesjid Ulim Tunong	Hak Pakai	28 agustus 1985	Bangunan SDN Ulim Tunong	Hibah	639.750.000,00	Dinas PK
54	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	92	2.480,00	2013	Jln. Blang Usie Desa Nanggroe Barat	Hak Pakai	28 agustus 1985	Bangunan SDN Kuta Garot	Hibah	192.000.000,00	Dinas PK
55	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	101	1.542,00	2013	Jln. Mesjid-Pante Raja	Hak Pakai	28 agustus 1985	Bangunan SDN 1 Pante Raja	Hibah	2.744.000.000,00	Dinas PK
56	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	102	1.414,00	2013	Jln. Mesjid-Pante Raja	Hak Pakai	30 September 1985	Bangunan SDN 2 Pante Raja	Hibah	346.950.000,00	Dinas PK
57	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	104	4.078,00	2013	Desa Pante Raja Barat	Hak Pakai	28 agustus 1985	Bangunan SDN Pante Raja	Hibah	106.050.000,00	Dinas PK
58	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	103	2.780,00	2013	Desa Pante Raja Tunong	Hak Pakai	30 September 1985	Bangunan SDN Pante Raja	Hibah	166.800.000,00	Dinas PK
59	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	105	3.617,00	2013	Jalan Banda Aceh-Medan Gampong Peurade	Hak Pakai	30 September 1985	Bangunan SDN Peurade	Hibah	530.140.000,00	Dinas PK
60	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	106	1.988,00	2013	Desa Muka Blang	Hak Pakai	24 mei 1996	Bangunan SDN Muka Blang	Hibah	660.000.000,00	Dinas PK
61	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	107	2.353,00	2013	Jln. Ulee Gle Jangka Buya	Hak Pakai	5 Oktober 1985	Bangunan SDN Jangka Buya	Hibah	178.920.000,00	Dinas PK
62	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	108	2.847,00	2013	Jln. Kereta Api Desa Jurong Teungoh	Hak Pakai	5 Oktober 1985	Bangunan SDN Bintara	Hibah	188.240.000,00	Dinas PK
63	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	110	1.331,00	2013	Jln. Provinsi Desa Meunasah Raya	Hak Pakai	30 September 1985	Bangunan SDN Babah Jurong	Hibah	432.000.000,00	Dinas PK
64	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	111	4.074,00	2013	Desa Meunasah Jurong	Hak Pakai	30 September 1985	Bangunan SDN Teupin Pukat	Hibah	199.650.000,00	Dinas PK
65	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	109	3.600,00	2013	Jln. Iskandar Muda Desa Meunasah Jurong Kec. Meureudu	Hak Pakai	30 September 1985	Bangunan SDN 3 Meurah Dua	Hibah	346.290.000,00	Dinas PK
66	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	113	2.102,00	2013	Desa Genteng	Hak Pakai	5 oktober 1985	Bangunan SDN Iskandar Muda	Hibah	98.040.000,00	Dinas PK

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Luas(m2)	Tahun	Letak / Alamat	Status Tanah		Penggunaan	Asal Usul	Harga	Keterangan
		Kode Barang	Register				Hak	Sertifikat				
								Tanggal				
67	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	112	1.634,00	2013	Jalan Diponegoro	Hak Pakai	5 oktober 1985	Bangunan SDN Lueng Bimba	Hibah	126.120.000,00	Dinas PK
68	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003	233	11.196,00	2017	Jln. Sp. Bale Lhok Duek - Blang Krueng	Hak Pakai	09 Agustus 2017	Pembangunan Jalan	Lain Lain	55.980.000,00	Dinas PU
69	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003	234	50.904,00	2017	Jln. Blang Gapu - Blang Iboih - Lhok Duek	Hak Pakai	09 Agustus 2017	Pembangunan Jalan	Lain Lain	254.520.000,00	Dinas PU
70	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003	235	124.176,00	2017	Jln. Lueng Putu - Jiem jiem - Abah Lueng	Hak Pakai	09 Agustus 2017	Pembangunan Jalan	Lain Lain	620.880.000,00	Dinas PU
71	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003	236	24.412,00	2017	Jln. Lueng Putu - Lancok Baroh	Hak Pakai	09 Agustus 2017	Pembangunan Jalan	Lain Lain	122.062.500,00	Dinas PU
72	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003	237	17.646,00	2017	Jln. Sp. Pohroh - Udeung	Hak Pakai	09 Agustus 2017	Pembangunan Jalan	Lain Lain	88.230.000,00	Dinas PU
73	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003	238	39.600,00	2017	Jln. Musa Teungoh - Blang Baro	Hak Pakai	09 Agustus 2017	Pembangunan Jalan	Lain Lain	198.000.000,00	Dinas PU
74	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003	239	8.428,00	2017	Jln. Sp. Tu - Keude Pante Raja - Lancang Paru	Hak Pakai	09 Agustus 2017	Pembangunan Jalan	Lain Lain	42.140.000,00	Dinas PU
75	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003	240	40.120,00	2017	Jln. Panteraja - Muka Blang - Blang Baro	Hak Pakai	09 Agustus 2017	Pembangunan Jalan	Lain Lain	200.600.000,00	Dinas PU
76	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003	241	22.102,50	2017	Jln. Mesjid Panteraja - Peurade - Reudeup	Hak Pakai	09 Agustus 2017	Pembangunan Jalan	Lain Lain	110.512.500,00	Dinas PU
77	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003	242	38.392,00	2017	Jln. Teungoh Panteraja - Sagoe Trienggadeng	Hak Pakai	09 Agustus 2017	Pembangunan Jalan	Lain Lain	191.962.500,00	Dinas PU
78	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003	243	20.195,00	2017	Jln. Reudeup - Raja Beureukat	Hak Pakai	09 Agustus 2017	Pembangunan Jalan	Lain Lain	100.977.500,00	Dinas PU
79	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003	244	16.263,00	2017	Jln. Lhok Puuk - Blang Baro	Hak Pakai	09 Agustus 2017	Pembangunan Jalan	Lain Lain	81.315.000,00	Dinas PU
80	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003	245	38.120,00	2017	Jln. Sp. Tu - Keude Panteraja - Lancang Paru	Hak Pakai	09 Agustus 2017	Pembangunan Jalan	Lain Lain	190.600.000,00	Dinas PU
81	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003	246	4.188,00	2017	Jln. Panteraja - Muka Blang - Blang Baro	Hak Pakai	09 Agustus 2017	Pembangunan Jalan	Lain Lain	20.940.000,00	Dinas PU
82	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003	247	11.955,00	2017	Jln. Mesjid Panteraja - Peurade - Reudeup	Hak Pakai	09 Agustus 2017	Pembangunan Jalan	Lain Lain	59.775.000,00	Dinas PU
83	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003	248	37.544,00	2017	Jln. Teungoh Panteraja - Sagoe Trienggadeng	Hak Pakai	09 Agustus 2017	Pembangunan Jalan	Lain Lain	187.720.000,00	Dinas PU
84	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003	249	4.734,00	2017	Jln. Reudeup - Raja Beureukat	Hak Pakai	09 Agustus 2017	Pembangunan Jalan	Lain Lain	23.670.000,00	Dinas PU
85	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003	250	23.490,00	2017	Jln. Lhok Puuk - Blang Baro	Hak Pakai	09 Agustus 2017	Pembangunan Jalan	Lain Lain	117.450.000,00	Dinas PU
86	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003	251	11.520,00	2017	Jln. Grong-Grong Capa - Kuala Ulim	Hak Pakai	09 Agustus 2017	Pembangunan Jalan	Lain Lain	57.600.000,00	Dinas PU
87	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003	252	26.775,00	2017	Jln. Nangrhoe Barat - Reuleut - Ulim	Hak Pakai	09 Agustus 2017	Pembangunan Jalan	Lain Lain	133.875.000,00	Dinas PU
88	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003	253	125.312,00	2017	Jln. Nangrhoe - Lhok Sandeng - Krueng Tijee	Hak Pakai	09 Agustus 2017	Pembangunan Jalan	Lain Lain	626.560.000,00	Dinas PU
89	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003	254	11.586,00	2017	Jln. Tutue Ara - Mns. Kumbang - Keude Parek	Hak Pakai	09 Agustus 2017	Pembangunan Jalan	Lain Lain	57.930.000,00	Dinas PU
90	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003	255	7.710,00	2017	Jln. Balee Ulim - Siblah Coh	Hak Pakai	09 Agustus 2017	Pembangunan Jalan	Lain Lain	38.550.000,00	Dinas PU
91	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003	256	8.358,00	2017	Jln. Sp. SMP - Balee Ulim	Hak Pakai	09 Agustus 2017	299 TAHUN 2017	Lain Lain	41.790.000,00	Dinas PU
92	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003	257	6.246,00	2017	Jln. Blang Dalam - Buket Teungoh	Hak Pakai	09 Agustus 2017	Pembangunan Jalan	Pembelian	31.230.000,00	Dinas PU
93	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003	258	25.410,00	2017	Jln. Blang Dalam - Gp. Baro - Babah Krueng	Hak Pakai	09 Agustus 2017	Pembangunan Jalan	Lain Lain	127.050.000,00	Dinas PU
94	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003	259	14.475,00	2017	Jln. Ulee Gle - Jangka Buya	Hak Pakai	09 Agustus 2017	Pembangunan Jalan	Lain Lain	72.377.500,00	Dinas PU
95	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003	260	56.640,00	2017	Jln. Ulee Gle - Uteun Bayu - Kumba	Hak Pakai	09 Agustus 2017	Pembanguna Jalan	Lain Lain	283.200.000,00	Dinas PU
96	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003	261	10.218,00	2017	Jln. Ulee Gle - Lueng Teungoh - Mns Kumbang	Hak Pakai	09 Agustus 2017	Pembangunan Jalan	Lain Lain	51.090.000,00	Dinas PU
97	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003	262	42.752,00	2017	Jln. Ulee Gle - Jeulanga Mata Ie - Blang Miroe	Hak Pakai	09 Agustus 2017	Pembangunan Jalan	Lain Lain	213.760.000,00	Dinas PU
98	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003	263	16.995,00	2017	Jln. Buket Teungoh - Mns Kumbang - Kuta Krueng	Hak Pakai	09 Agustus 2017	Pembangunan Jalan	Lain Lain	84.975.000,00	Dinas PU
99	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003	264	11.921,00	2017	Jln. Gp. Cot - Mns. Beureumbang - Kiran Krueng	Hak Pakai	09 Agustus 2017	Pembangunan Jalan	Lain Lain	59.605.000,00	Dinas PU
100	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003	265	6.000,00	2017	Jln. Gp. Cot - Pasi Aron	Hak Pakai	09 Agustus 2017	Pembangunan Jalan	Lain Lain	30.000.000,00	Dinas PU
101	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003	266	7.524,00	2017	Jln. Kiran Krueng - Kuala Kiran	Hak Pakai	09 Agustus 2017	Pembangunan Jalan	Lain Lain	37.620.000,00	Dinas PU

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Luas(m2)	Tahun	Letak / Alamat	Status Tanah		Penggunaan	Asal Usul	Harga	Keterangan
		Kode Barang	Register				Hak	Sertifikat				
								Tanggal				
102	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003	267	3.606,00	2017	Jln. Mns. Kumbang - Mns. Raya	Hak Pakai	09 Agustus 2017	Pembangunan Jalan	Lain Lain	18.030.000,00	Dinas PU
103	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003	268	27.080,00	2017	Jln. Jurong Minje - Jurong Teungoh - Jurong Ara	Hak Pakai	09 Agustus 2017	Pembangunan Jalan	Lain Lain	135.400.000,00	Dinas PU
104	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1.3.1.01.01.04.002	1	2.926,00	2008	Meurandeh Alue-Bandar Dua	Hak Pakai	27 Juli 2009	Gedung Sekolah SMP	Pembelian	54.131.000,00	Sekdakab
105	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	1.3.1.01.01.04.027	2	3.160,00	2008	Teungkluet-Trienggadeng	Hak Pakai	27 Juli 2009	Gudang Koperasi dan Sosial	Pembelian	204.765.000,00	Sekdakab
106	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	3	221.003,00	2009	Desa Manyang Cut Kecamatan Meureudu	Hak Pakai	07 September 2016	Sarana Kantor Pemerintahan	Pembelian	13.310.809.884,71	Sekdakab
107	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	1.3.1.01.01.04.027	4	28.730,00	2009	Desa Alue Keumiki-Ulim	Hak Pakai	16 April 2014	Kebun Obat	Pembelian	100.555.000,00	Sekdakab
108	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	1.3.1.01.01.04.027	273	19.219,00	2009	COT Seutui-Ulim	Hak Pakai	21 Juli 2011	Pembangunan Kantor PDAM	Pembelian	100.899.750,00	Sekdakab
109	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	1.3.1.01.01.04.027	5	1.987,00	2009	Langugop-Banda Aceh	Hak Pakai	13 April 2011	Asrama Mahasiswa	Pembelian	1.134.100.000,00	Sekdakab
110	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	1.3.1.01.01.04.027	6	1.213,00	2009	Meue-Trienggadeng	Hak Pakai	08 April 2011	BPP Pertanian	Pembelian	60.650.000,00	Sekdakab
111	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	9	37.999	2010	Trienggadeng	Hak Pakai	07 September 2016	Wisata Pantai	Pembelian	1.562.408.000,00	BPBK
112	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	17	1.415	2011	Jangka Buya	Hak Pakai	18 Juli 2022	Pembangunan TK Rauzatul	Pembelian	149.990.000,00	BPBK
113	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	32	34.150	2012	Meureudu	Hak Pakai	4 Juli 2022	Rumah Sakit Umum Meuredu	Pembelian	2.736.900.000,00	BPBK
114	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	163	6.224	2013	Meureudu	Hak Pakai	28 Desember 2011	Jalan Raja Beurangkat	Pembelian	49.470.000,00	BPBK
115	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	185	2.330,00	2013	Keude Lueng Putu	Hak Pakai	3 Agustus 2005	Kantor Camat	Hibah	1.237.500.000,00	Bandar Baru
116	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	188	700,00	2013	Jln. Banda Aceh-Medan Desa Keude Trienggadeng	Hak Pakai	3 Agustus 2005	Rumah Dinas	Hibah	100.000.000,00	Trienggadeng
117	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	189	1.000,00	2013	Jln. Banda Aceh-Medan Desa Keude Trienggadeng	Hak Pakai	3 Agustus 2005	Kantor Camat	Hibah	170.000.000,00	Trienggadeng
118	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	190	600,00	2013	Jln. Banda Aceh-Medan Desa Keude Trienggadeng	Hak Pakai	3 Agustus 2005	Gedung UDKP	Hibah	60.000.000,00	Trienggadeng
119	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	191	475,00	2013	Jln. Banda Aceh-Medan Desa Keude Trienggadeng	Hak Pakai	3 Agustus 2005	Gedung PKK	Hibah	50.000.000,00	Trienggadeng
120	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	196	1.261,00	2013	Jln. Tengku Ibrahim Abdullah Keude Ulim	Hak Pakai	25 Juli 2005	Pembangunan Kantor Camat	Hibah	487.200.000,00	Ulim
121	Tanah Kantor	1.3.1.01.01.04.028	225	760,00	2016	Gampong Manyang Cut Kec. Meureudu	Hak Pakai	02 Februari 2017	Pembangunan Gedung Kantor	Pembelian	228.732.400,00	BPBD
122	Tanah Jalan	1.3.1.01.03.07.011	1E+08	600,00	2021	Gampong Rungkom Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jawa	Hak Pakai	25 Mei 2022	Jalan Umum	Pembelian	298.235.288,00	Pendidikan Dayah
123	Tanah Sarana Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.03.07.011	1E+08	10.339,00	2013	Gampong Rungkom Meureudu	Hak Pakai	25 Oktober 2018	Pembangunan Sarana Pendidikan (MUQ)	Hibah	992.775.000,00	Pendidikan Dayah
124	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	203	10.030,00	2013	Meureudu	Hak Pakai	31 Januari 2022	Bangunan Kantor Balai Benih	Hibah	150.450.000,00	Pertanian
125	Tanah Kebun	1.3.1.01.02.02.004	208	34.800	2013	Desa Meunasah Paru Cot Kec. Bandar Baru	Hak Pakai	16 Desember 2021	Tanah Kebun	Hibah	682.605.000,00	Pertanian
126	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	-	498	2022	Kota Meureudu Kec. Meureudu	Hak Pakai	10 Juni 2021	Pekarangan/Bangunan TK Malahayati	Hibah	3.560.700,00	PK
127	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	-	258	2022	Desa Pulo U Kec. Meureudu	Hak Pakai	2 Desember 2021	Pekarangan/Bangunan TK	Hibah	903.000,00	PK
128	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	-	778	2022	Kota Meureudu Kec. Meureudu	Hak Pakai	11 Januari 2019	Pekarangan/Bangunan TK Bungoeng Seulanga	Hibah	5.562.700,00	PK
129	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	-	2.630	2022	Desa Rungkom Kec. Meureudu	Hak Pakai	12 Oktober 2020	Pembangunan Gedung SPNF SKB Kab. Pidie Jawa	Hibah	2.393.300,00	PK
130	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	-	1.827	2022	Desa Blang Awe Kec. Meureudu	Hak Pakai	5 Oktober 1985	Bangunan SD (SDN 13 Meureudu)	Hibah	1.662.570,00	PK
131	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	-	1.255	2022	Desa Jeulanga Barat Kec. Bandar Dua	Hak Pakai	30 September 1985	Bangunan SD (SDN 2 Bandar Dua)	Hibah	2.133.500,00	PK
132	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	-	2.017	2022	Desa Meurandeh Alue Kec. Bandar Dua	Hak Pakai	30 September 1985	Bangunan SD (SDN 3 Bandar Dua)	Hibah	2.420.400,00	PK
133	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	-	2.173	2022	Desa PeulaKan Tunong Kec. Bandar Dua	Hak Pakai	5 Oktober 1985	Bangunan SD (SDN 11 Bandar Dua)	Hibah	7.605.500,00	PK
134	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	-	4.500,00	2022	Desa Ulee Gle Tunong Kec. Bandar Dua	Hak Pakai	4 Oktober 2010	Bangunan SD (SDN 12 Bandar Dua)	Hibah	15.750.000,00	PK
135	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	-	3.234,20	2022	Desa Gaharu Kec. Bandar Dua	Hak Pakai	24 Maret 2008	Bangunan SMPN 3 Bandar Dua	Hibah	3.881.040,00	PK
136	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	-	2.926	2022	Desa Meurandeh Alue Kec. Bandar Dua	Hak Pakai	27 Juli 2009	Bangunan SMPN 4 Bandar Dua	Hibah	3.511.200,00	PK
137	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	-	2.340	2022	Desa Keude Kec. Bandar Baru	Hak Pakai	30 September 1985	Bangunan SD (SDN 1 Bandar Baru)	Hibah	8.190.000,00	PK
138	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	-	1.129	2022	Desa Siren Kec. Bandar Baru	Hak Pakai	30 September 1985	Bangunan SD (SDN 2 Bandar Baru)	Hibah	5.645.000,00	PK

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Luas(m2)	Tahun	Letak / Alamat	Status Tanah		Penggunaan	Asal Usul	Harga	Keterangan
		Kode Barang	Register				Hak	Sertifikat				
								Tanggal				
139	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	-	1.174	2022	Desa Dayah Ujong Kec. Bandar Baru	Hak Pakai	30 September 1985	Bangunan SD (SDN 4 Bandar Baru)	Hibah	5.870.000,00	PK
140	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	-	5.060	2022	Desa Balee Kec. Bandar Baru	Hak Pakai	30 September 1985	Bangunan SD (SDN 5 Bandar Baru)	Hibah	8.602.000,00	PK
141	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	-	1.884	2022	Desa Paru Keude Kec. Bandar Baru	Hak Pakai	30 September 1985	Bangunan SD (SDN 6 Bandar Baru)	Hibah	3.202.800,00	PK
142	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	-	1.767	2022	Desa Kayee Jatoe Kec. Bandar Baru	Hak Pakai	13 September 1995	Bangunan SD (SDN 7 Bandar Baru)	Hibah	4.329.150,00	PK
143	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	-	1.940	2022	Desa Blang Iboih Kec. Bandar Baru	Hak Pakai	13 September 1995	Bangunan SD (SDN 8 Bandar Baru)	Hibah	2.328.000,00	PK
144	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	-	3.487,50	2022	Gampoeng Jiem-Liem Kec. Bandar Baru	Hak Pakai	08 November 2016	Bangunan SD (SDN 9 Bandar Baru)	Hibah	4.185.000,00	PK
145	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	-	2.188	2022	Desa Teulada Kec. Bandar Baru	Hak Pakai	2 Juni 1986	Bangunan SD (SDN 10 Bandar Baru)	Hibah	3.719.600,00	PK
146	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	-	3.414	2022	Desa Blang Krueng Kec. Bandar Baru	Hak Pakai	13 September 1995	Bangunan SD (SDN 11 Bandar Baru)	Hibah	3.106.740,00	PK
147	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	-	1.533	2022	Desa Manyang Kec. Bandar Baru	Hak Pakai	30 September 1985	Bangunan SD (SDN 12 Bandar Baru)	Hibah	2.606.100,00	PK
148	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	-	1.818	2022	Desa Lancok Baroh Kec. Bandar Baru	Hak Pakai	30 September 1985	Bangunan SD (SDN 13 Bandar Baru)	Hibah	3.090.600,00	PK
149	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	-	3.045	2022	Desa Keude Kec. Bandar Baru	Hak Pakai	30 September 1985	Bangunan SD (SDN 15 Bandar Baru)	Hibah	10.657.500,00	PK
150	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	-	1.986	2022	Desa Udeung Kec. Bandar Baru	Hak Pakai	30 September 1985	Bangunan SD (SDN 16 Bandar Baru)	Hibah	3.376.200,00	PK
151	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	-	3.519	2022	Desa Lancang Kec. Bandar Baru	Hak Pakai	2 Juni 1986	Bangunan SD (SDN 20 Bandar Baru)	Hibah	12.316.500,00	PK
152	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	-	1.426	2022	Desa Tutong Kec. Bandar Baru	Hak Pakai	30 September 1985	Bangunan SD (SDN 22 Bandar Baru)	Hibah	7.130.000,00	PK
153	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	-	2.368	2022	Desa Blang Sukon Kec. Bandar Baru	Hak Pakai	24 Mei 1996	Bangunan SD (SDN 23 Bandar Baru)	Hibah	2.841.600,00	PK
154	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	-	1.930	2022	Desa Ara Kec. Bandar Baru	Hak Pakai	24 Mei 1996	Bangunan SD (SDN 24 Bandar Baru)	Hibah	6.755.000,00	PK
155	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	-	3.300,00	2022	Desa Sarah Panyah Kec. Bandar Baru	Hak Pakai	14 November 2016	Bangunan SD (SDN 28 Bandar Baru)	Hibah	3.960.000,00	PK
156	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	-	12.386,00	2022	Desa Jiem-Jiem Kec. Bandar Baru	Hak Pakai	22 September 2017	Bangunan SMPN 3 Bandar Baru	Hibah	14.863.200,00	PK
157	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	-	7.708	2022	Desa Pulo Pueb Kec. Bandar Baru	Hak Pakai	06 April 2011	Bangunan SMPN 5 Bandar Baru	Hibah	13.103.600,00	PK
158	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	-	1.940,00	2022	Desa Blang Iboih Kec. Bandar Baru	Hak Pakai	13 September 1995	Bangunan SMPN 6 Bandar Baru	Hibah	3.298.000,00	PK
159	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	-	5.060,00	2022	Desa Balee Musa Kec. Bandar Baru	Hak Pakai	30/09/1985/23 Desember 2011	Bangunan SMPN 7 Bandar Baru	Hibah	8.602.000,00	PK
160	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	-	6.494,00	2022	Desa Tanoh Mirah Kec. Bandar Baru	Hak Pakai	23 Desember 2011	Bangunan SMPN 8 Bandar Baru	Hibah	7.792.800,00	PK
161	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	-	518	2022	Desa Blang Sukon Kec. Bandar Baru	Hak Pakai	20 Nopember 2020	Bangunan TK Harapan	Hibah	621.600,00	PK
162	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	-	2.049	2022	Desa Kayee Jatoe Kec. Bandar Baru	Hak Pakai	5 Juni 2008	Bangunan TK Binaan Cubo	Hibah	5.019.682,50	PK
163	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	-	1.236,00	2022	Desa Tampui Kec. Trienggadeng	Hak Pakai	10 November 2016	Bangunan SMPN 3 Trienggadeng	Hibah	1.124.760,00	PK
164	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	-	6.805,00	2022	Desa Tu Kec. Pante Raja	Hak Pakai	08 November 2016	Bangunan SMPN 1 Pante Raja	Hibah	6.192.550,00	PK
165	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	-	507	2022	Desa Tu Kec. Pante Raja	Hak Pakai	12 Agustus 2021	Bangunan TK Permata	Hibah	461.370,00	PK
166	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	-	13.125,00	2022	Desa Sarah Mane Kec. Meurah Dua	Hak Pakai	05 April 2010	Bangunan SMPN 2 Meurah Dua	Hibah	11.943.750,00	PK
167	Tanah Kosong	1.3.1.01.02.02.002	-	13.125	2022	Desa Sarah Mane Kec. Meurah Dua	Hak Pakai	05 April 2010	Bangunan SDN 6 Meurah Dua	Hibah	11.943.750,00	PK
168	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	-	537	2022	Desa Geunteng Kec. Meurah Dua	Hak Pakai	29 Agustus 2019	Bangunan TK Bungoeng Seulanga II	Hibah	1.879.500,00	PK
169	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	-	2.169	2022	Desa Keurisi Meunash Raya Kec. Bandar Dua/Jangka Buya	Hak Pakai	5 Oktober 1985	Bangunan SDN 3 Jangka Buya	Hibah	5.314.050,00	PK
170	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	-	3.783,00	2022	Desa Blang Cari Kec. Ulim	Hak Pakai	19 Maret 2014	Bangunan SMPN 3 Ulim	Hibah	3.442.530,00	PK
171	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	1.3.1.01.01.04.006	-	2.220	2022	Desa Paya Kec. Trienggadeng	Hak Pakai	15 Juli 2008	Tanah Bangunan Puskesmas	Hibah	5.439.000,00	Dinkes KB
172	Tanah Bangunan Rumah Penjaga	1.3.1.01.01.01.007	-	2.491	2022	Desa Paya Kec. Trienggadeng	Hak Pakai	15 Juli 2008	Tanah Bangunan Rumah Dinas Puskesmas	Hibah	6.102.950,00	Dinkes KB
173	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	1.3.1.01.01.04.006	-	3.000	2022	Desa Tu Kec. Pante Raja	Hak Pakai	15 Juli 2008	Tanah Bangunan Puskesmas	Hibah	2.730.000,00	Dinkes KB
174	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	-	760	2022	Desa Manyang Cut Kec. Meureudu	Hak Pakai	2 Februari 2017	Pekarangan/Pembangunan Kantor	Hibah	1.862.000,00	BPKK
175	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	-	7.181	2022	Kota Meureudu Kec. Meureudu	Hak Pakai	15 Mei 2019	Pekarangan/Pembangunan Kantor	Hibah	51.344.150,00	BPKK
176	Tanah Kosong	1.3.1.01.02.02.002	-	4.103	2022	Desa Rhing Blang Kec. Meureudu	Hak Pakai	13 April 2018	Pekarangan	Hibah	10.052.350,00	BPKK
177	Tanah Kosong	1.3.1.01.02.02.002	-	521	2022	Desa Paya Pisang Klat Kec. Bandar Dua	Hak Pakai	10 Januari 2019	Pekarangan/Kebun	Hibah	1.276.450,00	Perkebunan
178	Tanah Kosong	1.3.1.01.02.02.002	-	46.124	2022	Desa Paya Pisang Klat Kec. Bandar Dua	Hak Pakai	25 Maret 2014	Pekarangan/Kebun	Hibah	113.003.800,00	Perkebunan
179	Tanah Kosong	1.3.1.01.02.02.002	-	328	2022	Desa Blang Kuta Kec. Bandar Dua	Hak Pakai	6 Maret 2014	Pekarangan/Kebun	Hibah	803.600,00	Perkebunan
180	Tanah Kosong	1.3.1.01.02.02.002	-	41.599	2022	Desa Lhok Pusong Kec. Bandar Dua	Hak Pakai	28 Februari 2018	Pekarangan/Kebun	Hibah	49.918.800,00	Perkebunan

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Luas(m2)	Tahun	Letak / Alamat	Status Tanah		Pergunaan	Asal Usul	Harga	Keterangan
		Kode Barang	Register				Hak	Sertifikat				
								Tanggal				
181	Tanah Kosong	1.3.1.01.02.02.002	-	50.028	2022	Desa Lhok Pusong Kec. Bandar Dua	Hak Pakai	28 Februari 2018	Pekarangan/Kebun	Hibah	60.033.600,00	Perkebunan
182	Tanah Kosong	1.3.1.01.02.02.002	-	37.479	2022	Desa Lhok Pusong Kec. Bandar Dua	Hak Pakai	28 Februari 2018	Pekarangan/Kebun	Hibah	44.974.800,00	Perkebunan
183	Tanah Kosong	1.3.1.01.02.02.002	-	7.583	2022	Desa Baro Kec. Bandar Dua	Hak Pakai	11 Oktober 2016	Pekarangan/Kebun	Hibah	12.891.100,00	Perkebunan
184	Tanah Kosong	1.3.1.01.02.02.002	-	10.700	2022	Desa Baro Kec. Bandar Dua	Hak Pakai	11 Oktober 2016	Pekarangan/Kebun	Hibah	18.190.000,00	Perkebunan
185	Tanah Kosong	1.3.1.01.02.02.002	-	22.530	2022	Desa Baro Kec. Bandar Dua	Hak Pakai	11 Oktober 2016	Pekarangan/Kebun	Hibah	38.301.000,00	Perkebunan
186	Tanah Kosong	1.3.1.01.02.02.002	-	2.077	2022	Desa Meunasah Balee Musa Kec. Bandar Baru	Hak Pakai	01 April 2019	Pekarangan/Kebun	Hibah	3.530.900,00	Perkebunan
187	Tanah Kosong	1.3.1.01.02.02.002	-	896	2022	Desa Kuta Pangwa Kec. Trienggadeng	Hak Pakai	25 Oktober 2018	Pekarangan/Kebun	Hibah	815.360,00	Perkebunan
188	Tanah Kosong	1.3.1.01.02.02.002	-	4.901	2022	Desa Kuta Pangwa Kec. Trienggadeng	Hak Pakai	24 Oktober 2018	Pekarangan/Sawah	Hibah	4.459.910,00	Perkebunan
189	Tanah Kosong	1.3.1.01.02.02.002	-	1.242	2022	Desa Kuta Pangwa Kec. Trienggadeng	Hak Pakai	24 Oktober 2018	Pekarangan/Sawah	Hibah	1.130.220,00	Perkebunan
190	Tanah Kosong	1.3.1.01.02.02.002	-	20.000	2022	Desa Sagoe Kec. Trienggadeng	Hak Pakai	07 September 2016	Pembangunan Lokasi Perkantoran	Hibah	18.200.000,00	Perkebunan
191	Tanah Kosong	1.3.1.01.02.02.002	-	541	2022	Desa Raya Kec. Trienggadeng	Hak Pakai	20 Desember 2017	Pekarangan/Sawah	Hibah	1.325.450,00	Perkebunan
192	Tanah Kosong	1.3.1.01.02.02.002	-	432	2022	Desa Keude Trienggadeng Kec. Trienggadeng	Hak Pakai	4 Juli 2011	Taman Kota Trienggadeng	Hibah	8.640.000,00	Perkebunan
193	Tanah Kosong	1.3.1.01.02.02.002	-	1.494	2022	Desa Keude Pante Raja Kec. Pante Raja	Hak Pakai	28 Februari 2018	Pekarangan/Kebun	Hibah	10.682.100,00	Perkebunan
194	Tanah Kosong	1.3.1.01.02.02.002	-	1.248	2022	Desa Peurade Kec. Pante Raja	Hak Pakai	28 Februari 2018	Pekarangan/Kebun	Hibah	2.121.600,00	Perkebunan
195	Tanah Kosong	1.3.1.01.02.02.002	-	252	2022	Desa Keude Pante Raja Kec. Pante Raja	Hak Pakai	28 Februari 2018	Pekarangan/Kebun	Hibah	1.801.800,00	Perkebunan
196	Tanah Kosong	1.3.1.01.02.02.002	-	8.891	2022	Desa Peurade Kec. Pante Raja	Hak Pakai	11 April 2017	Pekarangan/Kebun	Hibah	15.114.700,00	Perkebunan
197	Tanah Kosong	1.3.1.01.02.02.002	-	4.070	2022	Desa Meunasah Dayah Husein Kec. Meurah Dua	Hak Pakai	11 April 2017	Pekarangan/Kebun	Hibah	9.971.500,00	Perkebunan
198	Tanah Kosong	1.3.1.01.02.02.002	-	1.592	2022	Desa Meunasah Jurong Kec. Meurah Dua	Hak Pakai	11 April 2017	Pekarangan/Kebun	Hibah	3.900.400,00	Perkebunan
199	Tanah Kosong	1.3.1.01.02.02.002	-	1.413	2022	Desa Meunasah Raya Kec. Meurah Dua	Hak Pakai	11 April 2017	Pekarangan/Kebun	Hibah	4.945.500,00	Perkebunan
200	Tanah Kosong	1.3.1.01.02.02.002	-	9.259	2022	Desa Meunasah Raya Kec. Meurah Dua	Hak Pakai	28 Februari 2018	Pekarangan/Kebun	Hibah	32.406.500,00	Perkebunan
201	Tanah Kosong	1.3.1.01.02.02.002	-	6.718	2022	Desa Muko Jurong Kec. Jangka Buya	Hak Pakai	20 Desember 2017	Pekarangan/Kebun	Hibah	11.420.600,00	Perkebunan
202	Tanah Kosong	1.3.1.01.02.02.002	-	2.252	2022	Desa Mee Kec. Jangka Buya	Hak Pakai	16 Agustus 2004	Pekarangan/Kebun	Hibah	3.828.400,00	Perkebunan
203	Tanah Kosong	1.3.1.01.02.02.002	-	1.998	2022	Desa Meunasah Krueng Kec. Ulim	Hak Pakai	11 April 2017	Pekarangan/Kebun	Hibah	4.895.100,00	Perkebunan
204	Tanah Bangunan Gudang	1.3.1.01.01.02.003	-	17.511	2022	Desa Meue Kec. Trienggadeng	Hak Pakai	15 Juli 2008	Pembangunan Balai Benih Udang	Hibah	42.901.950,00	Kelautan
205	Tanah Kosong	1.3.1.01.02.02.002	-	5.875	2022	Desa Pohroh Kec. Meureudu	Hak Pakai	15 Juli 2008	Tempat Pembuangan Akhir	Hibah	5.346.250,00	LH
206	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	-	230	2022	Desa Lancang Paru Kec. Bandar Baru	Hak Pakai	24 April 2009	Pembangunan Gedung	Hibah	805.000,00	Pertanian
207	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	-	488	2022	Desa Lancang Paru Kec. Bandar Baru	Hak Pakai	24 April 2009	Pembangunan Gedung	Hibah	1.708.000,00	Pertanian
208	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	-	238	2022	Desa Lancang Paru Kec. Bandar Baru	Hak Pakai	24 April 2009	Pembangunan Gedung	Hibah	833.000,00	Pertanian
Jumlah											56.549.317.505,21	

92

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
RINCIAN ASET TETAP TANAH YANG BELUM MEMILIKI SERTIFIKAT

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Luas(m2)	Tahun	Letak / Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Keterangan
		Kode Barang	Register				Hak	Sertifikat					
								Tanggal	Nomor				
1	2	3	4	5,00	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	45	11.537,00	2013	Jln. Banda Aceh-Medan	Hak Pakai			Bangunan SMP 1 Bandar Baru	Hibah	2.884.250.000,00	Dinas PK
2	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	46	15.000,00	2013	Jln. Banda Aceh-Medan Km. 143	Hak Pakai			Bangunan SMP 1 Bandar Baru	Hibah	1.050.000.000,00	Dinas PK
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	48	508,00	2013	Desa Blang Dalam Kec. Bandar Dua	Hak Pakai			Bangunan Dinas P & K	Hibah	101.600.000,00	Dinas PK
4	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	58	3.962,00	2013	Bandar Dua	Hak Pakai			Bangunan SMPN 1 Bandar Dua	Hibah	4.754.400.000,00	Dinas PK
5	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	60	7.000,00	2013	Jln. Ule Glee Barat Desa Blang Kuta Kec. Bandar Dua	Hak Pakai			Bangunan SMP 2 Blang Kuta	Hibah	2.512.500.000,00	Dinas PK
6	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	74	5.494,00	2013	Jln. Iskandar Muda Rhieng Blang Kec. Meureudu	Hak Pakai			Bangunan SMPN 1	Hibah	230.400.000,00	Dinas PK
7	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	64	365,00	2013	Jln Revolusi	Hak Pakai			Bangunan SD Muhammadiyah	Hibah	1.098.800.000,00	Dinas PK
8	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	89	6.230,00	2013	Jln. Kuat Batee Desa Sagoe	Hak Pakai			Bangunan SMPN 1 Trienggadeng	Hibah	206.700.000,00	Dinas PK
9	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	99	20.000,00	2013	Jln. Banda Aceh-Medan Km. 8	Hak Pakai			Bangunan SMPN 1 Ulim	Hibah	1.151.550.000,00	Dinas PK
10	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	100	7.840,00	2013	Jln. Mesjid Kota Ulim	Hak Pakai			Bangunan SMPN 2 Ulim	Hibah	1.200.000.000,00	Dinas PK
11	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	59	16.750,00	2013	Jln. Mesjid Jangka Buya Desa Reului Mangat Kec. Jangka Buya	Hak Pakai			Bangunan SMPN 3 Bandar Dua	Hibah	227.760.000,00	Dinas PK
12	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	114	10.939,00	2013	Jln. Seunong Sp. IV Meureudu	Hak Pakai			Bangunan SMP 3 Sp. IV Meurah Dua	Hibah	1.312.680.000,00	Dinas PK
13	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	115	600,00	2013	Blang Baro-Bandar Baru	Hak Pakai			Pemabngunan PAUD	Pembelian	99.600.000,00	Dinas PK
14	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	116	600,00	2013	Desa Blang Dalam Kec. Bandar Dua	Hak Pakai			Pembangunan TK Blang Dalam	Pembelian	150.000.000,00	Dinas PK
15	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	226	2.077,00	2016	Gampong Bale Musa Bandar Baru	Hak Pakai			Pembangunan Gedung UPTD Barat	Pembelian	671435000	Dinas PK
16	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	123	540,00	2013	Kec. Meurah Dua	Hak Pakai			Pembangunan Puskesmas	Hibah	78.300.000,00	Dinkes KB
17	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	124	400,00	2013	Lancok Mesjid	Hak Pakai			Bangunan Pustu	Hibah	8.000.000,00	Dinkes KB
18	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	125	400,00	2013	Poroh	Hak Pakai			Bangunan Puskesmas	Hibah	10.000.000,00	Dinkes KB
19	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	126	450,00	2013	Baro Nyong	Hak Pakai			Bangunan Pustu	Hibah	11.250.000,00	Dinkes KB
20	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	127	400,00	2013	Lancok Baroh	Hak Pakai			Bangunan Puskesmas	Hibah	8.000.000,00	Dinkes KB
21	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	128	3.020,00	2013	Jln. Banda Aceh-Medan	Hak Pakai			Bangunan Puskesmas dan Rumah Dinas	Hibah	1.661.000.000,00	Dinkes KB
22	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	129	4.300,00	2013	Jln. Banda Aceh-Medan Desa Ule Glee	Hak Pakai			Bangunan Gedung	Hibah	4.300.000.000,00	Dinkes KB
23	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	130	620,00	2013	Desa Kuta Krueung Kec. Bandar Dua	Hak Pakai			Bangunan Puskesmas	Hibah	31.000.000,00	Dinkes KB
24	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	1.3.1.01.01.04.006	131	1,72	2013	Meurandeh Alue Bandar Dua	Hak Pakai			Bangunan Pustu	Hibah	686.400.000,00	Dinkes KB
25	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	1.3.1.01.01.04.006	132	195,00	2013	Muko Kuthang Bandar Dua	Hak Pakai			Bangunan Poskesdes	Hibah	78.000.000,00	Dinkes KB
26	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	133	650,00	2013	Jln. Paya Pisang Klat Desa Paya Pisang	Hak Pakai			Bangunan Pustu	Hibah	52.000.000,00	Dinkes KB
27	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	134	430,00	2013	Jln. Ule Glee Barat Desa Blang Kuta Kec. Bandar Dua	Hak Pakai			Bangunan Pustu	Hibah	43.000.000,00	Dinkes KB

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Luas(m2)	Tahun	Letak / Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Keterangan
		Kode Barang	Register				Hak	Sertifikat					
								Tanggal	Nomor				
28	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	135	600,00	2013	Desa Jeulanga Mata le	Hak Pakai			Bangunan Pustu	Hibah	24.000.000,00	Dinkes KB
29	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	136	6.649,00	2013	Jln. Iskandar Muda Kec. Meureudu	Hak Pakai			Bangunan Puskesmas	Hibah	1.662.250.000,00	Dinkes KB
30	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	137	240,00	2013	Jln. Beuracan	Hak Pakai			Bangunan Pustu	Hibah	36.000.000,00	Dinkes KB
31	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	138	675,00	2013	Jln. Tirta No. 3 (Belakang Toko Indako)	Hak Pakai			Tanah Puskesmas Lama	Hibah	101.250.000,00	Dinkes KB
32	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	139	2.100,00	2013	Depan Kantor Camat Trienggadeng	Hak Pakai			Bangunan Puskesmas	Hibah	315.000.000,00	Dinkes KB
33	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	1.3.1.01.01.04.006	140	1,82	2013	Pangwa Trienggadeng	Hak Pakai			Bangunan Pustu	Hibah	637.000.000,00	Dinkes KB
34	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	1.3.1.01.01.04.006	141	400,00	2013	Peulandok Trienggadeng	Hak Pakai			Bangunan Pustu	Hibah	40.000.000,00	Dinkes KB
35	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	1.3.1.01.01.04.006	142	455,00	2013	Dayah Teumanah Trienggadeng	Hak Pakai			Bangunan Pustu	Hibah	45.000.000,00	Dinkes KB
36	Tanah Bangunan Fasilitas Tempat Tinggal Lainnya	1.3.1.01.01.01.012	143	600,00	2013	Puskesmas Ulim	Hak Pakai			Bangunan Rumah Dinas	Hibah	240.000.000,00	Dinkes KB
37	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	144	1.540,00	2013	T. Maha Raja Sahid Mansyur Syah Kec. Ulim	Hak Pakai			Bangunan Puskesmas	Hibah	539.000.000,00	Dinkes KB
38	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	145	600,00	2013	Desa Mesjid Ulim Tunong Kec. Ulim	Hak Pakai			Bangunan Pustu	Hibah	72.000.000,00	Dinkes KB
39	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	146	600,00	2013	Dusun Geulanggan	Hak Pakai			Bangunan Pustu	Hibah	75.000.000,00	Dinkes KB
40	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	147	700,00	2013	Jln. PT. Gotong Royong Ds. Blang Rheu Kec. Ulim	Hak Pakai			Bangunan Pustu	Hibah	56.000.000,00	Dinkes KB
41	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	148	180,00	2013	Jln. Telkom Desa Dayah Baroh	Hak Pakai			Bangunan Puskesmasdes	Hibah	27.000.000,00	Dinkes KB
42	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	149	180,00	2013	Desa Biduk	Hak Pakai			Bangunan Polindes	Hibah	2.160.000,00	Dinkes KB
43	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	150	400,00	2013	Keude Pante Raja	Hak Pakai			Bangunan Puskesmas	Hibah	80.000.000,00	Dinkes KB
44	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	1.3.1.01.01.04.006	151	150,00	2013	Pustu Pante Raja	Hak Pakai			Bangunan Pustu	Hibah	15.000.000,00	Dinkes KB
45	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	1.3.1.01.01.04.006	152	8,73	2013	Puskesmas Jangka Buya	Hak Pakai			Bangunan Puskesmas	Hibah	2.617.500.000,00	Dinkes KB
46	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	153	150,00	2013	Desa Meunasah Mee Kec. Trienggadeng	Hak Pakai			Bangunan Pustu	Hibah	6.000.000,00	Dinkes KB
47	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	154	300,00	2013	Jln. Seneu Desa Meunasah Bie Kec. Meurah Dua	Hak Pakai			Bangunan Puskesmas	Hibah	75.000.000,00	Dinkes KB
48	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	155	240,00	2013	Jln. Meunasah Mancang Kec. Meurah Dua	Hak Pakai			Bangunan Polindes	Hibah	6.000.000,00	Dinkes KB
49	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	156	80,00	2013	Jln. Uli Meureudu Desa Lueng Bimba Kec. Meurah Dua	Hak Pakai			Bangunan Polindes	Hibah	16.000.000,00	Dinkes KB
50	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	157	154,00	2013	Jln. Sp IV Seunong Desa Seunong Kec. Meurah Dua	Hak Pakai			Bangunan Puskesmasdes	Hibah	3.850.000,00	Dinkes KB
51	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	158	977,00	2013	Meurandeh Alue Bandar Dua	Hak Pakai			Pembangunan Puskesmas Pembantu	Pembelian	356.024.758,00	Dinkes KB
52	Tanah Bangunan Rumah Sakit	1.3.1.01.01.04.003	229	1.106,00	2017	Dayah Nyong Bandar Baru	Hak Pakai			Pembangunan Puskesmas Nyong	Pembelian	125.890.200,00	Dinkes KB
53	Tanah Bangunan Rumah Sakit	1.3.1.01.01.04.003	272	2.192,00	2019	Blang Kuta Kec. Bandar Dua	Hak Pakai			Pembangunan Perluasan Puskesmas	Pembelian	194.920.000,00	Dinkes KB
54	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003	227	467,00	2016	Gp. Buket Teungoh-Jalan Lueng Geukueh	Hak Pakai			Tanah Sarana Umum Jalan	Pembelian	297.800.000,00	Dinas PU
55	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003	269	9.520,00	2012	Desa Kuta Krueng Bandar Dua	Hak Pakai			Pembangunan Jalan	Hibah	3.552.629.400,00	Dinas PU
56	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003	270	4.849,00	2012	Kuta Trieng Jalan Raja Beurangkat Meureudu	Hak Pakai			Pembangunan Jalan	Hibah	1.733.587.000,00	Dinas PU
57	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003	271	6.651,00	2012	Jalan Pulo Meureudu	Hak Pakai			Pembangunan Jalan	Hibah	2.799.056.100,00	Dinas PU

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Luas(m2)	Tahun	Letak / Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Keterangan
		Kode Barang	Register				Hak	Sertifikat					
								Tanggal	Nomor				
58	Tanah Lapangan Sepak Bola	1.3.1.01.03.01.005	211	5.555,00	2014	Gp. Keude Pante Raja	Hak Pakai			Lapangan Bola Kaki	Pembelian	499.950.000,00	Dispora
59	Tanah Lapangan Sepak Bola	1.3.1.01.03.01.005	212	952,00	2014	Gp. Pupu-Ulim	Hak Pakai			Lapangan Bola Kaki	Pembelian	199.920.000,00	Dispora
60	Tanah Lapangan Sepak Bola	1.3.1.01.03.01.005	217	7,00	2015	Gampoeng Keude Pante Raja	Hak Pakai			Lapangan Bola Kaki	Pembelian	708.390.000,00	Dispora
61	Tanah Lapangan Sepak Bola	1.3.1.01.03.01.005	231	2.745,00	2017	Gampoeng Keude Pante Raja	Hak Pakai			Lapangan Bola Kaki	Pembelian	181.480.000,00	Dispora
62	Tanah Untk pembangunan sekolah	1.3.1.01.02.03.005	228	40.811,00	2016	Baro Bandar Dua	Hak Pakai			Tanah untuk Pembanguna Gedung Kampus	Pembelian	3.600.373.451,00	Sekdakab
63	Tanah Untk pembangunan sekolah	1.3.1.01.02.03.005	232	40.811,00	2017	Blang Dalam Bandar Dua	Hak Pakai			Pembangunan Sarana Pendidikan Kampus AKN	Pembelian	6.998.077.560,00	Sekdakab
64	Tanah Bangunan Rumah Sakit	1.3.1.01.01.04.003	269	2.192,00	2018	Gp. Blang Kuta Kec. Bandar Dua Pijay	Hak Pakai			FASILITAS KESEHATAN	Pembelian	359.120.000,00	Sekdakab
65	Tanah Tempat Ibadah	1.3.1.01.01.04.026	270	242,00	2018	Gp. Paru Kedee, Kec. Bandar Baru	Hak Pakai			Lapangan Parkir	Pembelian	130.996.000,00	Sekdakab
66	Lain-lain	1.3.1.01.01.01.013	271	1,00	2018	Dalam Kabupaten Pidie Jaya	Hak Pakai			Pembuatan Sertifikat	Pembelian	6.396.040,00	Sekdakab
67	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	8	45.435	2010	Meureudu	Hak Pakai			Stadion Bola Kaki Kabupaten	Pembelian	1.311.900.000,00	BPBK
68	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	10	20.000	2010	Bandar Dua	Hak Pakai			Lapangan Bola Kaki Kec. B. Dua	Pembelian	210.000.000,00	BPBK
69	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	11	1.000	2010	Meurah Dua	Hak Pakai			Rumah Potong Hewan	Pembelian	175.000.000,00	BPBK
70	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	12	1.678	2010	Trienggadeng	Hak Pakai			Dryer	Pembelian	125.850.000,00	BPBK
71	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	13	750	2011	Meunasah Raya-Trienggadeng	Hak Pakai			Pembangunan TK	Pembelian	112.500.000,00	BPBK
72	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	15	835	2011	Lancang Paru-Bandar Baru	Hak Pakai			Pemb. Pabrik Lodisasi Garam	Pembelian	25.050.000,00	BPBK
73	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	16	11.320	2011	Jangka Buya	Hak Pakai			Lapangan Upacara/Bola kaki	Pembelian	1.199.920.000,00	BPBK
74	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	18	372	2011	Meunasah Bale-Meureudu	Hak Pakai			Pembangunan Jalan PPI	Pembelian	55.800.000,00	BPBK
75	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	19	6.657	2011	Pulo Gapu-Bandar Dua	Hak Pakai			Pembangunan Lap. Bola Kaki	Pembelian	139.797.000,00	BPBK
76	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	20	300	2011	Manyang Cut	Hak Pakai			Pembangunan Jalan Layang	Pembelian	75.000.000,00	BPBK
77	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	21	263	2011	Beurawang-Meureudu	Hak Pakai			Pembangunan Perluasan Jalan PDAM	Pembelian	52.600.000,00	BPBK
78	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	22	920	2011	Peulakan Cibrek-Bandar Dua	Hak Pakai			Puskesmas Kuta Krueng	Pembelian	99.360.000,00	BPBK
79	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	23	10.451	2011	Gampoeng Pohroh-Meureudu	Hak Pakai			Stadion Bola Kaki Kabupaten	Pembelian	391.912.500,00	BPBK
80	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	24	20.000	2011	Kampong Baroe-Bandar Dua	Hak Pakai			Lapangan Bola Kecamatan	Pembelian	210.000.000,00	BPBK
81	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	25	1.755	2012	Deah Pangwa-Trienggadeng	Hak Pakai			Pembangunan Pasar Ikan	Pembelian	245.700.000,00	BPBK
82	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	26	18.092	2012	Mesjid Peudeuk-Trienggadeng	Hak Pakai			Lapangan Bola Kaki	Pembelian	126.644.000,00	BPBK
83	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	27	1.180	2012	Meunasah Bie-Meurah Dua	Hak Pakai			Pembangunan Pasar Ikan Simpang Empat	Pembelian	168.800.000,00	BPBK
84	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	28	999	2012	Paru Cot-Bandar Baru	Hak Pakai			Tanah Kuburan Relokasi Dusun Tubok	Pembelian	39.960.000,00	BPBK
85	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	29	1.067	2012	Gp. Tunong-Pante Raja	Hak Pakai			Lapangan Bola Kaki	Pembelian	49.082.000,00	BPBK
86	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	30	592	2012	Meunasah Jurong-Meurah Dua	Hak Pakai			Perluasan Pembangunan Rumah Potong Hewan	Pembelian	118.400.000,00	BPBK
87	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	31	7.555	2012	Geuleudah-Meureudu	Hak Pakai			Unit Processing Benih (UPB)	Pembelian	1.359.900.000,00	BPBK

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Luas(m2)	Tahun	Letak / Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Keterangan
		Kode Barang	Register				Hak	Sertifikat					
								Tanggal	Nomor				
88	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	33	80.000	2012	Pante Raja	Hak Pakai			Sarana Kepentingan Umum	Pembelian	1.800.000.000,00	BPCK
89	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	35	4.070	2012	Dayah Husei-Meurah Dua	Hak Pakai			Unit Processing Benih (UPB)	Pembelian	229.800.000,00	BPCK
90	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	160	5.401	2013	Meureudu	Hak Pakai			Pembangunan Perkantoran Pemerintahan	Pembelian	416.225.000,00	BPCK
91	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	162	1.587	2013	Meurah Dua-Trienggadeng	Hak Pakai			Pembangunan Pasar Ikan Sp. 4 dan Pangwa	Pembelian	414.500.000,00	BPCK
92	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	164	6.687	2013	Gp. Udeung-Bandar Baru	Hak Pakai			Saluran Pembuangan Air Sawah	Pembelian	56.839.500,00	BPCK
93	Tanah Bangunan Pertokoan/Rumah Toko/Koperasi	1.3.1.01.01.02.002	165	289	2013	Kecamatan Pante Raja	Hak Pakai			Bangunan Toko Bekas Pasar Ikan Lama	Hibah	115.000.000,00	BPCK
94	Tanah Bangunan Pasar	1.3.1.01.01.02.001	166	3.074	2013	Kecamatan Bandar Dua	Hak Pakai			Bangunan Pasar Hewan	Hibah	1.998.100.000,00	BPCK
95	Tanah Bangunan Pasar	1.3.1.01.01.02.001	167	288	2013	Kecamatan Pante Raja	Hak Pakai			Tanah Pasar Ikan	Hibah	115.200.000,00	BPCK
96	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	168	80	2013	Kec. Jangka Buya	Hak Pakai			Pasar Ikan (Dikontrakkan)	Hibah	12.000.000,00	BPCK
97	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	169	150	2013	Kec. Trienggadeng	Hak Pakai			Pasar Ikan (Dikontrakkan)	Hibah	22.500.000,00	BPCK
98	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	170	200	2013	Kec. Bandar Baru	Hak Pakai			Pasar Ikan (Dikontrakkan)	Hibah	30.000.000,00	BPCK
99	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	171	180	2013	Kec. Meureudu	Hak Pakai			Pasar Ikan (Dikontrakkan)	Hibah	45.000.000,00	BPCK
100	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	172	1.200	2013	Kec. Meureudu	Hak Pakai			Bangunan Toko Pasar	Hibah	300.000.000,00	BPCK
101	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	173	300	2013	Kec. Ulim	Hak Pakai			Bangunan Pasar Ikan	Hibah	37.500.000,00	BPCK
102	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	174	300	2013	Kec. Bandar Dua	Hak Pakai			Bangunan Pasar Ikan	Hibah	75.000.000,00	BPCK
103	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	175	100	2013	Kec. Meureudu	Hak Pakai			Bangunan Pasar Sayur	Hibah	25.000.000,00	BPCK
104	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	176	1.000	2013	Kec. Trienggadeng	Hak Pakai			Bangunan Toko Pasar	Hibah	150.000.000,00	BPCK
105	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	177	600	2013	Kec. Ulim	Hak Pakai			Bangunan Kios Pasar	Hibah	75.000.000,00	BPCK
106	Tanah Bangunan Gedung Permanen	1.3.1.01.01.02.015	178	420	2013	Kecamatan Bandar Dua	Hak Pakai			Bangunan Pos Perbatasan	Hibah	250.000.000,00	BPCK
107	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	179	1.200	2013	Kec. Bandar Dua	Hak Pakai			Bangunan Toko Pasar	Hibah	300.000.000,00	BPCK
108	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	180	1.850	2013	Kec. Bandar Baru	Hak Pakai			Bangunan Toko	Hibah	323.750.000,00	BPCK
109	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	1.3.1.01.02.02.002	181	3.984	2013	Kecamatan Bandar Dua	Hak Pakai			Tanah TPA (Kebun)	Hibah	47.808.000,00	BPCK
110	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	1.3.1.01.02.02.002	182	1.500	2013	Langgien Bandar Baru	Hak Pakai			Tanah TPA	Hibah	18.000.000,00	BPCK
111	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	213	1.250	2014	Keude Paru-Bandar Baru	Hak Pakai			Pembangunan Pasar Ikan	Pembelian	261.250.000,00	BPCK
112	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	214	3.300	2014	Sarah Panyang-Bandar Baru	Hak Pakai			Pembangunan Sekolah Dasar	Pembelian	148.500.000,00	BPCK
113	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	215	1.894	2014	Cubo-Bandar Baru	Hak Pakai			Perluasan Komplek Puskesmas	Pembelian	183.718.000,00	BPCK
114	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	216	1.403	2014	Gp. Pulo-Meureudu	Hak Pakai			Pembangunan Jalan Pulo	Pembelian	258.064.604,00	BPCK
115	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	274	5.624	2014	COT Seutui-Ulim/Sarah Mane-Meurah Dua	Hak Pakai			Pembangunan Inteake	Pembelian	71.495.500,00	BPCK
116	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	218	67	2015	Puskesmas Cubo Bandar Baru	Hak Pakai			Pembangunan Jalan Pulo	Sumbangan	41.975.000,00	BPCK
117	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	219	79	2015	Meureudu	Hak Pakai			Pembangunan Jalan Pulo Gampong Mesjid Tuha	Sumbangan	41.000.000,00	BPCK

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Luas(m2)	Tahun	Letak / Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Keterangan
		Kode Barang	Register				Hak	Sertifikat					
								Tanggal	Nomor				
118	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	220	55	2015	Meureudu	Hak Pakai			Pembangunan Jalan Pulo	Sumbangan	22.850.000,00	BPKK
119	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	221	439	2015	Meureudu	Hak Pakai			Pembangunan Jalan Pulo	Sumbangan	166.250.000,00	BPKK
120	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	222	143	2015	Meureudu	Hak Pakai			Pembangunan Jalan Pulo	Sumbangan	690.850.000,00	BPKK
121	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	223	1.403	2015	Meureudu	Hak Pakai			Pembangunan Jalan Pulo Gampong Mesjid Tuha	Sumbangan	951.058.415,00	BPKK
122	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	183	110,00	2013	Lueng Putu	Hak Pakai			Bangunan Toko	Hibah	60.500.000,00	Bandar Baru
123	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	184	110,00	2013	Keude Lueng Putu	Hak Pakai			Bangunan Toko	Hibah	60.500.000,00	Bandar Baru
124	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	186	444,44	2013	Keude Pante Raja	Hak Pakai			Bangunan Pasar Sayur dan TPI	Hibah	199.998.000,00	Pante Raja
125	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	187	3.000,00	2013	Jln. Banda Aceh-Medan	Hak Pakai			Kantor Camat	Hibah	1.350.000.000,00	Pante Raja
126	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	192	7.093,00	2013	Jln. Pos Kelurahan Mesjid Tuha	Hak Pakai			Kantor Kecamatan Meureudu	Hibah	2.127.825.000,00	Meureudu
127	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	193	3.153,00	2013	Jln. Banda Aceh-Medan Meurah Dua	Hak Pakai			Kantor Camat	Hibah	630.600.000,00	Meurah Dua
128	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	194	1.419,00	2013	Jln. Kuta Blang	Hak Pakai			Kantor dan Rumah	Hibah	262.515.000,00	Meurah Dua
129	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	195	1.640,00	2013	Jln. Banda Aceh-Medan Meurah Dua	Hak Pakai			Kantor Polsek	Hibah	328.000.000,00	Meurah Dua
130	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	198	8.725,00	2013	Jln. Rel Kereta Api Desa Keude Jangka Buya	Hak Pakai			Kantor Kecamatan Meureudu	Hibah	785.250.000,00	Jangka Buya
131	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	199	3.000,00	2013	Jln. Medan-Banda Aceh Kel. Gampong Ule Glee	Hak Pakai			Kantor Camat dan Rumah Dinas	Hibah	1.050.000.000,00	Bandar Dua
132	Tanah Bangunan Pasar	1.3.1.01.01.02.001	200	771,00	2013	Jln. Medan-Banda Aceh Kel. Gampong Ule Glee	Hak Pakai			Pasar Sayur	Hibah	925.200.000,00	Bandar Dua
133	Tanah Lapangan Penimbunan Pembuangan Sampah	1.3.1.01.03.03.003	201	6.000,00	2013	Kumba	Hak Pakai			Tempat Pembuangan Akhir	Hibah	1.800.000.000,00	Bandar Dua
134	Tanah Bangunan Gudang	1.3.1.01.01.02.003	202	400,00	2013	Kecamatan Bandar Dua	Hak Pakai			Disewakan	Hibah	400.000.000,00	Bandar Dua
135	Tanah Sarana Pendidikan dan Latihan	1.3.1.01.03.07.011	1E+08	7.071,00	2013	Desa Kuta Pangwa Trienggadeng	Hak Pakai			Pembangunan Sarana Pendidikan (MUQ)	Hibah	740.443.420,00	Pendidikan Dayah
136	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	204	10.050,00	2013	Meureudu	Hak Pakai			Bangunan Gudang	Hibah	351.750.000,00	Pertanian
137	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	205	476,00	2013	Meureudu	Hak Pakai			Bangunan Kantor	Hibah	119.000.000,00	Pertanian
138	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	206	1.784,00	2013	Meureudu	Hak Pakai			Bangunan Kantor BPP	Hibah	240.840.000,00	Pertanian
139	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	207	10.050,00	2013	Meureudu	Hak Pakai			Bangunan Lantai Jemur	Hibah	251.250.000,00	Pertanian
140	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.02.02.004	209	1.432,00	2011	Desa Meugit Sagoe Bandar Dua	Hak Pakai			Pembangunan Kantor BPP	Hibah	180.985.512,00	Pertanian
141	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.02.02.004	210	2.317,00	2011	Desa Meue Trienggadeng	Hak Pakai			Pembangunan Kantor BPP	Hibah	199.167.372,00	Pertanian
142	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.02.02.004	211	1.413,00	2011	Desa Meunash Raya Meurah Dua	Hak Pakai			Pembangunan Kantor BPP	Hibah	307.126.208,00	Pertanian
143	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.02.02.004	212	1.998,00	2011	Desa Meunash Krueng Ulim	Hak Pakai			Pembangunan Kantor BPP	Hibah	413.917.768,00	Pertanian
144	Tanah Perkebunan Lainnya	1.3.1.01.02.03.004	230	41,60	2017	Lhok Pusong Bandar Dua	Hak Pakai			Untuk Lokasi Perkebunan dan Peternakan	Pembelian	628.144.100,00	Kehutanan
145	Tanah Bangunan Pasar	1.3.1.01.01.02.001	209	750	2013	Gampong Mesjid Kec. Pante Raja	Hak Pakai			Pembangunan Pusat Promosi Hasil Perikanan (Pasar Kepiting)	Pembelian	128.000.000,00	Kelautan
146	Tanah Bangunan Pasar	1.3.1.01.01.02.001	224	706,00	2016	Gp. Mesjid Kec. Panteraja	Hak Pakai			Tanah Untuk Pasar Kepiting Kec. Panteraja Kab. Pidie Jaya	Pembelian	185.000.000,00	Kelautan
147	Tanah Jalan	1.3.1.01.03.07.011	210	75,00	2013	Gampong Pulo Bandar Dua	Hak Pakai			Perluasan Jalan Pasar	Pembelian	430.569.481,00	Disperindagkop

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Luas(m2)	Tahun	Letak / Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Keterangan
		Kode Barang	Register				Hak	Sertifikat					
								Tanggal	Nomor				
148	Tanah Bangunan Pasar	1.3.1.01.03.07.011	211	4300	2012	Gampong Ulee Gle Bandar Dua	Hak Pakai			Pembangunan Pasar Ikan/Sayur	Hibah	3.257.633.800,00	Disperindagkop
149	Tanah Bangunan Pasar	1.3.1.01.03.07.011	212	28952	2012	Gampong Paru Cot Bandar Baru	Hak Pakai			Pembangunan Pasar Ikan/Sayur	Hibah	2.015.532.740,00	Disperindagkop
150	Tanah Bangunan Pasar	1.3.1.01.03.07.011	213	4126	2013	Kecamatan Trienggadeng	Hak Pakai			Pembangunan Pasar Ikan/Sayur	Hibah	812.822.000,00	Disperindagkop
151	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	1.3.1.01.03.07.003	1E+08	224,00	2021	Desa Alue keutapang, Kec. Bandar Dua	Hak Pakai			Untuk Jalan dan Tugu	Pembelian	123.344.784,00	Pertanahan
Jumlah											89.407.570.213,00		

98

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
REKAPITULASI PENYUSUTAN ASET TETAP PER SKPK TAHUN 2022

NO	NAMA SKPK	BEBAN PENYUSUTAN				AKUMULASI PENYUSUTAN			
		BEBAN SUSUT KIB B	BEBAN SUSUT KIB C	BEBAN SUSUT KIB D	JUMLAH BEBAN	AKUMULASI PENYUSUTAN KIB B	AKUMULASI PENYUSUTAN KIB C	AKUMULASI PENYUSUTAN KIB D	JUMLAH AKUMULASI
1	DINAS PENDIDIKAN	9.045.997.517,50	5.584.223.003,10	18.280.680,00	14.648.501.200,60	59.044.473.692,36	41.413.415.507,22	74.624.310,00	100.532.513.509,58
2	TK/SD	1.744.122.229,08	1.869.844,00	11.648.070,00	1.757.640.143,08	5.481.222.901,55	7.110.544,00	34.944.210,00	5.523.277.655,55
3	SMP	847.300.416,19	650.000,00	5.828.966,67	853.779.382,86	2.623.837.267,62	1.950.000,00	17.935.600,00	2.643.722.867,62
4	CABANG DINAS PENDIDIKAN	-	-	-	-	-	-	-	-
5	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	3.663.685.227,67	1.788.230.482,06	96.742.488,53	5.548.658.198,26	52.433.707.701,49	13.355.268.760,86	498.684.146,57	66.287.660.608,92
6	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN	11.429.981.667,64	1.643.523.936,12	573.387.783,92	13.646.893.387,68	46.890.068.995,39	9.293.093.076,20	2.229.128.982,98	58.412.291.054,57
7	DINAS PEKERJAAN UMUM	469.003.150,00	1.038.564.194,94	87.050.632.781,41	88.558.200.126,35	29.158.807.135,22	6.495.918.309,10	668.591.002.899,83	704.245.728.344,15
8	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	216.422.807,14	176.154.348,50	25.368.833,33	417.945.988,97	4.136.807.546,43	2.349.076.169,00	181.509.333,33	6.667.393.048,76
9	DINAS PERHUBUNGAN	89.378.000,00	186.805.664,53	137.460.675,00	413.644.339,53	3.936.107.300,00	1.785.580.503,10	429.879.650,00	6.151.567.453,10
10	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP, PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN	469.642.771,43	226.669.640,82	236.538.833,33	932.851.245,58	6.091.471.034,71	702.823.223,64	1.797.475.166,64	8.591.769.424,99
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PERCATATAN SIPIL	210.374.875,00	-	1.528.982,50	211.903.857,50	1.785.753.540,00	-	11.465.787,50	1.797.219.327,50
12	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	186.626.462,86	3.991.060,00	-	190.617.522,86	2.115.732.624,29	15.964.240,00	-	2.131.696.864,29
13	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	48.710.734,64	200.000,00	1.339.500,00	50.250.234,64	1.785.627.735,00	2.400.000,00	12.879.000,00	1.800.906.735,00
14	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	35.270.716,00	300.937.917,58	41.240.579,90	377.449.213,48	460.939.365,33	1.360.948.694,32	157.818.119,60	1.979.706.179,25
15	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	19.645.975,00	1.962.000,00	150.000,00	21.757.975,00	368.208.200,00	25.506.000,00	2.250.000,00	395.964.200,00
16	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH	31.396.875,00	54.057.000,00	166.666,67	85.620.541,67	469.681.525,00	521.938.000,00	666.666,67	992.286.191,67
17	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN	-	-	-	-	-	-	-	-
18	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-
19	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN	1.057.268.737,72	2.377.922.641,97	11.516.966,67	3.446.708.346,36	20.361.271.189,00	22.336.921.194,81	101.839.350,00	42.800.031.733,81
20	SEKRETARIAT DPRK	297.006.550,00	450.320.512,02	1.994.301,58	749.321.363,60	3.478.306.266,67	6.253.343.845,00	34.889.674,05	9.766.539.785,72
21	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN	1.652.677.585,71	77.611.800,00	33.382.497,50	1.763.671.883,21	26.114.363.735,71	757.355.800,00	323.869.727,50	27.195.589.263,21
22	INSPEKTORAT	40.376.964,29	-	-	40.376.964,29	420.457.535,71	-	-	420.457.535,71
23	KECAMATAN BANDAR BARU	17.131.500,00	83.169.739,44	-	100.301.239,44	453.562.750,00	831.697.394,40	-	1.285.260.144,40
24	KECAMATAN PANTERAJA	11.171.000,00	27.018.204,00	-	38.189.204,00	171.247.595,00	265.401.260,00	-	436.648.855,00
25	KECAMATAN TRIENGGADENG	4.200.000,00	75.863.605,94	-	80.063.605,94	218.583.000,00	734.666.059,40	-	953.249.059,40

NO	NAMA SKPK	BEBAN PENYUSUTAN				AKUMULASI PENYUSUTAN			
		BEBAN SUSUT KIB B	BEBAN SUSUT KIB C	BEBAN SUSUT KIB D	JUMLAH BEBAN	AKUMULASI PENYUSUTAN KIB B	AKUMULASI PENYUSUTAN KIB C	AKUMULASI PENYUSUTAN KIB D	JUMLAH AKUMULASI
26	KECAMATAN MEUREUDU	22.827.625,00	35.826.770,20	-	58.654.395,20	259.168.350,00	358.267.702,00	-	617.436.052,00
27	KECAMATAN MEURAH DUA	21.900.000,00	20.773.328,00	2.200.000,00	44.873.328,00	325.262.500,00	207.733.280,00	30.800.000,00	563.795.780,00
28	KECAMATAN ULIM	25.088.000,00	37.085.950,00	50.000,00	62.223.950,00	371.515.000,00	370.859.500,00	600.000,00	742.974.500,00
29	KECAMATAN JANGKA BUYA	10.955.500,00	16.825.200,68	666.484,00	28.447.184,68	135.231.500,00	144.351.366,80	6.664.840,00	286.247.706,80
30	KECAMATAN BANDAR DUA	30.757.500,00	79.165.100,00	233.333,33	110.155.933,33	464.850.000,00	784.305.000,00	1.633.333,33	1.250.788.333,33
31	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	64.460.812,50	480.000,00	4.240.000,00	69.180.812,50	1.807.529.012,50	3.360.000,00	42.400.000,00	1.853.289.012,50
32	DINAS SYARIAT ISLAM	18.954.000,00	11.812.120,00	-	30.766.120,00	624.827.540,00	88.654.840,00	-	713.482.380,00
33	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH	961.989.927,70	48.311.517,26	209.944.909,97	1.220.246.354,93	6.727.201.810,21	286.381.034,52	387.946.109,97	7.401.528.954,70
34	DINAS PENDIDIKAN DAYAH	31.903.400,00	91.831.809,66	9.930.000,00	133.665.209,66	244.149.100,00	132.984.813,82	9.930.000,00	387.063.913,82
35	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA	6.350.000,00	-	-	6.350.000,00	409.653.730,00	-	-	409.653.730,00
36	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH	10.085.260,00	-	-	10.085.260,00	104.031.040,00	-	-	104.031.040,00
37	SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH	15.975.000,00	-	150.000,00	16.125.000,00	221.238.750,00	-	900.000,00	222.138.750,00
38	SEKRETARIAT BAITUL MAL KABUPATEN	38.075.000,00	-	-	38.075.000,00	274.030.000,00	-	-	274.030.000,00
39	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG	89.768.214,29	91.268.600,00	42.500,00	181.079.314,29	687.795.000,00	737.975.380,00	255.000,00	1.426.025.380,00
40	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	2.075.433.918,10	393.269.461,80	3.558.022.688,88	6.026.726.068,78	14.006.482.485,45	2.833.402.683,88	28.363.865.578,25	45.203.750.747,58
41	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	160.973.585,71	74.586.400,00	7.882.494.472,26	8.118.054.457,97	2.364.498.900,00	487.489.620,00	44.450.691.414,25	47.302.679.934,25
42	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	189.686.514,29	296.458.300,08	1.028.219.544,19	1.514.364.358,56	2.571.449.825,00	2.257.212.721,02	9.326.525.365,45	14.155.187.911,47
43	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI	481.232.202,74	881.761.265,05	224.897.992,45	1.587.891.460,24	2.782.430.206,19	6.139.680.220,34	770.163.109,05	9.692.273.535,58
44	DINAS PERTANAHAN KABUPATEN	50.196.100,00	-	-	50.196.100,00	72.728.200,00	-	-	72.728.200,00
45	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	36.008.700,00	-	-	36.008.700,00	58.699.900,00	-	-	58.699.900,00
46	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	120.291.975,00	-	-	120.291.975,00	141.516.975,00	-	-	141.516.975,00
	TOTAL	36.050.304.998,20	16.179.201.417,75	101.168.300.532,09	153.397.806.948,04	302.654.528.460,83	123.343.036.743,43	757.893.237.374,97	1.183.890.802.579,23

92

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
LAPORAN AMORTISASI
ASET TAK BERWUJUD

No	Nama SKPD	Nama Barang	No. Register	Tahun	Nilai Perolehan	Penyusutan						Beban Amortisasi	Amortisasi	Sisa Nilai Buku
						Tahun Masa Manfaat	Nilai Penyusutan Per Tahun	Tahun Ini	Tahun Ini	Tahun Susut	Sisa Manfaat			
1	2	3	4	8	9	10	11=9/10	12	12	13=12-8	14=13-10	15	16=11*13	17=9-16
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Geografic Information Sistem (GIS)	1	2014	424.600.000,00	4	106.150.000,00	2022	2023	9	0	-	424.600.000,00	-
2	Dinas Pendidikan	Website Sekolah	1	2015	99.890.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten	Siadinda	1	2015	854.300.000,00	4	213.575.000,00	2022	2023	8	0	-	854.300.000,00	-
4	Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten	Simbakda	1	2015	285.000.000,00	4	71.250.000,00	2022	2023	8	0	-	285.000.000,00	-
5	Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten	SIM PBB-P2	1	2015	198.000.000,00	4	49.500.000,00	2022	2023	8	0	-	198.000.000,00	-
6	Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten	BPHTB	1	2015	197.450.000,00	4	49.362.500,00	2022	2023	8	0	-	197.450.000,00	-
7	Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten	GIS PBB-P2	1	2015	177.925.000,00	4	44.481.250,00	2022	2023	8	0	-	177.925.000,00	-
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	Website BPM	1	2015	17.820.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	Sistem Informasi Pemberdayaan	1	2015	41.800.000,00	4	10.450.000,00	2022	2023	8	0	-	41.800.000,00	-
10	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Website Bappeda	1	2015	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	E-Planning	1	2017	746.750.000,00	4	186.687.500,00	2022	2023	6	0	-	746.750.000,00	-
12	Sekretariat Daerah Kabupaten	E-Reporting	1	2017	40.000.000,00	4	10.000.000,00	2022	2023	6	0	-	40.000.000,00	-
13	Sekretariat Daerah Kabupaten	Simpaten	1	2017	49.990.000,00	4	12.497.500,00	2022	2023	6	0	-	49.990.000,00	-
14	Sekretariat Daerah Kabupaten	Simdes	1	2017	54.945.000,00	4	13.736.250,00	2022	2023	6	0	-	54.945.000,00	-
15	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	E-Arsip	1	2017	20.000.000,00	4	5.000.000,00	2022	2023	6	0	-	20.000.000,00	-
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sistem Informasi Pelayanan Terpadu	1	2017	98.175.000,00	4	24.543.750,00	2022	2023	6	0	-	98.175.000,00	-
17	Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten	Website Pelayanan Penerbitan SPD SKPK	1	2017	11.100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	SIPTK (Sistem Informasi Pendataan Tenaga Kerja)	1	2017	24.986.000,00	4	6.246.500,00	2022	2023	6	0	-	24.986.000,00	-
19	Dinas Pendidikan	Penetapan Angka Kredit (PAK)	1	2018	15.000.000,00	4	3.750.000,00	2022	2023	5	0	-	15.000.000,00	-
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	SIMPADU (Sistem Pelayanan Terpadu)	1	2018	25.000.000,00	4	6.250.000,00	2022	2023	5	0	-	25.000.000,00	-
21	Sekretariat Daerah Kabupaten	Lapora ABUWA	1	2018	49.940.000,00	4	12.485.000,00	2022	2023	5	0	-	49.940.000,00	-
22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	E-PRODOK	1	2019	52.000.000,00	4	13.000.000,00	2022	2023	4	0	13.000.000,00	52.000.000,00	-
23	UPTD Rumah Sakit Umum Daerah	Sistem Informasi Rumah Sakit Umum Daerah (SIMRS)	1	2019	376.669.000,00	4	94.167.250,00	2022	2023	4	0	94.167.250,00	376.669.000,00	-
24	Sekretariat Kabupaten	E-Voting	1	2020	97.844.000,00	4	24.461.000,00	2022	2023	3	1	24.461.000,00	73.383.000,00	24.461.000,00

No	Nama SKPD	Nama Barang	No. Register	Tahun	Nilai Perolehan	Penyusutan						Beban Amortisasi	Amortisasi	Sisa Nilai Buku
						Tahun Masa Manfaat	Nilai Penyusutan Per Tahun	Tahun Ini	Tahun Ini	Tahun Susut	Sisa Manfaat			
1	2	3	4	8	9	10	11=9/10	12	12	13=12-8	14=13-10	15	16=11*13	17=9-16
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sistem Informasi Penanggulangan Bencana (SIGUNA)	1	2020	5.000.000,00	4	1.250.000,00	2022	2023	3	1	1.250.000,00	3.750.000,00	1.250.000,00
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Simpeg (Sistem Informasi Kepegawaian)	1	2022	20.000.000,00	4	5.000.000,00	2022	2023	1	3	5.000.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sistem Arsip Surat Menyurat	1	2022	45.000.000,00	4	11.250.000,00	2022	2023	1	3	11.250.000,00	11.250.000,00	33.750.000,00
28	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	Aplikasi/Program Software (E-WEB)	1	2022	38.214.000,00	0	0,00	2022		0	0	-	0,00	-
29	Rumah Sakit Umum Daerah	Aplikasi/Program Software (E-WEB)	1	2022	14.163.200,00	0	0,00	2022		0	0	-	0,00	-
Jumlah					4.091.561.200,00		975.093.500,00					149.128.250,00	3.825.913.000,00	74.461.000,00

AK

Daftar Rincian Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)

No	Uraian	Jumlah
1	Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Non Tunai, Triwulan ke-4 TA 2022 (DBH PPh Pasal 21)	387.801.100,00
2	Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Non Tunai, Triwulan ke-4 TA 2022 (DBH PPh Pasal 25/29 OP)	2.895.072,00
3	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Minyak dan Gas Bumi Non Tunai, Triwulan ke-4 TA 2022	72.737.531,00
4	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan Non Tunai, Minggu ke-18 TA 2022	2.407.076,00
5	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya Non Tunai, Minggu ke-18 TA 2022	12.356.755,00
6	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Minyak dan Gas Bumi Non Tunai, Triwulan ke-4 TA 2022	2.273.109,00
7	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan Non Tunai, Minggu ke-18 TA 2022	100.320,00
8	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya Non Tunai, Minggu ke-18 TA 2022	386.067,00
9	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Rata Non Tunai, Tahap ke-3 TA 2022	472.605.805,00
10	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi Non Tunai - TDF, Triwulan ke-4 TA 2022	26.028.965,00
11	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Gas Bumi Non Tunai - TDF, Triwulan ke-4 TA 2022	33.144.170,00
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Non Tunai - TDF, Triwulan ke-4 TA 2022	145.834.351,00
13	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi Non Tunai - TDF, Triwulan ke-4 TA 2022	1.796.913,00
14	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Non Tunai - TDF, Triwulan ke-4 TA 2022	1.720.573,00
15	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Non Tunai - TDF, Triwulan ke-4 TA 2022	211.753.211,00
16	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Non Tunai, Triwulan ke-4 TA 2022	51.071.490,00
	Jumlah	1.424.912.508,00

97

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
DAFTAR ASET TAK BERWUJUD PER 31 DESEMBER 2022

No	Nama SKPD	Nama Barang	Merek/Tipe	Tahun	Asal Usul Perolehan	Harga	Kondisi	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Aplikasi/Program Software	Geografic Information Sistem (GIS)	2014	Pembelian	424.600.000	B	
2	Dinas Pendidikan	Aplikasi/Program Software	Website Sekolah	2015	Pembelian	99.890.000	B	
3	Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten	Aplikasi/Program Software	Siadinda	2015	Pembelian	854.300.000	B	
4	Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten	Aplikasi/Program Software	Simbakda	2015	Pembelian	285.000.000	B	
5	Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten	Aplikasi/Program Software	SIM PBB-P2	2015	Pembelian	198.000.000	B	
6	Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten	Aplikasi/Program Software	BPHTB	2015	Pembelian	197.450.000	B	
7	Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten	Aplikasi/Program Software	GIS PBB-P2	2015	Pembelian	177.925.000	B	
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	Aplikasi/Program Software	Website BPM	2015	Pembelian	17.820.000	B	
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	Aplikasi/Program Software	Sistem Informasi Pemberdayaan	2015	Pembelian	41.800.000	B	
10	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Aplikasi/Program Software	Website Bappeda	2015	Pembelian	10.000.000	B	
11	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Aplikasi/Program Software	E-Planning	2017	Pembelian	746.750.000	B	
12	Sekretariat Daerah Kabupaten	Aplikasi/Program Software	E-Reporting	2017	Pembelian	40.000.000	B	
13	Sekretariat Daerah Kabupaten	Aplikasi/Program Software	Simpaten	2017	Pembelian	49.990.000	B	
14	Sekretariat Daerah Kabupaten	Aplikasi/Program Software	Simdes	2017	Pembelian	54.945.000	B	
15	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Aplikasi/Program Software	E-Arsip	2017	Pembelian	20.000.000	B	
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Aplikasi/Program Software	Sistem Informasi Pelayanan Terpadu	2017	Pembelian	98.175.000	B	
17	Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten	Aplikasi/Program Software	Website Pelayanan Penerbitan SPD SKPK	2017	Pembelian	11.100.000	B	
18	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	Aplikasi/Program Software	SIPTK (Sistem Informasi Pendataan Tenaga Kerja)	2017	Pembelian	24.986.000	B	
19	Dinas Pendidikan	Aplikasi/Program Software	Penetapan Angka Kredit (PAK)	2018	Pembelian	15.000.000	B	
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Aplikasi/Program Software	SIMPADU (Sistem Pelayanan Terpadu)	2018	Pembelian	25.000.000	B	
21	Sekretariat Daerah Kabupaten	Aplikasi/Program Software	Lapora ABUWA	2018	Pembelian	49.940.000	B	
22	UPTD Rumah Sakit Umum Daerah	Aplikasi/Program Software	Sistem Informasi Rumah Sakit Umum Daerah (SIMRS)	2019	Pembelian	376.669.000	B	
23	Sekretariat Kabupaten	Aplikasi/Program Software	E-Voting	2020	Pembelian	97.844.000,00	B	
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Aplikasi/Program Software	Sistem Informasi Penanggulangan Bencana (SIGUNA)	2020	Pembelian	5.000.000,00	B	
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Aplikasi/Program Software	E-Prodok	2020	Pembelian	52.000.000,00	B	
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Aplikasi/Program Software	Simpeg (Sistem Informasi Kepegawaian)	2022	Pembelian	20.000.000,00	B	
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Aplikasi/Program Software	Sistem Arsip Surat Menyurat	2022	Pembelian	45.000.000,00	B	
28	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	Aplikasi/Program Software	E-WEB	2022	Pembelian	38.214.000,00	B	
29	Rumah Sakit Umum Daerah	Aplikasi/Program Software	E-WEB	2022	Pembelian	14.163.200,00	B	
JUMLAH						4.091.561.200		

98

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
RINCIAN KENDARAAN PEMERINTAH PIDIE JAYA YANG HILANG SAMPAI DENGAN TAHUN 2022

No.	SKPK	Jenis Kendaraan	Merk/Tahun	No. Polisi	Harga Perolehan (Rp)	Tahun Terima	Tahun Hilang	Tanda Bukti Laporan
1	Dinas Perhubungan	Pick Up L-300	Mithsubishi / 2011	BL 8009 O	146.450.000,00	2011	2012	Nomor: TBL/72/VII/2012/Res Atam
2	Dinas Perhubungan	Pick Up L-300	Mithsubishi / 2011	BL 8014 O	146.450.000,00	2011	2011	Nomor: TBL/12/VIII/2011/ACEH/Res Pidie/Sek Ulim
3	Dinas Perhubungan	Pick Up L-300	Mithsubishi / 2012	BL 8022 O	164.447.600,00	2012	2013	Nomor: SKET/03/IV/2013
4	Dinas Perhubungan	Pick Up L-300	Mithsubishi / 2011	BL 8011 O	146.450.000,00	2016	2016	Nomor: STPL/03/II/ 2016/Sektor
5	Setdakab	Sepeda Motor	Honda NF 125 TR / 2008	BL 2151 PF	14.574.000,00	2009	2009	Nomor: STPL/01/IV/ 2009/Polsek
6	BKPP	Sepeda Motor	Honda Supra 125 cc / 2008	BL 2115 PF	14.574.000,00	2009	2010	Nomor: STPL/13/ VIII/ 2010/ POLSEK
7	Bappeda	Sepeda Motor	Honda Supra X 125 / 2008	BL 2143 PF	14.531.250,00	2008	2009	Nomor: STPL/11/ VI/ 2009/ POLSEK
8	Sekretariat DPRK	Sepeda Motor	Honda NF 125 TR / 2008	BL 2121 PF	14.531.250,00	2012	2013	Nomor: STPL/30/IX/2013/ RES PIDIE/SEK MRD
9	Kabag Pembangunan	Sepeda Motor	Honda NF 125 TF / 2008	BL 2145 PF	14.531.250,00	2012	2013	Nomor: TBL/29/VIII/2013/ POLSEK
10	Kecamatan Trienggadeng	Sepeda Motor	Honda/ NF11B10 M/T/ 2011	BL 2566 O	11.607.000,00	2016	2016	Nomor:LP/10/II/2016/ ACEH/Res Pidie/Sek Tgd
11	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Sepeda Motor	Yamaha Vixion / 2012	BL 2722 O	22.000.000,00	2012	2015	Nomor: STPL/44/ IX/ 2015/ Sektor
12	Pendidikan	Sepeda Motor	Honda NF 125 TR / 2009	BL 2828 AF	14.500.000,00	2014	2015	Nomor: TBL/06/VII/2015/Aceh/ Res Pidie/Sek Ulim
13	Kelautan	Sepeda Motor	Supra NF 125 TR / 2008	BL 2261 O	14.574.000,00	2009	2013	Nomor: STPL/04/III/2013/ RES PIDIE/SEK MRD
14	PK (pengawas)	Sepeda Motor	Honda NF 11BID / 2009	BL 2275 O	11.607.000,00	2009	2015	Nomor: STPL/14/XI/2015/ Sektor
15	Setdakab	Sepeda Motor	Honda NF 125 TR / 2007	BL 2899 PB	14.053.000,00	2009	2013	Nomor: TBL/27/VII/2013/ POLSEK
16	Dinkes	Sepeda Motor	Honda NF 100 TD / 2007	BL 2842 PB	15.500.000,00	2009	2014	Nomor: TBL/01/I/ 2014/ RESKRIM
17	Bappeda	Sepeda Motor	Honda NF 125 TR / 2008	BL 2124 PF	14.574.000,00	2009	2012	Nomor: TBL/27/VIII/2012/ Aceh/Res Pidie/Sek Trgd
18	BPKP	Sepeda Motor	Supra NF 125 TR / 2013	BL 2745 O	16.328.000,00	2015	2015	Nomor: STPL/43/IX/2015/ Sektor
19	BKBPP	Sepeda Motor	Honda NF 125/D / 2008	BL 2114 PF	18.416.842,00	2011	2015	Nomor: TBL/12/XII/2015/Aceh/ Res Pidie/Sek Ulim
20	Kecamatan Meureudu	Sepeda Motor	Honda REVO / 2011	BL 2524 O	11.607.000,00	2012	2015	Nomor: STPL/03/I/ 2014/ Sektor
21	Kecamatan Ulim	Sepeda Motor	Honda NF 125 TR / 2012	BL 2061 AJ	16.500.000,00	2012	2015	Nomor: TBL/08/VIII/2015/Aceh/ Res Pidie/Sek Ulim
22	Pertanian dan Perternakan	Sepeda Motor	Honda NF 125 TR / 2012	BL 2880 AJ	16.500.000,00	2012	2014	Nomor: STPL/03/I/ 2014/ RES PIDIE/SEK MRD
23	Dinas Perikanan dan Kelautan	Sepeda Motor	Honda NF 125 TR / 2012	BL 2262 O	16.500.000,00	2012	2016	Nomor: TBL/35/VII/2016/ Aceh/Res Pidie/Sek Tgd
24	Dinas Syariat Islam	Sepeda Motor	Honda NF 125 TR / 2008	BL 2308 O	14.886.000,00	2012	2019	Nomor: STPL/18/XII/2019/SEK MRD
25	BPMG	Sepeda Motor	Honda NF 125 TR / 2008	BL 2306 O	14.886.000,00	2012	2019	Nomor: BPL/05/VI/2019/Res.Pidie 1.18/Sek M.Dua
JUMLAH					920.578.192,00			

92

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA

RINCIAN KENDARAAN RODA DUA PADA ASET LAIN-LAIN YANG DIGUNAKAN KEMBALI DALAM OPERASIONAL PEMERINTAH

No	Nama Barang	Kode Barang	No. Register	Merek/Tipe	Ukuran/	Bahan	Tahun	Nomor		Asal Usul	Harga	Kondisi	Keterangan
					CC			Pabrik	Polisi	Perolehan			
	2	3	4	5	6	7	8	9	12	14	15	16	17
1	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2596 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
2	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2597 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
3	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2598 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
4	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2600 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
5	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2603 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
6	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2610 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
7	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2612 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
8	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2614 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
	JUMLAH										92.856.000,00		

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
RINCIAN KENDARAAN RODA DUA YANG AKAN DIHIBAHKAN KEPADA PEMERINTAH GAMPONG

No	Nama Barang	Kode Barang	No. Register	Merek/Tipe	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun	Nomor		Asal Usul Perolehan	Harga	Kondisi	Keterangan
								Pabrik	Polisi				
	2	3	4	5	6	7	8	9	12	14	15	16	17
1	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2000 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
2	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2001 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
3	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2002 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
4	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2003 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
5	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2004 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
6	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2005 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
7	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2006 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
8	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2007 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
9	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2008 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
10	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2009 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
11	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2010 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
12	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2011 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
13	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2012 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
14	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2013 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
15	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2014 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
16	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2015 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
17	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2016 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
18	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2017 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
19	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2018 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab

No	Nama Barang	Kode Barang	No. Register	Merek/Tipe	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun	Nomor		Asal Usul Perolehan	Harga	Kondisi	Keterangan
								Pabrik	Polisi				
	2	3	4	5	6	7	8	9	12	14	15	16	17
20	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2019 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
21	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2020 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
22	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2021 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
23	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2022 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
24	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2023 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
25	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2024 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
26	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2025 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
27	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2026 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
28	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2027 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
29	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2028 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
30	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2029 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
31	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2030 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
32	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2031 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
33	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2032 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
34	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2033 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
35	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2034 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
36	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2035 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
37	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2036 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
38	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2037 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
39	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2038 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
40	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2039 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab

No	Nama Barang	Kode Barang	No. Register	Merek/Tipe	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun	Nomor		Asal Usul Perolehan	Harga	Kondisi	Keterangan
								Pabrik	Polisi				
	2	3	4	5	6	7	8	9	12	14	15	16	17
41	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2040 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
42	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2041 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
43	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2042 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
44	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2043 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
45	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2044 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
46	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2045 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
47	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2046 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
48	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2047 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
49	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2048 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
50	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2049 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
51	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2050 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
52	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2051 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
53	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2052 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
54	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2053 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
55	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2054 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
56	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2055 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
57	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2056 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
58	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2057 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
59	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2058 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
60	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2059 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
61	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2060 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab

No	Nama Barang	Kode Barang	No. Register	Merek/Tipe	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun	Nomor		Asal Usul Perolehan	Harga	Kondisi	Keterangan
								Pabrik	Polisi				
	2	3	4	5	6	7	8	9	12	14	15	16	17
62	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2061 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
63	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2062 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
64	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2063 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
65	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2064 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
66	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2065 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
67	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2066 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
68	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2067 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
69	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2068 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
70	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2069 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
71	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2070 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
72	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2071 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
73	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2072 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
74	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2073 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
75	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2074 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
76	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2075 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
77	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2076 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
78	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2077 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
79	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2078 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
80	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2079 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
81	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2080 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
82	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2081 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab

No	Nama Barang	Kode Barang	No. Register	Merek/Tipe	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun	Nomor		Asal Usul Perolehan	Harga	Kondisi	Keterangan
								Pabrik	Polisi				
	2	3	4	5	6	7	8	9	12	14	15	16	17
83	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2082 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
84	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2083 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
85	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2084 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
86	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2085 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
87	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2086 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
88	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2087 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
89	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2088 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
90	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2089 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
91	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2090 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
92	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2091 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
93	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2092 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
94	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2093 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
95	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2094 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
96	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2095 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
97	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2096 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
98	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2097 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
99	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2098 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
100	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2099 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
101	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2100 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
102	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2101 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
103	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2102 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab

No	Nama Barang	Kode Barang	No. Register	Merek/Tipe	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun	Nomor		Asal Usul Perolehan	Harga	Kondisi	Keterangan
								Pabrik	Polisi				
	2	3	4	5	6	7	8	9	12	14	15	16	17
104	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2103 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
105	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2104 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
106	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2105 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
107	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2106 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
108	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2107 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
109	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2108 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
110	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2109 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
111	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2110 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
112	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2111 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
113	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2112 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
114	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2113 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
115	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2114 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
116	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2115 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
117	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2116 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
118	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2117 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
119	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2118 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
120	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2119 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
121	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2120 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
122	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2121 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
123	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2122 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
124	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2123 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab

No	Nama Barang	Kode Barang	No. Register	Merek/Tipe	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun	Nomor		Asal Usul Perolehan	Harga	Kondisi	Keterangan
								Pabrik	Polisi				
	2	3	4	5	6	7	8	9	12	14	15	16	17
125	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2124 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
126	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2125 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
127	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2126 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
128	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2127 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
129	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2128 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
130	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2129 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
131	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2130 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
132	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2131 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
133	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2132 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
134	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2133 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
135	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2134 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
136	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2135 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
137	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2136 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
138	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2137 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
139	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2138 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
140	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2139 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
141	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2140 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
142	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2141 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
143	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2142 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
144	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2143 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
145	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2144 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab

No	Nama Barang	Kode Barang	No. Register	Merek/Tipe	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun	Nomor		Asal Usul Perolehan	Harga	Kondisi	Keterangan
								Pabrik	Polisi				
	2	3	4	5	6	7	8	9	12	14	15	16	17
146	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2145 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
147	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2146 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
148	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2147 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
149	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2148 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
150	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2149 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
151	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2150 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
152	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2151 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
153	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2152 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
154	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2153 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
155	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2154 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
156	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2155 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
157	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2156 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
158	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2157 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
159	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2158 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
160	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2159 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
161	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2160 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
162	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2161 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
163	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2162 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
164	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2163 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
165	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2164 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
166	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2165 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab

No	Nama Barang	Kode Barang	No. Register	Merek/Tipe	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun	Nomor		Asal Usul Perolehan	Harga	Kondisi	Keterangan
								Pabrik	Polisi				
	2	3	4	5	6	7	8	9	12	14	15	16	17
167	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2166 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
168	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2167 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
169	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2168 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
170	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2169 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
171	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2170 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
172	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2171 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
173	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2172 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
174	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2173 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
175	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2174 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
176	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2175 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
177	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2176 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
178	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2177 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
179	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2178 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
180	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2179 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
181	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2180 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
182	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2181 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
183	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2182 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
184	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2183 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
185	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2184 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
186	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2185 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
187	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2186 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab

No	Nama Barang	Kode Barang	No. Register	Merek/Tipe	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun	Nomor		Asal Usul Perolehan	Harga	Kondisi	Keterangan
								Pabrik	Polisi				
	2	3	4	5	6	7	8	9	12	14	15	16	17
188	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2187 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
189	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2188 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
190	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2189 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
191	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2190 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
192	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2191 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
193	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2192 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
194	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2193 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
195	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2194 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
196	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2195 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
197	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2196 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
198	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2197 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
199	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2198 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
200	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2199 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
201	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2200 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
202	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2201 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
203	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2202 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
204	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2203 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
205	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2204 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
206	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2205 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
207	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2206 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
208	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2207 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab

No	Nama Barang	Kode Barang	No. Register	Merek/Tipe	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun	Nomor		Asal Usul Perolehan	Harga	Kondisi	Keterangan
								Pabrik	Polisi				
	2	3	4	5	6	7	8	9	12	14	15	16	17
209	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2208 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
210	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2209 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
211	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2210 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
212	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2211 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
213	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2212 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
214	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2213 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
215	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2214 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
216	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2215 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
217	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2216 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
218	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2217 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
219	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2218 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
220	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2219 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
221	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2220 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
222	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	Suzuki New Smash	-	Besi/ Campuran	2009	-	BL 2221 O	Pembelian	13.275.000,00	B	Sekdakab
223	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2342 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
224	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2343 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
225	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2344 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
226	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2345 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
227	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2346 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
228	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2347 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
229	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2348 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK

No	Nama Barang	Kode Barang	No. Register	Merek/Tipe	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun	Nomor		Asal Usul Perolehan	Harga	Kondisi	Keterangan
								Pabrik	Polisi				
	2	3	4	5	6	7	8	9	12	14	15	16	17
230	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2349 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
231	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2350 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
232	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2351 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
233	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2352 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
234	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2353 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
235	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2354 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
236	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2355 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
237	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2356 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
238	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2357 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
239	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2358 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
240	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2359 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
241	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2360 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
242	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2361 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
243	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2362 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
244	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2363 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
245	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2364 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
246	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2365 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
247	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2366 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
248	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2367 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
249	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2368 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
250	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2369 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK

No	Nama Barang	Kode Barang	No. Register	Merek/Tipe	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun	Nomor		Asal Usul Perolehan	Harga	Kondisi	Keterangan
								Pabrik	Polisi				
	2	3	4	5	6	7	8	9	12	14	15	16	17
251	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2370 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
252	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2371 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
253	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2372 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
254	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2373 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
255	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2374 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
256	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2375 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
257	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2376 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
258	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2377 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
259	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2378 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
260	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2379 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
261	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2380 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
262	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2381 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
263	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2382 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
264	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2383 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
265	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2384 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
266	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2385 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
267	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2386 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
268	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2387 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
269	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2388 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
270	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2389 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
271	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2390 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK

No	Nama Barang	Kode Barang	No. Register	Merek/Tipe	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun	Nomor		Asal Usul Perolehan	Harga	Kondisi	Keterangan
								Pabrik	Polisi				
	2	3	4	5	6	7	8	9	12	14	15	16	17
272	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2391 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
273	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2392 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
274	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2393 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
275	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2394 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
276	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2395 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
277	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2396 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
278	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2397 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
279	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2398 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
280	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2399 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
281	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2400 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
282	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2401 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
283	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2402 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
284	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2403 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
285	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2404 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
286	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2405 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
287	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2406 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
288	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2407 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
289	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2408 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
290	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2409 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
291	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2410 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
292	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2411 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK

No	Nama Barang	Kode Barang	No. Register	Merek/Tipe	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun	Nomor		Asal Usul Perolehan	Harga	Kondisi	Keterangan
								Pabrik	Polisi				
	2	3	4	5	6	7	8	9	12	14	15	16	17
293	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2412 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
294	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2413O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
295	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2414 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
296	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2415 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
297	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2416 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
298	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2417 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
299	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2418 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
300	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2419 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
301	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2420 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
302	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2421 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
303	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2422 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
304	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2423 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
305	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2424 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
306	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2425 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
307	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2426 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
308	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2427 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
309	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2428 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
310	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2429 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
311	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2430 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
312	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2431 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
313	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2432 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK

No	Nama Barang	Kode Barang	No. Register	Merek/Tipe	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun	Nomor		Asal Usul Perolehan	Harga	Kondisi	Keterangan
								Pabrik	Polisi				
	2	3	4	5	6	7	8	9	12	14	15	16	17
314	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2433 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
315	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2434 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
316	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2435 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
317	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2436 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
318	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2437 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
319	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2438 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
320	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2439 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
321	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2440 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
322	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2441 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
323	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2442 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
324	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2443 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
325	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2444 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
326	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2445 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
327	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2446 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
328	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2447 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
329	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2448 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
330	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2449 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
331	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2450 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
332	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2451 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
333	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2452 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
334	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2453 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK

No	Nama Barang	Kode Barang	No. Register	Merek/Tipe	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun	Nomor		Asal Usul Perolehan	Harga	Kondisi	Keterangan
								Pabrik	Polisi				
	2	3	4	5	6	7	8	9	12	14	15	16	17
335	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2454 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
336	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2455 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
337	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2456 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
338	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2457 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
339	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2458 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
340	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2459 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
341	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2460 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
342	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2461 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
343	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2462 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
344	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2463 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
345	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2464 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
346	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2465 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
347	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2466 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
348	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2467 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
349	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2468 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
350	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2469 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
351	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2470 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
352	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2471 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
353	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2472 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
354	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2473 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
355	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2474 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK

No	Nama Barang	Kode Barang	No. Register	Merek/Tipe	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun	Nomor		Asal Usul Perolehan	Harga	Kondisi	Keterangan
								Pabrik	Polisi				
	2	3	4	5	6	7	8	9	12	14	15	16	17
356	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2475 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
357	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2476 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
358	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2477 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
359	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2478 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
360	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2479 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
361	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2480 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
362	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2481 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
363	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2482 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
364	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2483 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
365	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2484 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
366	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2485 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
367	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2486 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
368	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2487 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
369	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2488 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
370	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2489 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
371	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2490 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
372	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2491 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
373	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2492 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
374	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2493 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
375	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2494 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
376	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2495 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK

No	Nama Barang	Kode Barang	No. Register	Merek/Tipe	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun	Nomor		Asal Usul Perolehan	Harga	Kondisi	Keterangan
								Pabrik	Polisi				
	2	3	4	5	6	7	8	9	12	14	15	16	17
377	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2496 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
378	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2497 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
379	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2498 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
380	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2499 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
381	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2500 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
382	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2501 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
383	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2502 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
384	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2503 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
385	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2504 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
386	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2505 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
387	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2506 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
388	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2507 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
389	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2508 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
390	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2509 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
391	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2510 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
392	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2511 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
393	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2512 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
394	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2513O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
395	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2514 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
396	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2515 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
397	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2516 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK

No	Nama Barang	Kode Barang	No. Register	Merek/Tipe	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun	Nomor		Asal Usul Perolehan	Harga	Kondisi	Keterangan
								Pabrik	Polisi				
	2	3	4	5	6	7	8	9	12	14	15	16	17
398	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2517 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
399	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2518 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
400	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2519 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
401	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2520 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
402	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2521 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
403	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2522 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
404	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2523 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
405	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2525 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
406	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2526 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
407	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2527 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
408	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2528 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
409	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2529 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
410	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2530 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
411	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2531 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
412	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2532 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
413	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2533 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
414	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2534 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
415	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2535 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
416	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2536 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
417	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2537 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
418	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2538 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK

No	Nama Barang	Kode Barang	No. Register	Merek/Tipe	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun	Nomor		Asal Usul Perolehan	Harga	Kondisi	Keterangan
								Pabrik	Polisi				
	2	3	4	5	6	7	8	9	12	14	15	16	17
419	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2539 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
420	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2540 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
421	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2541 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
422	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2542 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
423	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2543 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
424	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2544 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
425	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2545 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
426	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2546 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
427	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2547 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
428	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2548 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
429	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2549 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
430	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2550 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
431	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2551 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
432	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2552 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
433	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2553 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
434	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2554 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
435	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2555 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
436	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2556 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
437	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2557 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
438	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2558 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
439	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2559 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK

No	Nama Barang	Kode Barang	No. Register	Merek/Tipe	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun	Nomor		Asal Usul Perolehan	Harga	Kondisi	Keterangan
								Pabrik	Polisi				
	2	3	4	5	6	7	8	9	12	14	15	16	17
440	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2560 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
441	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2561 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
442	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2562 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
443	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2563 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
444	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2564 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
445	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2565 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
446	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2567 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
447	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2568 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
448	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2569 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
449	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2570 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
450	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2571 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
451	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2572 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
452	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2573 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
453	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2574 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
454	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2575 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
455	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2576 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
456	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2577 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
457	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2578 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
458	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2579 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
459	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2580 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
460	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2581 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK

No	Nama Barang	Kode Barang	No. Register	Merek/Tipe	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun	Nomor		Asal Usul Perolehan	Harga	Kondisi	Keterangan
								Pabrik	Polisi				
	2	3	4	5	6	7	8	9	12	14	15	16	17
461	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2582 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
462	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2583 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
463	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2584 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
464	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2585 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
465	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2586 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
466	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2587 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
467	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2588 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
468	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2589 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
469	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2590 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
470	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2591 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
471	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2592 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
472	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2593 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
473	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2594 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
474	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2595 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
475	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2599 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
476	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2601 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
477	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2602 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
478	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2604 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
479	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2605 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
480	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2606 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
481	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2607 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK

No	Nama Barang	Kode Barang	No. Register	Merek/Tipe	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun	Nomor		Asal Usul Perolehan	Harga	Kondisi	Keterangan
								Pabrik	Polisi				
	2	3	4	5	6	7	8	9	12	14	15	16	17
482	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2608 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
483	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2609 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
484	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2611 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
485	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2613 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
486	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2615 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
487	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2616 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
488	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2617 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
489	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2618 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
490	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2619 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
491	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2620 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
492	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2621 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
493	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2622 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
494	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2623 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
495	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2624 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
496	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2625 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
497	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2626 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
498	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2627 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
499	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2628 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
500	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2629 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
501	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2630 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
502	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2631 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK

No	Nama Barang	Kode Barang	No. Register	Merek/Tipe	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun	Nomor		Asal Usul Perolehan	Harga	Kondisi	Keterangan
								Pabrik	Polisi				
	2	3	4	5	6	7	8	9	12	14	15	16	17
503	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2632 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
504	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL2633 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
505	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2634 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
506	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2635 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
507	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2636 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
508	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2637 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
509	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2638 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
510	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2639 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
511	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2640 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
512	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2641 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
513	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2642 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
514	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2643 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
515	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2644 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
516	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2645 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
517	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2646 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
518	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2647 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
519	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2648 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
520	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2649 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
521	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2650 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
522	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2651 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
523	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2652 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK

No	Nama Barang	Kode Barang	No. Register	Merek/Tipe	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun	Nomor		Asal Usul Perolehan	Harga	Kondisi	Keterangan
								Pabrik	Polisi				
	2	3	4	5	6	7	8	9	12	14	15	16	17
524	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2653 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
525	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2654 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
526	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2655 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
527	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2656 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
528	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2657 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
529	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2658 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
530	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2659 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
531	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2660 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
532	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2661 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
533	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2662 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
534	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2663 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
535	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2664 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
536	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2665 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
537	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2666 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
538	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2667 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
539	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2668 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
540	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2669 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
541	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2670 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
542	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2671 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
543	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	REVO NF11BID	-	Besi/ Campuran	2011	Honda	BL 2672 O	Pembelian	11.607.000,00	B	BPKK
544	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	SUZUKI FK 110 SD	-	Besi/ Campuran	2008	Suzuki	BL 2966 PB	Pembelian	11.950.000,00	B	BPKK

No	Nama Barang	Kode Barang	No. Register	Merek/Tipe	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun	Nomor		Asal Usul Perolehan	Harga	Kondisi	Keterangan
								Pabrik	Polisi				
	2	3	4	5	6	7	8	9	12	14	15	16	17
545	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	SUZUKI FK 110 SD	-	Besi/ Campuran	2008	Suzuki	BL 2983 PB	Pembelian	11.950.000,00	B	BPKK
546	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	SUZUKI FK 110 SD	-	Besi/ Campuran	2008	Suzuki	BL 2988 PB	Pembelian	11.950.000,00	B	BPKK
547	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	SUZUKI FK 110 SD	-	Besi/ Campuran	2008	Suzuki	BL 2974 PB	Pembelian	11.950.000,00	B	BPKK
548	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	SUZUKI FK 110 SD	-	Besi/ Campuran	2008	Suzuki	BL 2975 PB	Pembelian	11.950.000,00	B	BPKK
549	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	SUZUKI FK 110 SD	-	Besi/ Campuran	2008	Suzuki	BL 2989 PB	Pembelian	11.950.000,00	B	BPKK
550	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	SUZUKI FK 110 SD	-	Besi/ Campuran	2008	Suzuki	BL 2969 PB	Pembelian	11.950.000,00	B	BPKK
551	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	SUZUKI FK 110 SD	-	Besi/ Campuran	2008	Suzuki	BL 2990 PB	Pembelian	11.950.000,00	B	BPKK
552	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	SUZUKI FK 110 SD	-	Besi/ Campuran	2008	Suzuki	BL 2973 PB	Pembelian	11.950.000,00	B	BPKK
553	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	SUZUKI FK 110 SD	-	Besi/ Campuran	2008	Suzuki	BL 2976 PB	Pembelian	11.950.000,00	B	BPKK
554	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	SUZUKI FK 110 SD	-	Besi/ Campuran	2008	Suzuki	BL 2991 PB	Pembelian	11.950.000,00	B	BPKK
555	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	SUZUKI FK 110 SD	-	Besi/ Campuran	2008	Suzuki	BL 2977 PB	Pembelian	11.950.000,00	B	BPKK
556	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	SUZUKI FK 110 SD	-	Besi/ Campuran	2008	Suzuki	BL 2978 PB	Pembelian	11.950.000,00	B	BPKK
557	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	SUZUKI FK 110 SD	-	Besi/ Campuran	2008	Suzuki	BL 2971 PB	Pembelian	11.950.000,00	B	BPKK
558	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	SUZUKI FK 110 SD	-	Besi/ Campuran	2008	Suzuki	BL 2993 PB	Pembelian	11.950.000,00	B	BPKK
559	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	SUZUKI FK 110 SD	-	Besi/ Campuran	2008	Suzuki	BL 2965 PB	Pembelian	11.950.000,00	B	BPKK
560	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	SUZUKI FK 110 SD	-	Besi/ Campuran	2008	Suzuki	BL 2979 PB	Pembelian	11.950.000,00	B	BPKK
561	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	SUZUKI FK 110 SD	-	Besi/ Campuran	2008	Suzuki	BL 2980 PB	Pembelian	11.950.000,00	B	BPKK
562	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	SUZUKI FK 110 SD	-	Besi/ Campuran	2008	Suzuki	BL 2994 PB	Pembelian	11.950.000,00	B	BPKK
563	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	SUZUKI FK 110 SD	-	Besi/ Campuran	2008	Suzuki	BL 2968 PB	Pembelian	11.950.000,00	B	BPKK
564	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	SUZUKI FK 110 SD	-	Besi/ Campuran	2008	Suzuki	BL 2995 PB	Pembelian	11.950.000,00	B	BPKK
565	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	SUZUKI FK 110 SD	-	Besi/ Campuran	2008	Suzuki	BL 2981 PB	Pembelian	11.950.000,00	B	BPKK

No	Nama Barang	Kode Barang	No. Register	Merek/Tipe	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun	Nomor		Asal Usul Perolehan	Harga	Kondisi	Keterangan
								Pabrik	Polisi				
	2	3	4	5	6	7	8	9	12	14	15	16	17
566	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	SUZUKI FK 110 SD	-	Besi/ Campuran	2008	Suzuki	BL 2982 PB	Pembelian	11.950.000,00	B	BPKK
567	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	SUZUKI FK 110 SD	-	Besi/ Campuran	2008	Suzuki	BL 2996 PB	Pembelian	11.950.000,00	B	BPKK
568	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	SUZUKI FK 110 SD	-	Besi/ Campuran	2008	Suzuki	BL 2967 PB	Pembelian	11.950.000,00	B	BPKK
569	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	SUZUKI FK 110 SD	-	Besi/ Campuran	2008	Suzuki	BL 2999 PB	Pembelian	11.950.000,00	B	BPKK
570	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	SUZUKI FK 110 SD	-	Besi/ Campuran	2008	Suzuki	BL 2984 PB	Pembelian	11.950.000,00	B	BPKK
571	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	SUZUKI FK 110 SD	-	Besi/ Campuran	2008	Suzuki	BL 2985 PB	Pembelian	11.950.000,00	B	BPKK
572	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	SUZUKI FK 110 SD	-	Besi/ Campuran	2008	Suzuki	BL 2986 PB	Pembelian	11.950.000,00	B	BPKK
573	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	SUZUKI FK 110 SD	-	Besi/ Campuran	2008	Suzuki	BL 2998 PB	Pembelian	11.950.000,00	B	BPKK
574	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	SUZUKI FK 110 SD	-	Besi/ Campuran	2008	Suzuki	BL 2987 PB	Pembelian	11.950.000,00	B	BPKK
575	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	SUZUKI FK 110 SD	-	Besi/ Campuran	2008	Suzuki	BL 2997 PB	Pembelian	11.950.000,00	B	BPKK
576	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	SUZUKI FK 110 SD	-	Besi/ Campuran	2008	Suzuki	BL 2970 PB	Pembelian	11.950.000,00	B	BPKK
577	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	203	SUZUKI FK 110 SD	-	Besi/ Campuran	2008	Suzuki	BL 2972 PB	Pembelian	11.950.000,00	B	BPKK
JUMLAH TOTAL											7.079.197.000,00		

98

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
RINCIAN GEDUNG DAN BANGUNAN
YANG DIHIBAHKAN TAHUN 2022

A. GEDUNG DAN BANGUNAN YANG DIHIBAHKAN

No	Jenis Barang>Nama Barang	Nomor		Kondisi			Konstruksi Gedung/Bangunan		Luas/Tipe (m2)	Letak/Alamat Lokasi	Dokumen Gedung/Bangunan		Luas Tanah	Status Tanah	Registrasi Tanah	Asal Usul Perolehan	Total Harga	Keterangan
		Kode Barang	Register	B	KB	RB	Bertingkat/Tidak	Beton/Tidak			Nomor	Tanggal						
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen (RKB)	03.11.01.10.01	1	Baik	-	-	Ya	Ya	0	SMAN 1 Bandar dua	011/SP/PA-DISDIK/IV/2016	26/04/2016	0	Hak Pakai	101.140.101	Pembelian	1.193.874.000,00	Dinas Pendidikan
4	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen (RKB)	03.11.01.10.01	2	Baik	-	-	Ya	Ya	0	SMAN 1 Bandar Baru	012/SP/PA-DISDIK/IV/2017	26/04/2016	0	Hak Pakai	101.140.101	Pembelian	1.256.710.000,00	Dinas Pendidikan
5	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen (RKB)	03.11.01.10.01	3	Baik	-	-	Ya	Ya	0	SMAN 2 Trienggadeng	031/SP/PA-DISDIK/IV/016	26/05/2015	0	Hak Pakai	101.140.101	Pembelian	1.271.360.000,00	Dinas Pendidikan
6	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen (Ruang Lab. Komputer)	03.11.01.10.01	68	Baik	-	-	Tidak	Ya	0	SMAN Unggul Pidie Jaya	009/SP/PA-DISDIK/V/2016	20/04/2016	0	Hak Pakai	101.010.101	Pembelian	448.600.000,00	Dinas Pendidikan
7	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen (Ruang Lab. Komputer)	03.11.01.10.01	5	Baik	-	-	Tidak	Ya	0	SMK Bandar Baru	014/SP/PA-DISDIK/IV/2016	26/04/2016	0	Hak Pakai	101.140.101	Pembelian	447.600.000,00	Dinas Pendidikan
8	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen (Pagar)	03.11.01.10.01	11	Baik	-	-	Tidak	Ya	0	pagar SMK Bandar Dua	18/SP/PA-DISDIK/IV/2016	28/04/2016	0	Hak Pakai	101.140.101	Pembelian	199.880.000,00	Dinas Pendidikan
9	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen (Mushalla)	03.11.01.10.01	33	Baik	-	-	Tidak	Ya	0	SMKN bandar dua	006/SP/PA-DISDIK/IV/2016	20/04/2016	0	Hak Pakai	101.140.101	Pembelian	418.988.000,00	Dinas Pendidikan
10	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen (Mushalla)	03.11.01.10.01	36	Baik	-	-	Tidak	Ya	0	SMA 2 bandar dua	017/SP/PA-DISDIK/IV/2016	26/04/2016	0	Hak Pakai	101.140.101	Pembelian	417.400.000,00	Dinas Pendidikan
11	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen (Bangunan Sanitasi dan Air Bersih)	03.11.01.10.01	52	Baik	-	-	Tidak	Ya	0	SMA Unggul Pidie Jaya	072/SP/PA-DISDIK/IV/2016	23/11/2016	0	Hak Pakai	101.140.101	Pembelian	145.400.000,00	Dinas Pendidikan
JUMLAH																	5.799.812.000,00	

92

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
RINCIAN AKUMULASI PENYUSUTAN ATAS GEDUNG DAN BANGUNAN
YANG DIHIBAHKAN TAHUN 2022

A RINCIAN AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN YANG DIHIBAHKAN

No	Kode Barang	Nama Barang	No. Register	Luas Gedung	Luas Tanah	Tahun	Nilai Perolehan	Penyusutan					Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Sisa Nilai Buku	Keterangan
								Tahun Masa Manfaat	Nilai Penyusutan Per Tahun	Tahun Ini	Tahun Susut	Sisa Manfaat				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8/9	11	12=11-7	13=12-9	14	15=10*12	16=8-15	17
3	03.11.01.10.01	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	0	0	0	2016	1.193.874.000,00	50	23.877.480,00	2019	3	47	23.877.480,00	71.632.440,00	1.122.241.560,00	Dinas Pendidikan
4	03.11.01.10.01	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	0	0	0	2016	1.256.710.000,00	50	25.134.200,00	2019	3	47	25.134.200,00	75.402.600,00	1.181.307.400,00	Dinas Pendidikan
5	03.11.01.10.01	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	0	0	0	2016	1.271.360.000,00	50	25.427.200,00	2019	3	47	25.427.200,00	76.281.600,00	1.195.078.400,00	Dinas Pendidikan
6	03.11.01.10.01	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	0	0	0	2016	447.600.000,00	50	8.952.000,00	2019	3	47	8.952.000,00	26.856.000,00	420.744.000,00	Dinas Pendidikan
7	03.11.01.10.01	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	1	0	0	2016	199.880.000,00	50	3.997.600,00	2019	3	47	3.997.600,00	11.992.800,00	187.887.200,00	Dinas Pendidikan
8	03.11.01.10.01	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	1	0	0	2016	145.400.000,00	50	2.908.000,00	2019	3	47	2.908.000,00	8.724.000,00	136.676.000,00	Dinas Pendidikan
9	03.11.01.10.01	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	3	0	0	2016	418.988.000,00	50	8.379.760,00	2019	3	47	8.379.760,00	25.139.280,00	393.848.720,00	Dinas Pendidikan
10	03.11.01.10.01	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	3	0	0	2016	417.400.000,00	50	8.348.000,00	2019	3	47	8.348.000,00	25.044.000,00	392.356.000,00	Dinas Pendidikan
11	03.11.01.10.01	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	6	0	0	2016	448.600.000,00	50	8.972.000,00	2019	3	47	8.972.000,00	26.916.000,00	421.684.000,00	Dinas Pendidikan
Jumlah							5.799.812.000,00		115.996.240,00				115.996.240,00	347.988.720,00	5.451.823.280,00	

92

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
REKAPITULASI ASET LAIN-LAIN (TANAH) YANG DIHIBAHKAN TAHUN 2022

No	Jenis Barang>Nama Barang	Nomor		Luas(m2)	Tahun	Letak / Alamat	Status Tanah			Pergunaan	Asal Usul	Harga	Penerima Hibah	No BAST	Tanggal BAST	Keterangan
		Kode Barang	Register				Hak	Sertifikat								
								Tanggal	Nomor							
1	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	01.01.11.04.02	2	750	2008	Muko Dayah-Bandar Dua	Hak Pakai	00 0000		Gedung Sekolah MIN Meugit	Pembelian	75.000.000,00	Kemenag	-	-	
2	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	01.01.11.04.25	7	43.945	2009	Paru Keude-Bandar Baru	Hak Pakai	00 0000		SMK Perikanan	Pembelian	1.318.350.000,00	SMK Perikanan	-	-	
SUB JUMLAH 1												1.393.350.000,00				
1	Tanah Kantor Pemerintah	01.01.11.04.01	9	80.000	2011	Paru Keude-Bandar Baru	Hak Pakai	00 0000		Sarana Kepentingan Umum	Pembelian	3.400.000.000,00	Yon Armed	-	-	
2	Tanah Kantor Pemerintah	01.01.11.04.01	27	682	2012	Meunasah Bie-Meurah Dua	Hak Pakai	00 0000		Perluasan MIN Kuta Rentang	Pembelian	136.400.000,00	Kemenag	-	-	
SUB JUMLAH 2												3.536.400.000,00				
1	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	01.01.11.04.25	8	3576	2009	Meucat Pangwa Trienggadeng	Hak Pakai	00 0000		Pertanian dan Perkebunan		893.900.000,00	SMK Pertanian	-	-	
SUB JUMLAH 3												893.900.000,00				
JUMLAH 1 + 2 + 3												5.823.650.000,00				

98

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
REKAPITULASI ARUS KAS MASUK DARI AKTIVITAS OPERASI PER SKPK TA 2022 DAN 2021

NO	URAIAN	2022	2021
	ARUS KAS MASUK	744.773.742.983,14	754.230.087.452,80
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	21.944.510.767,72	72.265.716.651,80
	1 PAJAK	9.638.687.012,00	8.711.018.955,00
	1 Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten	9.638.687.012,00	8.711.018.955,00
	2 RETRIBUSI	3.646.194.200,00	56.047.888.179,00
	1 Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	923.314.200,00	892.560.200,00
	2 Rumah Sakit Umum Daerah	0,00	52.036.586.779,00
	2 Dinas Pekerjaan Umum	12.454.000,00	49.509.000,00
	3 Dinas Lingkungan Hidup	210.010.000,00	218.258.000,00
	4 Dinas Perhubungan	117.950.000,00	125.700.000,00
	5 Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	70.292.000,00	58.725.000,00
	8 Dinas Kelautan dan Perikanan	30.000.000,00	116.067.200,00
	6 Dinas Pertanian dan Pangan	448.000.000,00	595.600.000,00
	7 Dinas Perkebunan dan Peternakan	22.860.000,00	59.040.000,00
	9 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	1.440.481.000,00	1.470.420.000,00
	10 Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten	370.833.000,00	425.422.000,00
	3 HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN YANG DIPISAHKAN	2.786.958.904,00	2.532.367.261,00
	1 Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten	2.786.958.904,00	2.532.367.261,00
	4 ZAKAT/INFAQ	0,00	0,00
	1 Badan Baitul Mal	0,00	0,00
	4 LAIN - LAIN PENDAPATAN ASLI YANG SAH	5.872.670.651,72	4.974.442.256,80
	2 Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten	1.121.799.903,04	1.793.496.015,04
	3 Sekretariat Baitul Mal	4.750.870.748,68	3.180.946.241,76
2	PENDAPATAN TRANSFER	694.397.263.215,42	681.964.370.801,00
	1 DANA BAGI HASIL PAJAK	9.024.898.892,00	11.341.472.527,00
	1 SKPKD	9.024.898.892,00	11.341.472.527,00
	2 DANA BAGI HASIL BUKAN PAJAK	6.898.191.045,00	3.482.079.148,00
	1 SKPKD	6.898.191.045,00	3.482.079.148,00
	3 DANA ALOKASI UMUM	403.321.541.158,00	404.301.754.000,00
	1 SKPKD	403.321.541.158,00	404.301.754.000,00
	4 DANA ALOKASI KHUSUS	151.535.338.886,00	122.846.954.653,00
	1 SKPKD	151.535.338.886,00	122.846.954.653,00
	5 DANA PENGUAT	0,00	0,00
	1 SKPKD	0,00	0,00
	6 DANA OTONOMI KHUSUS	0,00	0,00
	1 SKPKD	0,00	0,00
	7 DANA INSENTIF DAERAH	18.897.689.000,00	39.790.452.000,00
	1 SKPKD	18.897.689.000,00	39.790.452.000,00
	8 DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI	26.524.380.706,17	24.922.205.099,00
	1 SKPKD	26.524.380.706,17	24.922.205.099,00
	9 BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	78.195.223.528,25	75.279.453.374,00
	1 SKPKD	78.195.223.528,25	75.279.453.374,00
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	28.431.969.000,00	0,00
	1 HIBAH	28.431.969.000,00	0,00
	PENERIMAAN LAINNYA		
	1 SKPKD	28.431.969.000,00	0,00
	2 PENERIMAAN DANA DARURAT	0,00	0,00
	3 PENERIMAAN LAINNYA	0,00	0,00

92

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
REKAPITULASI ARUS KAS KELUAR DARI AKTIVITAS OPERASI PER SKPK TA 2022 DAN 2021

NO	URAIAN	2022	2021
	ARUS KAS KELUAR = A+B+C+D+E	555.022.720.804,67	581.339.696.861,00
A	Belanja Pegawai =(1 sd 41)	282.596.101.590,00	276.602.633.548,00
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	128.346.078.298,00	134.325.121.766,00
2	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	553.761.397,00	473.644.453,00
3	Dinas Pendidikan Dayah	1.154.152.635,00	1.005.316.878,00
4	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	56.331.016.938,00	53.944.690.802,00
5	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten	13.790.139.720,00	12.022.490.334,00
6	Dinas Pekerjaan Umum	4.252.455.822,00	4.176.680.910,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.504.270.175,00	1.231.828.272,00
8	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	1.116.484.777,00	1.084.619.724,00
9	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.021.280.281,00	1.952.782.358,00
10	Dinas Pertanahan	627.904.401,00	116.348.342,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	1.527.424.786,00	1.261.437.032,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.585.890.594,00	1.967.167.970,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	1.859.407.036,00	1.508.483.979,00
14	Dinas Perhubungan	1.174.999.381,00	917.699.109,00
15	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	683.638.241,00	108.880.924,00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.191.373.890,00	1.946.246.848,00
17	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	1.390.645.525,00	1.460.450.681,00
18	Sekretariat Majelis Adat Aceh	329.732.395,00	388.105.050,00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	945.064.861,00	115.543.597,00
20	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.482.628.052,00	1.673.775.959,00
21	Dinas Pertanian dan Pangan	7.339.802.773,00	6.912.564.870,00
22	Dinas Perkebunan dan Peternakan	1.898.844.870,00	1.905.478.807,00
23	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	2.291.174.892,00	1.875.579.375,00
24	Sekretariat Daerah Kabupaten	6.737.833.274,00	6.645.370.717,00
25	Sekretariat DPRK	9.787.048.409,00	9.590.977.803,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.181.031.327,00	1.795.909.831,00
27	Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten	9.682.997.608,00	9.114.596.826,00
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.005.350.604,00	1.665.038.249,00
29	Inspektorat	3.550.347.366,00	3.024.096.706,00
30	Kecamatan Bandar Baru	1.794.745.889,00	1.749.324.599,00
31	Kecamatan Panteraja	1.497.112.396,00	1.342.964.469,00
32	Kecamatan Trienggadeng	1.360.550.147,00	1.283.436.425,00
33	Kecamatan Meureudu	1.024.360.514,00	965.383.185,00
34	Kecamatan Meurah Dua	641.510.394,00	541.627.699,00
35	Kecamatan Ulim	1.192.196.124,00	1.025.084.500,00
36	Kecamatan Jangka Buya	1.121.339.996,00	1.284.350.745,00
37	Kecamatan Bandar Dua	1.406.624.384,00	1.334.297.518,00
38	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.056.828.589,00	971.266.386,00
39	Dinas Syariat Islam	1.402.796.216,00	1.140.648.687,00
40	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	380.307.796,00	357.412.015,00
41	Sekretariat Baitul Mal Kabupaten	374.948.817,00	395.909.148,00
B	Belanja Barang dan Jasa	195.183.833.898,67	218.876.770.230,00
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9.629.194.771,00	11.150.157.231,00
2	Dinas Pendidikan (TK/SD)	0,00	332.489.550,00
3	Dinas Pendidikan (SMP)	0,00	163.778.206,00
4	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	373.016.820,00	452.232.670,00
5	Dinas Pendidikan Dayah	7.020.803.890,00	5.688.282.899,00
6	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	18.817.974.886,00	15.569.454.073,00
7	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten	6.057.328.490,00	51.055.882.564,00
8	Dinas Pekerjaan Umum	23.274.609.133,00	11.968.317.811,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.733.529.508,00	3.174.298.577,00
10	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	1.295.685.500,00	1.627.734.500,00
11	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.531.282.558,00	5.980.896.657,00
12	Dinas Pertanahan	359.075.237,00	194.297.306,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	1.807.483.047,00	2.252.266.348,00
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	826.910.446,00	1.880.149.024,00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	1.705.096.120,00	2.132.345.184,00
16	Dinas Perhubungan	904.479.450,00	1.341.233.530,00
17	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	311.882.000,00	164.222.365,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi	875.115.291,00	1.252.727.757,00
19	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	1.206.670.680,00	3.293.354.137,00
20	Sekretariat Majelis Adat Aceh	283.732.250,00	350.653.684,00
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	532.134.883,00	191.280.316,00
22	Dinas Kelautan dan Perikanan	19.894.201.065,00	19.691.045.774,00
23	Dinas Pertanian dan Pangan	4.337.536.770,00	6.020.735.549,00
24	Dinas Perkebunan dan Peternakan	28.662.653.550,67	12.202.667.908,00
25	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	2.249.436.815,00	2.572.412.019,00
26	Sekretariat Daerah Kabupaten	11.106.263.236,00	14.594.381.399,00

NO	URAIAN	2022	2021
27	Sekretariat DPRK	11.874.357.573,00	12.067.091.709,00
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.869.304.395,00	4.113.960.181,00
29	Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten	11.111.775.190,00	11.209.755.389,00
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.277.634.488,00	2.315.075.623,00
31	Inspektorat	877.694.491,00	1.116.148.300,00
32	Kecamatan Bandar Baru	350.761.600,00	336.027.300,00
33	Kecamatan Panteraja	307.638.817,00	303.469.020,00
34	Kecamatan Trienggadeng	342.996.461,00	297.842.471,00
35	Kecamatan Meureudu	341.284.851,00	305.490.246,00
36	Kecamatan Meurah Dua	338.366.415,00	367.709.045,00
37	Kecamatan Ulim	325.595.564,00	306.187.612,00
38	Kecamatan Jangka Buya	285.031.836,00	270.828.826,00
39	Kecamatan Bandar Dua	338.658.208,00	303.894.529,00
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.791.129.969,00	1.800.816.955,00
41	Dinas Syariat Islam	13.030.576.354,00	6.525.140.878,00
42	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	1.113.116.676,00	1.082.773.816,00
43	Sekretariat Baitul Mal Kabupaten	811.814.614,00	857.261.292,00
C	Belanja Hibah	5.930.034.567,00	18.324.442.702,00
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	403.186.000,00	3.174.340.220,00
2	Dinas Pendidikan Dayah	350.000.000,00	4.922.010.829,00
3	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	100.000.000,00	200.000.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum	2.540.142.717,00	1.657.807.000,00
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	50.000.000,00	100.000.000,00
6	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	600.000.000,00	760.000.000,00
7	Dinas Perkebunan dan Peternakan	0,00	5.380.038.153,00
8	Sekretariat Daerah Kabupaten	105.000.000,00	1.301.441.000,00
9	Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten	1.127.400.000,00	40.000.000,00
10	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	654.305.850,00	788.805.500,00
D	Belanja Bantuan Sosial	11.081.907.883,00	14.477.353.930,00
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	25.000.000,00	49.979.880,00
2	Dinas Pendidikan Dayah	1.661.365.000,00	1.664.226.000,00
3	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.326.499.700,00	6.319.848.050,00
4	Dinas Perkebunan dan Peternakan	0,00	119.020.000,00
5	Sekretariat Daerah Kabupaten	1.348.030.000,00	1.570.880.000,00
6	Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten	0,00	0,00
7	Dinas Syariat Islam	1.151.500.000,00	1.196.000.000,00
8	Sekretariat Baitul Mal Kabupaten	3.569.513.183,00	3.557.400.000,00
E	Belanja Tidak Terduga	706.903.046,00	4.053.589.338,00
1	Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten	706.903.046,00	4.053.589.338,00
F	Belanja Bantuan Keuangan	59.523.939.820,00	49.004.907.113,00
5.02.	Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten	59.523.939.820,00	49.004.907.113,00

92

REKAPITULASI PENGHAPUSAN KONTRUKSI DALAM Pengerjaan sesuai Surat Keputusan Bupati Pidie Jaya Tahun 2022

No.	SKPK	Uraian	Lokasi	Tahun Perolehan	Nilai
					(Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum	Gedung Kantor PU	Pusat Perkantoran Cot Trieng	2014	10.753.012.000,00
2	RSUD	Belanja Jasa Perencanaan / Desain	RSUD Kab. Pidie Jaya Meureudu	2015	799.975.000,00
3	RSUD	Perencanaan Pembangunan Kanopi Rumah Sakit	RSUD Kab. Pidie Jaya Meureudu	2017	18.200.000,00
4	BAPPEDA	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan (Perc. Gedung KNPI Kab. Pidie Jaya)	Meureudu	2009	39.075.000,00
5	BAPPEDA	Jasa Konsultan Penyusunan Perencanaan Detail Tata Ruang Kawasan Ibu Kota Bandar Dua	Bandar Dua	2010	98.050.000,00
6	BAPPEDA	Perencanaan Sanitasi Permukiman	Pusat Kecamatan	2010	400.000.000,00
7	BAPPEDA	Perencanaan Sanitasi Permukiman	Pusat Kecamatan	2010	100.000.000,00
8	BAPPEDA	Perencanaan Review Rencana Program Investasi Pembinaan Kelembagaan (RPJM)	Dalam Kab. Pidie Jaya	2010	33.500.000,00
9	BAPPEDA	Konsultasi Perencanaan	8 Kecamatan	2010	328.574.000,00
10	BAPPEDA	Konsultasi Perencanaan	Pusat Perkantoran	2010	120.000.000,00
11	BAPPEDA	Konsultasi Perencanaan	8 Kecamatan	2013	217.067.500,00
12	BAPPEDA	Konsultasi Perencanaan	8 Kecamatan	2013	234.402.500,00
13	BAPPEDA	Konsultasi Perencanaan	8 Kecamatan	2013	133.608.500,00
14	BAPPEDA	Konsultasi Perencanaan	Pusat Perkantoran	2014	140.000.000,00
15	BAPPEDA	Konsultasi Perencanaan	8 Kecamatan	2014	140.000.000,00
16	BAPPEDA	Konsultasi Perencanaan	8 Kecamatan	2014	50.000.000,00
17	BAPPEDA	Konsultasi Perencanaan	8 Kecamatan	2014	186.347.500,00
18	BAPPEDA	Konsultasi Perencanaan	Dalam Kab. Pidie Jaya	2014	9.790.000,00
19	BAPPEDA	Konsultasi Perencanaan	Dalam Kab. Pidie Jaya	2014	135.000.000,00
20	BAPPEDA	Konsultasi Perencanaan	Dalam Kab. Pidie Jaya	2014	41.079.000,00
21	BAPPEDA	Konsultasi Perencanaan	Dalam Kab. Pidie Jaya	2014	97.290.000,00
22	BAPPEDA	Konsultasi Perencanaan	Dalam Kab. Pidie Jaya	2014	80.000.000,00
		JUMLAH			14.154.971.000,00

92

REKAPITULASI PERHITUNGAN BELANJA DIBAYAR DIMUKA TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NO REFERENSI/PERJANJIAN	SKPD	OBJEK ASURANSI/SEWA	JANGKA WAKTU		PERIODE LK	JLH HARI PERJANJIAN	BEBAN-LO 2022			BELANJA DIBAYAR DIMUKA	
				AWAL	AKHIR			NILAI KONTRAK	HARI	NILAI	HARI	NILAI
1	R-545221000274	SEKDAKAB	TOYOTA FORTUNER GRAND NEW VN TURBO 2.5G A/T BL1014OW	25/11/2022	25/11/2023	31/12/2022	365	6.080.562,00	36	599.726,66	329	5.480.835,34
2	R-545221000243	SEKDAKAB	ALL NEW FORTUNER 2.4G 4X4 A/T BL124OC	21/11/2022	21/11/2023	31/12/2022	365	7.657.767,00	40	839.207,34	325	6.818.559,66
3	R-545221000242	SEKDAKAB	TOYOTA HIACE HIGH GRADE COMMUTER BL1311SQ	21/11/2022	21/11/2023	31/12/2022	365	9.664.804,00	40	1.059.156,60	325	8.605.647,40
4	11-UWR144161_22-5213-1887	SEKDAKAB	TOYOTA FORTUNER GRAND NEW VN TURBO 2.5G A/T BL1013OW	25/11/2022	25/11/2023	31/12/2022	365	6.779.381,00	36	668.651,28	329	6.110.729,72
5	04-UWR110405_22-5213-2359	SEKDAKAB	ALL NEW KIJANG INNOVA G 2.4 A/T DIESEL BL1018OO	02/04/2022	02/04/2023	31/12/2022	365	7.283.866,00	273	5.447.932,65	92	1.835.933,35
6	04-UWR110407_22-5213-2556	SEKDAKAB	ALL NEW KIJANG INNOVA G 2.4 A/T DIESEL BL1447AA	02/04/2022	02/04/2023	31/12/2022	365	7.283.866,00	273	5.447.932,65	92	1.835.933,35
7	05-UWR115436_22-5213-2158	SEKDAKAB	TOYOTA NEW HARRIER 2.4 G BL220JB	25/05/2022	25/05/2023	31/12/2022	365	7.098.159,00	220	4.278.342,41	145	2.819.816,59
8	02-UWR099842_22-5213-1827	SEKDAKAB	TOYOTA VELLFIRE 2.5G A/T BL1015OO	28/02/2022	28/02/2023	31/12/2022	365	11.767.402,00	306	9.865.274,01	59	1.902.127,99
9	R380221000017	SEKDAKAB	HONDA NEW CR-V 2.0L 4X2 M/T BL122OC	17/06/2022	17/06/2023	31/12/2022	365	5.512.176,00	197	2.975.064,85	168	2.537.111,15
10	SUB JUMLAH 1 (1 s/d 9)							69.127.983,00		31.181.288,46		37.946.694,54
11	03-UWR105447_22-5213-2916	SEKWAN	MITSUBISHI PAJERO SPORT DAKAR 4X4 HI POWER BL1420AA	03/03/2022	03/03/2023	31/12/2022	365	6.885.620,00	303	5.716.007,84	62	1.169.612,16
12	03-UWR105441_22-5213-2913	SEKWAN	MITSUBISHI PAJERO SPORT DAKAR 4X4 HI POWER BL1422AA	03/03/2022	03/03/2023	31/12/2022	365	6.885.620,00	303	5.716.007,84	62	1.169.612,16
13	03-UWR105443_22-5213-2915	SEKWAN	MITSUBISHI PAJERO SPORT DAKAR 4X4 HI POWER BL1027OO	03/03/2022	03/03/2023	31/12/2022	365	6.885.620,00	303	5.716.007,84	62	1.169.612,16
14	SUB JUMLAH 2 (11 s/d 13)							20.656.860,00		17.148.023,51		3.508.836,49
15	005/SP/LPTQ/2022	DSI	SEWA RUKO LPTQ	30/04/2022	01/05/2023	31/12/2022	366	25.000.000,00	245	16.734.972,68	121	8.265.027,32
16	SUB JUMLAH 2 (15)							25.000.000,00		16.734.972,68		8.265.027,32
17	483/Pdf-Adt/Not-SN/IV/2022	RSUD	SEWA RUKO GUDANG OBAT DAN FARMASI	24/04/2022	24/04/2023	31/12/2022	365	59.934.000,00	251	41.214.887,67	114	18.719.112,33
18	SUB JUMLAH 3 (17)							59.934.000,00		41.214.887,67		18.719.112,33
	TOTAL = 10+14+16+18							174.718.843,00		106.279.172,32		68.439.670,68

97

REKAPITULASI PENGHENTIAN PEMAKAIAAN ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN PER SKPK TAHUN 2022

No	Nama SKPK	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Sisa Nilai Buku	Keterangan
1	2	3	4	5=3-4	6
1	Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten	1.811.951.400,18	1.808.188.900,18	3.762.500,00	
2	Kecamatan Bandar Baru	61.019.875,00	61.019.875,00	-	
3	Kecamatan Pante Raja	25.678.500,00	25.678.500,00	-	
4	Kecamatan Trienggadeng	51.453.500,00	51.453.500,00	-	
5	Kecamatan Meureudu	71.799.975,00	71.799.975,00	-	
6	Kecamatan Meurah Dua	28.635.500,00	28.635.500,00	-	
7	Kecamatan Ulim	108.146.800,00	108.146.800,00	-	
8	Kecamatan Jangka Buya	14.700.000,00	14.700.000,00	-	
9	Kecamatan Bandar Dua	68.297.255,00	68.297.255,00	-	
10	Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu dan Transmigrasi	167.265.000,00	167.265.000,00	-	
11	Badan Pemberdayaan Masyarakat Gampong	547.728.999,98	540.788.999,98	6.940.000,00	
	Jumlah	2.956.676.805,16	2.945.974.305,16	10.702.500,00	

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA PIDIE JAYA
DAFTAR ASET TANAH YANG DIHIBAHKAN

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Luas(m2)	Tahun	Letak / Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Keterangan
		Kode Barang	Register				Hak	Sertifikat					
								Tanggal	Nomor				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	1	-	2022	Gampong Mesjid-Pante Raja	Hak Pakai	-	-	Pembangunan Kantor Pengadilan Negeri Pidie Jaya	Pembelian	4.518.452.700,00	Dinas Pertanahan
2	Tanah Bangunan Pendidikan/Pelatihan	1.3.1.01.01.04.002	64	365,00	2013	Jln Revolusi	Hak Pakai	00 0000		Bangunan SD Muhammadiyah	Hibah	51.100.000,00	Dinas Pendidikan
Jumlah											4.569.552.700,00		

98

**PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
PENGHAPUSAN PERALATAN MESIN TA 2022**

No	Kode Barang	Nama Barang	No. Register	Merek/Tipe	Tahun	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Sisa Nilai Buku	Keterangan
1	2	3	4	5	8	9	16=11*13	17=9-16	18
1	1.3.2.02.01.03.002	Pick Up	13933	Mitsubishi	2011	146.450.000,00	146.450.000,00	-	Dinas Perhubungan
2	1.3.2.02.01.03.002	Pick Up	13931	Mitsubishi	2011	146.450.000,00	146.450.000,00	-	Dinas Perhubungan
3	1.3.2.02.01.03.002	Pick Up	17834	Mitsubshi	2012	164.447.600,00	164.447.600,00	-	Dinas Perhubungan
4	1.3.2.02.01.03.002	Pick Up	17832	Mitsubshi	2012	164.447.600,00	164.447.600,00	-	Dinas Perhubungan
Jumlah						621.795.200,00	621.795.200,00	-	
1	1.3.2.02.01.06.001	Mobil Ambulance	55932	Mitsubishi	2013	117.000.000,00	117.000.000,00	-	Dinas Kesehatan dan KB
Jumlah						117.000.000,00	117.000.000,00	-	
1	1.3.2.02.01.06.022	Truck Sampah	4044	Isuzu NKR 71 ND	2009	249.000.000,00	249.000.000,00	-	Dinas Lingkungan Hidup
2	1.3.2.02.01.06.022	Truck Sampah	4043	Isuzu NKR 71 ND	2009	249.000.000,00	249.000.000,00	-	Dinas Lingkungan Hidup
3	1.3.2.02.01.05.002	Helicak/Bajaj	110063	VIAR	2015	44.900.000,00	44.900.000,00	-	Dinas Lingkungan Hidup
Jumlah						542.900.000,00	542.900.000,00	-	
1	1.3.2.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	59986	Toyota	2013	85.600.000,00	85.600.000,00	-	Kecamatan Pante Raja
Jumlah						85.600.000,00	85.600.000,00	-	
1	1.3.2.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	59986	Toyota	2013	85.600.000,00	85.600.000,00	-	Kecamatan Jangka Buya
Jumlah						85.600.000,00	85.600.000,00	-	
14	1.3.2.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	60324	Toyota	2013	127.750.000,00	127.750.000,00	-	Kecamatan Meurah Dua
Jumlah						127.750.000,00	127.750.000,00	-	
19	1.3.2.02.01.01.006	Kendaraan Roda Empat	60194	Toyota	2013	95.000.000,00	95.000.000,00	-	Kecamatan Meureudu
Jumlah						95.000.000,00	95.000.000,00	-	
Jumlah Total						1.675.645.200,00	1.675.645.200,00	-	

97

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
DAFTAR ASET GEDUNG DAN BANGUNAN YANG DIHAPUSKAN DAN DIHIBAHKAN

No	Kode Barang	Nama Barang	No. Register	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Sisa Nilai Buku	Posisi KIB	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1.3.3.01.01.16.001	Gedung UPTD Wilayah Timur	156	2013	150.150.000,00	27.027.000,00	123.123.000,00	Dinas Pendidikan	Dihapuskan
2	1.3.3.02.01.01.002	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	205	2013	259.071.000,00	46.632.780,00	212.438.220,00	Dinas Pendidikan	Dihapuskan
3	1.3.3.02.01.01.002	Perpustakaan	223	2013	66.708.725,00	12.007.570,50	54.701.154,50	Dinas Pendidikan	Dihapuskan
4	1.3.3.02.01.01.002	Rumah Pegawai	299	2013	142.040.000,00	25.567.200,00	116.472.800,00	Dinas Pendidikan	Dihapuskan
5	1.3.3.02.01.01.002	Rumah Pegawai	355	2013	85.680.000,00	15.422.400,00	70.257.600,00	Dinas Pendidikan	Dihapuskan
6	1.3.3.01.01.10.001	Bangunan Pagar	890	2016	144.971.500,00	17.396.580,00	127.574.920,00	Dinas Pendidikan	Dihibahkan
7	1.3.3.01.01.10.001	Bangunan Pagar	893	2016	199.800.000,00	23.976.000,00	175.824.000,00	Dinas Pendidikan	Dihibahkan
8	1.3.3.01.01.10.001	Bangunan Pagar	894	2016	149.900.000,00	17.988.000,00	131.912.000,00	Dinas Pendidikan	Dihibahkan
9	1.3.3.01.01.30.001	Bangunan Pagar	1073	2017	99.800.000,00	9.980.000,00	89.820.000,00	Dinas Pendidikan	Dihibahkan
10	1.3.3.01.01.30.001	Bangunan Pagar	1079	2017	155.800.000,00	15.580.000,00	140.220.000,00	Dinas Pendidikan	Dihibahkan
11	1.3.3.01.01.30.001	Bangunan Pagar	1086	2017	194.800.000,00	19.480.000,00	175.320.000,00	Dinas Pendidikan	Dihibahkan
12	1.3.3.01.01.30.001	Bangunan Pagar	1087	2017	164.900.000,00	16.490.000,00	148.410.000,00	Dinas Pendidikan	Dihibahkan
13	1.3.3.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1090	2017	349.753.000,00	34.975.300,00	314.777.700,00	Dinas Pendidikan	Dihibahkan
14	1.3.3.01.01.10.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	1237	2019	168.000.000,00	10.080.000,00	157.920.000,00	Dinas Pendidikan	Dihibahkan
15	1.3.3.01.01.10.001	Jamban/MCK	1272	2019	46.000.000,00	2.760.000,00	43.240.000,00	Dinas Pendidikan	Dihibahkan
16	1.3.3.01.01.10.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen (Ruang Guru/Kepala Sekolah)	1279	2019	83.000.000,00	4.980.000,00	78.020.000,00	Dinas Pendidikan	Dihibahkan

No	Kode Barang	Nama Barang	No. Register	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Sisa Nilai Buku	Posisi KIB	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	1.3.3.01.01.10.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	1474	2020	120.000.000,00	4.800.000,00	115.200.000,00	Dinas Pendidikan	Dihibahkan
18	1.3.3.04.01.04.001	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	1511	2020	93.983.000,00	3.759.320,00	90.223.680,00	Dinas Pendidikan	Dihibahkan
19	1.3.3.01.01.16.001	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	1552	2020	276.000.000,00	11.040.000,00	264.960.000,00	Dinas Pendidikan	Dihibahkan
20	1.3.3.01.01.05.001	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	1586	2020	310.000.000,00	12.400.000,00	297.600.000,00	Dinas Pendidikan	Dihibahkan
21	1.3.3.01.01.05.001	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	1587	2020	290.000.000,00	11.600.000,00	278.400.000,00	Dinas Pendidikan	Dihibahkan
22	1.3.3.01.01.05.001	Pagar Permanen	1600	2020	280.000.000,00	11.200.000,00	268.800.000,00	Dinas Pendidikan	Dihibahkan
23	1.3.3.01.01.10.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2103	2021	168.091.200,00	3.361.824,00	164.729.376,00	Dinas Pendidikan	Dihibahkan
24	1.3.3.01.01.10.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2183	2021	168.106.200,00	3.362.124,00	164.744.076,00	Dinas Pendidikan	Dihibahkan
25	Sub Jumlah 1 (Dinas Pendidikan)				4.166.554.625,00	361.866.098,50	3.804.688.526,50		
26	1.3.3.01.01.06.010	Bangunan Klinik/Puskesmas	7	2009	168.673.000,00	43.854.980,00	124.818.020,00	Dinkes KB	Dihapuskan
27	1.3.3.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	812	2014	47.552.000,00	7.608.320,00	39.943.680,00	Sekdakab	Dihapuskan
28	TOTAL = 25+26+27				4.382.779.625,00	413.329.398,50	3.969.450.226,50		

98

REKAPITULASI KAPITALISASI BELANJA MODAL TA 2022 PADA ASET INDUKNYA

A. GEDUNG DAN BANGUNAN

No	Jenis Barang>Nama Barang	Nomor		Konstruksi Beton Ya/Tdak	Tahun Perolehan	Letak/Alamat Lokasi	Dokumen Gedung/Bangunan		Harga Perolehan Awal	Belanja Tahun 2022	Jumlah Total	Keterangan	Tahun Ini	Masa Manfaat	Tahun Susut	Koreksi Susut
		Kode Barang	Register				Nomor	Tanggal								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Bangunan Klinik/Puskesmas	1.3.3.01.01.06.010	2460	Ya	2019	Puskesmas Meureudu	0392/SP/DOKA/Dink es-KB/PJ/IX/2019	16 September 2019	1.819.401.566,00	1.684.993.320,00	3.504.394.886,00	Dinkes KB	2022	50	3	101.099.599,20
Jumlah									1.819.401.566,00	1.684.993.320,00	3.504.394.886,00				101.099.599,20	

B. JALAN, JEMBATAN, JARINGAN DAN IRIGASI

No	Jenis Barang>Nama Barang	Nomor		Konstruksi	Tahun Perolehan	Letak/Alamat Lokasi	Dokumen		Harga Perolehan Awal	Belanja Tahun 2022	Jumlah Total	Keterangan	Tahun Ini	Masa Manfaat	Tahun Susut	Koreksi Susut
		Kode Barang	Register				Tanggal	Nomor								
1	2	3	4	5	6	10	11	12	16	17	18	19	20	20	22	23
1	Jalan Kabupaten Lokal	1.3.4.01.01.03.003	2498	Aspal	2016	Blang Dalam - Babah Krueng	01 March 2016	600/620-04/sppk/DAK- BM/2016	1.622.100.000,00	1.021.187.696,00	2.643.287.696,00	Dinas Pu	2022	10	6	612.712.617,60
2	Jalan Kabupaten Lokal	1.3.4.01.01.03.003	3402	Aspal	2019	Babah Krueng - Alue Sane - Jelanga Barat	20 June 2019	600/620-18/SPPK/DAK- BM/PIJAY/VI/201	4.272.625.065,20	3.872.609.580,00	8.145.234.645,20	Dinas Pu	2022	10	3	1.161.782.874,00
3	Jalan Kabupaten Lokal	1.3.4.01.01.03.003	2868	Aspal	2017	Nangr hoe - Lhok Sandeng - Krueng Tijee	20 June 2017	600/620-06/SPPK/DAK- BM/PIJAY/VI/2017	2.106.300.000,00	4.399.139.913,00	6.505.439.913,00	Dinas Pu	2022	10	5	2.199.569.956,50
4	Jalan Kabupaten Lokal	1.3.4.01.01.03.003	2890	Aspal	2017	Trienggadeng-Panton Beurasan-Cubo	18 November 2017	600/620-28/SPPK/DAK- T /BM/PijayXI/2017	2.141.856.860,00	4.278.284.136,00	6.420.140.996,00	Dinas Pu	2022	10	5	2.139.142.068,00
5	Jalan Kabupaten Lokal	1.3.4.01.01.05.001	2075	Aspal	2015	Lueng Putu - Jiem jiem - Abah Lueng Bandar Dua	0000-00-00	600/620-09/SPPK/DAK- T/BM/PJ IX/2015	1.570.700.000,00	4.236.389.100,00	5.807.089.100,00	Dinas Pu	2022	10	7	2.965.472.370,00
6	Waduk Dengan Tanggul, Dan Pintu Air/Menara Pengambilan	1.3.4.02.01.01.004	3189	Beton	2018	Embung D.I Blang Geulumpang	19 April 2018	600/23/SPK-DAK- PG/PA/2018	1.854.150.000,00	524.223.968,72	2.378.373.968,72	Dinas Pu	2022	50	4	41.937.917,50
7	Bangunan Pengambilan Bebas	1.3.4.02.01.02.004	3199	Beton	2018	Bendung D.I Panton Pupu Beurasan	19 April 2018	600/09/SPK-DAK- PG/PA/2018	306.963.000,00	1.004.562.853,49	1.311.525.853,49	Dinas Pu	2022	50	4	80.365.028,28
8	Bendung Dengan Pintu Bilas	1.3.4.02.01.02.002	2544	Beton	2016	Beurasan	15 March 2016	600/14/spk-pernc/PU- PG/2016	921.900.000,00	2.044.974.007,00	2.966.874.007,00	Dinas Pu	2022	50	6	245.396.880,84
9	Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi)	1.3.4.02.01.03.003	3447	BETON	2019	D.I Alue Sane	07 November 2019	600/610- 07/PG/KONTR./APBK- P/PIJAY/X	994.779.000,00	2.032.583.538,45	3.027.362.538,45	Dinas Pu	2022	50	3	121.955.012,31
10	Jaringan Irigasi	1.3.4.02.01.06.017	2560	Beton	2016	Lhok Bambui	03 June 2016	600/18/spk-APBK/PA- PG/2016	846.330.000,00	1.005.751.231,47	1.852.081.231,47	Dinas Pu	2022	50	6	120.690.147,78
11	Saluran Drainage	1.3.4.02.04.04.002	3987	GALIAN	2020	Langglen Keude Lueng Putu	07 August 2020	600/610- 01/SPPK/PG/Did/PIJAY /VIII/2020	1.447.500.000,00	1.990.584.688,54	3.438.084.688,54	Dinas Pu	2022	10	2	398.116.937,71
12	Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi)	1.3.4.02.01.03.003	3990	GALIAN	2020	DI. Kuta Krueng	01 December 2020	58/SPK/PU- PG/XII/2020	199.825.000,00	1.375.367.577,27	1.575.192.577,27	Dinas Pu	2022	50	2	55.014.703,09
13	Waduk Dengan Tanggul Dan Pintu Pengukur Waduk Lapangan	1.3.4.02.01.01.005	2193	Beton	2015	Teuraceue Meureudu	0000-00-00	Swakelola	324.800.000,00	1.514.306.447,06	1.839.106.447,06	Dinas Pu	2022	50	7	212.002.902,59
14	Jalan Desa	1.3.4.01.01.05.001	560	-	2012	Luengputu-Lancok Baroh Bandar Baru	0000-00-00	600/20/SP/BM/PA/VI/ 2012	1.470.716.000,00	2.506.876.618,00	3.977.592.618,00	Dinas Pu	2022	10	10	2.506.876.618,00
15	Jalan Kabupaten Lokal	1.3.4.01.01.03.003	3392	Aspal	2019	Drien Bungong - Asan Kumbang	20 June 2019	600/620-13/SPPK/DAK- BM/PIJAY/VI/201	988.487.805,80	1.012.695.597,00	2.001.183.402,80	Dinas Pu	2022	10	3	303.808.679,10

No	Jenis Barang>Nama Barang	Nomor		Konstruksi	Tahun Perolehan	Letak/Alamat Lokasi	Dokumen		Harga Perolehan Awal	Belanja Tahun 2022	Jumlah Total	Keterangan	Tahun Ini	Masa Manfaat	Tahun Susut	Koreksi Susut
		Kode Barang	Register				Tanggal	Nomor								
1	2	3	4	5	6	10	11	12	16	17	18	19	20	20	22	23
16	Jalan Kabupaten Lokal	1.3.4.01.01.03.003	3398	Aspal	2019	Mns. Kulam - Mulieng - Lampoh Lada	20 June 2019	600/620-03/SPPK/DAK- BM/PIJAY/VI/201	1.572.840.514,20	4.466.452.171,00	6.039.292.685,20	Dinas Pu	2022	10	3	1.339.935.651,30
17	Jalan Kabupaten Lokal	1.3.4.01.01.03.003	3408	Aspal	2019	SARAH PANYANG ALUE NGEU - ABAH LUENG	04 November 2019	600/620- 21/SPPK/DOKA- BM/PIJAY/XI/20	1.651.989.000,00	5.021.264.496,00	6.673.253.496,00	Dinas Pu	2022	10	3	1.506.379.348,80
18	Jalan Desa	1.3.4.01.01.05.001	2076	Aspal	2015	Panteraja - Blang Baro Pante Raja	0000-00-00	600/620-10/SPPK/DAK- T/BM/PJ IX/2015	2.988.000.000,00	2.506.240.717,00	5.494.240.717,00	Dinas Pu	2022	10	7	1.754.368.501,90
19	Jalan Desa	1.3.4.01.01.05.001	3968	Aspal	2020	GP. COT-MEUNASAH BEUREMBANG-KIRAN KRUENG	01 December 2020	25/SPK/PU- BM/XII/2020	209.494.000,00	2.543.725.369,45	2.753.219.369,45	Dinas Pu	2022	10	2	508.745.073,89
20	Jalan Desa	1.3.4.01.01.05.001	3977	ASPAL	2020	Blang Dalam Jurong Teungoh	28 April 2020	02/SPK/PERC/PU- BM/IV/2020	95.480.000,00	2.024.125.658,80	2.119.605.658,80	Dinas Pu	2022	10	2	404.825.131,76
21	Jalan Kabupaten Lokal	1.3.4.01.01.03.003	2869	Aspal	2017	Blang Rheu - Lhok Gajah	20 June 2017	600/620-16/SPPK/DAK- BM/PIJAY/VI/201	1.050.700.000,00	1.018.664.950,00	2.069.364.950,00	Dinas Pu	2022	10	5	509.332.475,00
22	Jalan Kabupaten Lokal	1.3.4.01.01.03.003	2875	Aspal	2017	Ulee Gle - Jeulanga Mata Ie - Cot Keng	20 June 2017	600/620-11/SPPK/DAK- BM/PIJAY/VI/20	1.048.139.000,00	4.044.537.416,00	5.092.676.416,00	Dinas Pu	2022	10	5	2.022.268.708,00
Jumlah									29.685.675.245,20	54.444.547.730,25	84.130.222.975,45					21.210.699.603,94

92

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
DAFTAR ASET TETAP JALAN JEMBATAN JARINGAN DAN IRIGASI
YANG AKAN DIHIBAHKAN KE MASYARAKAT DAN DIINVESTASIKAN PADA PDAM TIRTA KRUENG MEUREUDU

No	Kode Barang	Nama Barang	No. Register	Panjang	Lebar	Luas	Tahun	Nilai Perolehan	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Sisa Nilai Buku	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1.3.4.04.01.04.003	Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Besar	2910	0	0	0	2017	149.500.000,00	4.983.333,33	29.900.000,00	119.600.000,00	Hibah Masyarakat
2	1.3.4.04.01.04.002	Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Sedang	3461	0	0	0	2019	110.000.000,00	3.666.666,67	14.666.666,67	95.333.333,33	Hibah Masyarakat
3	1.3.4.04.01.04.002	Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Sedang	3462	0	0	0	2019	110.000.000,00	3.666.666,67	14.666.666,67	95.333.333,33	Hibah Masyarakat
4	1.3.4.04.01.04.002	Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Sedang	3463	0	0	0	2019	110.000.000,00	3.666.666,67	14.666.666,67	95.333.333,33	Hibah Masyarakat
5	1.3.4.04.01.04.002	Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Sedang	3464	0	0	0	2019	110.000.000,00	3.666.666,67	14.666.666,67	95.333.333,33	Hibah Masyarakat
6	1.3.4.04.01.04.002	Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Sedang	3465	0	0	0	2019	110.000.000,00	3.666.666,67	14.666.666,67	95.333.333,33	Hibah Masyarakat
7	1.3.4.04.01.04.002	Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Sedang	3466	0	0	0	2019	110.000.000,00	3.666.666,67	14.666.666,67	95.333.333,33	Hibah Masyarakat
8	1.3.4.04.01.04.002	Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Sedang	3467	0	0	0	2019	110.000.000,00	3.666.666,67	14.666.666,67	95.333.333,33	Hibah Masyarakat
9	1.3.4.04.01.04.002	Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Sedang	3468	0	0	0	2019	110.000.000,00	3.666.666,67	14.666.666,67	95.333.333,33	Hibah Masyarakat
10	1.3.4.04.01.04.002	Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Sedang	3469	0	0	0	2019	110.000.000,00	3.666.666,67	14.666.666,67	95.333.333,33	Hibah Masyarakat
11	1.3.4.04.01.04.002	Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Sedang	3470	0	0	0	2019	110.000.000,00	3.666.666,67	14.666.666,67	95.333.333,33	Hibah Masyarakat
12	1.3.4.04.01.04.002	Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Sedang	3471	0	0	0	2019	110.000.000,00	3.666.666,67	14.666.666,67	95.333.333,33	Hibah Masyarakat
13	1.3.4.04.01.04.002	Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Sedang	3472	0	0	0	2019	110.000.000,00	3.666.666,67	14.666.666,67	95.333.333,33	Hibah Masyarakat
14	1.3.4.04.01.04.002	Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Sedang	3473	0	0	0	2019	110.000.000,00	3.666.666,67	14.666.666,67	95.333.333,33	Hibah Masyarakat
15	1.3.4.04.01.04.002	Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Sedang	3474	0	0	0	2019	110.000.000,00	3.666.666,67	14.666.666,67	95.333.333,33	Hibah Masyarakat
16	1.3.4.04.01.04.002	Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Sedang	3475	0	0	0	2019	110.000.000,00	3.666.666,67	14.666.666,67	95.333.333,33	Hibah Masyarakat
17	1.3.4.04.01.04.002	Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Sedang	3476	0	0	0	2019	110.000.000,00	3.666.666,67	14.666.666,67	95.333.333,33	Hibah Masyarakat
18	1.3.4.04.01.04.002	Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Sedang	3477	0	0	0	2019	110.000.000,00	3.666.666,67	14.666.666,67	95.333.333,33	Hibah Masyarakat
19	1.3.4.04.01.04.002	Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Sedang	3478	0	0	0	2019	110.000.000,00	3.666.666,67	14.666.666,67	95.333.333,33	Hibah Masyarakat
20	1.3.4.04.01.04.002	Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Sedang	3479	0	0	0	2019	110.000.000,00	3.666.666,67	14.666.666,67	95.333.333,33	Hibah Masyarakat
21	1.3.4.04.01.04.002	Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Sedang	3480	0	0	0	2019	110.000.000,00	3.666.666,67	14.666.666,67	95.333.333,33	Hibah Masyarakat
22	1.3.4.04.01.04.002	Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Sedang	3481	0	0	0	2019	110.000.000,00	3.666.666,67	14.666.666,67	95.333.333,33	Hibah Masyarakat
23	1.3.4.04.01.04.002	Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Sedang	3482	0	0	0	2019	110.000.000,00	3.666.666,67	14.666.666,67	95.333.333,33	Hibah Masyarakat
24	1.3.4.04.01.04.002	Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Sedang	3483	0	0	0	2019	110.000.000,00	3.666.666,67	14.666.666,67	95.333.333,33	Hibah Masyarakat
25	1.3.4.04.01.04.002	Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Sedang	3484	0	0	0	2019	110.000.000,00	3.666.666,67	14.666.666,67	95.333.333,33	Hibah Masyarakat
26	1.3.4.04.01.04.002	Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Sedang	3485	0	0	0	2019	152.114.000,00	5.070.466,67	20.281.866,67	131.832.133,33	Hibah Masyarakat
27	1.3.4.04.01.04.002	Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Sedang	3486	0	0	0	2019	152.000.000,00	5.066.666,67	20.266.666,67	131.733.333,33	Hibah Masyarakat
28	1.3.4.03.01.01.001	Instalasi Air Permukaan Kapasitas Kecil	3882	0	0	0	2020	199.800.000,00	6.660.000,00	19.980.000,00	179.820.000,00	Hibah Masyarakat
29	1.3.4.04.02.02.004	Jaringan Distribusi Lainnya	4556	0	0	0	2022	331.624.161,00	8.290.604,03	8.290.604,03	323.333.556,98	Hibah Masyarakat
30	1.3.4.03.01.05.002	Jaringan Rumah Tangga (JARUT)	127	0	0	0	2009	507.642.060,00	16.921.402,00	236.899.628,00	270.742.432,00	PDAM
31	1.3.4.03.01.05.002	Jaringan Rumah Tangga (JARUT)	131	0	0	0	2009	241.288.500,00	8.042.950,00	112.601.300,00	128.687.200,00	PDAM
32	1.3.4.03.01.05.002	Jaringan Rumah Tangga (JARUT)	355	0	0	0	2010	1.645.995.000,00	54.866.500,00	713.264.500,00	932.730.500,00	PDAM
33	1.3.4.03.01.05.002	Jaringan Rumah Tangga (JARUT)	356	0	0	0	2010	1.245.186.875,00	41.506.229,17	539.580.979,17	705.605.895,83	PDAM
34	1.3.4.03.01.05.002	Jaringan Rumah Tangga (JARUT)	357	0	0	0	2010	3.128.596.000,00	104.286.533,33	1.355.724.933,33	1.772.871.066,67	PDAM
35	1.3.4.03.01.05.002	Jaringan Rumah Tangga (JARUT)	358	0	0	0	2010	1.424.565.000,00	47.485.500,00	617.311.500,00	807.253.500,00	PDAM
36	1.3.4.03.01.05.002	Jaringan Rumah Tangga (JARUT)	359	0	0	0	2010	508.724.000,00	16.957.466,67	220.447.066,67	288.276.933,33	PDAM
37	1.3.4.03.01.05.002	Jaringan Rumah Tangga (JARUT)	360	0	0	0	2010	299.741.200,00	9.991.373,33	129.887.853,33	169.853.346,67	PDAM
38	1.3.4.03.01.05.002	Jaringan Rumah Tangga (JARUT)	361	0	0	0	2010	1.083.703.125,00	36.123.437,50	469.604.687,50	614.098.437,50	PDAM
39	1.3.4.03.01.05.002	Jaringan Rumah Tangga (JARUT)	362	0	0	0	2010	669.010.050,00	22.300.335,00	289.904.355,00	379.105.695,00	PDAM
40	1.3.4.03.01.05.002	Jaringan Rumah Tangga (JARUT)	363	0	0	0	2010	118.033.000,00	3.934.433,33	51.147.633,33	66.885.366,67	PDAM
41	1.3.4.03.01.05.002	Jaringan Rumah Tangga (JARUT)	364	0	0	0	2010	169.209.000,00	5.640.300,00	73.323.900,00	95.885.100,00	PDAM
42	1.3.4.03.01.05.002	Jaringan Rumah Tangga (JARUT)	365	0	0	0	2010	477.864.750,00	15.928.825,00	207.074.725,00	270.790.025,00	PDAM
43	1.3.4.03.01.05.002	Jaringan Rumah Tangga (JARUT)	418	0	0	0	2011	642.941.600,00	21.431.386,67	257.176.640,00	385.764.960,00	PDAM
44	1.3.4.03.01.05.002	Jaringan Rumah Tangga (JARUT)	433	0	0	0	2011	275.546.400,00	9.184.880,00	110.218.560,00	165.327.840,00	PDAM
45	1.3.4.03.01.05.002	Jaringan Rumah Tangga (JARUT)	457	0	0	0	2011	28.250.000,00	941.666,67	11.300.000,00	16.950.000,00	PDAM
46	1.3.4.03.01.05.002	Jaringan Rumah Tangga (JARUT)	473	0	0	0	2011	46.400.000,00	1.546.666,67	18.560.000,00	27.840.000,00	PDAM
47	1.3.4.03.01.05.002	Jaringan Rumah Tangga (JARUT)	513	0	0	0	2011	46.500.000,00	1.550.000,00	18.600.000,00	27.900.000,00	PDAM
48	1.3.4.03.01.05.002	Jaringan Rumah Tangga (JARUT)	514	0	0	0	2011	38.000.000,00	1.266.666,67	15.200.000,00	22.800.000,00	PDAM
49	1.3.4.03.01.05.002	Jaringan Rumah Tangga (JARUT)	693	0	0	0	2012	390.388.000,00	13.012.933,33	143.142.266,67	247.245.733,33	PDAM
50	1.3.4.03.01.05.002	Jaringan Rumah Tangga (JARUT)	694	0	0	0	2012	327.984.000,00	10.932.800,00	120.260.800,00	207.723.200,00	PDAM
51	1.3.4.03.01.05.002	Jaringan Rumah Tangga (JARUT)	695	0	0	0	2012	383.500.000,00	12.783.333,33	140.616.666,67	242.883.333,33	PDAM
52	1.3.4.03.01.05.002	Jaringan Rumah Tangga (JARUT)	887	0	0	0	2013	198.000.000,00	6.600.000,00	66.000.000,00	132.000.000,00	PDAM
53	1.3.4.03.01.05.002	Jaringan Rumah Tangga (JARUT)	888	0	0	0	2013	198.000.000,00	6.600.000,00	66.000.000,00	132.000.000,00	PDAM
54	1.3.4.03.01.05.002	Jaringan Rumah Tangga (JARUT)	958	0	0	0	2013	1.137.571.000,00	37.919.033,33	379.190.333,33	758.380.666,67	PDAM
55	1.3.4.03.01.05.002	Jaringan Rumah Tangga (JARUT)	963	0	0	0	2013	203.595.000,00	6.786.500,00	67.865.000,00	135.730.000,00	PDAM
56	1.3.4.03.01.05.002	Jaringan Rumah Tangga (JARUT)	1843	0	0	0	2014	469.500.000,00	15.650.000,00	140.850.000,00	328.650.000,00	PDAM
57	1.3.4.03.01.05.002	Jaringan Rumah Tangga (JARUT)	1844	0	0	0	2014	476.513.000,00	15.883.766,67	142.953.900,00	333.559.100,00	PDAM
58	1.3.4.03.01.05.002	Jaringan Rumah Tangga (JARUT)	1845	0	0	0	2014	230.700.000,00	7.690.000,00	69.210.000,00	161.490.000,00	PDAM
59	1.3.4.03.01.05.002	Jaringan Rumah Tangga (JARUT)	1846	0	0	0	2014	190.000.000,00	6.333.333,33	57.000.000,00	133.000.000,00	PDAM
60	1.3.4.03.01.05.002	Jaringan Rumah Tangga (JARUT)	1849	0	0	0	2014	35.650.000,00	1.188.333,33	10.695.000,00	24.955.000,00	PDAM
61	1.3.4.03.01.05.002	Jaringan Rumah Tangga (JARUT)	1850	0	0	0	2014	1.130.450.000,00	37.681.666,67	339.135.000,00	791.315.000,00	PDAM
62	1.3.4.03.01.05.002	Jaringan Rumah Tangga (JARUT)	1851	0	0	0	2014	54.800.000,00	1.826.666,67	16.440.000,00	38.360.000,00	PDAM
63	1.3.4.03.01.05.002	Jaringan Rumah Tangga (JARUT)	1852	0	0	0	2014	54.600.000,00	1.820.000,00	16.380.000,00	38.220.000,00	PDAM
64	1.3.4.03.01.05.002	Jaringan Rumah Tangga (JARUT)	2171	0	0	0	2015	2.118.820.000,00	70.627.333,33	565.018.666,67	1.553.801.333,33	PDAM
65	1.3.4.03.01.05.002	Jaringan Rumah Tangga (JARUT)	2172	0	0	0	2015	423.119.000,00	14.103.966,67	112.831.733,33	310.287.266,67	PDAM
66	1.3.4.03.01.05.002	Jaringan Rumah Tangga (JARUT)	2175	0	0	0	2015	329.240.000,00	10.974.666,67	87.797.333,33	241.442.666,67	PDAM
67	1.3.4.03.01.05.002	Jaringan Rumah Tangga (JARUT)	2176	0	0	0	2015	258.300.000,00	8.610.000,00	68.880.000,00	189.420.000,00	PDAM
68	1.3.4.03.01.05.002	Jaringan Rumah Tangga (JARUT)	2178	0	0	0	2015	57.800.000,00	1.926.666,67	15.413.333,33	42.386.666,67	PDAM
69	1.3.4.03.01.05.002	Jaringan Rumah Tangga (JARUT)	2180	0	0	0	2015	64.500.000,00	2.150.000,00	17.200.000,00	47.300.000,00	PDAM

No	Kode Barang	Nama Barang	No. Register	Panjang	Lebar	Luas	Tahun	Nilai Perolehan	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Sisa Nilai Buku	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	15	16=11*13	17=9-16	
70	1.3.4.04.01.03.002	Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas Sedang	2675	0	0	0	2016	34.400.000,00	1.146.666,67	8.026.666,67	26.373.333,33	PDAM
71	1.3.4.04.01.03.002	Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas Sedang	2676	0	0	0	2016	33.900.000,00	1.130.000,00	7.910.000,00	25.990.000,00	PDAM
72	1.3.4.04.01.03.003	Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas Besar	2677	0	0	0	2016	1.738.499.000,00	57.949.966,67	405.649.766,67	1.332.849.233,33	PDAM
73	1.3.4.04.01.03.002	Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas Sedang	2678	0	0	0	2016	415.819.000,00	13.860.633,33	97.024.433,33	318.794.566,67	PDAM
74	1.3.4.04.01.03.002	Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas Sedang	2679	0	0	0	2016	414.645.000,00	13.821.500,00	96.750.500,00	317.894.500,00	PDAM
75	1.3.4.04.01.03.002	Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas Sedang	2680	0	0	0	2016	703.658.000,00	23.455.266,67	164.186.866,67	539.471.133,33	PDAM
76	1.3.4.04.01.03.002	Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas Sedang	2683	0	0	0	2016	1.030.380.000,00	34.346.000,00	240.422.000,00	789.958.000,00	PDAM
77	1.3.4.04.01.03.002	Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas Sedang	2686	0	0	0	2016	415.345.000,00	13.844.833,33	96.913.833,33	318.431.166,67	PDAM
78	1.3.4.04.01.03.003	Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas Besar	2909	0	0	0	2017	99.800.000,00	3.326.666,67	19.960.000,00	79.840.000,00	PDAM
79	1.3.4.04.01.04.003	Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Besar	2913	0	0	0	2017	149.800.000,00	4.993.333,33	29.960.000,00	119.840.000,00	PDAM
80	1.3.4.04.01.04.001	Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Kecil	3222	777	0	0	2018	199.800.000,00	6.660.000,00	33.300.000,00	166.500.000,00	PDAM
81	1.3.4.04.01.04.001	Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Kecil	3223	2232	0	0	2018	480.577.000,00	16.019.233,33	80.096.166,67	400.480.833,33	PDAM
82	1.3.4.04.01.04.001	Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Kecil	3224	1675	0	0	2018	426.030.000,00	14.201.000,00	71.005.000,00	355.025.000,00	PDAM
83	1.3.4.04.01.04.001	Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Kecil	3226	0	0	0	2018	85.050.000,00	2.835.000,00	14.175.000,00	70.875.000,00	PDAM
84	1.3.4.04.01.04.002	Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Sedang	3460	0	0	0	2019	100.400.000,00	3.346.666,67	13.386.666,67	87.013.333,33	PDAM
85	1.3.4.04.01.04.002	Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Sedang	3487	0	0	0	2019	395.396.003,00	13.179.866,77	52.719.467,07	342.676.535,93	PDAM
86	1.3.4.04.01.04.002	Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Sedang	3488	0	0	0	2019	595.111.557,00	19.837.051,90	79.348.207,60	515.763.349,40	PDAM
87	1.3.4.04.01.04.002	Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Sedang	3489	0	0	0	2019	496.476.488,00	16.549.216,27	66.196.865,07	430.279.622,93	PDAM
88	1.3.4.04.01.04.002	Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Sedang	3490	0	0	0	2019	262.642.632,00	8.754.754,40	35.019.017,60	227.623.614,40	PDAM
89	1.3.4.04.01.02.003	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Besar	3491	0	0	0	2019	617.030.990,00	20.567.699,67	82.270.798,67	534.760.191,33	PDAM
90	1.3.4.04.01.04.002	Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Sedang	3492	0	0	0	2019	105.800.000,00	3.526.666,67	14.106.666,67	91.693.333,33	PDAM
91	1.3.4.04.01.04.002	Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Sedang	3493	0	0	0	2019	194.800.000,00	6.493.333,33	25.973.333,33	168.826.666,67	PDAM
92	1.3.4.04.01.04.002	Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Sedang	3494	0	0	0	2019	49.900.000,00	1.663.333,33	6.653.333,33	43.246.666,67	PDAM
93	1.3.4.04.01.04.002	Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Sedang	3495	0	0	0	2019	480.000.000,00	16.000.000,00	64.000.000,00	416.000.000,00	PDAM
94	1.3.4.04.01.04.002	Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Sedang	3496	0	0	0	2019	480.000.000,00	16.000.000,00	64.000.000,00	416.000.000,00	PDAM
95	1.3.4.04.01.04.002	Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Sedang	3497	0	0	0	2019	480.000.000,00	16.000.000,00	64.000.000,00	416.000.000,00	PDAM
96	1.3.4.04.01.04.002	Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Sedang	3498	0	0	0	2019	480.000.000,00	16.000.000,00	64.000.000,00	416.000.000,00	PDAM
97	1.3.4.04.01.04.002	Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Sedang	3499	0	0	0	2019	480.000.000,00	16.000.000,00	64.000.000,00	416.000.000,00	PDAM
98	1.3.4.04.01.04.002	Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Sedang	3500	0	0	0	2019	494.938.972,00	16.497.965,73	65.991.862,93	428.947.109,07	PDAM
99	1.3.4.03.01.05.006	Instalasi Air Bersih / Air Baku Lainnya	3841	0	0	0	2020	84.838.805,00	2.827.960,17	8.483.880,50	76.354.924,50	PDAM
100	1.3.4.04.04.02.001	Jaringan Pipa Distribusi Tekanan Tinggi	3952	0	0	0	2020	201.800.000,00	6.726.666,67	20.180.000,00	181.620.000,00	PDAM
101	1.3.4.04.02.02.004	Jaringan Distribusi Lainnya	4268	0	0	0	2021	530.583.665,00	13.264.591,63	26.529.183,25	504.054.481,75	PDAM
102	1.3.4.04.02.02.004	Jaringan Distribusi Lainnya	4269	0	0	0	2021	582.000.000,00	14.550.000,00	29.100.000,00	552.900.000,00	PDAM
103	1.3.4.04.02.02.004	Jaringan Distribusi Lainnya	4270	0	0	0	2021	400.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00	380.000.000,00	PDAM
104	1.3.4.04.02.02.004	Jaringan Distribusi Lainnya	4272	0	0	0	2021	583.311.000,00	14.582.775,00	29.165.550,00	554.145.450,00	PDAM
105	1.3.4.04.02.02.004	Jaringan Distribusi Lainnya	4273	0	0	0	2021	475.000.000,00	11.875.000,00	23.750.000,00	451.250.000,00	PDAM
106	1.3.4.04.02.02.004	Jaringan Distribusi Lainnya	4274	0	0	0	2021	425.000.000,00	10.625.000,00	21.250.000,00	403.750.000,00	PDAM
107	1.3.4.04.04.02.005	Jaringan Pipa Distribusi Tekanan Rendah Pipa PC	4276	0	0	0	2021	522.500.780,00	17.416.692,67	34.833.385,33	487.667.394,67	PDAM
108	1.3.4.04.02.02.004	Jaringan Distribusi Lainnya	4278	0	0	0	2021	585.000.000,00	14.625.000,00	29.250.000,00	555.750.000,00	PDAM
109	1.3.4.04.01.01.004	Jaringan Air Minum Lainnya	4438	0	0	0	2022	2.353.375.635,00	78.445.854,50	78.445.854,50	2.274.929.780,50	PDAM
110	1.3.4.04.02.02.004	Jaringan Distribusi Lainnya	4554	0	0	0	2022	523.077.000,00	13.076.925,00	13.076.925,00	510.000.075,00	PDAM
111	1.3.4.04.02.02.004	Jaringan Distribusi Lainnya	4555	0	0	0	2022	519.211.624,00	12.980.290,60	12.980.290,60	506.231.333,40	PDAM
112	1.3.4.04.02.02.004	Jaringan Distribusi Lainnya	4557	0	0	0	2022	519.887.238,00	12.997.180,95	12.997.180,95	506.890.057,05	PDAM
113	1.3.4.04.02.02.004	Jaringan Distribusi Lainnya	4558	0	0	0	2022	521.816.000,00	13.045.400,00	13.045.400,00	508.770.600,00	PDAM
114	1.3.4.04.02.02.004	Jaringan Distribusi Lainnya	4559	0	0	0	2022	523.647.000,00	13.091.175,00	13.091.175,00	510.555.825,00	PDAM
115	1.3.4.04.02.02.004	Jaringan Distribusi Lainnya	4560	0	0	0	2022	517.670.903,60	12.941.772,59	12.941.772,59	504.729.131,01	PDAM
116	1.3.4.04.02.02.004	Jaringan Distribusi Lainnya	4561	0	0	0	2022	317.373.028,00	7.934.325,70	7.934.325,70	309.438.702,30	PDAM
117	1.3.4.04.02.02.004	Jaringan Distribusi Lainnya	4562	0	0	0	2022	422.043.000,00	10.551.075,00	10.551.075,00	411.491.925,00	PDAM
118	1.3.4.04.02.02.004	Jaringan Distribusi Lainnya	4563	0	0	0	2022	316.162.349,00	7.904.058,73	7.904.058,73	308.258.290,28	PDAM
Jumlah								47.819.762.390,60	1.526.547.021,74	11.093.983.941,54	36.725.778.449,06	

98

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
 DAFTAR ASET TETAP JALAN JEMBATAN JARINGAN DAN IRIGASI
 YANG AKAN DIHAPUSKAN UNTUK DIREKONSTRUKSI

No	Kode Barang	Nama Barang	No. Register	Tahun	Nilai Perolehan	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Sisa Nilai Buku
1	2	3	4	8	9	15	16=11*13	17=9-16
1	1.3.4.01.02.05.005	Jembatan Pada Jalan Poros Desa	48	2008	85.000.000,00	1.700.000,00	25.500.000,00	59.500.000,00
2	1.3.4.01.02.05.005	Jembatan Pada Jalan Poros Desa	59	2008	15.000.000,00	300.000,00	4.500.000,00	10.500.000,00
3	1.3.4.01.02.05.005	Jembatan Pada Jalan Poros Desa	67	2008	64.800.000,00	1.296.000,00	19.440.000,00	45.360.000,00
4	1.3.4.01.02.05.005	Jembatan Pada Jalan Poros Desa	238	2009	117.800.000,00	2.356.000,00	32.984.000,00	84.816.000,00
5	1.3.4.01.01.05.003	Jembatan penyebrangan di Atas Air	316	2010	57.200.000,00	0	57.200.000,00	0
6	1.3.4.02.04.05.007	Bangunan Penguat Tebing/Pantai	904	2013	93.200.000,00	9.320.000,00	93.200.000,00	0
7	1.3.4.02.04.05.007	Bangunan Penguat Tebing/Pantai	2184	2015	105.500.000,00	10.550.000,00	84.400.000,00	21.100.000,00
Jumlah					538.500.000,00	25.522.000,00	317.224.000,00	221.276.000,00

98